



# KONDISI ARSITEKTUR EKSISTING SPBE

Pemerintah Kabupaten Murung Raya

# Lembar Pengesahan

DOKUMEN ARSITEKTUR & PETA RENCANA SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)  
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SPBE  
DI PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

Kabupaten Murung Raya, Desember 2023

Pj. Bupati

Dr. Drs. Hermon, M.Si



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Adanya amanat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengenai implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) kepada seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (IPPD) menjadi dasar dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Secara umum, SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Masyarakat & Swasta). Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.

Implementasi SPBE dievaluasi secara berkala oleh evaluator dari Kemenpan-RB dengan tujuan untuk memastikan kelangsungan dari implementasi SPBE. Dalam menanggapi amanat SPBE ini Pemerintah Kabupaten Murung Raya berinisiatif untuk mengimplementasikan SPBE dengan semangat *continuous improvement*. Salah satu tahapan yang dilakukan yaitu dengan menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Tujuan dari disusunnya dokumen perencanaan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mengimplementasikan SPBE selama 5 tahun kedepan agar dalam pelaksanaannya seluruh instansi internal yang terlibat dapat saling bersinergi. Selain itu, dengan adanya perencanaan ini diharapkan dapat meningkatkan penilaian indeks SPBE secara bertahap.

Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Kabupaten Murung Raya berpedoman pada Perpres 95/2018, mengikuti Visi, Misi, Tujuan & Strategi SPBE Nasional serta berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, Arsitektur dan Peta Rencana ini menggunakan *reverse engineering* dari 47 indikator yang menjadi pokok dari evaluasi SPBE. Sehingga dapat dipastikan apa yang tertuang dalam dokumen ini telah memenuhi konteks evaluasi dalam SPBE. Secara umum, Arsitektur SPBE ini mencakup domain Tata Kelola, Manajemen, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data & Informasi, Arsitektur Layanan Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Keamanan Informasi dan Audit TIK. Arsitektur SPBE diharapkan dapat menghadirkan transformasi digital dalam layanan internal maupun publiknya.

# Daftar Isi

<b>Bab I Pendahuluan</b>	<b>5</b>
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Maksud dan Tujuan	10
1.3. Landasan Hukum	10
1.4. Landasan Teori	12
1.4.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	12
1.4.2. Roadmap Reformasi Birokrasi	14
1.4.3. The Open Group Architecture Framework (TOGAF)	18
1.4.4. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE	18
1.4.5. Referensi Arsitektur SPBE Nasional	21
<b>Bab II</b>	
<b>Visi dan Misi Strategi SPBE</b>	<b>33</b>
2.1. Visi	34
2.2. Strategi Peningkatan SPBE	35
2.3. Inisiatif Strategis SPBE	37
<b>Bab III</b>	
<b>Analisa Kondisi Eksisting SPBE</b>	<b>39</b>
3.1. Kebijakan & Manajemen	40
3.1.1. Kebijakan	40
3.1.2. Manajemen	40
3.2. Arsitektur SPBE	41
3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis	41
3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis	42
3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis	76
3.2.2. Arsitektur Data dan Informasi	79
3.2.2.1. Katalog Data dan Informasi	79
3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi	124
3.2.3. Arsitektur Layanan SPBE	127
3.2.3.1. Katalog Layanan	127
3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan	150
3.2.3.3. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi	153
3.2.3.1.1. Layanan Perencanaan SPBE	153
3.2.3.1.2. Layanan Penganggaran SPBE	156
3.2.3.1.3. Layanan Keuangan SPBE	158
3.2.3.1.4. Layanan Pengelolaan Aset SPBE	162
3.2.3.1.5. Layanan Kepegawaian SPBE	165
3.2.3.1.6. Layanan Kinerja Pegawai SPBE	173
3.2.3.1.7. Layanan Kearsipan Dinamis SPBE	176
3.2.3.1.8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPBE	179
3.2.3.1.9. Layanan Pengaduan Publik SPBE	184
3.2.3.1.10. Layanan Data Terbuka SPBE	186
3.2.3.1.11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE	188
3.2.3.1.12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE	190
3.2.3.1.13. Layanan JDIH SPBE	192

3.2.3.1.14. Layanan Publik SPBE (Bidang Perizinan)	196
3.2.3.1.15. Layanan Publik SPBE (Kemiskinan)	199
3.2.3.1.16. Layanan Publik SPBE (Stunting)	201
3.2.4. Arsitektur Aplikasi Eksisting	203
3.2.4.1. Katalog Aplikasi Eksisting	203
3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting	224
3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE	227
3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)	227
3.2.5.2. Sistem Integrasi	234
3.2.5.3. Referensi Fasilitas Komputasi	237
3.2.5.4. Platform	237
3.2.5.5. Arsitektur Keamanan SPBE	243
3.2.5.6. Standar Keamanan	244
3.2.5.7. Penerapan Keamanan	244
3.2.5.7.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	244
3.2.5.7.2. Peningkatan Keamanan SPBE	245
3.2.5.7.3. Penanganan insiden Keamanan SPBE	245
3.2.5.8. Audit Keamanan	245
3.2.5.9. Kelaikan Keamanan	245
3.2.5.10. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	246
3.2.5.11. Pemenuhan Standar Teknis	246
3.2.5.11.1. Standar Teknis Jaringan Intra Pemerintah	246
3.2.5.11.2. Standar Teknis Aplikasi Web	249
3.2.5.11.3. Standar Teknik Aplikasi Mobile	253
3.2.5.12. Level Maturitas Infrastruktur IT	255
3.2.5.13. Arsitektur dan Desain Infrastruktur	256
3.2.5.13.1. Kondisi Eksisting Arsitektur dan Desain Infrastruktur	257
3.2.5.14. Penggunaan Teknologi	258
3.2.5.14.1. Kondisi Eksisting Penggunaan Teknologi	259
3.2.5.15. Manajemen aset	259
3.2.5.15.1. Kondisi Eksisting Manajemen Aset	260
3.2.5.16. Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal	260
3.2.5.16.1. Kondisi Eksisting Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal	261
3.2.5.17. Pemantauan Kinerja dan Analisis Data	261
3.2.5.17.1. Kondisi Eksisting Pemantauan Kinerja dan Analisis Data	262
3.2.5.18. Keamanan Informasi	262
3.2.5.18.1. Kondisi Eksisting Keamanan Informasi	263
3.2.5.19. Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana	264
3.2.5.19.1. Kondisi Eksisting Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana	264
3.2.5.19.2. Nilai Level Maturitas Infrastruktur IT	265
<b>Bab IV</b>	
<b>Analisa Kesenjangan SPBE</b>	<b>267</b>
4.1. Analisa Kesenjangan SPBE	268



# **Bab I Pendahuluan**

## 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Murung Raya terletak di bagian dalam Pulau Kalimantan, tepatnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, dengan luas wilayah mencapai 2.370.000 hektar (23.700 km<sup>2</sup>), yang setara dengan 15,43% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Murung Raya, secara geografis, terletak di daerah khatulistiwa yaitu pada posisi 113° 12' 40,98" - 115° 8' 6,52" BT dan 0° 51' 51,87" LS - 0° 47' 25,24" LU. Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah administrasi yang terbagi menjadi 10 kecamatan, 115 desa, dan 9 kelurahan. Kecamatan U'ut Murung merupakan kecamatan terluas, yaitu 7.263 km<sup>2</sup> dan diikuti oleh Kecamatan Seribu Riam seluas 7.023 km<sup>2</sup> dan Sumber Barito seluas 2.797 km<sup>2</sup>. Dari segi status hukum, seluruh desa atau kelurahan di kabupaten ini memiliki status definitif, dengan total 124 desa, mencapai 100 persen dari total wilayah administratif. Kabupaten Murung Raya pertama kali terbentuk pada tahun 2002 hingga 2006, wilayah administrasi pemerintahannya terbatas pada 5 kecamatan, 116 desa, dan 2 kelurahan, yaitu Kecamatan Permata Intan, Murung, Laung Tuhup, Tanah Siang, dan Sumber Barito. Namun, setelah mengalami pemekaran, wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Murung Raya kini mencakup 10 kecamatan, 115 desa, dan 9 kelurahan.

Luas Wilayah Kabupaten Murung Raya yang setara dengan 15,43% dari total luas Provinsi Kalimantan Tengah mengharuskan penerapan teknologi informasi, agar dapat dipastikan bahwa aksesibilitas terhadap layanan publik mengalami peningkatan yang signifikan, mengatasi kendala geografis dan temporal yang mungkin menghambat akses masyarakat. Proses ini tidak hanya berdampak pada peningkatan efisiensi administratif melalui pengurangan metode manual, melainkan juga membuka peluang untuk mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi. Fenomena ini tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memberikan masyarakat kemudahan akses terhadap informasi publik. Selain itu, implementasi SPBE di Kabupaten Murung Raya memiliki potensi untuk menghasilkan efisiensi pengeluaran dan sumber daya, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan daya saing wilayah ini dalam menghadapi tantangan global. Proses transformasi ini juga memiliki potensi untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan, menciptakan saluran interaksi yang lebih langsung antara pemerintah dan warganya. Dengan peningkatan keamanan data, Kabupaten Murung Raya akan lebih siap untuk menghadapi perubahan global dan memanfaatkan inovasi teknologi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, penerapan SPBE dapat dipandang sebagai kunci utama dalam membentuk pemerintahan yang responsif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di era digital ini.

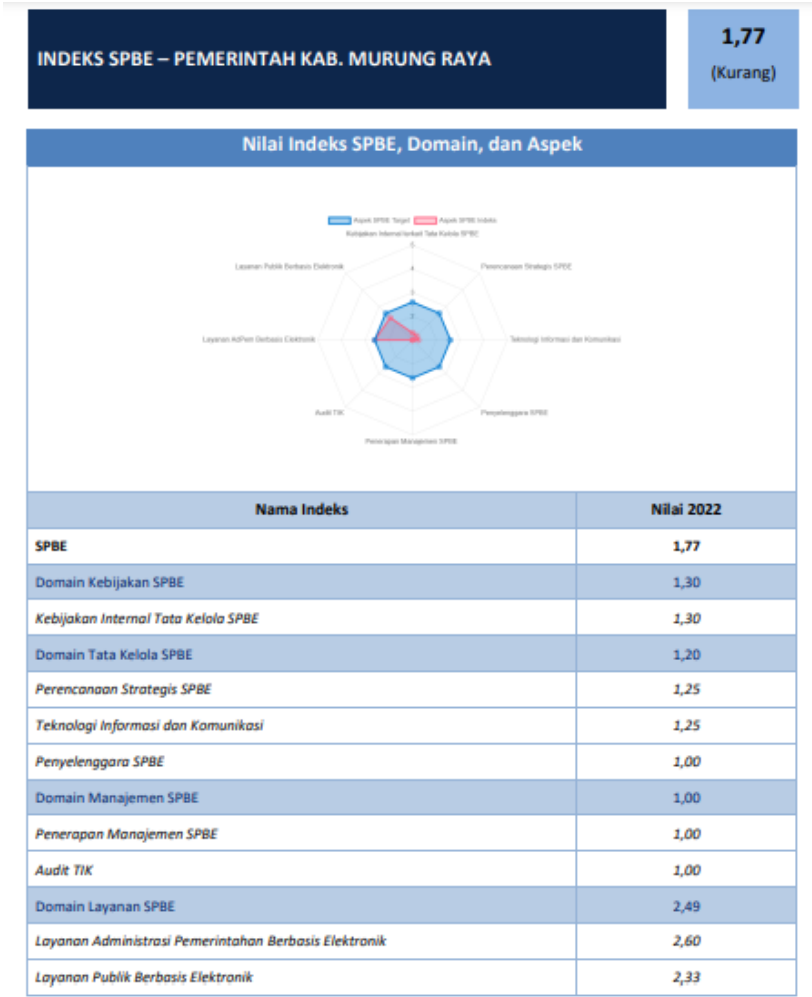
Strategi pembangunan nasional 2020-2024 menggarisbawahi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari: aspek kemandirian ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Output transformasi digital secara nasional juga mencakup empat sektor: *digital government*, *digital society*, *digital economy*, dan *digital infrastructure*. Selaras dengan target pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2019-2024. Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melakukan transformasi digital terhadap sistem pemerintahan dalam pelayanan publik. Langkah awal yang dilakukan adalah membangun komitmen bersama sehingga semua pihak bisa bersinergi dalam melaksanakan digitalisasi dalam hal pemerintahan.



Berkaitan dengan adanya Perpres 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat 3 peran utama dalam sistem tersebut yaitu efisiensi, efektivitas dan kemudahan.

Tantangan era digital saat ini dan meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga mendorong kebijakan pengembangan dan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini diukur melalui Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyusul peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan acuan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi fokus penerapan SPBE, yaitu: 1) Tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai fasilitator dalam pelaksanaannya; dan 3) Kemudahan dalam layanan pemerintahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat.

Komitmen kepala daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjadi salah satu kunci dalam menciptakan budaya digital dalam sistem pemerintahannya. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Murung Raya meraih indeks SPBE nasional untuk kategori kabupaten/kota dengan perolehan nilai 1,77 dari hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB.



**Gambar 1.1.1.** Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022  
(Sumber: Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Murung Raya, 2022)

Kunci kemudahan maupun kecepatan pelayanan publik terletak pada teknologi dan digitalisasi. Seperti halnya di negara Denmark masih bertengger di urutan nomor satu dunia dalam hal indeks *e-Government*. Indeks *e-Government* yang tinggi ini nyatanya juga berdampak pada aspek pelayanan yang lain. Secara umum, hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada Tahun 2021 di Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan menjadi *baseline* dalam penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. Dokumen ini disusun untuk menentukan strategi yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Pemerintah Kabupaten Murung Raya lima tahun mendatang serta dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik. Selain itu, diharapkan juga dapat mewujudkan terciptanya digitalisasi pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi nasional. Implementasi SPBE diharapkan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026.

***"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."***

Adapun visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 adalah sebagai berikut:

***"Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"***

Berdasarkan dengan visi tersebut, perlu adanya peningkatan pelayanan administrasi pemerintah dan pelayanan publik dalam rangka untuk meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Revolusi Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, seperti: penetrasi teknologi yang serba disruptif, serta adanya perkembangan *Internet of Things* (IoT) yang menjadikan perubahan semakin cepat. Pemanfaatan *IoT* menghasilkan kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data *basic*. Lebih jauh, pelayanan administrasi pemerintahan perlu didukung dengan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*cloud computing*), hingga kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan. Perubahan ini dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan. Di satu sisi dalam mewujudkan reformasi organisasi pemerintah, perlu didukung dengan komitmen dan perencanaan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu upaya mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah dengan birokrasi

pemerintahan yang fokus pada orientasi pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan TIK. Saat ini, pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan (*Smart Government*) atau yang lebih dikenal dengan istilah SPBE dimanfaatkan untuk mendukung fungsi dan layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Aktivitas pemerintahan ini telah lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat. Ketidakseragaman dalam proses pengembangan aplikasi SPBE menjadi permasalahan tersendiri pada proses pemeliharaan. Belum tersedianya kebijakan, panduan dan standar yang jelas terkait implementasi *Smart Government* menjadikan proses pengelolaan tidak berjalan dengan efektif.

Faktanya, kini masyarakat menuntut pelayanan publik yang transparan, birokrasi yang cepat dan efektif sehingga SPBE menjadi tuntutan yang harus diterapkan dengan serius. Adanya SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat sehingga lebih efektif dan efisien baik dalam waktu layanan, percepatan proses, alur birokrasi, serta transparansi terhadap proses, biaya, maupun waktu pelayanan.



**Gambar 1.1.2.** Kebijakan Pengembangan SPBE

Pembangunan SPBE yang akan dibangun maupun yang sudah ada harus mendukung proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Oleh karena itu, diperlukan suatu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada saat ini terkait dengan proses pembangunan dan pemeliharaan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat terselesaikan dan mampu diimplementasikan dengan baik menyesuaikan proses bisnis yang ada di Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Sebagai langkah menuju pembangunan panduan yang dimaksud, maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyusun Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Murung Raya. Harapannya dengan adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, pengembangan SPBE dapat dilaksanakan dengan lebih sistematis dan terpadu. Keterpaduan ini ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2028 yaitu:

1. Penyusunan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam mengimplementasikan SPBE;
2. Terwujudnya implementasi SPBE yang terarah dan komprehensif; dan
3. Terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

Adapun tujuan dari penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2028 sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
2. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
3. Menyusun dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2028 guna optimalisasi layanan masyarakat yang semakin baik di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

## 1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pekerjaan penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

13. Peraturan Presiden RI Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
22. Instruksi Presiden RI Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
23. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 57/kep/M.Kominfo/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
24. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
26. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
27. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Murung Raya
28. Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/228/2023 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Murung Raya
29. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya



## 1.4. Landasan Teori

### 1.4.1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018, SPBE didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE pemerintah daerah sehingga SPBE menjadi terpadu dan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah. Satu-kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh dapat menghasilkan proses birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.



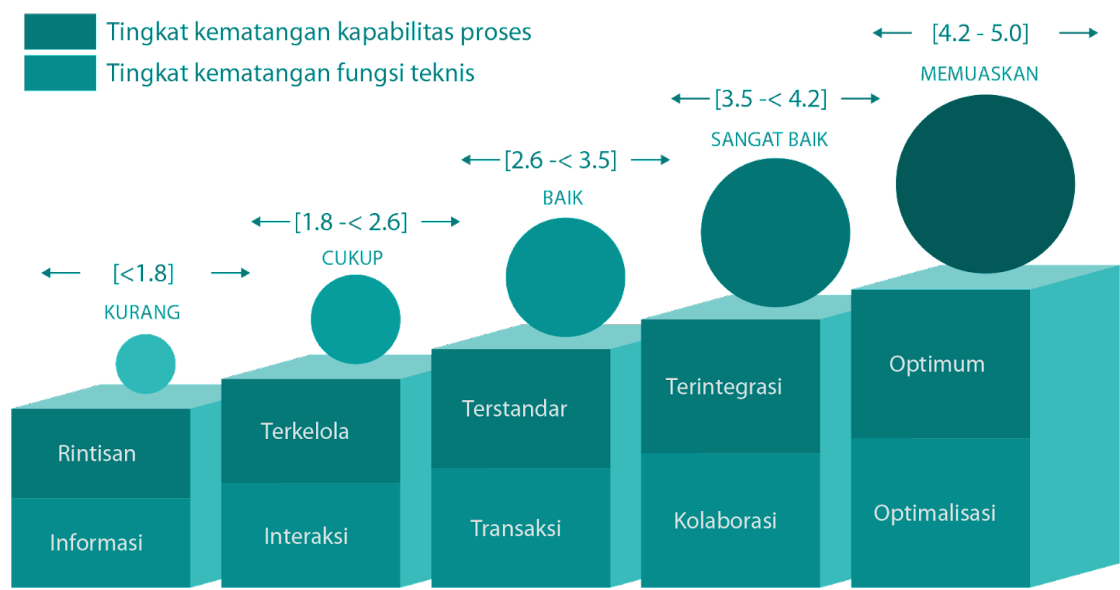
**Gambar 1.4.1.1.** Ruang Lingkup Arsitektur SPBE Nasional

Secara umum implementasi SPBE terdapat tiga tahapan penting dalam kesuksesan SPBE, yaitu:

1. Perencanaan: Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Kontrak;
2. Pelaksanaan: Manajemen Proyek/Kegiatan, Manajemen Rekanan, dan Tim Pelaksana (jumlah & kompetensi); dan
3. Evaluasi: Monitoring dan evaluasi setiap tahun untuk mengetahui capaian progres penerapan Arsitektur SPBE khususnya *Roadmap*, Kondisi permasalahan *eksisting* SPBE, Inisiatif perbaikan program.

Saat ini, kondisi penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat menggunakan konsep tingkat kematangan SPBE untuk mengukur derajat pengembangan SPBE. Tingkatan kematangan mengarah pada pengembangan SPBE pada keluaran dan dampak yang lebih baik. Tingkat kematangan yang rendah menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang

rendah, sedangkan tingkat kematangan yang tinggi menunjukkan kapabilitas dan keberhasilan yang lebih tinggi.



Gambar 1.4.1.2. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Adapun kondisi tingkat kematangan penerapan yang terdapat pada SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4.1.1. Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat		Karakteristik
1	Rintisan	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.</li></ul>
	Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan SPBE dalam bentuk satu arah.</li></ul>
2	Terkelola	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi.</li></ul>
	Interaksi	<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan SPBE dalam bentuk dua arah.</li></ul>
3	Terstandarisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi oleh semua unit organisasi terkait.</li></ul>
	Transaksi	<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.</li></ul>
4	Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif.</li></ul>
	Kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain.</li></ul>
5	Optimum	<ul style="list-style-type: none"><li>Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan.</li></ul>
	Optimalisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.</li></ul>

### 1.4.2. Roadmap Reformasi Birokrasi

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, dan tentunya yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode Road Map RB Nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Road Map disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang RB, sehingga dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan RB secara berkelanjutan pada masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Pelaksanaan RB telah memasuki tiga periode Road Map RB sejak Grand Design RB Tahun 2010–2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (APBN/APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari Grand Design RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

#### 1. Penyederhanaan Birokrasi Dua Level

Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 47.992 struktur pada 95 kementerian/lembaga yang telah disederhanakan, 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah serta 44.870 Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional pada 91 kementerian/lembaga, disusul dengan 31 provinsi, 371 kabupaten dan 86 kota yang telah diusulkan dan diberikan pertimbangan tertulis untuk penyederhanaan birokrasi.

#### 2. Penghapusan Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak efektif

Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih tugas fungsi di antara Instansi Pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran. Tercatat 37 LNS telah dibubarkan dan diintegrasikan pada kementerian/lembaga yang sesuai.

#### 3. Digitalisasi Birokrasi Melalui Penerapan SPBE yang Terintegrasi

Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Terdapat 159 Instansi Pemerintah yang memiliki tingkat kematangan SPBE “baik”. Kualitas digital birokrasi semakin positif, tercermin pada indeks E- Government Development Index (EGDI) yang dikeluarkan oleh United Nations. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat ke-88 atau naik 19 level dari tahun 2018.

4. Efisiensi APBN/APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar ± Rp 112 Triliun.

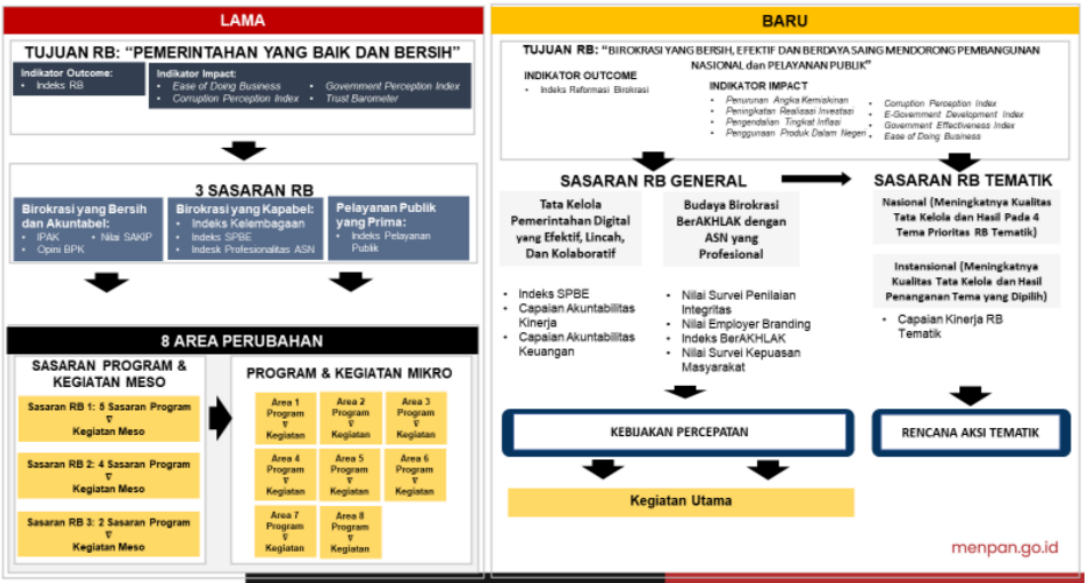
5. Penguatan Pengawasan Melalui pembangunan Zona Integritas

Unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Tercatat sampai dengan tahun 2022 telah terbentuk 1.937 unit kerja WBK dan 225 unit kerja WBBM.

6. Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2021, terdapat 56 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.

A. Fokus Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi



Gambar 1.4.9.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

Gambaran Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam Road Map RB 2020-2024 dibandingkan dengan Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman.

#### 1. Tujuan RB

Tujuan pada Road Map RB 2020-2024 sebelum penajaman yaitu “Pemerintahan yang baik dan bersih”, menjadi “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang. Isu tersebut terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

#### 2. Sasaran Strategis RB

Sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, hard element terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Aspek soft element yaitu terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

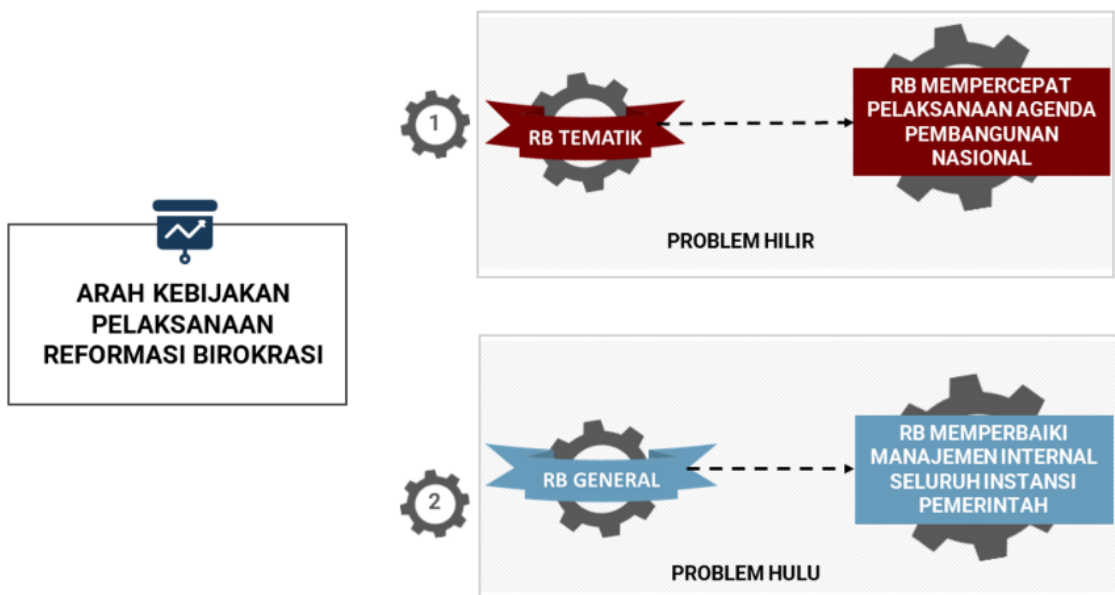
#### 3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Kegiatan RB tidak dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (acceleration). Kegiatan percepatan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

##### 1.4.9.4 Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi atas pelaksanaan RB yaitu mampu menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat serta menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar tersebut, setelah penajaman pelaksanaan RB mengarah ke dalam dua fokus “double track”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir RB Tematik.



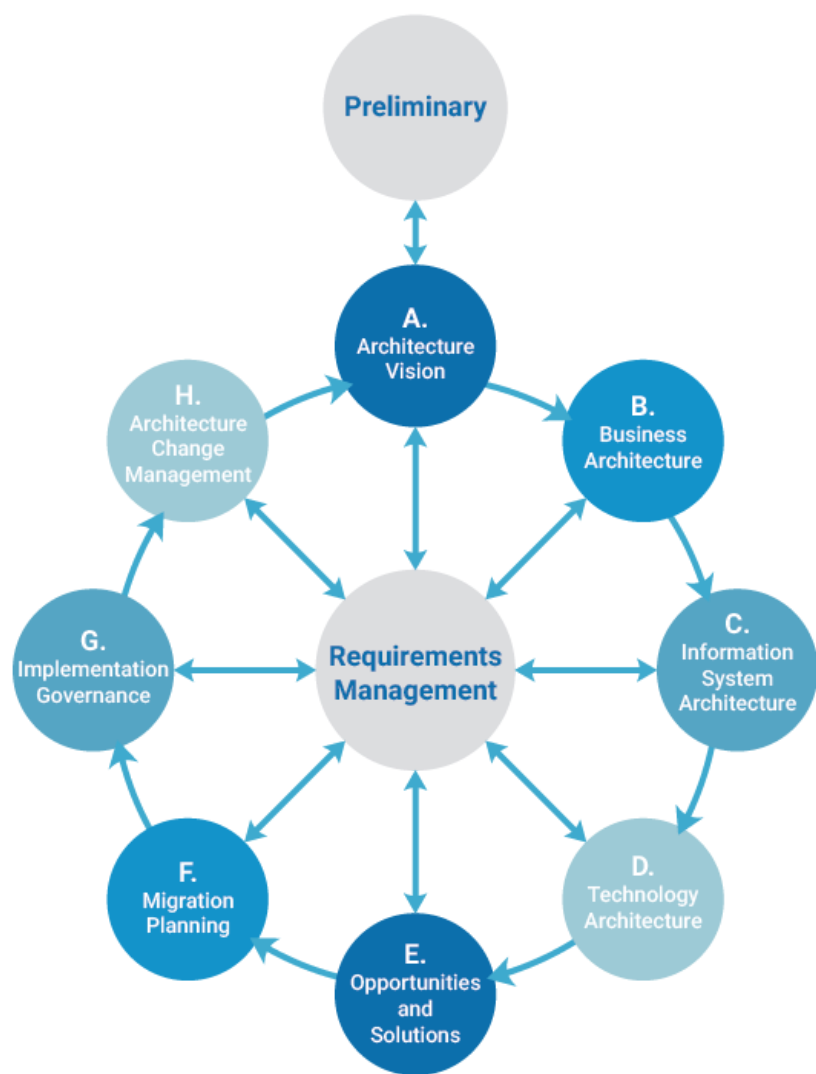


**Gambar 1.4.9.2.** Double Track Fokus Pelaksanaan RB

#### 4. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan. Guna mendapatkan peningkatan kepercayaan masyarakat dan untuk menunjukan efektivitas RB, maka ditentukan indikator tujuan yang berkualitas dampak (impact) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (outcomes) yaitu terkait hasil (outcomes) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (governance) pada tingkat intermediate outcomes dan immediate outcomes pada aspek-aspek kunci birokrasi. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang spesifik, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART) dan berorientasi pada hasil (outcome).

1.4.3. The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

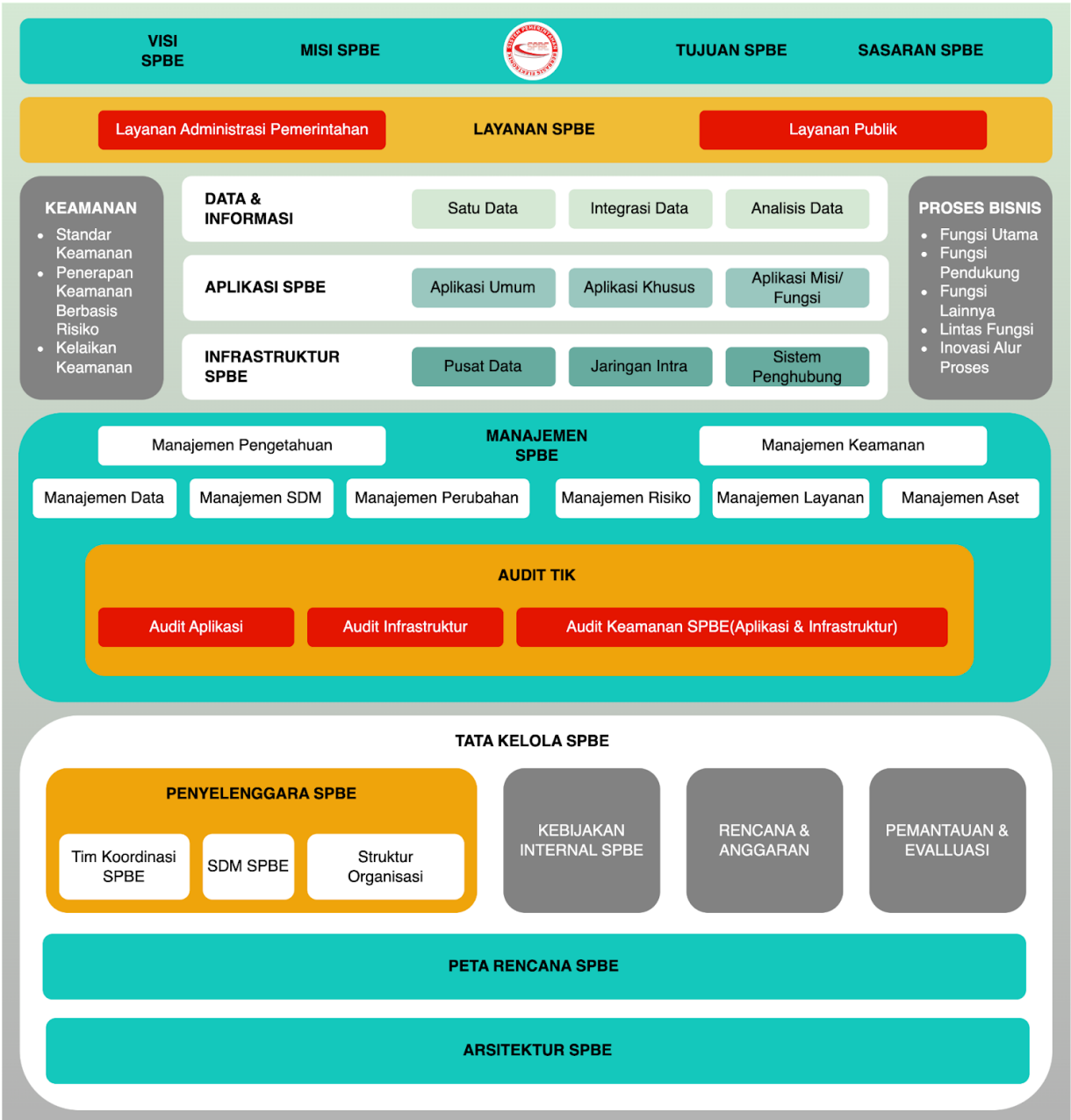


Gambar 1.4.2.1. Domain Arsitektur TOGAF

Penyusunan arsitektur arsitektur SPBE ini mengadopsi konsep metode pengembangan arsitektur IT (*Architecture Development Method*) yang ada dalam *framework* TOGAF. Konsep ini mendefinisikan secara mendetail dimulai dari arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur sistem dan data, arsitektur teknologi (infrastruktur dan keamanan), portofolio solusi dan peta rencana. Penyusunan Arsitektur SPBE pemerintah Kabupaten Murung Raya harus mampu memenuhi tujuan dari perkembangan teknologi dan visi SPBE yang ingin diadopsi oleh pemerintah daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan hasil evaluasi SPBE eksisting.

1.4.4. Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

Keberhasilan penerapan SPBE Kabupaten Murung Raya dalam penyelenggaraan alur pemerintahan perlu didukung oleh arsitektur SPBE yang terperinci sehingga dapat menjadi acuan pengembangan SPBE oleh seluruh *stakeholder*. Gambaran mengenai cakupan arsitektur SPBE Nasional yang perlu diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.4.3.1.** Domain Arsitektur SPBE Nasional

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, serta keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Pengembangan dari keenam arsitektur tersebut didukung oleh manajemen yang dilaksanakan dengan baik dan tata kelola yang disusun secara rinci dan terarah. Setiap *layer* arsitektur yang disebutkan dalam kerangka SPBE memiliki detail masing-masing yang selanjutnya saling terkait dan dapat mendorong keberhasilan domain lainnya. Langkah awal proses penyusunan dokumen arsitektur SPBE yang harus disusun terlebih dahulu dengan mendefinisikan tata kelola. Tata kelola adalah serangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan kegiatan dalam institusi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan dari institusi. Penerapan tata kelola dimulai dengan membentuk tim koordinasi

SPBE dan jadwal kegiatan, menetapkan kebijakan SPBE, dan menyusun rencana dan anggaran SPBE.

Langkah kedua dalam proses penyusunan arsitektur SPBE yaitu dengan menentukan bentuk-bentuk manajemen yang akan dilakukan dalam proses pengembangan SPBE di perangkat daerah. Manajemen adalah sebuah cara untuk mengarahkan seluruh *stakeholder* untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Adapun 8 (delapan) proses penentuan manajemen, yaitu:

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| - Manajemen Resiko             | - Manajemen Data      |
| - Manajemen Keamanan Informasi | - Manajemen Layanan   |
| - Manajemen SDM                | - Manajemen Aset TIK  |
| - Manajemen Pengetahuan        | - Manajemen Perubahan |

Arsitektur proses bisnis menjadi hal pertama yang perlu dikelola. Proses bisnis perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan alur organisasi internal dan pelayanan yang efektif dan efisien. Arsitektur proses bisnis selanjutnya menjadi acuan dalam pembangunan aplikasi pada domain aplikasi. Aplikasi dapat berupa portal yang mendukung layanan dan telah terintegrasi dengan berbagai aplikasi lain. Adapun beberapa portal layanan yang dapat dibangun antara lain, yaitu:

- Portal layanan administrasi pemerintah;
- Portal layanan publik;
- Portal pusat layanan; dan
- Integrasi kanal layanan.

Aplikasi juga dapat dibagi berdasarkan penggunaannya, yaitu aplikasi yang bersifat khusus dan umum. Adapun berdasarkan penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aplikasi umum nasional;
- Aplikasi khusus instansi pemda.

Pembangunan aplikasi mengacu pada data yang dikelola oleh perangkat daerah. Selain itu, pada arsitektur data memungkinkan adanya integrasi data dengan portal data nasional. Arsitektur lain yang dikembangkan dalam proses pembangunan SPBE adalah arsitektur infrastruktur. Arsitektur ini dikembangkan sebagai bentuk penanganan alat yang digunakan dalam pelayanan. Arsitektur infrastruktur dibagi menjadi dua jenis, yaitu: infrastruktur jaringan dan infrastruktur pusat data daerah. Infrastruktur jaringan adalah hal-hal mengenai pengelolaan koneksi yang ada pada perangkat daerah termasuk didalamnya pusat pengendalian dan jaringan, jaringan intra instansi pusat, jaringan intra instansi pemerintah daerah dan jaringan pita lebar. Sedangkan untuk infrastruktur pusat data daerah didalamnya terdapat *cloud services* dan repositori aplikasi/data.

Arsitektur terakhir yang digunakan dalam peningkatan layanan instansi adalah arsitektur keamanan informasi, dimana aspek keamanan informasi adalah aspek-aspek yang dilingkupi dan melingkupi keamanan informasi dalam sebuah sistem informasi. Aspek-aspek ini, meliputi:

privasi/kerahasiaan yang menjaga kerahasiaan informasi dari semua pihak kecuali untuk pihak yang memiliki kewenangan. Kelima arsitektur yang telah disebutkan (arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan informasi) adalah domain yang dikelola untuk meningkatkan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Pengembangan domain layanan tentunya mengedepankan aspek kemudahan bagi pengguna layanan tersebut. Adapun klasifikasi layanan yang diberikan oleh instansi pusat adalah layanan administrasi pemerintahan, layanan publik, dan survei penggunaan aplikasi SPBE. Secara umum, arsitektur SPBE Nasional terdiri dari enam komponen berupa taksonomi referensi arsitektur di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh setiap Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) sesuai dengan struktur yang telah ditentukan dalam setiap domain arsitektur SPBE Nasional.

#### **1.4.5. Referensi Arsitektur SPBE Nasional**

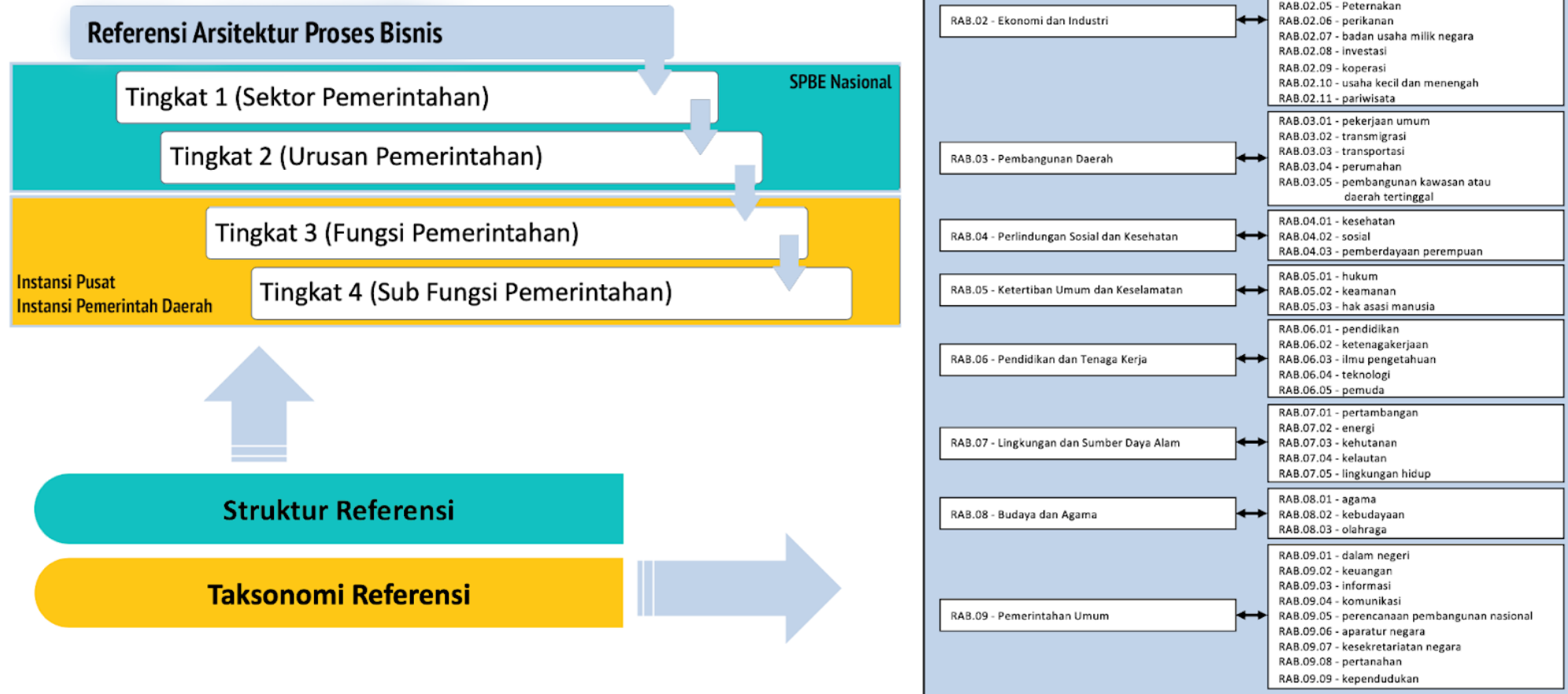
Referensi Arsitektur SPBE Nasional merupakan taksonomi dalam SPBE yang terdiri dari Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB-01), Taksonomi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD-02), Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL-03), dan Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RA-04), Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI-05), Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK-06). Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL) merupakan arsitektur yang berfokus pada desain layanan yang dapat digunakan oleh beberapa aplikasi untuk melakukan tugas yang sama. Setiap layanan yang ada memungkinkan aplikasi untuk saling berbagi informasi dan membangun integrasi. Adapun kondisi tingkat kematangan yang terdapat pada RAL Level 1 SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

##### **A. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)**

Domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur proses bisnis 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Sektor pemerintahan: mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Urusan pemerintahan: menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- d. Sub fungsi pemerintahan: menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Adapun penjelasan mengenai referensi arsitektur proses bisnis dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.4.4.1.** Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

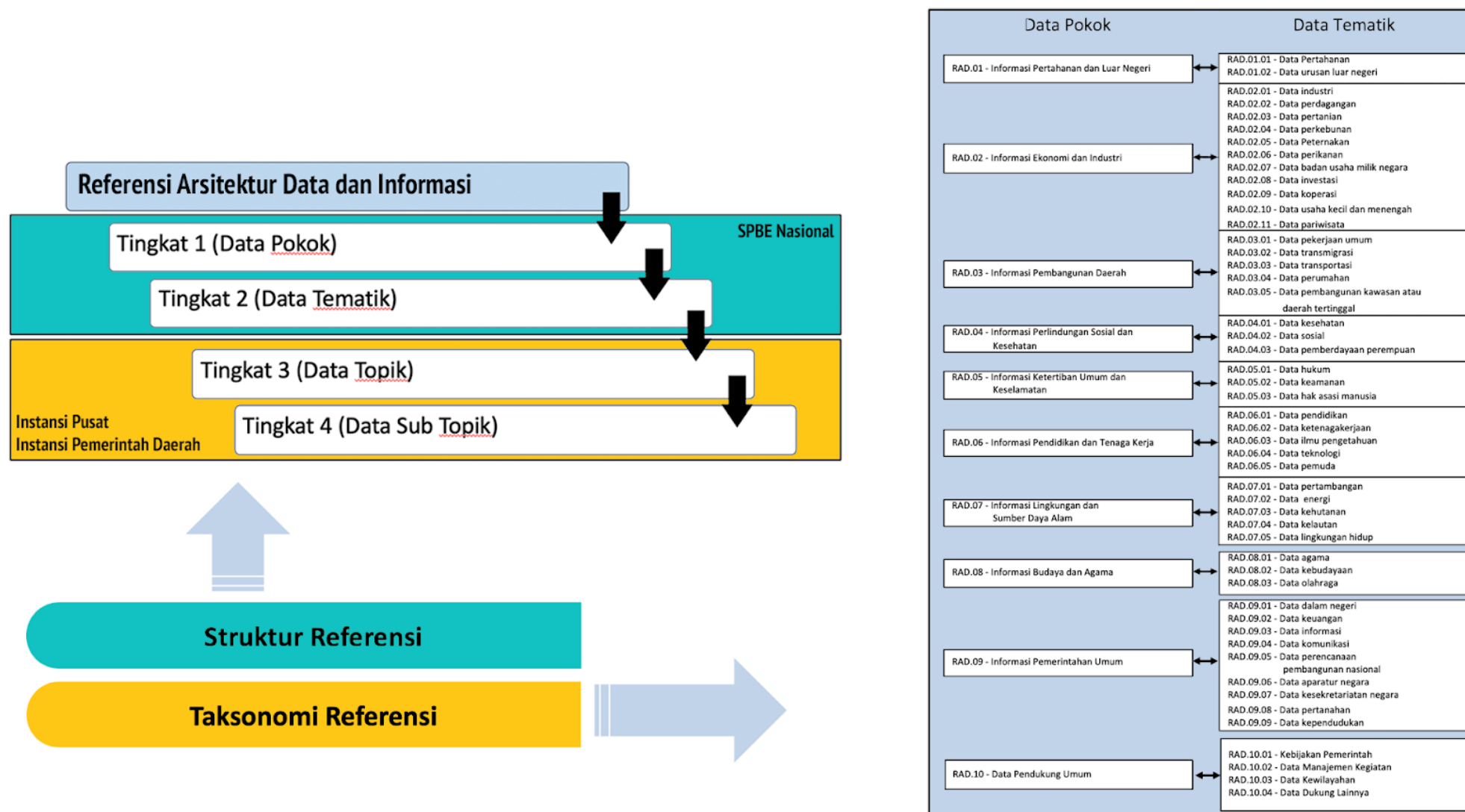
## **B. Struktur Referensi Arsitektur Data (RAD)**

Domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur data dan informasi berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Data pokok: mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Data tematik: menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Data topik: menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya IPPD mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional; dan
- d. Data sub topik: menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.



Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur data dapat dilihat pada gambar berikut:



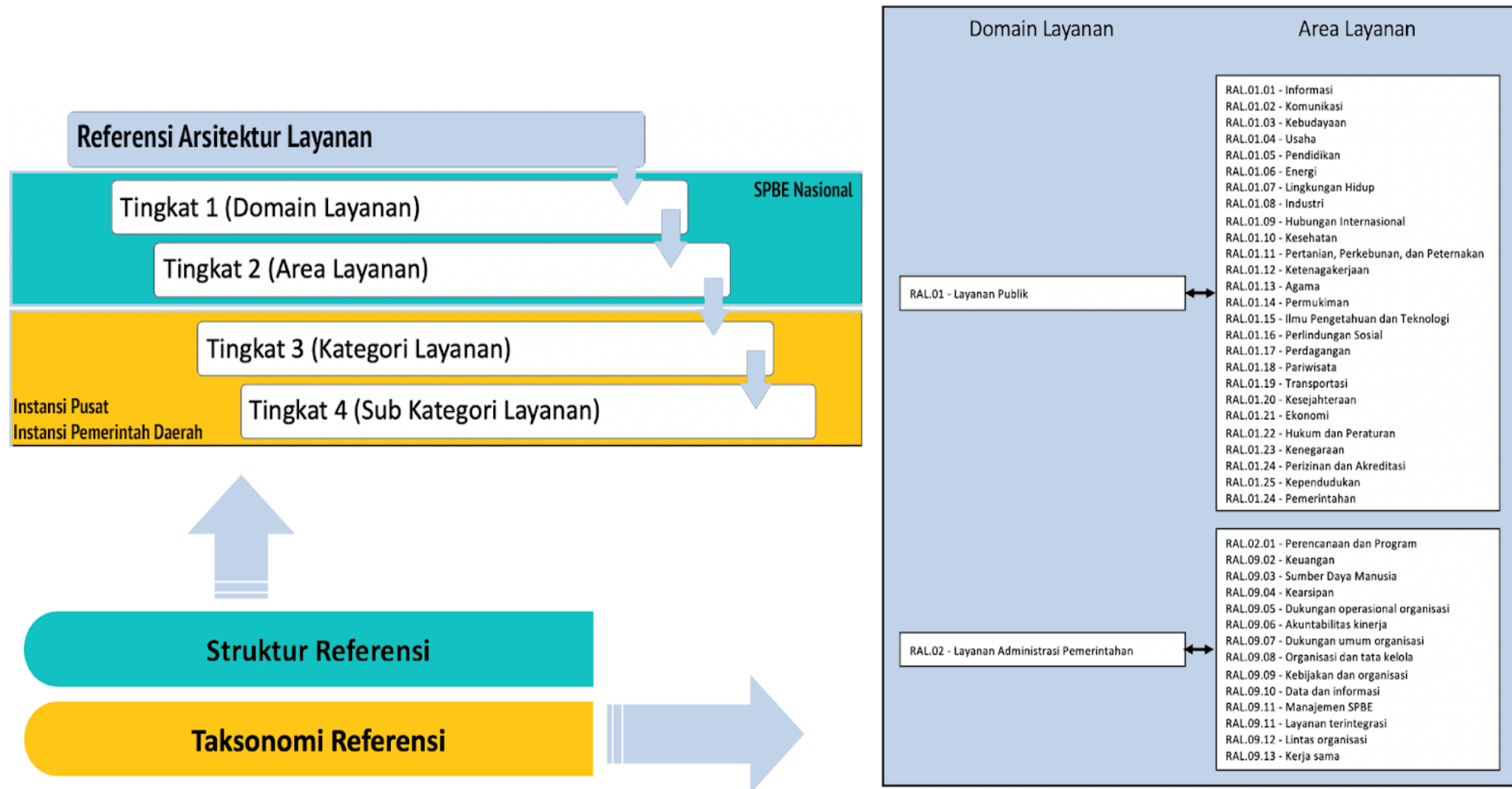
**Gambar 1.4.4.2.** Taksonomi Referensi Arsitektur Data (RAD)

### **C. Struktur Referensi Arsitektur Proses Layanan (RAL)**

Domain arsitektur layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) tingkat struktur, yaitu:

- a. Domain layanan: mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area layanan: menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori layanan: menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori layanan: menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional nasional.

Adapun penjelasan mengenai taksonomi referensi arsitektur layanan dapat dilihat pada gambar berikut:



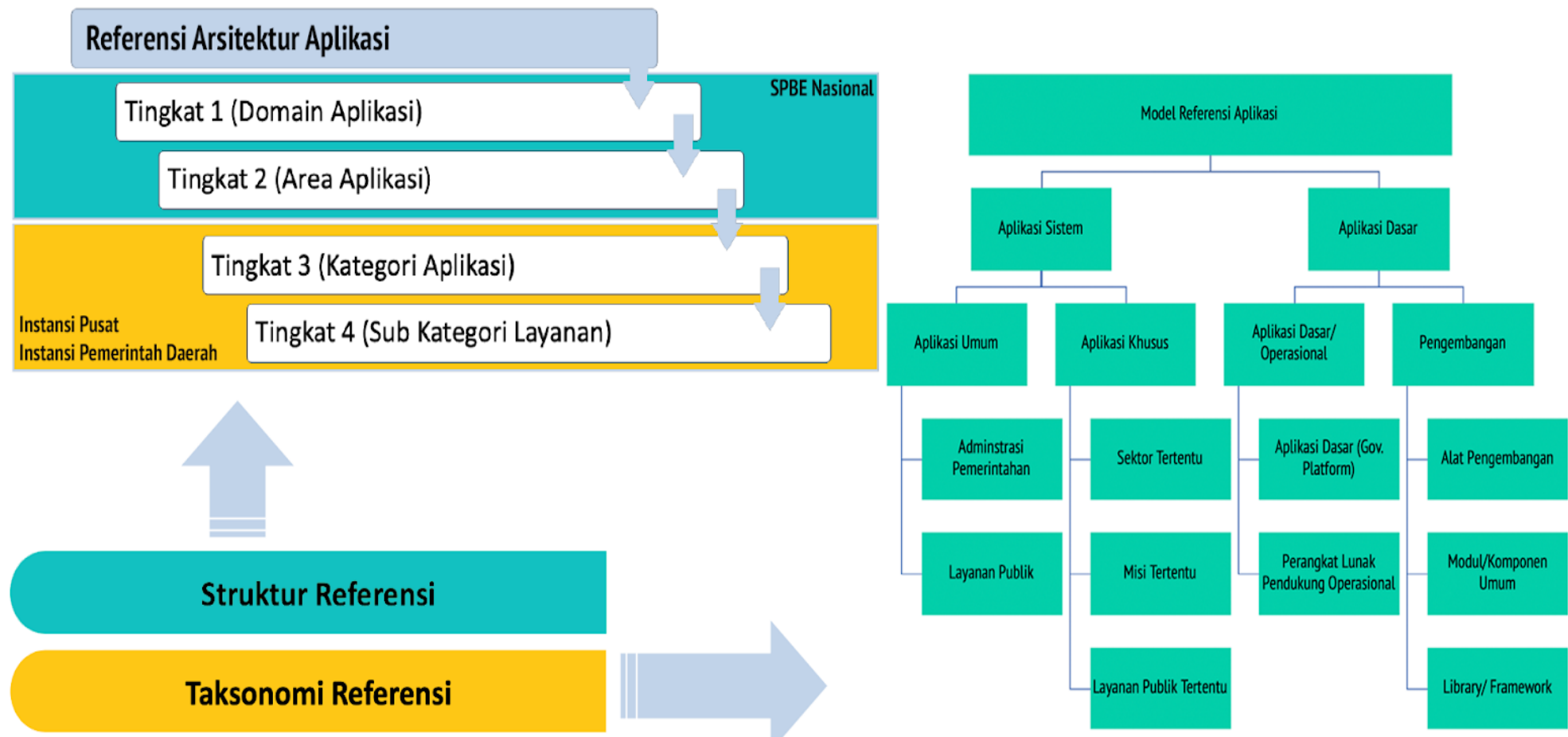
**Gambar 1.4.4.3.** Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

#### **D. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)**

Domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan kedalam 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. Domain aplikasi: mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area aplikasi: menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori aplikasi: menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh IPPD sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. Sub kategori aplikasi: menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (empat). IPPD dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur aplikasi dijelaskan pada gambar berikut:



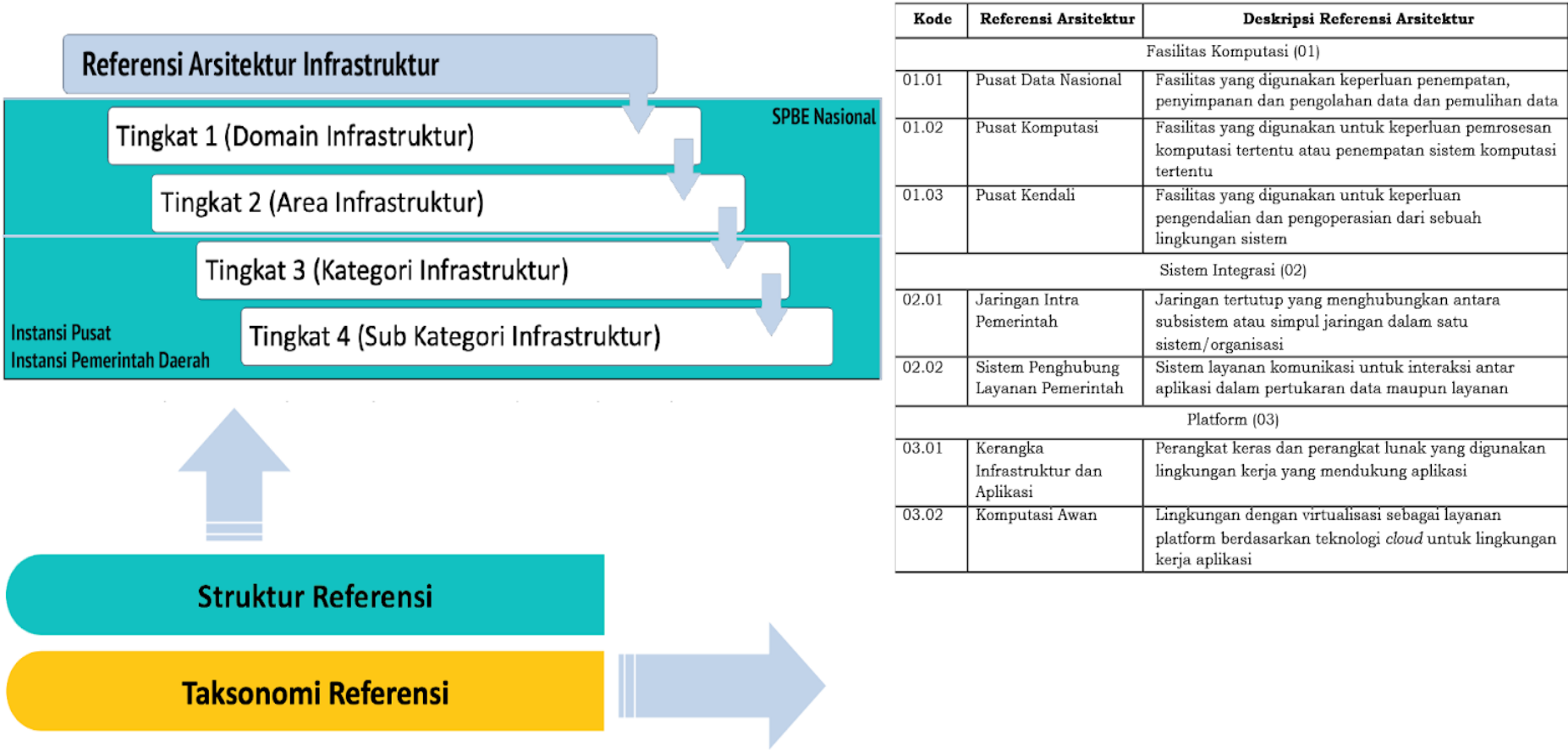
**Gambar 1.4.4.4.** Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

#### **E. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)**

Domain arsitektur infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi, data dan informasi yang kemudian dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua) dan menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- c. Kategori infrastruktur, menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga) yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur infrastruktur dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 1.4.4.5. Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

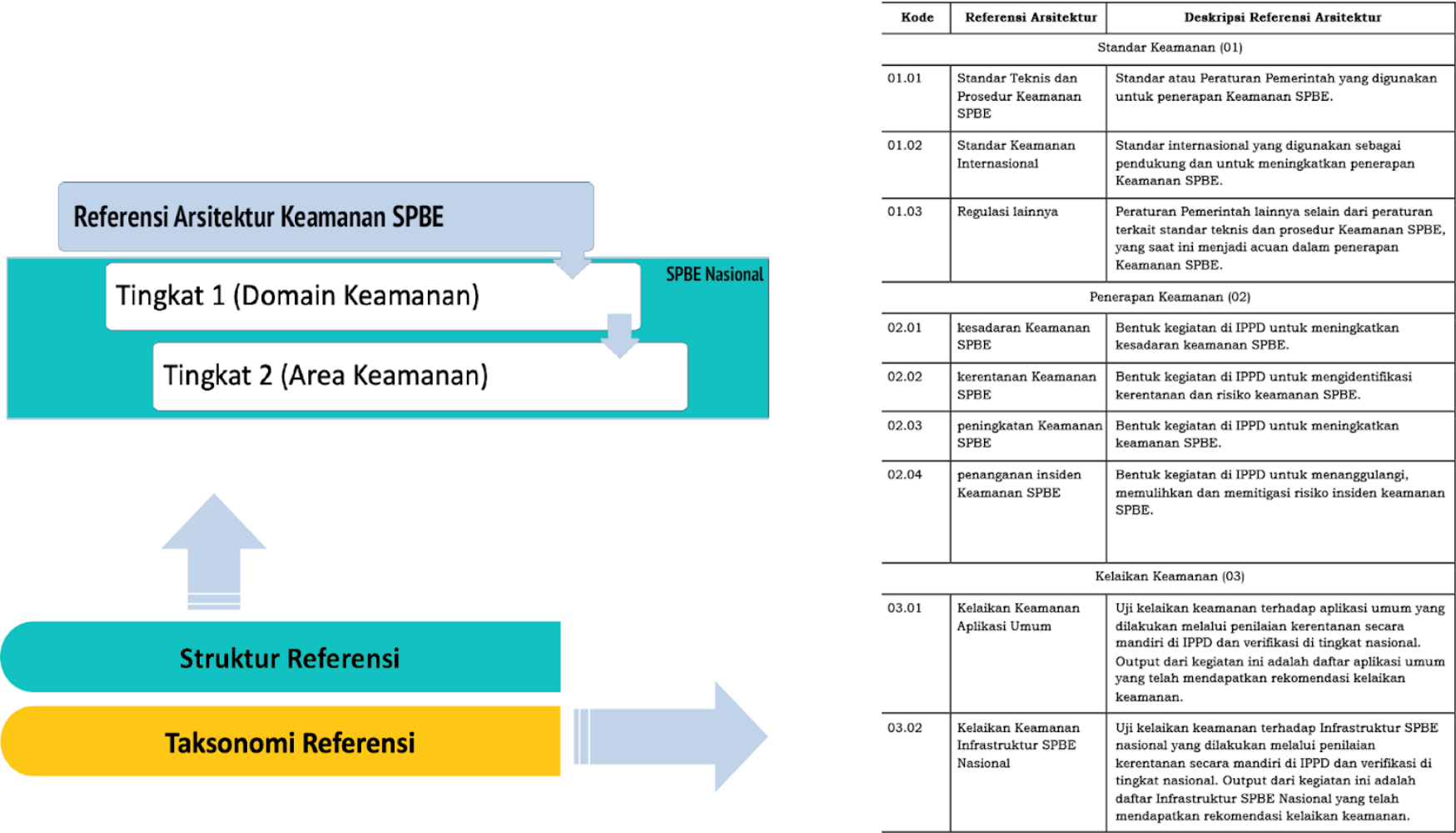


## **F. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan Informasi**

Domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional yang selanjutnya merupakan substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur domain arsitektur keamanan SPBE berupa 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. Domain keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan pertimbangan kelayakan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan
- b. Area keamanan: mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Adapun gambaran mengenai referensi arsitektur keamanan informasi dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 1.4.4.6. Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan Informasi (RAK)



# **Bab II**

## **Visi dan Misi**

### **Strategi SPBE**

## 2.1. Visi

Secara umum, arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga harus mengacu pada visi SPBE Nasional yaitu:

*"Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi."*

Berdasarkan hal tersebut, visi SPBE Nasional ini perlu diselaraskan, disinkronisasikan, dan diharmonisasikan dengan visi dan misi SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya guna mendefinisikan arsitektur dan peta rencana SPBE yang sesuai. Adapun Tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 :

*"Kabupaten Murung Raya yang Maju, Mandiri dan Sejahtera"*

Mengacu pada dua hal tersebut pondasi strategi dalam arsitektur dan peta jalan SPBE, Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024-2026. Lebih jauh, visi Pemerintah Kabupaten Murung Raya tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Kabupaten Murung Raya guna menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif. Berbagai upaya pencapaian visi SPBE dan strategi pencapaian implementasi SPBE yang dapat digunakan antara lain, yaitu:

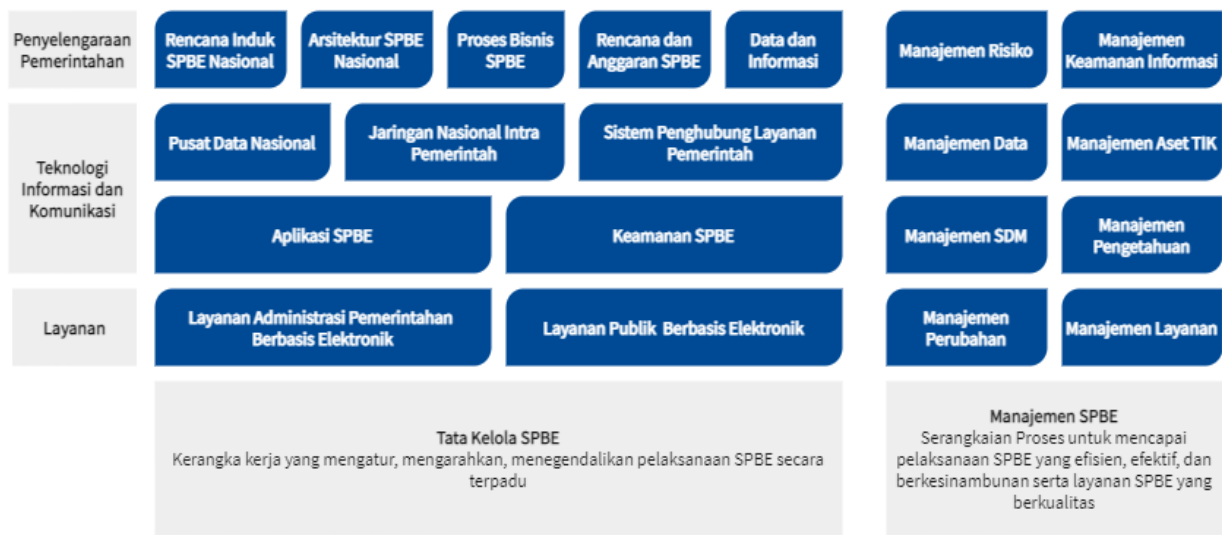
1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola SPBE yang terpadu;
2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Secara umum, merujuk pada visi dan misi SPBE, tujuan SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya antara lain, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sebagai turunan dari visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya, yaitu:

- 1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen TIK yang efektif dan efisien;
- 2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
- 3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
- 4. Meningkatkan kapasitas SDM TIK.



Gambar 2.1.1. Unsur-unsur dalam SPBE

2.2. Strategi Peningkatan SPBE

Berdasarkan hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, strategi peningkatan indeks SPBE meliputi 4 domain, yaitu: kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan. Secara khusus, perlu adanya peningkatan indeks SPBE khususnya pada domain kebijakan dan manajemen agar mencapai target level 4 (empat).

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	1,77
Domain Kebijakan SPBE	1,30
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	1,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,20
Perencanaan Strategis SPBE	1,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,25
Penyelenggara SPBE	1,00
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	2,49
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,33

Gambar 2.2.1. Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya  
(Sumber: laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Murung Raya, 2022)

Merujuk pada Gambar 2.2.1. dapat disimpulkan bahwa anggota dalam Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum sepenuhnya aktif berkolaborasi dalam penerapan tata kelola dan manajemen SPBE. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan indeks pada seluruh domain SPBE perlu dilakukan beberapa *best practices* yang dirinci pada Tabel berikut.

Tabel 2.2.1. Strategi Peningkatan Indeks SPBE

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
1	Indikator 1 sampai 10 terkait Kebijakan SPBE	1. Melakukan reviu atas regulasi <i>eksisting</i> yang terkait SPBE, memastikan cakupannya sesuai dengan yang diamanatkan dalam pedoman evaluasi SPBE; 2. Melakukan revisi/perbaikan regulasi SPBE Daerah sesuai dengan perkembangan regulasi SPBE dari Pusat.	Diskominfo
2	Indikator 16 terkait Layanan Pusat Data	1. Server Pemerintah Kabupaten Murung Raya terintegrasi dengan jaringan Pusat Data Nasional; dan 2. Melakukan evaluasi atas operasional Pusat Data milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya.	Diskominfo

No	Indikator	Peluang Peningkatan Indeks SPBE	Penanggung Jawab
3	Indikator 17 terkait Jaringan Intra Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan konektivitas ke seluruh perangkat daerah (<i>Metro Area Network</i>) yang terpusat di Diskominfo sebagai NOC nya;</li> <li>2. Memastikan seluruh ruangan perangkat daerah tercover radius <i>Access Point</i>; dan</li> <li>3. Melakukan evaluasi atas operasional Jaringan Intra milik Pemerintah Kabupaten Murung Raya.</li> </ol>	Diskominfo
4	Indikator 19 terkait Tim Koordinasi SPBE	Mendefinisikan jadwal kegiatan program kerja Tim Koordinasi SPBE dan disahkan dalam Surat Keputusan Bupati.	Tim Koordinasi SPBE
5	Indikator 20 terkait Kolaborasi Penerapan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan kolaborasi dalam penerapan peta rencana SPBE.</li> </ol>	Tim Koordinasi SPBE
6	Indikator 21 - 28 terkait Manajemen SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji manajemen SPBE dan menerapkannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sesuai pedoman yang ditetapkan;</li> <li>2. Melakukan kegiatan manajemen SPBE secara berkelanjutan; dan</li> <li>3. Melakukan reviu dan perbaikan atas penerapan manajemen SPBE.</li> </ol>	OPD Terkait

### 2.3. Inisiatif Strategis SPBE

Berdasarkan telaah visi SPBE Nasional dan visi pemerintah Kabupaten Murung Raya serta analisis hasil evaluasi SPBE terakhir diperoleh sepuluh inisiatif sebagai prioritas pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu:

1. Reviu kebijakan terkait SPBE yang sudah ada;
2. Melakukan efisiensi proses bisnis dengan melakukan digitalisasi pada proses bisnis yang kompleks guna memberikan pelayanan administrasi internal maupun publik yang lebih prima;
3. Pengembangan aplikasi khusus guna mendukung implementasi layanan tematik SPBE, aplikasi internal Pemerintah Kabupaten Murung Raya setidaknya harus memenuhi syarat indeks layanan SPBE di level 4 (empat), dimana aplikasi khusus harus dapat terintegrasi dengan aplikasi lain baik yang dikelola oleh internal pemda maupun yang dikelola oleh instansi lain;
4. Pengembangan *platform* integrasi layanan elektronik yang sudah berjalan dengan menyediakan kebijakan implementasi TIK yang menyeluruh dan menjangkau seluruh perangkat daerah, seperti: optimalisasi berbagai SOP yang sudah ada terutama yang berkaitan dengan pihak ketiga dan pelaksanaan berkelanjutan;
5. Peningkatan dan optimalisasi kapasitas (pusat data, jaringan intra pemerintah dan sistem penghubung layanan pemerintah) untuk optimalisasi layanan elektronik di internal Pemerintah Kabupaten yang berkelanjutan;



6. Penyesuaian tim Koordinasi SPBE (terutama pembentukan pokja);
7. Optimalisasi forum kolaborasi penerapan SPBE baik dengan internal maupun dengan instansi pusat;
8. Peningkatan kompetensi dan jumlah SDM dengan kualifikasi TI secara terencana dan berkesinambungan;
9. Menyusun pedoman, penerapan & optimalisasi manajemen SPBE; dan
10. Melakukan audit atas operasional SPBE yang meliputi audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan secara berkala.



# **Bab III**

## **Analisa Kondisi**

### ***Eksisting* SPBE**

### 3.1. Kebijakan & Manajemen

#### 3.1.1. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menerapkan beberapa layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik. Pengembangan layanan SPBE telah didukung oleh kebijakan internal SPBE yang terlihat pada hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dimana domain kebijakan memperoleh nilai 1.30 (penilaian kebijakan dasar untuk penerapan SPBE dinilai belum maksimal). Beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan internal SPBE dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1.1** Mandatori Kebijakan SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Kebijakan Tim Koordinasi SPBE	Sudah Ada
2.	Kebijakan Manajemen Data	Sudah Ada
3.	Kebijakan Arsitektur SPBE	Sudah Ada
4.	Kebijakan Peta Rencana SPBE	Sudah Ada
5.	Kebijakan Layanan Pusat Data	Sudah Ada
6.	Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah Ada
7.	Kebijakan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sudah Ada
8.	Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Sudah Ada
9.	Kebijakan internal Manajemen Keamanan Informasi	Sudah Ada
10.	Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah Ada

Berdasarkan sepuluh mandatori kebijakan internal SPBE, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah menyusun kebijakan tersebut.

#### 3.1.2. Manajemen

Pengembangan dan penerapan SPBE tentu harus diimbangi dengan penerapan manajemen guna memastikan operasional SPBE dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ekspektasi. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 khususnya pada domain manajemen SPBE memperoleh nilai 1.00. Layanan SPBE tanpa didukung dengan penerapan manajemen yang optimal dapat berimplikasi pada pelayanan yang kurang baik. Terdapat 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan dalam implementasi SPBE, yakni: SDM (*people*) →Manajemen (*process*) →Layanan IT (*technology*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan mengenai pemenuhan penerapan manajemen yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2.1.** Mandatori Manajemen SPBE Kabupaten Murung Raya

No.	Mandatori	Keterangan
1.	Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Belum diterapkan
2.	Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Belum diterapkan
3.	Penerapan Manajemen Data	Belum diterapkan
4.	Penerapan Manajemen Aset TIK	Belum diterapkan
5.	Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Belum diterapkan
6.	Penerapan Manajemen Pengetahuan	Belum diterapkan
7.	Penerapan Manajemen Perubahan	Belum diterapkan
8.	Penerapan Manajemen Layanan Indikator SPBE	Belum diterapkan

Berdasarkan dari delapan mandatori Manajemen SPBE, Pemerintah Kabupaten Murung Raya belum menerapkan mandatori manajemen SPBE dan kedepannya perlu adanya penerapan manajemen SPBE secara optimal dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menghilangkan duplikasi data, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kompleksitas birokrasi, serta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah.

**3.2. Arsitektur SPBE**

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Arsitektur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan SPBE yang optimal. Selain itu, Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai dasar penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

**3.2.1. Arsitektur Proses Bisnis**

Secara umum, arsitektur proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3.2.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Katalog disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Murung Raya, dimana Level 1,2, dan 3 mengacu pada kodefikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional serta untuk level 4 hingga level 5 mengacu pada proses bisnis Kabupaten Murung Raya. Tabel berikut ini merupakan ringkasan dari katalog proses bisnis Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun katalog proses bisnis selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbemurungraya>.

Tabel 3.2.1.1.1. Daftar Proses Bisnis yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 02.01.01.01	Pengendalian Izin Usaha Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.01 Pembinaan Industri Regional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.01.02.01	Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.02 Penumbuh-Kembangan Industri Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.01.06.01	Penggunaan Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.06 Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.01.06.02	Pemasaran Produk Dalam Negeri	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.06 Penggunaan Produk Dalam Negeri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.01.07.01	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.01 Industri	RAB.02.01.07 Pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Produk Digital	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAB 02.02.01.01	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.01 Pembinaan Perdagangan Regional	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 02.02.04.01	Pengembangan Ekspor	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.02 Perdagangan	RAB.02.02.04 Ekspor Impor	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.09.03.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.03 Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.09.04.01	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.09 Koperasi	RAB.02.09.04 Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.03.02.01	Penyuluhan Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.02 Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.03.03.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.03.03.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.03.03.03	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.04.01.01	Pembinaan Perkebunan Regional	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.04 Perkebunan	RAB.02.04.01 Pembinaan Perkebunan Regional	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.03.04.01	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAB 02.03.04.02	Pengawasan Keamanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 02.03.04.03	Penanganan Kerawanan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAB 02.03.04.04	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.03 Pertanian	RAB.02.03.04 Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAB 02.05.01.01	Pengendalian Kesehatan Hewan	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.01 Pembinaan Peternakan Regional	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.05.03.01	Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.03 Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.05.06.01	Pengelolaan Perikanan Budidaya	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.05 Peternakan	RAB.02.05.06 Perikanan Budidaya	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAB 02.08.01.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAB 02.08.02.01	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAB 02.08.02.02	Promosi Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAB 02.08.03.01	Pelayanan Penanaman Modal	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.08 Investasi	RAB.02.08.03 Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAB 02.10.04.01	Pengembangan UMKM	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 02.10.04.02	Pemberdayaan Usaha Mikro	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.10 Usaha Kecil dan Menengah	RAB.02.10.04 Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAB 02.11.01.01	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAB 02.11.01.02	Pemasaran Pariwisata	RAB.02 Ekonomi dan Industri	RAB.02.11 Pariwisata	RAB.02.11.01 Pembinaan Pariwisata Regional	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAB 03.01.02.01	Penyelenggaraan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.01.02.02	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.02 Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.01.03.01	Pengembangan Jasa Konstruksi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.03 Pembinaan Jasa Kontruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.01.04.01	Pengendalian B3 dan Limbah B3	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 03.01.04.01.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 03.01.04.01.01.01	Verifikasi Lapangan Persyaratan Penyimpanan sementara Limbah B3	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 03.01.04.02	Pengelolaan Sistem Air Limbah	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.04 Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.01.05.01	Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.01.05.02	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Daerah Irigasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	RAB.03.01.05 Pengelolaan Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.02.01.01	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.02 Transmigrasi	RAB.03.02.01 Pembinaan Transmigrasi Regional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAB 03.03.02.01	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.02	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jaringan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.02.01	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.02.02	Pengadaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.02.03	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Kebijakan Jalan Kota	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.03	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.04	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.03.02.04.01	Pembangunan Gedung Terminal	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.04.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.05.01	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.06	Penyediaan Angkutan Umum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.06.01	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.07	Penyediaan Perlengkapan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.07.01	Pemeliharaan Prasarana dan Perlengkapan Jalan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.08	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.08.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.03.02.08.02	Pengawasan Rekomendasi Andalalin	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.02.08.03	Penilaian Hasil Andalalin	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.02 Pengelolaan Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.03.04.01	Pengelolaan Pelayaran	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.03 Transportasi	RAB.03.03.04 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Dinas Perhubungan
MURA-DAB 03.04.03.01	Pengembangan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.04.03.02	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAB 03.04.03.03	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.03 Pengembangan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAB 03.04.05.01	Kawasan Permukiman	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAB 03.04.05.02	Pengembangan Perumahan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.04 Perumahan	RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAB 03.05.03.01	Peningkatan Kerjasama Desa	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.03 Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAB 03.05.04.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.06.04.01	Penyelenggaraan Penataan Ruang	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.04 Tata Ruang Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAB 03.06.05.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.06 Pertanahan	RAB.03.06.05 Litigasi Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAB 03.07.01.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.01.01	Administrasi Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.01.02	Diseminasi Data Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.01.03	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02	Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02.01.01	Administrasi Dokumen Pelaporan Peristiwa Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02.01.02	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.07.01.02.01.03	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.02.02	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.03	Pengawasan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.03.01	Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.01	Bimbingan Teknis Pendayagunaan Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.02	Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.03	Pemanfaatan Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.04	Penertiban Informasi Administrasi Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 03.07.01.04.05	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.05.01	Inventarisasi Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.05.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.04.05.03	Penyajian Data Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.05	Pengelolaan Profil Kependudukan	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.06	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.06.01	Fasilitasi dan Sosialisasi Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.06.02	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pencatatan Sipil	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.01.06.03	Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.01 Pembinaan Kependudukan Regional	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAB 03.07.03.01	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan	RAB.03.07 Kependudukan	RAB.03.07.03 Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
					Keluarga Berencana
MURA-DAB 04.01.01.01	Pemenuhan UKP dan UKM	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.01.01.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.01 Pembinaan Kesehatan Regional	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.01.02.01	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.02 Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.01.03.01	Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.01.03.02	Operasional Pelayanan Kesehatan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.01.04.01	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	RAB.04.01.04 Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
MURA-DAB 04.02.01.01	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.01.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.01.02.01	Pelaksanaan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 04.02.01.02.02	Pelaksanaan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.01.02.03	Pengelolaan Bina Mental Spiritual	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.01.02.04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Kesejahteraan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.01.02.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga Pendidikan dan Keterampilan SDM Terampil	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.01 Pembinaan Sosial Regional	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAB 04.02.03.01	Rehabilitasi Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.03 Manajemen Sosial	Dinas Sosial
MURA-DAB 04.02.05.01	Perlindungan dan Jaminan Sosial	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.05 Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
MURA-DAB 04.02.06.01	Manajemen penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02.02	Manajemen penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 04.02.06.02.02.01	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02.02.02	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02.02.03	Pencegahan Kebakaran	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.02.02.04	Pengadaan Sarana Prasarana Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.03	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.03.01	Kajian Risiko Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.03.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.01	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.02	Penanganan Pascabencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 04.02.06.04.03	Penanggulangan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.04	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.05	Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.06	Penguatan Kapasitas Kawasan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.07	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.04.08	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.05	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.05.01	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.05.02	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.05.03	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 04.02.06.05.04	Respon Cepat Darurat Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.06	Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.06.01	Penguatan Kelembagaan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAB 04.02.06.07	Penanganan Bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.02 Sosial	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	Dinas Sosial
MURA-DAB 04.03.04.01	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAB 04.03.04.02	Perlindungan Khusus Anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAB 04.03.05.01	Perlindungan Perempuan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan	RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan	RAB.04.03.05 Perlindungan Hak Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAB 05.02.01.01	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 05.02.01.02.01	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Penanganan Gangguan	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.02	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.03	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.04	Pengadaan Sarana Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.05	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.06	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.07	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 05.02.01.02.08	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.02 Keamanan	RAB.05.02.01 Ketentraman, Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAB 06.01.01.01	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.01.01.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.01 Manajemen Tenaga Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 06.01.02.01	Pengelolaan Pendidikan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.02	Pengembangan Bahasa dan Sastra	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.02.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.02.01.01	Peningkatan Apresiasi Siswa Bahasa dan Sastra Daerah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.03	Pengembangan Kurikulum	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.03.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.02.03.01.01	Pelatihan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.02 Pembinaan Pendidikan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.03.01	Pendidikan Anak Usia Dini	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.03.01.01	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.03.01.01.01	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.03 Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 06.01.04.01	Pendidikan Dasar	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.04.01.01	Pengelolaan Pendidikan SD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.04.01.01.01	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendidikan SD	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.04 Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.05.01	Pendidikan Menengah	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.05 Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.05.01.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.05 Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.01.05.01.01.01	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pendidikan SMP	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.01 Pendidikan	RAB.06.01.05 Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 06.02.02.01	Hubungan Industrial	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAB 06.02.02.02	Penempatan Tenaga Kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAB 06.02.02.03	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	RAB.06.02.02 Pembinaan Ketenagakerjaan Regional	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAB 06.04.01.01	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.01 Pemberdayaan Pemuda	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 06.04.02.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.04 Pemuda	RAB.06.04.02 Pembinaan Pemuda Regional	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAB 06.05.01.01	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	RAB.06.05 Olahraga	RAB.06.05.01 Pembinaan Olahraga Regional	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAB 07.05.01.01	Peningkatan Pendidikan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 07.05.01.02	Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 07.05.01.03	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.01 Pembinaan Lingkungan Hidup Regional	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 07.05.02.01	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 07.05.02.01.01	Kebijakan Energi dan Air	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 07.05.02.01.01.01	Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 07.05.02.01.01.02	Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.02 Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 07.05.03.01	Pengelolaan Persampahan	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03 Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 07.05.03.02	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	RAB.07.05.03 Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAB 08.02.01.01	Pembinaan Kesenian Masyarakat	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 08.02.01.02	Pengelolaan Kebudayaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.02 Pembinaan Kebudayaan Regional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAB 08.02.05.01	Pembinaan Perpustakaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.02	Pembudayaan Gemar Membaca	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.02.01	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.02.02	Pemilihan Duta Baca	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.02.03	Pengembangan Literasi Inklusi Sosial	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.02.04	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.03	Pengembangan Bahan Pustaka	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 08.02.05.04	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.05	Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.06	Pengembangan Perpustakaan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.05.07	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.05 Pembinaan Kepustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.01	Pengelolaan Arsip	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.03	Pengelolaan Arsip Dinamis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.03.01	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.03.02	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 08.02.06.03.03	Pengawasan Arsip Dinamis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.04	Pengelolaan Arsip Statis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.04.01	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.05	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.05.01	Pemberdayaan Kapasitas Unit dan Lembaga Kearsipan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 08.02.06.05.02	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	RAB.08 Budaya dan Agama	RAB.08.02 Kebudayaan	RAB.08.02.06 Pembinaan Kepustakaan dan Arsip Nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAB 09.01.02.01	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAB 09.01.02.01.01	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAB 09.01.02.01.01.01	Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAB 09.01.02.01.01.02	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.01.02.02	Pengelolaan Produk Hukum	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Bagian Hukum
MURA-DAB 09.01.02.03	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.01.01	Pembahasan Rancangan Perda	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.01.02	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.02	Pengawasan Penggunaan Anggaran	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.02.01	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.02.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.03	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.03.03.01	Pelaksanaan Reses	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.01.02.04	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.02.04.01	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Sekretariat DPRD
MURA-DAB 09.01.03.01	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.03 Pembinaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
MURA-DAB 09.01.03.01.01	Administrasi Tata Pemerintahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.03 Pembinaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
MURA-DAB 09.01.03.01.01.01	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.03 Pembinaan Otonomi Daerah	Bagian Pemerintahan
MURA-DAB 09.01.05.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAB 09.01.05.02	Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAB 09.01.05.03	Perbendaharaan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.03.01	Pembinaan Penatausahaan Keuangan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.03.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.01.05.03.03	Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lain	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.03.04	Pengelolaan Kas Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.03.05	Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.04	Pengelolaan Keuangan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.05	Rencana Anggaran Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.01.05.06	Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.06.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.06.01.01	Kebijakan Pembentukan BLUD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.06.01.02	Kebijakan Pendirian BUMD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.06.01.03	Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.01.05.06.01.04	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.06.01.05	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAB 09.01.05.07	Perencanaan dan Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.01 Dalam Negeri	RAB.09.01.05 Pembinaan Keuangan Daerah	Bagian Pemerintahan
MURA-DAB 09.02.08.01	Pengadaan dan Manajemen Aset	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.01	Inventarisasi Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.02	Penatausahaan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.03	Pengamanan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.04	Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.05	Penilaian Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAB 09.02.08.01.07	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.02.08.02	Penunjang Urusan Pemerintah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Umum
MURA-DAB 09.02.08.02.01	Administrasi Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Umum
MURA-DAB 09.02.08.02.01.01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Umum
MURA-DAB 09.02.08.02.01.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Umum
MURA-DAB 09.02.08.02.01.03	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Umum
MURA-DAB 09.02.08.03	Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAB 09.02.08.03.01	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAB 09.02.08.03.01.01	Pengelolaan Layanan Pengadaan Elektronik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 Keuangan	RAB.09.02.08 Pengadaan dan Manajemen Aset	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAB 09.03.02.01	Pengelolaan Aplikasi Informatika	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAB 09.03.02.02	Penyelenggaraan Persandian Pengamanan Informasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.03.02.03	Pengembangan Ekosistem SPBE	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.02 Pengelolaan Informatika	
MURA-DAB 09.03.03.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.03 Pengelolaan Data Statistik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAB 09.03.05.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.03 Informasi	RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAB 09.05.01.01	Penelitian dan Pengembangan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.01.01	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.02	Perencanaan Pembangunan Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.03	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.03.01	Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04	Perencanaan dan Pendanaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.01	Analisis Kondisi Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.05.01.04.02	Analisis Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.03	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.04	Pelaksanaan Konsultasi Publik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.05	Pelaksanaan Musrenbang	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.06	Penelaahan Dokumen Perencanaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.04.07	Penetapan Dokumen Perencanaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.05	Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.05.01	Perencanaan Pembangunan Manusia	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.05.02	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAB 09.05.01.06	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Administrasi Pembangunan

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.05.01.06.01	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.01 Perencanaan Pembangunan Nasional	Bagian Administrasi Pembangunan
MURA-DAB 09.05.07.01	Pengelolaan Program Kerja Organisasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Kerja Organisasi	Bagian Organisasi
MURA-DAB 09.05.07.01.01	Penataan Organisasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Kerja Organisasi	Bagian Organisasi
MURA-DAB 09.05.07.01.01.01	Monev Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Kerja Organisasi	Bagian Organisasi
MURA-DAB 09.05.07.01.01.02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Kerja Organisasi	Bagian Organisasi
MURA-DAB 09.05.07.01.01.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAB.09.05.07 Pengelolaan Kerja Organisasi	Bagian Organisasi
MURA-DAB 09.06.02.01	Kepegawaian Daerah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.02	Kenaikan Pangkat ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.03	Mutasi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.04	Promosi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.06.02.05	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.06	Administrasi Pemberhentian ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.06.01	Pengadaan PNS dan PPPK	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.06.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.06.03	Pengelolaan Kebutuhan ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.07	Pengembangan Kompetensi ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.07.01	Assessment Center	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.07.02	Pendidikan Lanjutan ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.07.03	Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.08	Pengembangan Kompetensi Teknis	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.06.02.08.01	Sertifikasi Kompetensi Manajerial dan Fungsional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.09	Penilaian Kinerja Aparatur	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.09.02	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.09.03	Pemberian Penghargaan Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.09.04	Pembinaan Disiplin ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.09.05	Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAB 09.06.02.10	Administrasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.02.10.01	Monev Penilaian Kinerja Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.02.10.02	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.02.10.03	Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum

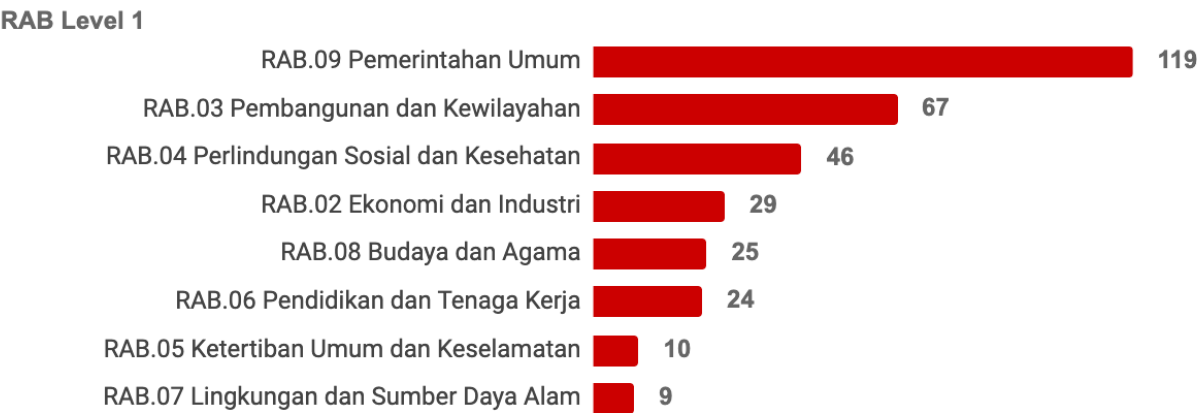
ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.06.02.10.04	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.02.10.05	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.02.10.06	Peningkatan Sarana Prasarana Disiplin Pegawai	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	Bagian Umum
MURA-DAB 09.06.09.01	Penyelenggaraan Pengawasan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	Inspektorat
MURA-DAB 09.06.09.02	Pendampingan dan Asistensi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 Aparatur Negara	RAB.09.06.09 Pengawasan Aparatur Negara	Inspektorat
MURA-DAB 09.07.03.01	Peningkatan Kewaspadaan Nasional	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.03.02	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.03.03	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.03.04	Peningkatan Peran Partai Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.03.05	Peningkatan Lembaga Pendidikan Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.03 Ketahanan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

ID Proses Bisnis	Nama Bisnis/Urusan	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAB 09.07.07.01	Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.07.01.01	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.07 Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.08.01	Pengembangan Etika dan Budaya Politik	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.08 Fasilitas politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.09.01	Organisasi Masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAB 09.07.09.01.01	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.07 Kesekretariatan Negara	RAB.09.07.09 Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



3.2.1.2. Analisis Katalog Proses Bisnis

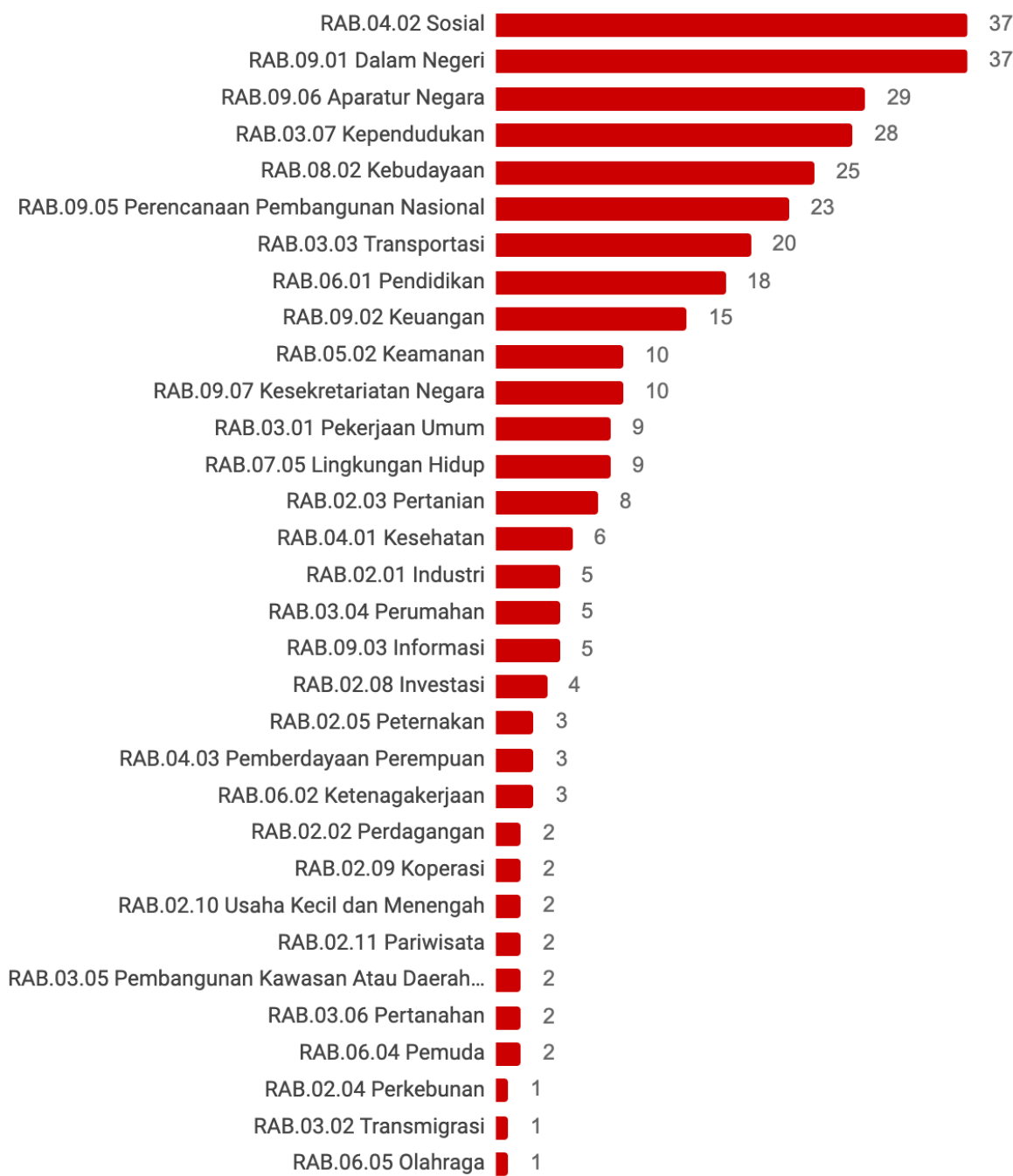
Merujuk pada hasil pemetaan proses bisnis pada sub bab sebelumnya, dapat dianalisis pengelompokan Level 1 RAB Nasional sebagai berikut:



Grafik 3.2.1.2.1. Grafik Jumlah Proses Bisnis RAB berdasarkan Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Level 1 RAB Nasional, sebagian besar proses bisnis masuk dalam RAB.09 Pemerintahan Umum dan RAB.03 Pembangunan dan Kewilayahan. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

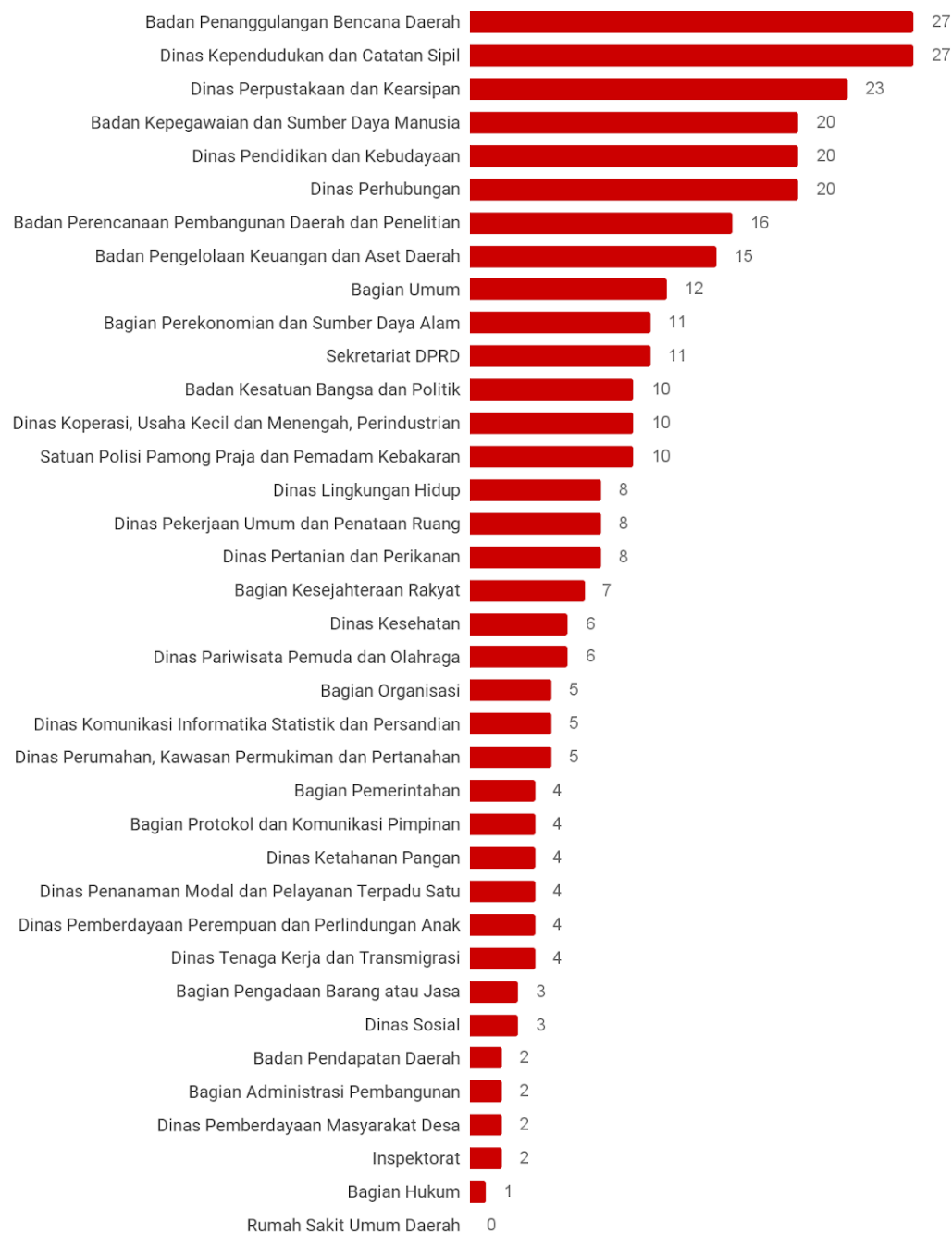
RAB Level 2



**Grafik 3.2.1.2.2.** Grafik Jumlah Proses Bisnis berdasarkan RAB Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan level 2 RAB nasional, kategori terbanyak terdapat pada RAB.04.02. Sosial dan RAB.09.01 Dalam Negeri masing-masing sejumlah 37 proses bisnis dan RAB.09.06 Aparatur Negara dengan jumlah 29 proses bisnis. Urusan proses bisnis dengan jumlah paling sedikit terdapat pada RAB.02.04 Perkebunan dengan jumlah 1 proses bisnis. Tentunya varietas jumlah proses bisnis tergantung pada tipe perangkat daerah. Kondisi ini dapat berubah sesuai perkembangan dan inovasi daftar metadata probis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Unit Kerja



Grafik 3.2.1.2.3. Grafik Jumlah Proses Bisnis pada Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.1.2.3. Kepemilikan proses bisnis didominasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing sejumlah 27 Proses Bisnis dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejumlah 23 proses bisnis. Sedangkan Unit Kerja yang belum memiliki proses bisnis terletak pada Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki 0 proses bisnis. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan proses bisnis pada perangkat daerah sangat beragam dan tergantung pada karakteristik serta tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan perubahan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3.2.2.    **Arsitektur Data dan Informasi**

Arsitektur data memberikan gambaran mengenai daftar data pokok yang dimiliki seluruh perangkat daerah. Daftar data ini perlu dikumpulkan, disimpan, diproses, dan disajikan secara elektronik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi pemerintah dapat diakses dengan mudah, aman, dan terintegrasi secara efektif di antara lembaga pemerintah yang berbeda.

3.2.2.1.   **Katalog Data dan Informasi**

Data dan Informasi dalam Arsitektur SPBE merupakan suatu kumpulan data pokok (*by name, by address*) hasil *output* dari pelayanan maupun pengelolaan pemerintahan. Setiap data yang dikelola berupa data yang bersifat publik, terbatas, dan rahasia berdasarkan dari hasil survei terhadap seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Murung Raya Selanjutnya daftar data yang ada diselaraskan dengan referensi arsitektur data SPBE Nasional. Tabel 3.2.2.1.1. merupakan ringkasan dari katalog data dan informasi Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun katalog data dan informasi selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbemurungraya>.

**Tabel 3.2.2.1.1.** Daftar Data dan Informasi yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.02.01	Data Kenaikan Gaji Berkala		Terbatas	Realtime	Kepegawaian Daerah	Layanan Kenaikan Gaji Berkala	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.01	Data Presensi ASN	e-Presensi	Terbatas	Harian	Kepegawaian Daerah	Layanan Presensi ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.02	Data Cuti PNS	SIASN	Terbatas	Realtime	Kepegawaian Daerah	Layanan Cuti ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.03	Data Jabatan Fungsional ASN		Terbatas	Bulanan	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.04	Data Jenjang Pangkat/Golongan ASN	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Pangkat/Golongan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN	RAD.09.06 DATA APARATUR	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							UMUM	NEGARA	
MURA-DAD 09.06.05	Data Kepegawaian ASN	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pemutakhiran Data Kepegawaian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.06	Data Pensiun ASN	SIASN	Terbatas	Realtime	Mutasi ASN	Layanan Pensiun ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.07	Data Penerima Satyalancana Karya Satya	ULA Kemendagri	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Penghargaan Satyalancana Karya Satya	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.08	Data Karis/Karsu PNS	SIAPEK BKN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Karis/Karsu	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.09	Data Mutasi ASN		Terbatas	Realtime	Mutasi ASN	Layanan Mutasi ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.10	Data Gelar Pendidikan ASN	SIASN	Terbuka	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pencantuman Gelar	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.11	Data Izin Belajar ASN		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi Teknis	Layanan Izin Belajar ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.12	Data Tugas Belajar ASN		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi Teknis	Layanan Tugas Belajar ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.13	Data Nominasi ASN	SIASN	Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Penilaian Kinerja ASN/BAPERJAKAT	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD	Data Kinerja ASN	e-Kinerja BKN	Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Kinerja ASN	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA	Badan Kepegawaian dan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
09.06.14							PEMERINTAHAN UMUM	APARATUR NEGARA	Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.15	Data Pemberhentian Pegawai	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pemberhentian Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.16	Data Disiplin ASN	i'DIS BKN	Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.17	Data TPP		Terbatas	Realtime	Penilaian Kinerja Aparatur	Layanan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.18	Data Profil Pegawai	SIMPEGNAS SIMPEG	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Profil Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.19	Data Usulan Alih Jenjang Jabatan		Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.20	Data Kompetensi		Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.21	Data SK Alih Jenjang Jabatan	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.22	Data SK Hukuman Disiplin	i'DIS BKN SIASN	Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.23	Data SK Hukuman Ringan		Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD	Data Perintah Pemeriksaan		Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.06 DATA	Badan Kepegawaian dan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
09.06.24							PEMERINTAHAN UMUM	APARATUR NEGARA	Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.25	Data BAP Pemeriksa		Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.26	Data BAP Perangkat Daerah		Terbatas	Realtime	Pembinaan Disiplin ASN	Layanan Disiplin Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.27	Data Usulan Kenaikan Pangkat		Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.28	Data SK Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.29	Data Usulan Kenaikan Jabatan		Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.30	Data Hasil Uji Kompetensi		Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.31	Data SK Kenaikan Jabatan	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.32	Data SK Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Pangkat/Golongan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.33	Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat	SIASN	Terbatas	Realtime	Kenaikan Pangkat ASN	Layanan Kenaikan Pangkat/Golongan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.34	Data Usulan Pemberhentian		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Layanan Pemberhentian Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					ASN				
MURA-DAD 09.06.35	Data SK Pemberhentian	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pemberhentian Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.36	Data Persetujuan Teknis Pemberhentian	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Pemberhentian Pegawai	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.37	Data Formasi ASN	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.38	Data Usulan Formasi	e-Formasi Menpan	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.39	Data SK Penetapan Formasi	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.40	Data SK Pengangkatan ASN		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.41	Data SK Persetujuan Teknis		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.42	Data Pemberkasan CASN		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia



ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
					ASN				
MURA-DAD 09.06.43	Data CASN	SSCASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 09.06.44	Data SK Pengangkatan CASN	SIASN	Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Layanan Kebutuhan ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAD 04.01.01	Data P4GN		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Layanan P4GN dan PN	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAD 04.01.02	Data PN		Terbatas	Realtime	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Layanan P4GN dan PN	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAD 06.03.01	Data Izin Penelitian		Terbuka	Realtime	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Layanan Izin Penelitian	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.03 DATA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAD 10.04.01	Data Surat Keterangan Terdaftar Ormas		Terbatas	Realtime	Organisasi Masyarakat	Layanan Pendaftaran SKT Ormas	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAD 10.04.02	Data Partai Politik		Terbatas	Realtime	Peningkatan Peran Partai Politik	Layanan Verifikasi Partai Politik	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAD 04.02.01	Data Kebencanaan		Terbuka	Realtime	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana	Layanan Sosialisasi Kebencanaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD	Data Evakuasi Korban		Terbatas	Realtime	Penyelamatan dan	Layanan Evakuasi Korban	RAD.04 INFORMASI	RAD.04.02 DATA	Badan Penanggulangan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
04.02.02	bencana				Evakuasi Korban Bencana	Bencana	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	SOSIAL	Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.03	Data Distribusi Bantuan		Terbuka	Realtime	Penanganan Pascabencana	Layanan Distribusi Bantuan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.04	Data Kerugian Pasca Bencana		Terbatas	Realtime	Penanganan Pascabencana	Layanan Pasca Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.05	Data Distribusi Sarana Prasarana Kebencanaan		Terbuka	Realtime	Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Distribusi Sarpras Kebencanaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.06	Data Pelatihan Kebencanaan		Terbuka	Realtime	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Layanan Pelatihan Kebencanaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.07	Data Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana		Terbatas	Realtime	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Layanan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.08	Data Evaluasi Bencana		Terbuka	Realtime	Penanggulangan Bencana	Layanan Monev Bencana	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD 04.02.09	Data Bantuan Kebencanaan		Terbatas	Realtime	Penanganan Pascabencana	Layanan Bantuan Kebencanaan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAD	Data Penagihan Pajak	SIMDA	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan	Layanan Penagihan Pajak	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.02 DATA	Badan Pendapatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
09.02.01	Retribusi	Pendapatan			Daerah	Retribusi	PEMERINTAHAN UMUM	KEUANGAN	Daerah
MURA-DAD 09.02.02	Data Pajak PBB	SISMIOP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.03	Data BPHTB	SISMIOP e-BPHTB e-CIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.04	Data SSPD	SISMIOP e-BPHTB e-CIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.05	Data Laporan Pembayaran BPHTB	SISMIOP e-BPHTB e-CIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan BPHTB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.06	Data SPPT	SIMPBB e-SPPT	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB-P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.07	Data Objek PBB P2	SIMPBB e-SPPT	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB-P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.08	Data Subjek PBB P2	SIMPBB e-SPPT	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Pajak PBB-P2	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.09	Data Perhitungan PBB		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Layanan Perhitungan PBB	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.10	Data Pengkajian Pajak Daerah		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kompetensi Teknis	Layanan Tugas Belajar ASN	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAD 09.02.11	Data Perhitungan Penghasilan Daerah		Terbatas	Realtime	Perencanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	Layanan Perhitungan Penghasilan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.02.12	Data Pengelolaan Keuangan Daerah	FMIS	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.13	Data Dana Desa	SIMSTRADA	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pencairan Dana Desa dan ADD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.14	Data Barang Milik Daerah	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.15	Data Pemanfaatan Barang Milik Daerah	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.16	Data Penghapusan Barang Milik Daerah	SIMDA BMD	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.17	Data Belanja Modal		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.18	Data Belanja Habis Pakai		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.19	Data Barang Persediaan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Persediaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.20	Data SPD	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.21	Data SP2D	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penerbitan SP2D	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.22	Data Standart Satuan Harga	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Penyusunan Standar Satuan Harga	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							UMUM		Daerah
MURA-DAD 09.02.23	Data KUA	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.24	Data PPAS	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.25	Data Penganggaran	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.26	Data RKBMD		Terbatas	Realtime	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Layanan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.27	Data SPJ	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.28	Data SPP	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.29	Data SPM	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.30	Data STS	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.31	Data BKU	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.32	Data Perda Pertanggungjawaban APBD	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.02.33	Data Perbup Penjabaran APBD	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.34	Data SPTJM SPM	FMIS	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Keuangan Daerah	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.35	Data DPA	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.36	Data Anggaran Kas	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.37	Data RKA OPD	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.02.38	Data RAPBD	SIPD-RI	Terbatas	Realtime	Rencana Anggaran Daerah	Layanan Penyusunan Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.02.01	Data Usulan Pemanfaatan Barang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.02.02	Data Perjanjian Kerjasama		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.02.03	Data MoU Pemanfaatan Aset		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.02.04	Data SK Lelang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.02.05	Data SK Hibah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								KEGIATAN	Daerah
MURA-DAD 10.02.06	Data Risalah Lelang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.04.01	Data Kartu Inventaris Barang		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.04.02	Data Kartu Inventaris Ruangan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.04.03	Data BA Rekonsiliasi Aset Tetap		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 10.04.04	Data Kendaraan Dinas		Terbatas	Realtime	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Layanan Arsip BPKB Kendaraan Dinas	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAD 09.05.01	Data Dokumen Perencanaan	SIPD-RI	Terbuka	Realtime	Penelaahan Dokumen Perencanaan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.02	Data Monev Dokumen Perencanaan	SIPD-RI	Terbatas	Bulanan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Monev Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.03	Data SK Tim Rancangan Teknokratik		Terbatas	Bulanan	Penelaahan Dokumen Perencanaan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.04	Data Rancangan Teknokratik RPJMD		Terbatas	Bulanan	Penelaahan Dokumen Perencanaan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.05.05	Data Rancangan RPJMD	SIPD-RI	Terbatas	Bulanan	Penelaahan Dokumen Perencanaan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.06	Data Perda RPJMD		Terbuka	Bulanan	Penelaahan Dokumen Perencanaan	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.07	Data Monitoring DAK		Terbatas	Bulanan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan Monitoring DAK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.08	Data DAK	KRISNA	Terbuka	Bulanan	Perencanaan dan Pendanaan	Layanan DAK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.09	Data Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Terbuka	Bulanan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Layanan Kelitbangan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.10	Data Pembangunan Daerah	e-Monev Bangda	Terbuka	Bulanan	Perencanaan Pembangunan Daerah	Layanan Monev Pembangunan Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.11	Data Infrastruktur dan Kewilayahan		Terbuka	Bulanan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Layanan Monev Infrastruktur dan Kewilayahan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAD 09.05.12	Data Realisasi Anggaran		Tertutup	Realtime	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Layanan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Bagian Administrasi Pembangunan



ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.05.13	Data Monitoring Pembangunan Fisik		Terbatas	Realtime	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Layanan Monitoring Konstruksi Fisik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.05 DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Bagian Administrasi Pembangunan
MURA-DAD 10.01.01	Data Draft Produk Hukum Daerah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.01.02	Data Draft Perbup	JDIH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.01.03	Data Perbup	JDIH	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.01.04	Data Bantuan Hukum		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Bantuan Hukum	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.01.05	Data Produk Hukum Daerah	JDIH	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.01 DATA KEBIJAKAN PEMERINTAH	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.02.01	Data Harmonisasi	JDIH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.02.02	Data Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	JDIH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.02.03	Data Naskah Akademik Produk Hukum	JDIH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Hukum
MURA-DAD 10.02.04	Data Nomor Registrasi Produk Hukum	JDIH	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Produk Hukum	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Hukum
MURA-DAD	Data Bantuan Skripsi dan		Terbuka	Realtime	Pelaksanaan Capaian	Layanan Bantuan Skripsi	RAD.04 INFORMASI	RAD.04.02 DATA	Bagian Kesejahteraan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
04.02.01	Wisuda				Kinerja Kesejahteraan Sosial	dan Wisuda Mahasiswa Tidak Mampu	PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	SOSIAL	Rakyat
MURA-DAD 04.02.02	Data Bantuan Penghulu dan Pendeta		Terbuka	Realtime	Pelaksanaan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	Layanan Bantuan Penghulu dan Pendeta	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAD 04.02.03	Data Bantuan Lembaga Terdaftar		Terbuka	Realtime	Pelaksanaan Capaian Kinerja Kesejahteraan Masyarakat	Layanan Bantuan Lembaga Terdaftar	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAD 08.01.01	Data Penerima Bantuan Rumah Ibadah		Terbuka	Realtime	Pelaksanaan Capaian Kinerja Kesejahteraan Sosial	Layanan Bantuan Rumah Ibadah	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.01 DATA AGAMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAD 09.06.01	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP REVIU	Terbatas	Tahunan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Bagian Organisasi
MURA-DAD 09.06.02	Data ANJAB ABK	e-SIMONA	Terbatas	Tahunan	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Layanan ANJAB ABK	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Bagian Organisasi
MURA-DAD 09.06.03	Data Survey Kepuasan Masyarakat	e-SKM	Terbuka	Enam Bulanan	Monev Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Bagian Organisasi
MURA-DAD 09.06.04	Data Kesepakatan Kerjasama		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Layanan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Bagian Pemerintahan
MURA-DAD 09.06.05	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Bagian Pemerintahan
MURA-DAD 10.03.01	Data Administrasi Kewilayahan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Layanan Administrasi Kewilayahan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.03 DATA KEWILAYAHAN	Bagian Pemerintahan
MURA-DAD	Data Dokumen Penawaran	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan	Layanan Pengadaan	RAD.09 INFORMASI	RAD.09.02 DATA	Bagian Pengadaan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
09.02.01	Harga				Jasa	Barang dan Jasa	PEMERINTAHAN UMUM	KEUANGAN	Barang atau Jasa
MURA-DAD 09.02.02	Data Dokumen SPPBJ	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 09.02.03	Data Dokumen Kontrak	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 09.02.04	Data Dokumen PPK	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.01	Data Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE AMEL e-Katalog	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.02	Data Penilaian Penyedia Barang dan Jasa	SIKAP	Terbuka	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Penilaian Penyedia Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.03	Data Rencana Umum Pengadaan	SIRUP	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Rencana Umum Pengadaan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.04	Data Penyedia Barang dan Jasa	SIKAP	Terbuka	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.05	Data Model Dokumen Pemilihan	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.06	Data Kaji Ulang	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.07	Data Dokumen Teknis	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 10.02.08	Data Dokumen Kualifikasi	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.02.09	Data Dokumen Administrasi	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.04.01	Data BA Hasil Non Tender	SPSE	Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.04.02	Data BA Kaji Ulang		Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 10.04.03	Data BA Hasil Tender		Terbatas	Realtime	Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAD 07.01.01	Data Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Terbatas	Realtime	Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Layanan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.01 DATA PERTAMBANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 07.02.01	Data Kebijakan Energi dan Air		Terbatas	Realtime	Kebijakan Energi dan Air	Layanan Kebijakan Energi dan Air	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.02 DATA ENERGI	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 07.03.01	Data Kebijakan Pertanian dan Kehutanan		Terbatas	Realtime	Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Layanan Kebijakan Pertanian dan Kehutanan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.03 DATA KEHUTANAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 09.02.01	Data Bahan Penyusunan Kebijakan BUMD dan BLUD		Terbatas	Realtime	Monev Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Layanan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 09.02.02	Data Pengendalian Distribusi Perekonomian		Terbatas	Realtime	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Layanan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							UMUM		
MURA-DAD 09.02.03	Data Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro		Terbatas	Realtime	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 09.02.04	Data Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		Terbatas	Realtime	Kebijakan Pendirian BUMD	Layanan Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAD 10.02.01	Data Fasilitas Keprotokolan Pimpinan		Terbatas	Realtime	Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Fasilitas Keprotokolan Pimpinan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAD 10.02.02	Data Fasilitas Komunikasi Pimpinan		Terbatas	Realtime	Fasilitas Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Layanan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAD 10.02.03	Data Publikasi Kegiatan Pimpinan		Terbuka	Realtime	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Layanan Publikasi Kegiatan Pimpinan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAD 10.02.04	Data Kunjungan Tamu		Terbuka	Realtime	Penunjang Urusan Pemerintah	Layanan Kunjungan Tamu	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Umum
MURA-DAD 10.02.05	Data Permohonan Peminjaman Aset		Terbatas	Realtime	Penunjang Urusan Pemerintah	Layanan Fasilitas Perlengkapan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Umum
MURA-DAD 10.02.06	Data Permintaan Dukungan Konsumsi		Terbatas	Realtime	Penunjang Urusan Pemerintah	Layanan Permohonan Konsumsi	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Umum
MURA-DAD 10.02.07	Data Pinjam Pakai Aset Sekretariat Daerah		Terbatas	Realtime	Penunjang Urusan Pemerintah	Layanan Pinjam Pakai Aset Sekretariat Daerah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Bagian Umum
MURA-DAD 03.07.01	Data Kartu Keluarga	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 03.07.02	Data Kartu Tanda Penduduk	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.03	Data Kartu Identitas Anak	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.04	Data Surat Keterangan Pindah Warga Negara	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.05	Data Akta Kelahiran	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.06	Data Akta Kematian	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.07	Data Akta Perkawinan	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.08	Data Akta Perceraian	SIAK	Terbatas	Realtime	Administrasi Dokumen Pendaftaran Penduduk	Layanan Administrasi Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.09	Data Kependudukan	SIAK	Terbatas	Realtime	Penyajian Data Kependudukan	Layanan Penyediaan Data Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 03.07.10	Data Identitas Kependudukan Digital	IKD	Terbatas	Realtime	Pengumpulan Data Kependudukan dan Penyajian Database Kependudukan	Layanan Identitas Kependudukan Digital	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAD 04.01.01	Data Kepesertaan BPJS	PCare	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan BPJS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 04.01.02	Data Kunjungan Pasien BPJS	PCare	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan BPJS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.03	Data Caregiver		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Caregiver	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.04	Data Angka Bebas Jentik	SILANTOR	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan DBD	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.05	Data Balita Diare	SIHEPI	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Diare	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.06	Data Hepatitis		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Hepatitis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.07	Data Imunisasi	SIPTM	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Imunisasi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.08	Data ISPA		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan ISPA	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.09	Data Kartu Identitas Berobat	MPDN	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kartu Identitas Berobat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 04.01.10	Data Pendistribusian Obat Cacing		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pengobatan Kecacingan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.11	Data Pengelolaan Farmasi	SIMONA	Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Layanan Kefarmasian	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.12	Data Farmasi Klinis	SIMONA	Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Layanan Kefarmasian	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.13	Data Pasien Kegawatdaruratan		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kegawatdaruratan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.14	Data Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.15	Data Kesehatan Anak Usia Sekolah		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.16	Data Kesehatan Gigi dan Mulut		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.17	Data Deteksi Dini/Skrining Indera	SIPTM	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Indera	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan



ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 04.01.18	Data Kesehatan Jamaah Haji	SISKOHATKES	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Jamaah Haji	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.19	Data Pembinaan Pos UKK	SITKO	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Kerja Pos UKK	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.20	Data Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	TAKELMAS	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Masyarakat	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.21	Data Kesehatan Olahraga	SITKO	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Olahraga	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.22	Data Kesehatan Remaja		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Remaja	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.23	Data Yankestrad		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kesehatan Tradisional	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.24	Data Kusta		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kusta dan Frambusia	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.25	Data Frambusia		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Kusta dan Frambusia	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 04.01.26	Data Laboratorium		Terbatas	Realtime	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Layanan Laboratorium Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.27	Data Pasien Penyalahguna Napza	SIMKESWA	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Napza	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.28	Data Pelaporan Gizi	SIGIZI Terpadu	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pelaporan Gizi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.29	Data Pendaftaran Pasien		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pendaftaran Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.30	Data Skrining Penyakit Tidak Menular	SIPTM	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Penyakit Tidak Menular	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.31	Data Promosi Kesehatan		Terbuka	Bulanan	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Promosi Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.32	Data Penyakit Rabies		Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Penanganan Rabies	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.33	Data Pasien Rapid Antigen	ALLRECORD ANTIGEN	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Rapid Antigen	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 04.01.34	Data Skrining Malaria	e-Sismal	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan RDT Malaria	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.35	Data Sarana Prasarana Kesehatan	ASPAK	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.36	Data Tuberkulosis	SITB	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Tuberkulosis	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.37	Data Stunting	e-HDW AKSI BANGDA KEMENDAGRI	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pencegahan Stunting	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.38	Data Pencegahan Stunting	e-HDW AKSI BANGDA KEMENDAGRI	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pencegahan Stunting	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.39	Data Kematian Ibu	MPDN	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Informasi Mortalitas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.40	Data Kematian Anak	MPDN	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Informasi Mortalitas	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 04.01.41	Data Status Gizi	SIGIZI Terpadu	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Penanganan Gizi	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.06.01	Data SDM Kesehatan	SISDMK	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan SDM Kesehatan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 10.02.01	Data Penilaian Kinerja Puskesmas		Terbatas	Realtime	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Capaian PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 10.02.02	Data Capaian Indikator Nasional Mutu	INM	Terbatas	Realtime	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Implementasi Indikator Nasional Mutu	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 10.04.01	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBUT	Terbatas	Realtime	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Kesehatan
MURA-DAD 02.03.01	Data Bantuan Stunting		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	Layanan Bantuan Stunting	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.02	Data Gerakan Pangan Murah		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Gerakan Pangan Murah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.03	Data Cadangan Pangan		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Cadangan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.04	Data Pertanian Keluarga		Terbatas	Realtime	Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan	Layanan Pertanian Keluarga	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.05	Data Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.06	Data Sertifikasi Keamanan Pangan Segar		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.07	Data Perizinan Keamanan Pangan Segar		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Perizinan Keamanan Pangan Segar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							INDUSTRI		
MURA-DAD 02.03.08	Data Sosialisasi Keamanan Pangan Segar		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.09	Data Penguatan Keamanan Pangan Segar		Terbatas	Realtime	Pengawasan Keamanan Pangan	Layanan Penguatan Keamanan Pangan Segar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 02.03.10	Data Pengentasan Kerawanan Pangan		Terbatas	Realtime	Penanganan Kerawanan Pangan	Layanan Pengentasan Kerawanan Pangan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAD 09.03.01	Data Berita dan Informasi Publik	Sistem Informasi Berita dan Informasi Publik	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Berita dan Informasi Publik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.03.02	Data Media Publikasi	Sistem Informasi Pengumuman Kabupaten Murung raya	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Media Publikasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.03.03	Data PPID	PPID	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan PPID	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.03.04	Data Statistik Sektoral		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Layanan Statistik Sektoral	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.03 DATA INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.04.01	Data Virtual Private Server	PROXMOX	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Virtual Private Server	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.04.02	Data Jaringan Intra Pemerintah	Sistem Informasi Jaringan Intra	Tertutup	Realtime	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.04 DATA KOMUNIKASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
		Pemerintah							
MURA-DAD 09.06.01	Data Tanda Tangan Elektronik	BSRE	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Sertifikat Elektronik	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 09.06.02	Data Evaluasi SPBE	Tauval SPBE	Terbuka	Tahunan	Pengembangan Ekosistem SPBE	Layanan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 10.02.01	Data Website Pemerintah	Sistem Informasi Hosting dan Sub-Domain	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Hosting dan Sub Domain	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 10.04.01	Data Email Pemerintah	e-Mail	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Layanan Email Pemerintah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 10.04.02	Data Aduan dan Aspirasi	SP4N Laporan	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAD 02.02.01	Data Operasi Pasar		Terbatas	Realtime	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Layanan Operasi Pasar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.02.02	Data Ketersediaan Bahan Pokok di Daerah		Terbatas	Realtime	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Layanan Ketersediaan Bahan Pokok Daerah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.09.01	Data Pelatihan Koperasi		Terbatas	Realtime	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Layanan Pelatihan Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.09.02	Data Penilaian Indeks Koperasi		Terbatas	Realtime	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Penilaian Indeks Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
									Perdagangan
MURA-DAD 02.09.03	Data Koperasi		Terbatas	Realtime	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Layanan Pendataan Koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.10.01	Data Pelatihan Bahan Baku Menjadi Bahan Jadi		Terbatas	Realtime	Pengembangan UMKM	Layanan Pelatihan Bahan Baku Menjadi Bahan Jadi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.10.02	Data Pelatihan UKM		Terbatas	Realtime	Pengembangan UMKM	Layanan Pelatihan UKM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 02.10.03	Data UMKM		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Usaha Mikro	Layanan Pendataan UMKM	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAD 07.05.01	Data Pengelolaan Sampah	Sistem Informasi Persampahan Nasional	Terbuka	Realtime	Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 07.05.02	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	National Water and Sanitation Information Service (NAWASIS)	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Persampahan	Layanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 07.05.03	Data Penerimaan Retribusi Kebersihan/Persampahan	FMIS	Terbatas	Enam Bulanan	Pengelolaan Persampahan	Layanan Pengelolaan Sampah	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 07.05.04	Data Ketaatan Dokumen Lingkungan		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Persampahan	Layanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN	Dinas Lingkungan Hidup

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
						Sampah	SUMBER DAYA ALAM	HIDUP	
MURA-DAD 07.05.05	Data Indeks Lingkungan Hidup	IKLH	Terbuka	Harian	Pengelolaan Persampahan	Layanan Retribusi Kebersihan/Persampahan	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 07.05.06	Data Pengelolaan Lingkungan Hidup	SIRAJA LIMBAH	Terbuka	Realtime	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 07.05.07	Data Pembuatan SPPL	OSS	Terbatas	Realtime	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Layanan Rekomendasi Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	RAD.07 INFORMASI LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RAD.07.05 DATA LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAD 02.11.01	Data Potensi Destinasi Wisata	Rekreasi Murung Raya	Terbuka	Realtime	Pemasaran Pariwisata	Layanan Potensi Destinasi Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 02.11.02	Data Pengunjung Wisata	Rekreasi Murung Raya	Terbuka	Realtime	Pemasaran Pariwisata	Layanan Potensi Destinasi Wisata	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 02.11.03	Data Pelaku Ekonomi Kreatif		Terbatas	Realtime	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Ekonomi Kreatif	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 02.11.04	Data Sarana Hibah		Terbatas	Realtime	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Layanan Sarana Hibah	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 06.04.01	Data Organisasi Pemuda		Terbuka	Realtime	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Organisasi Pemuda	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 06.04.02	Data Wirausaha Muda		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Layanan Wirausaha Muda	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.04 DATA PEMUDA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 06.05.01	Data Sewa Sarana Olahraga		Terbuka	Realtime	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Layanan Sewa Sarana Olahraga	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.05 DATA OLAHRAGA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAD 03.01.01	Data Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	Terbatas	Realtime	Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.01.02	Data Peminjaman Alat Berat		Terbatas	Realtime	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Peminjaman Alat Berat	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.01.03	Data Pembangunan Jalan		Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Jalan	Layanan Pembangunan Jalan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.01.04	Data Perbaikan Jalan Rusak		Terbatas	Bulanan	Penyelenggaraan Jalan	Layanan Perbaikan Jalan Rusak	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.01.05	Data Saluran Irigasi		Terbuka	Bulanan	Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Daerah Irigasi	Layanan Saluran Irigasi	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.01.06	Data Pelatihan Jasa Konstruksi	SIPJAKI	Terbatas	Bulanan	Pengembangan Jasa Konstruksi	Layanan Pelatihan Jasa Konstruksi	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 10.03.01	Data Pemetaan Wilayah		Terbuka	Bulanan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Layanan Pemetaan Wilayah	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.03 DATA KEWILAYAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAD 03.05.01	Data Teknologi Tepat Guna		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Teknologi Tepat Guna	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 03.05.02	Data Kelembagaan Desa		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Kelembagaan Desa	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								TERTINGGAL	
MURA-DAD 03.05.03	Data KPM		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 03.05.04	Data Pengelolaan BUMDES		Terbatas	Realtime	Peningkatan Kerjasama Desa	Layanan BUMDES	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.05 DATA PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 09.02.01	Data Pengelolaan Keuangan Desa	SISKEUDES	Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.02 DATA KEUANGAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 10.02.01	Data Konsultasi Kepala Desa		Terbatas	Realtime	Peningkatan Kerjasama Desa	Layanan Konsultasi Kepala Desa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 10.04.01	Data Pelantikan Pejabat Desa		Terbatas	Realtime	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Layanan Pelantikan Pejabat Desa	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAD 03.07.01	Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga	SIMPONI PPA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 03.07.02	Data Keluarga Berencana	NEW SIGA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Keluarga Berencana	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 03.07.03	Data Informasi Keluarga	NEW SIGA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Informasi Data Keluarga	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 03.07.04	Data Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	NEW SIGA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 03.07.05	Data Distribusi Alkon	SIRIKA	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Distribusi Alkon	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 03.07.06	Data Rumah Kependudukan	RDK	Terbatas	Realtime	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Layanan Rumah Data Kependudukan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.07 DATA KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 04.03.01	Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	SIMPONI PPA	Terbatas	Realtime	Perlindungan Khusus Anak	Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.03 DATA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAD 02.08.01	Data Perizinan Berusaha	OSS	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.02	Data Persyaratan Perizinan	OSS	Terbuka	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.03	Data Nomor Induk Berusaha	OSS	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							INDUSTRI		Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.04	Data Tanda Daftar Gudang	OSS	Terbatas	Realtime	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Tanda Daftar Gudang (TDG)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.05	Data Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan	OSS	Terbatas	Realtime	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.06	Data Perizinan Non Berusaha	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.07	Data Persyaratan Perizinan Non Berusaha	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.08	Data Persetujuan Teknis	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.09	Data Surat Keputusan Perizinan	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pelayanan Penanaman Modal	Layanan Perizinan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.10	Data Peta Potensi Investasi		Terbuka	Realtime	Promosi Penanaman Modal	Layanan Peta Potensi Investasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.11	Data Konsultasi Perizinan		Terbuka	Realtime	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.12	Data Pembinaan Penanaman Modal		Terbuka	Realtime	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Pembinaan Pengendalian Modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.13	Data Pengawasan Penanaman Modal		Terbatas	Realtime	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Pengawasan Pengendalian Modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 02.08.14	Data Pemantauan Pengendalian Modal		Terbatas	Realtime	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Layanan Pemantauan Pengendalian Modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.15	Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 02.08.16	Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	Terbatas	Realtime	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAD 06.01.01	Data Pendidikan Usia Dini	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pendidikan Anak Usia Dini	Layanan Pendidikan Usia Dini	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 06.01.02	Data Pendidikan Non Formal	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pendidikan Non Formal	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 06.01.03	Data Pendidikan Dasar (SD - SMP)	DAPODIK	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Pendidikan Dasar (SD - SMP)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 06.01.04	Data Legalisir Ijazah		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Legalisir Ijazah	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 06.01.05	Data Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Verval SP	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pendidikan	Layanan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 08.02.01	Data Kebudayaan		Terbuka	Realtime	Pengelolaan Kebudayaan	Layanan Kebudayaan	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 08.02.02	Data Kesenian		Terbuka	Realtime	Pembinaan Kesenian Masyarakat	Layanan Kesenian	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 08.02.03	Data Pembinaan Kelompok Seni		Terbuka	Realtime	Pembinaan Kesenian Masyarakat	Layanan Pembinaan Kelompok Seni	RAD.08 INFORMASI BUDAYA DAN AGAMA	RAD.08.02 DATA KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAD 03.03.01	Data Uji Kendaraan Bermotor	SIM PKB	Terbatas	Realtime	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Layanan Uji Kendaraan Bermotor	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 03.03.02	Data Retribusi Tambat Labuh		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Pelayaran	Layanan Jasa Kepelabuhanan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 03.03.03	Data Rekomendasi Izin Angkutan		Terbatas	Realtime	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Layanan Rekomendasi Izin Angkutan Trayek	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 03.03.04	Data Rekomendasi Izin Angkutan Plat Kuning		Terbatas	Realtime	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Layanan Rekomendasi Izin Angkutan Plat Kuning	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 03.03.05	Data Perizinan Parkir		Terbatas	Realtime	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Layanan Permohonan Perizinan Parkir	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 03.03.06	Data Informasi Kecelakaan		Terbuka	Realtime	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Layanan Informasi Data Kecelakaan	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.03 DATA TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAD 06.01.01	Data Jumlah Layanan Perpustakaan Digital	iMurungraya	Tertutup	Realtime	Pengembangan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Digital	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 06.01.02	Data Perpustakaan Keliling		Terbuka	Realtime	Pengembangan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 06.01.03	Data Pengelolaan Perpustakaan	INLISLite	Terbatas	Realtime	Pengembangan Perpustakaan	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.01 DATA PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.06.01	Data Arsip Dinamis	SRIKANDI e-Office	Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Kearsipan Dinamis	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 09.06.02	Data Buku Ekspedisi		Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Kearsipan Dinamis	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 09.06.03	Data Agenda Keluar		Terbatas	Lainnya	Pengelolaan Arsip Dinamis	Layanan Kearsipan Dinamis	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 10.02.01	Data Pengguna Arsip	SIKN JIKN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Informasi Arsip Statis	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 10.02.02	Data Pengelolaan Arsip		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip	Layanan Pengelolaan Arsip	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 10.02.03	Data Alih Media		Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip	Layanan Pengelolaan Arsip	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 10.04.01	Data Jumlah Arsip	SIKN JIKN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Informasi Arsip Statis	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 10.04.02	Data Jumlah Pengunjung	SIKN JIKN	Terbatas	Realtime	Pengelolaan Arsip Statis	Layanan Informasi Arsip Statis	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAD 02.03.01	Data Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	IDENTIK PKH	Tertutup	Bulanan	Pengendalian Kesehatan Hewan	Layanan Pendataan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.03.02	Data Jumlah Nelayan Tradisional	Satu Data KKP	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD	Data Kelembagaan Petani	SIMLUHTAN	Terbatas	Bulanan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Pendaftaran	RAD.02 INFORMASI	RAD.02.03 DATA	Dinas Pertanian dan

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
02.03.03						Kelompok Tani	EKONOMI DAN INDUSTRI	PERTANIAN	Perikanan
MURA-DAD 02.03.04	Data Penyuluhan Pertanian	SIMLUHTAN	Terbatas	Bulanan	Penyuluhan Pertanian	Layanan Penyuluhan Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.03.05	Data Penyediaan Sarpras Pertanian		Terbatas	Bulanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Layanan Penyediaan Sarpras Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.04.01	Data Kelompok Tani Perkebunan	SIMLUHTAN	Terbatas	Bulanan	Pembinaan Perkebunan Regional	Layanan Penyuluhan Perkebunan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.04 DATA PERKEBUNAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.05.01	Data Kesehatan Hewan Ternak	iSIKHNAS	Tertutup	Bulanan	Pengendalian Kesehatan Hewan	Layanan Kesehatan Hewan Ternak	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.06.01	Data Pembudidaya Ikan	Satu Data KKP	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 02.06.02	Data Pengolah Hasil Perikanan	Satu Data KKP	Terbatas	Bulanan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Layanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAD 03.01.01	Data Drainase		Terbatas	Realtime	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Layanan Drainase	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 03.04.01	Data Penyediaan Rumah Layak Huni		Terbatas	Realtime	Pengembangan Perumahan	Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 03.04.02	Data Informasi Rumah Layak Huni		Terbatas	Realtime	Pengembangan Perumahan	Layanan Informasi Rumah Layak Huni	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 03.04.03	Data Penyediaan Rumah Korban Bencana		Terbatas	Realtime	Pengembangan Perumahan	Layanan Penyediaan Rumah Korban Bencana	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 03.04.04	Data Kawasan Kumuh		Terbatas	Realtime	Kawasan Permukiman	Layanan Pencatatan Kawasan Kumuh	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 03.04.05	Data Pengerjaan Konstruksi Pemukiman		Terbatas	Realtime	Kawasan Permukiman	Layanan Pengerjaan Konstruksi Pemukiman	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.04 DATA PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 03.06.01	Data Fasilitas dan Kompilasi Tanah Masyarakat		Terbatas	Realtime	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Layanan Fasilitas dan Kompilasi Data Tanah Masyarakat	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.06 DATA PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAD 04.02.01	Data Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Tenaga Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.02	Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Rehabilitasi Sosial	Layanan Rehabilitasi Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.03	Data Rekomendasi Bantuan Sosial		Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Rekomendasi Bantuan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.04	Data Kartu Indonesia Sehat (KIS)	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.05	Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.06	Data Program Keluarga Harapan (PKH)	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							KESEHATAN		
MURA-DAD 04.02.07	Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.08	Data Penerima Bantuan Sosial	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penanganan Fakir Miskin	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.09	Data Makam Pahlawan	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Penerima Bantuan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.10	Data Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 04.02.11	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG	Terbatas	Realtime	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.02 DATA SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAD 03.02.01	Data Transmigrasi		Terbatas	Realtime	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Layanan Transmigrasi	RAD.03 PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.02 DATA TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAD 06.02.01	Data Kartu Pencari Kerja	KarirHub	Terbatas	Realtime	Penempatan Tenaga Kerja	Layanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAD 06.02.02	Data Pelatihan Berbasis Kompetensi		Terbatas	Realtime	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAD 06.02.03	Data Pengesahan Peraturan Perusahaan		Terbatas	Realtime	Hubungan Industrial	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							TENAGA KERJA	AAN	
MURA-DAD 06.02.04	Data Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama		Terbatas	Realtime	Hubungan Industrial	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	RAD.06 INFORMASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KERJA	RAD.06.02 DATA KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAD 10.04.01	Data Pendaftaran Perusahaan		Terbatas	Realtime	Hubungan Industrial	Layanan Pendaftaran Perusahaan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAD 09.06.01	Data Aduan Berindikasi Korupsi		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Aduan Berindikasi Korupsi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.02	Data Angka Kredit dan Diklat APIP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Angka Kredit dan Diklat APIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.03	Data Manajemen Risiko		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Evaluasi Manajemen Risiko	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.04	Data Dokumen Laporan Gratifikasi		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pelaporan Tindakan Gratifikasi	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.05	Data Daftar Konsultasi Pelayanan Pemerintah		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Konsultasi Pelayanan Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.06	Data Pengawasan APIP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan APIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.07	Data SPIP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan SPIP	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.06.08	Data Status Tindak Lanjut Pengawasan		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Tindak Lanjut Pengawasan	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.06 DATA APARATUR NEGARA	Inspektorat

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.07.01	Data Profile Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.02	Data Peta Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.03	Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.04	Data Pokok Pokok Hasil Pengawasan		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.05	Data Koreksi Intern Kepala Daerah		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.06	Data Form Rekap Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.07	Data Dokumen Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.08	Data Form Evaluasi Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.09	Data Laporan Hasil Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.10	Data Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.11	Data Surat Permohonan Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT	Inspektorat

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
							UMUM	AN NEGARA	
MURA-DAD 09.07.12	Data Surat Tugas		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.13	Data Program Kerja Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.14	Data Kertas Kerja Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.15	Data Konsep LHP		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.16	Data Laporan Hasil Pemeriksaan Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.17	Data Dokumen Draft Temuan Sementara		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.18	Data Dokumen Draft Temuan Akhir		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.19	Data BA Kesepakatan Hasil Temuan dan Tindak Lanjut		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.20	Data Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.21	Data Kartu Penugasan Audit		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 09.07.22	Data Formulir Anggaran Waktu		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.23	Data Surat Pernyataan Independensi		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.24	Data Surat Permintaan Dokumen		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 09.07.25	Data Pemeriksaan Pendahuluan		Tertutup	Realtime	Penyelenggaraan Pengawasan	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 INFORMASI PEMERINTAHAN UMUM	RAD.09.07 DATA KESEKRETARIAT AN NEGARA	Inspektorat
MURA-DAD 04.01.01	Data Pendaftaran Online Pasien	AMANG RSUD	Terbatas	Harian	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Pendaftaran Online Pasien	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 04.01.02	Data Klaim BPJS	PCare	Terbatas	Realtime	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Penjaminan Klaim BPJS	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 04.01.03	Data Rekam Medik		Tertutup	Harian	Pemenuhan UKP dan UKM	Layanan Pemeriksaan Laboratorium	RAD.04 INFORMASI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAD.04.01 DATA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.01	Data Laporan Keuangan	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.02	Data Laporan Rekam Medik	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.03	Data Register Pasien	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN	Rumah Sakit Umum Daerah

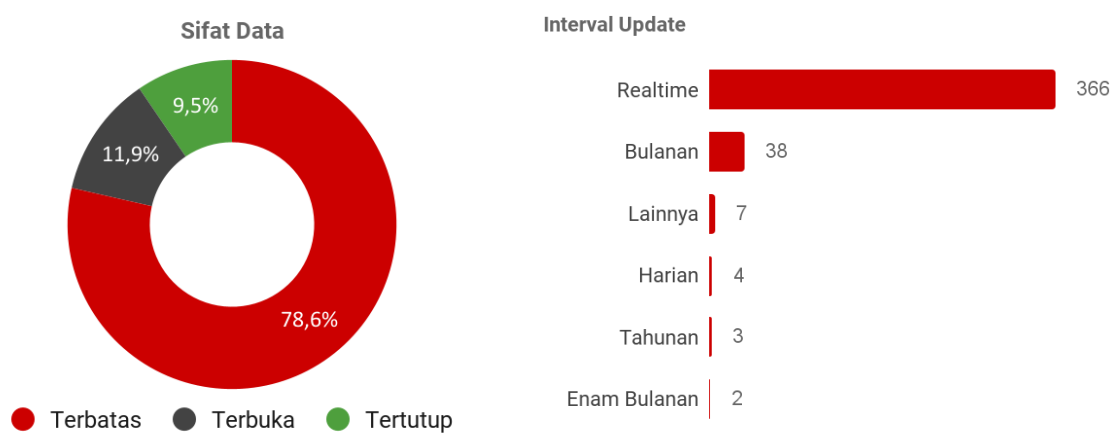
ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
								KEGIATAN	
MURA-DAD 10.02.04	Data SIRS	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.05	Data Laporan Rawat Jalan	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.06	Data Laporan Rawat Inap	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.07	Data Laporan Penunjang	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.08	Data Laporan Grafik	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.09	Data Laporan Gudang Farmasi	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.10	Data Laporan Waktu Tunggu	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.11	Data Laporan Apotek	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.12	Data Laporan IBS	SIMRS	Terbatas	Bulanan	Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan	Layanan Manajemen RSUD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 10.02.13	Data Laporan Indikator Mutu		Terbatas	Realtime	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Indikator Mutu	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Rumah Sakit Umum Daerah

ID Data	Data	Aplikasi	Sifat Data	Validitas Data	← Proses Bisnis (Dependency)	→ Layanan (Dependency)	→ RAD Level 1 (Dependency)	→ RAD Level 2 (Dependency)	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)
MURA-DAD 10.04.01	Data Kepuasan Pelanggan		Terbatas	Realtime	Operasional Pelayanan Kesehatan	Layanan Kepuasan Pelanggan	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAD 05.02.01	Data Pelatihan Linmas		Terbatas	Realtime	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Layanan Pelatihan Linmas	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAD 05.02.02	Data Penertiban Reklame		Terbatas	Realtime	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penertiban Reklame	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAD 05.02.03	Data Penertiban PKL		Terbatas	Realtime	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Penertiban PKL	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAD 05.02.04	Data Pengendalian Kebakaran		Terbatas	Realtime	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Layanan Pengendalian Kebakaran	RAD.05 INFORMASI KETERTIBAN UMUM DAN KESELAMATAN	RAD.05.02 DATA KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAD 10.02.01	Data Administrasi DPRD		Terbatas	Realtime	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Administrasi Kesekretariatan DPRD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Sekretariat DPRD
MURA-DAD 10.02.02	Data Penyelenggaraan Rapat		Terbatas	Realtime	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Fasilitas Penyelenggaraan Rapat DPRD	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.02 DATA MANAJEMEN KEGIATAN	Sekretariat DPRD
MURA-DAD 10.04.01	Data Penyediaan dan Koordinasi Tenaga Ahli		Terbatas	Realtime	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Layanan Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Sekretariat DPRD
MURA-DAD 10.04.02	Data Jaring Aspirasi		Terbatas	Realtime	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Layanan Jaring Aspirasi	RAD.10 DATA PENDUKUNG UMUM	RAD.10.04 DATA DUKUNG LAINNYA	Sekretariat DPRD



3.2.2.2. Analisis Katalog Data dan Informasi

Merujuk pada hasil pemetaan data dan informasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data Tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut.



Grafik 3.2.2.2.1. Grafik Jumlah Daftar Data dan Informasi Berdasarkan Sifat dan Interval Update

Berdasarkan grafik 3.2.2.2.1. menunjukkan bahwa terdapat 420 data pokok *eksisting* yang berada di Pemerintah Kabupaten Murung Raya dengan 330 data (78,6%) merupakan data yang bersifat terbatas, 50 Data (11,9%) merupakan data yang bersifat terbuka, 40 Data (9,5%) merupakan data yang bersifat tertutup. Merujuk grafik di atas dapat dilihat bahwa mayoritas data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya memiliki sifat terbatas atau dapat diartikan bahwa pemilik data hanya dapat membagikan data tersebut dengan akses data yang terbatas.

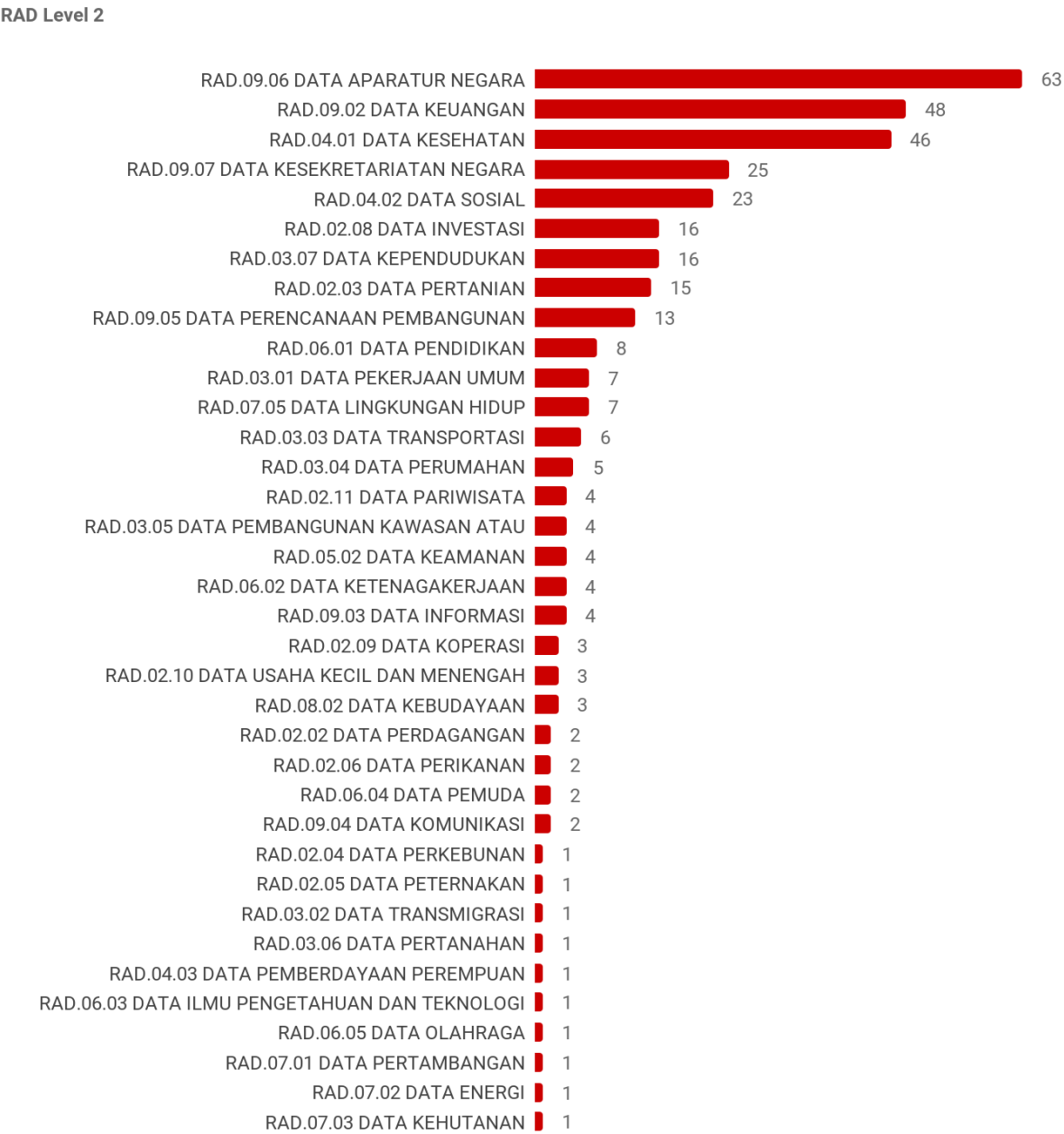
Adapun dari 420 data pokok mayoritas, sebanyak 366 data merupakan data dengan interval *update realtime*, 38 data merupakan data dengan interval *update Bulanan*, dan 7 data merupakan data dengan interval *update Lainnya*, serta Interval *update data* terendah dengan interval *update Enam Bulanan sejumlah 2 data*. Secara umum, mayoritas data di Kabupaten Murung Raya harus di *update* secara *realtime* sehingga diperlukan digitalisasi proses bisnis untuk memudahkan pemrosesan pengolahan data.



Grafik 3.2.2.2.2. Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.2. mayoritas data didominasi oleh RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum sejumlah 155 Data, RAD.10 Data Pendukung Umum sejumlah 74 Data dan RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan sejumlah 70 Data. Sedangkan RAD.08 Informasi Budaya dan Agama dengan jumlah 4 data merupakan data RAD yang paling sedikit.

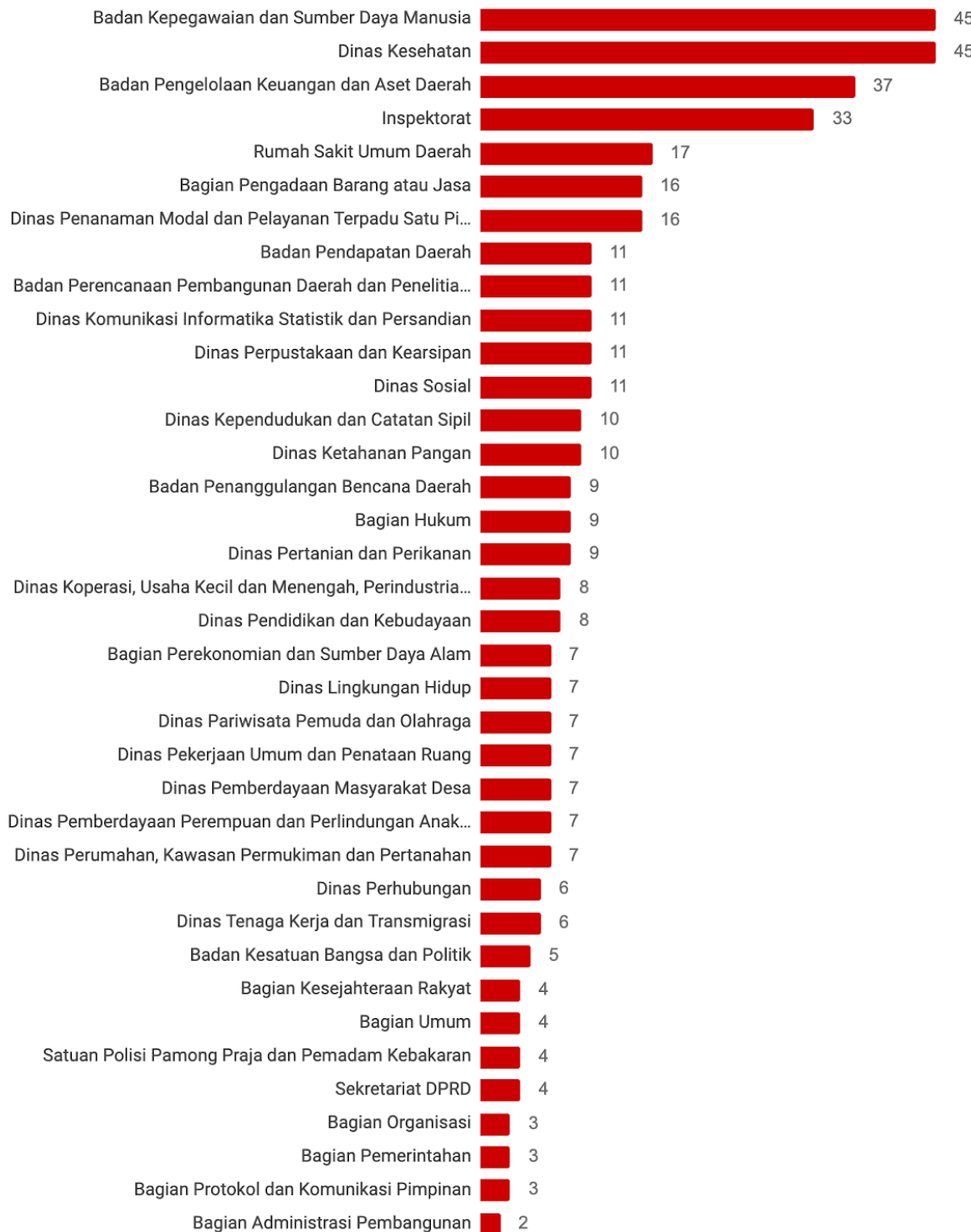
Kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan dan inovasi daftar metadata arsitektur data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.



**Grafik 3.2.2.2.3.** Grafik Jumlah Daftar Data berdasarkan RAD Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.3. menunjukkan bahwa RAD level 2 didominasi oleh, RAD.09.06 Data Aparatur Negara sejumlah 63 data, RAD.09.02 Data Keuangan sejumlah 48 data. Sedangkan paling sedikit, yaitu: RAD.07.03 Data Kehutanan sejumlah 1 data. Merujuk pada referensi arsitektur data Nasional yang berjumlah 49 referensi, referensi arsitektur data Kabupaten Murung Raya terdiri atas 41 Referensi Arsitektur Data Nasional, sementara 8 referensi lainnya bukan merupakan referensi/urusan pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Produsen Data/Penanggung Jawab Data



Grafik 3.2.2.2.4. Grafik Jumlah Daftar Data di Perangkat Daerah

Berdasarkan Grafik 3.2.2.2.4. menunjukkan bahwa mayoritas data terbanyak dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia dengan jumlah 45 data. Data paling sedikit yaitu pada Bagian Administrasi Pembangunan yang memiliki jumlah 2 data. Oleh karena itu, perlu evaluasi dan inventarisasi data di masing-masing perangkat daerah untuk memvalidasi apakah data yang dimiliki telah sesuai.

3.2.3.    **Arsitektur Layanan SPBE**

Layanan SPBE dapat memberikan manfaat seperti mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan, serta memberikan akses yang lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan layanan. Secara umum, arsitektur layanan menggambarkan kondisi mengenai layanan yang dihadirkan pada masing-masing perangkat daerah sesuai proses bisnis utamanya.

3.2.3.1.   **Katalog Layanan**

Katalog ini berisi layanan merupakan proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (*customer*), baik itu internal (perangkat daerah, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh perangkat daerah, dimana RAL Level 1 dan 2 mengacu pada kodifikasi referensi arsitektur layanan SPBE Nasional sedangkan Level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh perangkat daerah. Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 276 layanan dimana 121 layanan (43,84%) telah terdigitalisasi. Tabel 3.2.3.1.1. merupakan ringkasan dari katalog layanan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun katalog layanan selengkapnya ditunjukkan pada link: [bit.ly/metadataspbemurungraya](https://bit.ly/metadataspbemurungraya).

**Tabel 3.2.3.1.1.** Katalog Layanan yang dikelola oleh perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Murung raya

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 02.04.01	Layanan Presensi ASN	Data Presensi ASN	e-Presensi	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.02	Layanan Cuti ASN	Data Cuti PNS	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.03	Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	Data Jabatan Fungsional ASN Data Usulan Alih Jenjang Jabatan Data Kompetensi Data SK Alih Jenjang Jabatan Data Usulan Kenaikan Pangkat Data SK Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional Data Usulan Kenaikan Jabatan Data Hasil Uji Kompetensi	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data SK Kenaikan Jabatan				
MURA-DAL 02.04.04	Layanan Pemutakhiran Data Kepegawaian	Data Kepegawaian ASN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.05	Layanan Pensiun ASN	Data Pensiun ASN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.06	Layanan Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Data Penerima Satyalancana Karya Satya	ULA Kemendagri	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.07	Layanan Karis/Karsu	Data Karis/Karsu PNS	SIAPEK BKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.08	Layanan Mutasi ASN	Data Mutasi ASN		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.09	Layanan Pencantuman Gelar	Data Gelar Pendidikan ASN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.10	Layanan Izin Belajar ASN	Data Izin Belajar ASN		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.11	Layanan Tugas Belajar ASN	Data Tugas Belajar ASN		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.12	Layanan Penilaian Kinerja ASN/BAPERJAKAT	Data Nominasi ASN	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.13	Layanan Kinerja ASN	Data Kinerja ASN	e-Kinerja BKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.14	Layanan Pemberhentian Pegawai	Data Pemberhentian Pegawai Data Usulan Pemberhentian Data SK Pemberhentian Data Persetujuan Teknis Pemberhentian	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.15	Layanan Disiplin Pegawai	Data Disiplin ASN Data SK Hukuman Disiplin Data SK Hukuman Ringan Data Perintah Pemeriksaan Data BAP Pemeriksaan Data BAP Perangkat Daerah	i'DIS BKN SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.16	Layanan Tambahan Penghasilan	Data TPP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.02.04 APARATUR	Badan Kepegawaian dan Sumber

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
	Pegawai (TPP)			PEMERINTAHAN	NEGARA	Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.17	Layanan Kenaikan Gaji Berkala	Data Kenaikan Gaji Berkala		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.18	Layanan Profil Pegawai	Data Profil Pegawai	SIMPEGNAS SIMPEG	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.19	Layanan Kebutuhan ASN	Data Formasi ASN Data Usulan Formasi Data SK Penetapan Formasi Data SK Pengangkatan ASN Data SK Persetujuan Teknis Data Pemberkasan CASN Data CASN Data SK Pengangkatan CASN	SSCASN e-Formasi Menpan SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 02.04.20	Layanan Kenaikan Pangkat/Golongan	Data Jenjang Pangkat/Golongan ASN Data SK Kenaikan Pangkat Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat	SIASN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAL 01.24.01	Layanan Pendaftaran SKT Ormas	Data Surat Keterangan Terdaftar Ormas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.24 PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAL 01.24.02	Layanan Verifikasi Partai Politik	Data Partai Politik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.24 PEMERINTAH DAERAH	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAL 01.25.01	Layanan P4GN dan PN	Data P4GN Data PN		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAL 01.33.01	Layanan Izin Penelitian	Data Izin Penelitian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.33 ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
MURA-DAL 01.26.01	Layanan Sosialisasi Kebencanaan	Data Kebencanaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.02	Layanan Evakuasi Korban Bencana	Data Evakuasi Korban bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.03	Layanan Distribusi Bantuan	Data Distribusi Bantuan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.26.04	Layanan Pasca Bencana	Data Kerugian Pasca Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.05	Layanan Distribusi Sarpras Kebencanaan	Data Distribusi Sarana Prasarana Kebencanaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.06	Layanan Pelatihan Kebencanaan	Data Pelatihan Kebencanaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.07	Layanan Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana	Data Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.08	Layanan Monev Bencana	Data Evaluasi Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.26.09	Layanan Bantuan Kebencanaan	Data Bantuan Kebencanaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MURA-DAL 01.04.01	Layanan Pajak PBB	Data Pajak PBB	SISMIOP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 01.04.02	Layanan BPHTB	Data BPHTB Data SSPD Data Laporan Pembayaran BPHTB	SISMIOP e-BPHTB e-CIS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 01.04.03	Layanan Pajak PBB-P2	Data SPPT Data Objek PBB P2 Data Subjek PBB P2	SIMPBB e-SPPT	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 01.04.04	Layanan Penagihan Pajak Retribusi	Data Penagihan Pajak Retribusi	SIMDA Pendapatan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 02.02.01	Layanan Perhitungan PBB	Data Perhitungan PBB		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 02.02.02	Layanan Perhitungan Penghasilan Daerah	Data Perhitungan Penghasilan Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 02.02.03	Layanan Pengkajian Peraturan Pajak Daerah	Data Pengkajian Pajak Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAL 02.02.04	Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah	Data Pengelolaan Keuangan Daerah Data SPJ Data SPP Data SPM	FMIS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data STS Data BKU Data Perda Pertanggungjawaban APBD Data Perbup Penjabaran APBD Data SPTJM SPM				
MURA-DAL 02.02.05	Layanan Pencairan Dana Desa dan ADD	Data Dana Desa	SIMSTRADA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.06	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Barang Milik Daerah Data Pemanfaatan Barang Milik Daerah Data Penghapusan Barang Milik Daerah Data Belanja Modal Data Belanja Habis Pakai Data Kartu Inventaris Barang Data Kartu Inventaris Ruangan Data BA Rekonsiliasi Aset Tetap Data Usulan Pemanfaatan Barang Data Perjanjian Kerjasama Data MoU Pemanfaatan Aset Data SK Lelang Data SK Hibah Data Risalah Lelang	SIMDA BMD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.07	Layanan Pengelolaan Barang Persediaan	Data Barang Persediaan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.08	Layanan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Data SPD	FMIS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.09	Layanan Penerbitan SP2D	Data SP2D	FMIS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.10	Layanan Penyusunan Standar Satuan Harga	Data Standart Satuan Harga	SIPD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 02.02.11	Layanan Penyusunan Anggaran	Data KUA Data PPAS Data Penganggaran Data DPA Data Anggaran Kas Data RKA OPD Data RAPBD	SIPD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.02.12	Layanan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Data RKBMD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.04.01	Layanan Arsip BPKB Kendaraan Dinas	Data Kendaraan Dinas		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAL 02.03.01	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Data Dokumen Perencanaan Data SK Tim Rancangan Teknokratik Data Rancangan Teknokratik RPJMD Data Rancangan RPJMD Data Perda RPJMD	SIPD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.02	Layanan Monev Dokumen Perencanaan	Data Monev Dokumen Perencanaan	SIPD	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.03	Layanan Monitoring DAK	Data Monitoring DAK		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.04	Layanan DAK	Data DAK	KRISNA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.05	Layanan Kelitbangan	Data Pengembangan Inovasi dan Teknologi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.06	Layanan Monev Pembangunan Daerah	Data Pembangunan Daerah	e-Monev Bangda	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.07	Layanan Monev Infrastruktur dan Kewilayahan	Data Infrastruktur dan Kewilayahan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAL 02.03.08	Layanan Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran	Data Realisasi Anggaran		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Bagian Administrasi Pembangunan
MURA-DAL 02.03.09	Layanan Monitoring Konstruksi Fisik	Data Monitoring Pembangunan Fisik		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	Bagian Administrasi Pembangunan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.28.01	Layanan Bantuan Hukum	Data Bantuan Hukum		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	Bagian Hukum
MURA-DAL 01.28.02	Layanan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Data Produk Hukum Daerah	JDIH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.28 HUKUM	Bagian Hukum
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Penyusunan Dokumen Produk Hukum Daerah	Data Draft Produk Hukum Daerah Data Harmonisasi Data Draft Perbup Data Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Data Perbup Data Naskah Akademik Produk Hukum Data Nomor Registrasi Produk Hukum		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Hukum
MURA-DAL 01.26.01	Layanan Bantuan Skripsi dan Wisuda Mahasiswa Tidak Mampu	Data Bantuan Skripsi dan Wisuda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAL 01.26.02	Layanan Bantuan Penghulu dan Pendeta	Data Bantuan Penghulu dan Pendeta		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAL 01.26.03	Layanan Bantuan Lembaga Terdaftar	Data Bantuan Lembaga Terdaftar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAL 01.41.01	Layanan Bantuan Rumah Ibadah	Data Penerima Bantuan Rumah Ibadah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.41 AGAMA	Bagian Kesejahteraan Rakyat
MURA-DAL 02.07.01	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	e-SKM	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Organisasi
MURA-DAL 02.07.02	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP REVIU	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Organisasi
MURA-DAL 02.07.03	Layanan ANJAB ABK	Data ANJAB ABK	e-SIMONA	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.07 AKUNTABILITAS KINERJA	Bagian Organisasi
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pemerintahan
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Administrasi Kewilayahan	Data Administrasi Kewilayahan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pemerintahan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 02.08.01	Layanan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Data Kesepakatan Kerjasama		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA	Bagian Pemerintahan
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa Data Model Dokumen Pemilihan Data Kaji Ulang Data Dokumen Teknis Data Dokumen Kualifikasi Data Dokumen Administrasi Data Dokumen Penawaran Harga Data BA Hasil Non Tender Data Dokumen SPPBJ Data Dokumen Kontrak Data Dokumen PPK Data BA Kaji Ulang Data BA Hasil Tender	SPSE AMEL e-Katalog	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Penilaian Penyedia Barang dan Jasa	Data Penilaian Penyedia Barang dan Jasa	SIKAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAL 02.06.03	Layanan Rencana Umum Pengadaan	Data Rencana Umum Pengadaan	SIRUP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAL 02.06.04	Layanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Data Penyedia Barang dan Jasa	SIKAP	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAL 01.04.01	Layanan Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Data Bahan Penyusunan Kebijakan BUMD dan BLUD		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 01.04.02	Layanan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Data Pengendalian Distribusi Perekonomian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.04 EKONOMI	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 01.36.01	Layanan Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Data Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.36 PERTAMBANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 01.37.01	Layanan Kebijakan Energi dan Air	Data Kebijakan Energi dan Air		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.37 ENERGI	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 01.38.01	Layanan Kebijakan Pertanian dan Kehutanan	Data Kebijakan Pertanian dan Kehutanan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.38 KEHUTANAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 02.02.01	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro	Data Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 02.02.02	Layanan Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Data Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan	Data Fasilitasi Keprotokolan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Data Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAL 02.06.03	Layanan Publikasi Kegiatan Pimpinan	Data Publikasi Kegiatan Pimpinan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
MURA-DAL 02.06.04	Layanan Kunjungan Tamu	Data Kunjungan Tamu		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Umum
MURA-DAL 02.06.05	Layanan Fasilitasi Perlengkapan	Data Permohonan Peminjaman Aset		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Umum
MURA-DAL 02.06.06	Layanan Permohonan Konsumsi	Data Permintaan Dukungan Konsumsi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Umum
MURA-DAL 02.06.07	Layanan Pinjam Pakai Aset Sekretariat Daerah	Data Pinjam Pakai Aset Sekretariat Daerah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Bagian Umum
MURA-DAL 01.23.01	Layanan Administrasi Kependudukan	Data Kartu Keluarga Data Kartu Tanda Penduduk Data Kartu Identitas Anak Data Surat Keterangan Pindah Warga Negara Data Akta Kelahiran Data Akta Kematian Data Akta Perkawinan Data Akta Perceraian	SIAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAL 01.23.02	Layanan Penyediaan Data Kependudukan	Data Kependudukan	SIAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAL 01.23.03	Layanan Identitas Kependudukan Digital	Data Identitas Kependudukan Digital	IKD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAL 01.25.01	Layanan BPJS	Data Kepesertaan BPJS Data Kunjungan Pasien BPJS	PCare	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.25.02	Layanan Caregiver	Data Caregiver		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.03	Layanan DBD	Data Angka Bebas Jentik	SILANTOR	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.04	Layanan Diare	Data Balita Diare	SIHEPI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.05	Layanan Hepatitis	Data Hepatitis		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.06	Layanan Imunisasi	Data Imunisasi	SIPTM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.07	Layanan ISPA	Data ISPA		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.08	Layanan Kartu Identitas Berobat	Data Kartu Identitas Berobat	MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.09	Layanan Pengobatan Kecacingan	Data Pendistribusian Obat Cacing		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.10	Layanan Kefarmasian	Data Pengelolaan Farmasi Data Farmasi Klinis	SIMONA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.11	Layanan Kegawatdaruratan	Data Pasien Kegawatdaruratan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.12	Layanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi	Data Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.13	Layanan Kesehatan Anak Usia Sekolah	Data Kesehatan Anak Usia Sekolah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.14	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Data Kesehatan Gigi dan Mulut		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.15	Layanan Kesehatan Indera	Data Deteksi Dini/Skrining Indera	SIPTM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.16	Layanan Kesehatan Jamaah Haji	Data Kesehatan Jamaah Haji	SISKOHATKES	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.17	Layanan Kesehatan Kerja Pos UKK	Data Pembinaan Pos UKK	SITKO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.18	Layanan Kesehatan Masyarakat	Data Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	TAKELMAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.19	Layanan Kesehatan Olahraga	Data Kesehatan Olahraga	SITKO	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.20	Layanan Kesehatan Remaja	Data Kesehatan Remaja		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.25.21	Layanan Kesehatan Tradisional	Data Yankestrad		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.22	Layanan Kusta dan Frambusia	Data Kusta Data Frambusia		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.23	Layanan Laboratorium Kesehatan	Data Laboratorium		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.24	Layanan Napza	Data Pasien Penyalahguna Napza	SIMKESWA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.25	Layanan Pelaporan Gizi	Data Pelaporan Gizi	SIGIZI Terpadu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.26	Layanan Pendaftaran Pasien	Data Pendaftaran Pasien		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.27	Layanan Penyakit Tidak Menular	Data Skrining Penyakit Tidak Menular	SIPTM	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.28	Layanan Promosi Kesehatan	Data Promosi Kesehatan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.29	Layanan Penanganan Rabies	Data Penyakit Rabies		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.30	Layanan Rapid Antigen	Data Pasien Rapid Antigen	ALLRECORD ANTIGEN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.31	Layanan RDT Malaria	Data Skrining Malaria	e-Sismal	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.32	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	RENBut	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.33	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	Data Sarana Prasarana Kesehatan	ASPAK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.34	Layanan Tuberkulosis	Data Tuberkulosis	SITB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.35	Layanan Pencegahan Stunting	Data Stunting Data Pencegahan Stunting	e-HDW AKSI BANGDA KEMENDAGRI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.36	Layanan Informasi Mortalitas	Data Kematian Ibu Data Kematian Anak	MPDN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.25.37	Layanan Penanganan Gizi	Data Status Gizi	SIGIZI Terpadu	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 02.04.01	Layanan SDM Kesehatan	Data SDM Kesehatan	SISDMK	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Dinas Kesehatan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Capaian PKP (Penilaian Kinerja Puskesmas)	Data Penilaian Kinerja Puskesmas		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Implementasi Indikator Nasional Mutu	Data Capaian Indikator Nasional Mutu	INM	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Dinas Kesehatan
MURA-DAL 01.07.01	Layanan Bantuan Stunting	Data Bantuan Stunting		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.02	Layanan Gerakan Pangan Murah	Data Gerakan Pangan Murah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.03	Layanan Cadangan Pangan	Data Cadangan Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.04	Layanan Pertanian Keluarga	Data Pertanian Keluarga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.05	Layanan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	Data Rekomendasi Keamanan Pangan Segar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.06	Layanan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	Data Sertifikasi Keamanan Pangan Segar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.07	Layanan Perizinan Keamanan Pangan Segar	Data Perizinan Keamanan Pangan Segar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.08	Layanan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar	Data Sosialisasi Keamanan Pangan Segar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.09	Layanan Penguatan Keamanan Pangan Segar	Data Penguatan Keamanan Pangan Segar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.07.10	Layanan Pengentasan Kerawanan Pangan	Data Pengentasan Kerawanan Pangan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan
MURA-DAL 01.43.01	Layanan Berita dan Informasi Publik	Data Berita dan Informasi Publik	Sistem Informasi Berita dan Informasi Publik	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 01.43.02	Layanan Media Publikasi	Data Media Publikasi	Sistem Informasi Pengumuman Kabupaten Murung raya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 01.43.03	Layanan PPID	Data PPID	PPID	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 01.43.04	Layanan Statistik Sektoral	Data Statistik Sektoral		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.44.01	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Data Aduan dan Aspirasi	SP4N Lapor	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.08.01	Layanan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	Tauval SPBE	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.08 ORGANISASI DAN TATA KELOLA	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.09.01	Layanan Hosting dan Sub Domain	Data Website Pemerintah	Sistem Informasi Hosting dan Sub-Domain	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.09.02	Layanan Email Pemerintah	Data Email Pemerintah	e-Mail	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.09.03	Layanan Sertifikat Elektronik	Data Tanda Tangan Elektronik	BSRE	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.09.04	Layanan Virtual Private Server	Data Virtual Private Server	PROXMOX	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 02.09.05	Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Data Jaringan Intra Pemerintah	Sistem Informasi Jaringan Intra Pemerintah	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.09 DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAL 01.05.01	Layanan Pelatihan Bahan Baku Menjadi Bahan Jadi	Data Pelatihan Bahan Baku Menjadi Bahan Jadi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.05.02	Layanan Ketersediaan Bahan Pokok Daerah	Data Ketersediaan Bahan Pokok di Daerah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.06.01	Layanan Operasi Pasar	Data Operasi Pasar		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.13.01	Layanan Pelatihan Koperasi	Data Pelatihan Koperasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.13.02	Layanan Penilaian Indeks Koperasi	Data Penilaian Indeks Koperasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan



ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
						Perdagangan
MURA-DAL 01.13.03	Layanan Pendataan Koperasi	Data Koperasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.14.01	Layanan Pelatihan UKM	Data Pelatihan UKM		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.14.02	Layanan Pendataan UMKM	Data UMKM		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
MURA-DAL 01.40.01	Layanan Pengelolaan Sampah	Data Pengelolaan Sampah	Sistem Informasi Persampahan Nasional	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.02	Layanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	National Water and Sanitation Information Service (NAWASIS)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.03	Layanan Retribusi Kebersihan/Persampahan	Data Penerimaan Retribusi Kebersihan/Persampahan	FMIS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.04	Layanan Pengawasan Ketaatan Dokumen Lingkungan	Data Ketaatan Dokumen Lingkungan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.05	Layanan Indeks Lingkungan Hidup	Data Indeks Lingkungan Hidup	IKLH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.06	Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Data Pengelolaan Lingkungan Hidup	SIRAJA LIMBAH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.40.07	Layanan Rekomendasi Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Data Pembuatan SPPL	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.40 LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAL 01.15.01	Layanan Potensi Destinasi Wisata	Data Potensi Destinasi Wisata Data Pengunjung Wisata	Rekreasi Murung Raya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAL 01.15.02	Layanan Sarana Hibah	Data Sarana Hibah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.15.03	Layanan Ekonomi Kreatif	Data Pelaku Ekonomi Kreatif		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAL 01.34.01	Layanan Organisasi Pemuda	Data Organisasi Pemuda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAL 01.34.02	Layanan Wirausaha Muda	Data Wirausaha Muda		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.34 PEMUDA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAL 01.35.01	Layanan Sewa Sarana Olahraga	Data Sewa Sarana Olahraga		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.35 OLAHRAGA	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAL 01.17.01	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung	Data Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.17.02	Layanan Peminjaman Alat Berat	Data Peminjaman Alat Berat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.17.03	Layanan Pembangunan Jalan	Data Pembangunan Jalan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.17.04	Layanan Perbaikan Jalan Rusak	Data Perbaikan Jalan Rusak		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.17.05	Layanan Saluran Irigasi	Data Saluran Irigasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.17.06	Layanan Pelatihan Jasa Konstruksi	Data Pelatihan Jasa Konstruksi	SIPJAKI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.22.01	Layanan Pemetaan Wilayah	Data Pemetaan Wilayah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAL 01.05.01	Layanan Teknologi Tepat Guna	Data Teknologi Tepat Guna		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 01.21.01	Layanan Konsultasi Kepala Desa	Data Konsultasi Kepala Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 01.21.02	Layanan Kelembagaan Desa	Data Kelembagaan Desa		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 01.21.03	Layanan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Data KPM		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.21.04	Layanan BUMDES	Data Pengelolaan BUMDES		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.21 PEMBANGUNAN KAWASAN ATAU DAERAH TERTINGGAL	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 02.02.01	Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	Data Pengelolaan Keuangan Desa	SISKEUDES	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.02 KEUANGAN	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Pelantikan Pejabat Desa	Data Pelantikan Pejabat Desa		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAL 01.23.01	Layanan Keluarga Berencana	Data Keluarga Berencana	NEW SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.23.02	Layanan Informasi Data Keluarga	Data Informasi Keluarga	NEW SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.23.03	Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Data Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	NEW SIGA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.23.04	Layanan Distribusi Alkon	Data Distribusi Alkon	SIRIKA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.23.05	Layanan Rumah Data Kependudukan	Data Rumah Kependudukan	RDK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.23 KEPENDUDUKAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.27.01	Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	SIMPONI PPA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAL 01.12.01	Layanan Perizinan Berusaha	Data Perizinan Berusaha Data Persyaratan Perizinan Data Nomor Induk Berusaha	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.12.02	Layanan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Data Tanda Daftar Gudang	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.03	Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan	Data Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan	OSS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.04	Layanan Perizinan Non Berusaha	Data Perizinan Non Berusaha	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.05	Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	SICANTIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.06	Layanan Peta Potensi Investasi	Data Peta Potensi Investasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.07	Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Data Konsultasi Perizinan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.08	Layanan Pembinaan Pengendalian Modal	Data Pembinaan Penanaman Modal		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.09	Layanan Pengawasan Pengendalian Modal	Data Pengawasan Penanaman Modal		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.12.10	Layanan Pemantauan Pengendalian Modal	Data Pemantauan Pengendalian Modal		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAL 01.31.01	Layanan Pendidikan Usia Dini	Data Pendidikan Usia Dini	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.31.02	Layanan Pendidikan Non Formal	Data Pendidikan Non Formal	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.31.03	Layanan Pendidikan Dasar (SD - SMP)	Data Pendidikan Dasar (SD - SMP)	DAPODIK	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.31.04	Layanan Legalisir Ijazah	Data Legalisir Ijazah		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.31.05	Layanan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Data Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Verval SP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.42.01	Layanan Kebudayaan	Data Kebudayaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.42.02	Layanan Kesenian	Data Kesenian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.42.03	Layanan Pembinaan Kelompok Seni	Data Pembinaan Kelompok Seni		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.42 KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAL 01.19.01	Layanan Uji Kendaraan Bermotor	Data Uji Kendaraan Bermotor	SIM PKB	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.19.02	Layanan Jasa Kepelabuhanan	Data Retribusi Tambat Labuh		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.19.03	Layanan Rekomendasi Izin Angkutan Trayek	Data Rekomendasi Izin Angkutan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.19.04	Layanan Rekomendasi Izin Angkutan Plat Kuning	Data Rekomendasi Izin Angkutan Plat Kuning		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.19.05	Layanan Permohonan Perizinan Parkir	Data Perizinan Parkir		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.43.01	Layanan Informasi Data Kecelakaan	Data Informasi Kecelakaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.43 INFORMASI	Dinas Perhubungan
MURA-DAL 01.31.01	Layanan Perpustakaan Digital	Data Jumlah Layanan Perpustakaan Digital	iMurungraya	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 01.31.02	Layanan Perpustakaan Keliling	Data Perpustakaan Keliling		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 01.31.03	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Data Pengelolaan Perpustakaan	INLISLite	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.31 PENDIDIKAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 02.04.01	Layanan Kearsipan Dinamis	Data Arsip Dinamis Data Buku Ekspedisi Data Agenda Keluar	SRIKANDI e-Office	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 02.04.02	Layanan Informasi Arsip Statis	Data Jumlah Arsip Data Jumlah Pengunjung Data Pengguna Arsip	SIKN JIKN	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Pengelolaan Arsip	Data Pengelolaan Arsip Data Alih Media		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAL 01.07.01	Layanan Pendaftaran Kelompok Tani	Data Kelembagaan Petani	SIMLUHTAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.07.02	Layanan Penyuluhan Pertanian	Data Penyuluhan Pertanian	SIMLUHTAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.07.03	Layanan Penyediaan Sarpras Pertanian	Data Penyediaan Sarpras Pertanian		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.08.01	Layanan Penyuluhan Perkebunan	Data Kelompok Tani Perkebunan	SIMLUHTAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.08 PERKEBUNAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.09.01	Layanan Pendataan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	Data Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	IDENTIK PKH	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.09.02	Layanan Kesehatan Hewan Ternak	Data Kesehatan Hewan Ternak	iSIKHNAS	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.10.01	Layanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Data Jumlah Nelayan Tradisional Data Pembudidaya Ikan Data Pengolah Hasil Perikanan	Satu Data KKP	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAL 01.17.01	Layanan Drainase	Data Drainase		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.20.01	Layanan Penyediaan Rumah Layak Huni	Data Penyediaan Rumah Layak Huni		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.20.02	Layanan Informasi Rumah Layak Huni	Data Informasi Rumah Layak Huni		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.20.03	Layanan Penyediaan Rumah Korban Bencana	Data Penyediaan Rumah Korban Bencana		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.20.04	Layanan Pencatatan Kawasan Kumuh	Data Kawasan Kumuh		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.20.05	Layanan Pengerjaan Konstruksi Pemukiman	Data Pengerjaan Konstruksi Pemukiman		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.20 PERUMAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.22.01	Layanan Fasilitasi dan Kompilasi Data Tanah Masyarakat	Data Fasilitasi dan Kompilasi Tanah Masyarakat		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.22 PERTANAHAN	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
MURA-DAL 01.26.01	Layanan Tenaga Kesejahteraan Sosial	Data Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.26.02	Layanan Rehabilitasi Sosial	Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.26.03	Layanan Rekomendasi Bantuan Sosial	Data Rekomendasi Bantuan Sosial		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
MURA-DAL 01.26.04	Layanan Penanganan Fakir Miskin	Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Data Program Keluarga Harapan (PKH) Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.26.05	Layanan Penerima Bantuan Sosial	Data Penerima Bantuan Sosial	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.26.06	Layanan Perawatan Makam Pahlawan	Data Makam Pahlawan	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.26.07	Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Data Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	SIKS-NG	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.26 SOSIAL	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.27.01	Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga	Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga	SIMPONI PPA	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.27 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Sosial
MURA-DAL 01.16.01	Layanan Pendaftaran Perusahaan	Data Pendaftaran Perusahaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.16 PERIZINAN DAN AKREDITASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 01.18.01	Layanan Transmigrasi	Data Transmigrasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.18 TRANSMIGRASI	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 01.32.01	Layanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Data Pencari Kerja (AK-1)	KarirHub	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 01.32.02	Layanan Pelatihan Berbasis Kompetensi	Data Pelatihan Berbasis Kompetensi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 01.32.03	Layanan Pengesahan Peraturan Perusahaan	Data Pengesahan Peraturan Perusahaan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 01.32.04	Layanan Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama	Data Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.32 KETENAGAKERJAAN	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAL 02.04.01	Layanan Angka Kredit dan Diklat APIP	Data Angka Kredit dan Diklat APIP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.02	Layanan Pengawasan APIP	Data Pengawasan APIP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI	RAL.02.04 APARATUR	Inspektorat

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
				PEMERINTAHAN	NEGARA	
MURA-DAL 02.04.03	Layanan SPIP	Data SPIP		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.04	Layanan Tindak Lanjut Pengawasan	Data Status Tindak Lanjut Pengawasan		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.05	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Data Profile Audit Data Peta Audit Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Data Pokok Pokok Hasil Pengawasan Data Koreksi Intern Kepala Daerah Data Form Rekap Tindak Lanjut Data Dokumen Tindak Lanjut Data Form Evaluasi Tindak Lanjut Data Laporan Hasil Monitoring dan Pemantauan Tindak Lanjut Data Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester Data Surat Permohonan Audit Data Surat Tugas Data Program Kerja Audit Data Kertas Kerja Audit Data Konsep LHP Data Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Data Dokumen Draft Temuan Sementara Data Dokumen Draft Temuan Akhir		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat

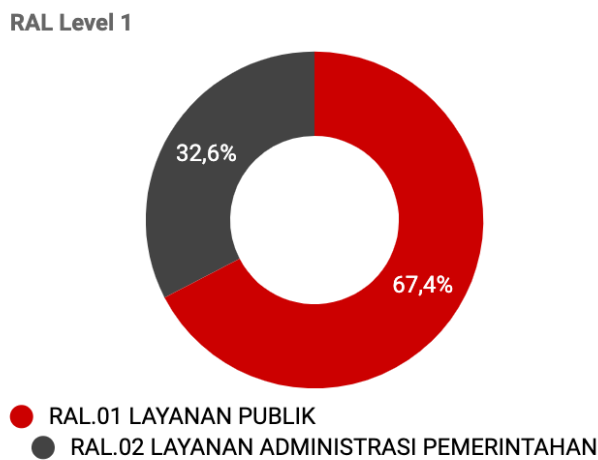


ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data BA Kesepakatan Hasil Temuan dan Tindak Lanjut Data Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak Data Kartu Penugasan Audit Data Formulir Anggaran Waktu Data Surat Pernyataan Independensi Data Surat Permintaan Dokumen Data Pemeriksaan Pendahuluan				
MURA-DAL 02.04.06	Layanan Aduan Berindikasi Korupsi	Data Aduan Berindikasi Korupsi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.07	Layanan Evaluasi Manajemen Risiko	Data Manajemen Risiko		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.08	Layanan Pelaporan Tindakan Gratifikasi	Data Dokumen Laporan Gratifikasi		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 02.04.09	Layanan Konsultasi Pelayanan Pemerintah	Data Daftar Konsultasi Pelayanan Pemerintah		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.04 APARATUR NEGARA	Inspektorat
MURA-DAL 01.25.01	Layanan Pendaftaran Online Pasien	Data Pendaftaran Online Pasien	AMANG RSUD	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAL 01.25.02	Layanan Penjaminan Klaim BPJS	Data Klaim BPJS	PCare	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAL 01.25.03	Layanan Pemeriksaan Laboratorium	Data Rekam Medik		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.25 KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAL 01.44.01	Layanan Kepuasan Pelanggan	Data Kepuasan Pelanggan		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.44 KOMUNIKASI	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Manajemen RSUD	Data Laporan Keuangan Data Laporan Rekam Medik Data Register Pasien Data SIRS Data Laporan Rawat Jalan Data Laporan Rawat Inap Data Laporan Penunjang	SIMRS	RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Rumah Sakit Umum Daerah

ID	Nama Layanan	Data	Aplikasi	→ RAL Level 1 (Dependency)	→ RAL Level 2 (Dependency)	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)
		Data Laporan Grafik Data Laporan Gudang Farmasi Data Laporan Waktu Tunggu Data Laporan Apotek Data Laporan IBS				
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Indikator Mutu	Data Laporan Indikator Mutu		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAL 01.29.01	Layanan Pelatihan Linmas	Data Pelatihan Linmas		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAL 01.29.02	Layanan Penertiban Reklame	Data Penertiban Reklame		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAL 01.29.03	Layanan Penertiban PKL	Data Penertiban PKL		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAL 01.29.04	Layanan Pengendalian Kebakaran	Data Pengendalian Kebakaran		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.29 KEAMANAN	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
MURA-DAL 01.24.01	Layanan Jaring Aspirasi	Data Jaring Aspirasi		RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.24 PEMERINTAH DAERAH	Sekretariat DPRD
MURA-DAL 02.06.01	Layanan Administrasi Keskretariatian DPRD	Data Administrasi DPRD		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Sekretariat DPRD
MURA-DAL 02.06.02	Layanan Fasilitas Penyelenggaraan Rapat DPRD	Data Penyelenggaraan Rapat		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Sekretariat DPRD
MURA-DAL 02.06.03	Layanan Penyediaan dan Pengoordinasian Tenaga Ahli	Data Penyediaan dan Koordinasi Tenaga Ahli		RAL.02 LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	RAL.02.06 DUKUNGAN OPERASIONAL ORGANISASI	Sekretariat DPRD

3.2.3.2. Analisis Diagram Layanan

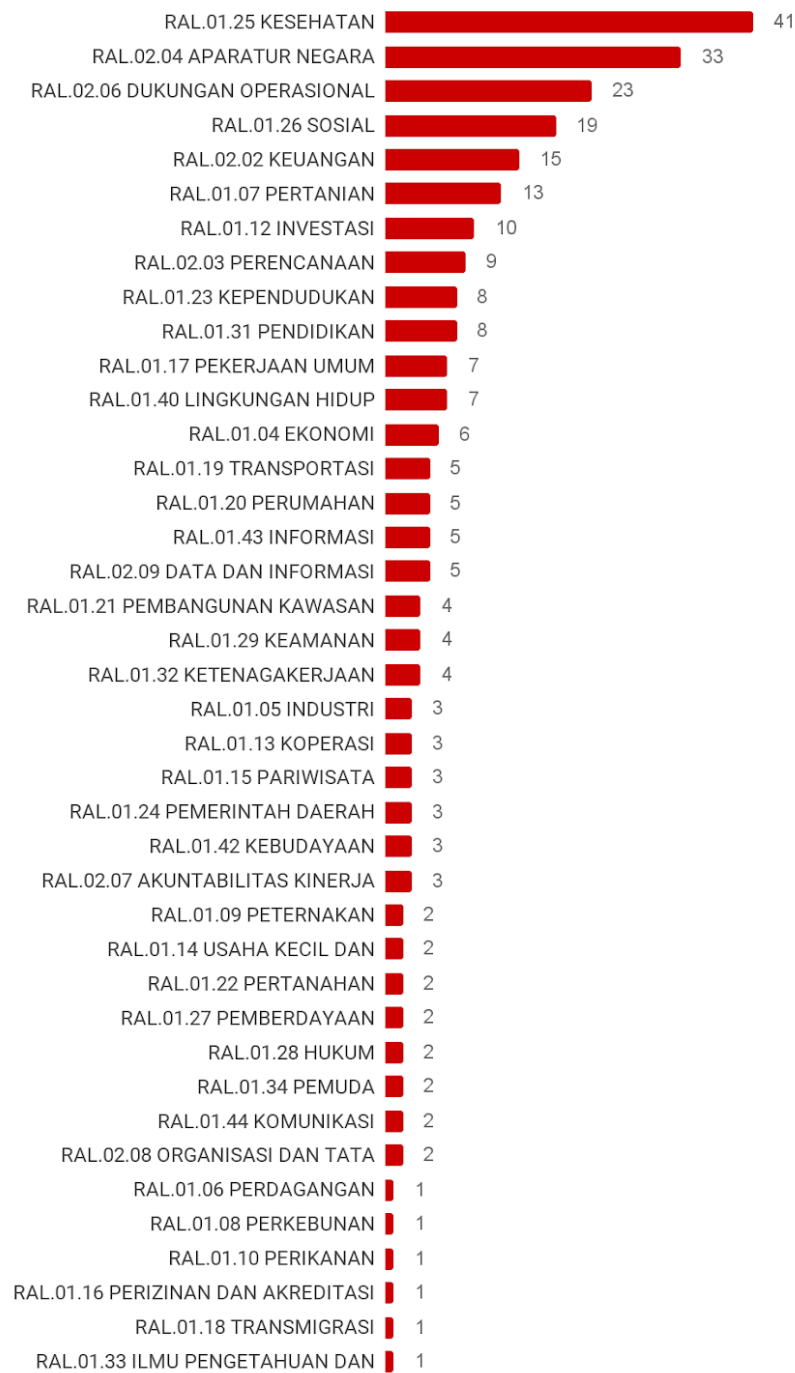
Merujuk pada hasil pemetaan layanan pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.3.2.1. Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 1 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.1 serta mengacu pada Referensi Arsitektur Layanan SPBE Nasional (RAL Level 1) dari total 276 layanan yang dimiliki, terdapat 67,4% (186 Layanan) merupakan RAL.01 Layanan Publik dan sebesar 32,6% (90 Layanan) merupakan RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan. Mengacu pada referensi arsitektur ini, mayoritas layanan yang ada merupakan layanan publik untuk masyarakat dimana pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat menjadikannya sebagai panduan untuk memfasilitasi kerjasama antara instansi pemerintah/perangkat daerah dalam pengembangan layanan publik dan juga membantu pemerintah dalam merancang dan mengembangkan sistem administrasi pemerintahan yang terintegrasi, efisien, dan transparan.

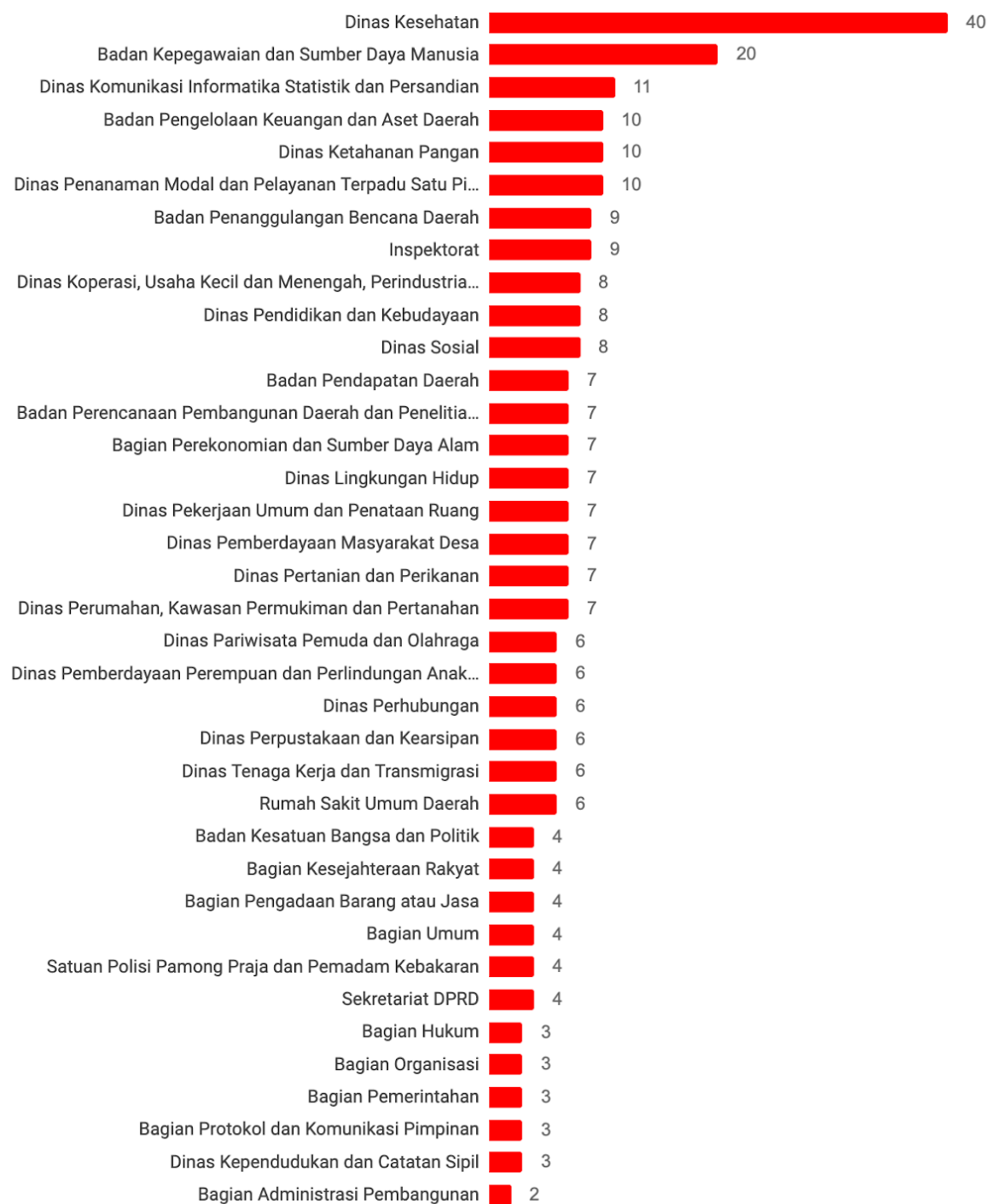
RAL Level 2



**Grafik 3.2.3.2.2** Grafik Jumlah Layanan Berdasarkan RAL Level 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Grafik 3.2.3.2.2 dapat dilihat RAL Level 2 yang paling banyak adalah RAL.01.25. Kesehatan sejumlah 41 layanan, RAL.02.04 Aparatur Negara sejumlah 33 layanan dan RAL.02.06 Dukungan Operasional sejumlah 23 layanan. Referensi Arsitektur Layanan Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya mencakup 45 Referensi dari 52 Arsitektur Layanan Nasional. Perbedaan pada jumlah layanan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah menyesuaikan pada tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini tentunya bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Unit Kerja



Grafik 3.2.3.2.3. Grafik Jumlah Layanan pada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan grafik 3.2.3.2.3. menunjukkan bahwa layanan paling banyak dimiliki oleh Dinas Kesehatan sejumlah 40 layanan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejumlah 20 layanan. Sedangkan paling sedikit berada pada Bagian Administrasi Pembangunan yang hanya memiliki 2 layanan. Berdasarkan hasil survei, keseluruhan layanan yang dimiliki oleh perangkat daerah memerlukan verifikasi agar layanan dapat terstandarisasi serta memastikan layanan tersebut berjalan optimal.

**3.2.3.3. Diagram Layanan SPBE yang menjadi indikator dalam evaluasi**

Diagram layanan SPBE menjelaskan hubungan antara layanan, data, dan aplikasi di masing-masing perangkat daerah khusus indikator 32 sampai 47 pada evaluasi SPBE. Hal ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan transformasi proses layanan. Diagram layanan SPBE juga menjelaskan layanan antar perangkat daerah yang memiliki irisan dan memetakan kepemilikan data pada masing-masing perangkat daerah, sehingga dapat diidentifikasi data apa saja yang dapat di berbagai pakaikan antar perangkat daerah. Hasil identifikasi data menjadi dasar dalam penyusunan rencana integrasi antar sistem di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Berikut ini merupakan gambaran keterkaitan layanan, data, aplikasi dan teknologi.

**3.2.3.1.1. Layanan Perencanaan SPBE**

Sebagai upaya untuk menunjang layanan perencanaan SPBE, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas bidang perencanaan pembangunan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

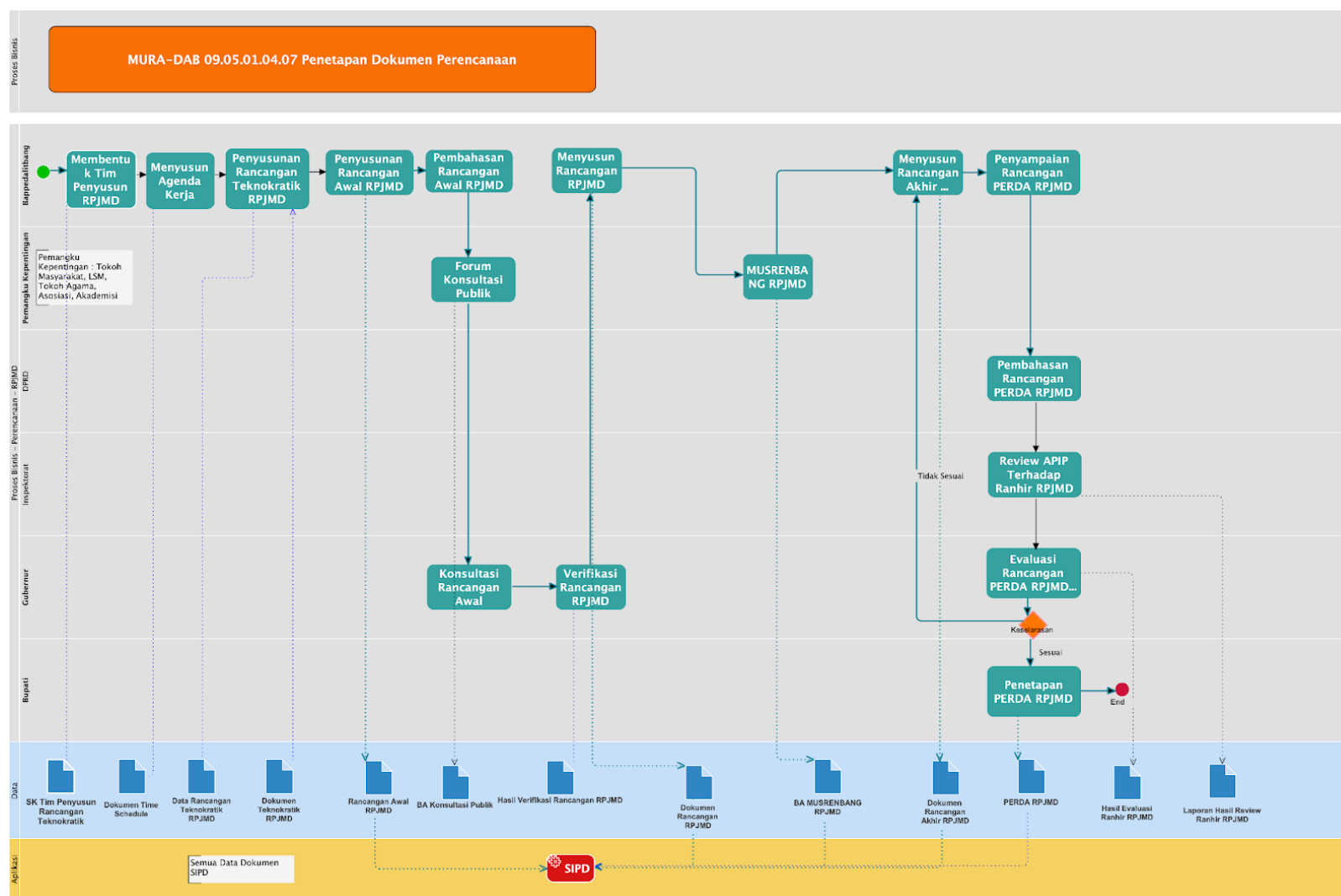
- a. Perumusan program kerja badan;
- b. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan perencanaan SPBE di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah:

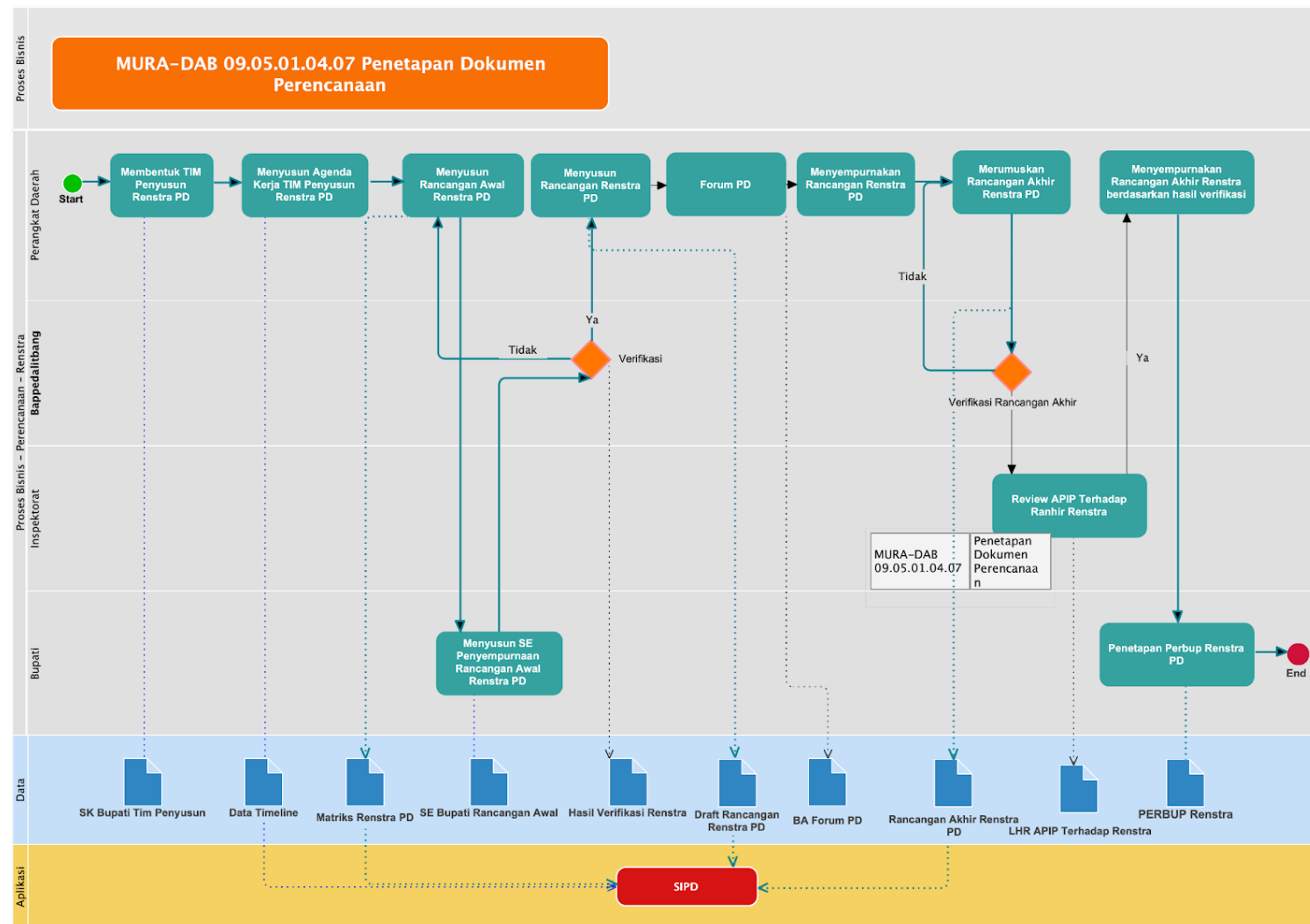
**Tabel 3.2.3.1.1.1** Layanan Perencanaan SPBE

No.	Deskripsi	Uraian
1.	Penyusunan Dokumen RPJMD	Proses perencanaan jangka menengah yang disesuaikan dan ditetapkan dengan kebutuhan daerah dan memuat komitmen untuk mencapai visi dan misi daerah.
2.	Penyusunan Dokumen Renstra	Proses perencanaan jangka panjang yang memuat tujuan, strategi, program, dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi daerah. Dokumen ini disusun sebelum pengembangan RPJMD.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Penyusunan Dokumen RPJMD dan Penyusunan Dokumen Renstra. Pada layanan perencanaan ini Aplikasi yang digunakan adalah SIPD.



Gambar 3.2.3.1.1.1 Penyusunan Dokumen RPJMD



**Gambar 3.2.3.1.1.2. Penyusunan Dokumen Renstra**



3.2.3.1.2. Layanan Penganggaran SPBE

Sebagai upaya untuk menunjang layanan penganggaran SPBE, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan fungsi sebagai berikut:

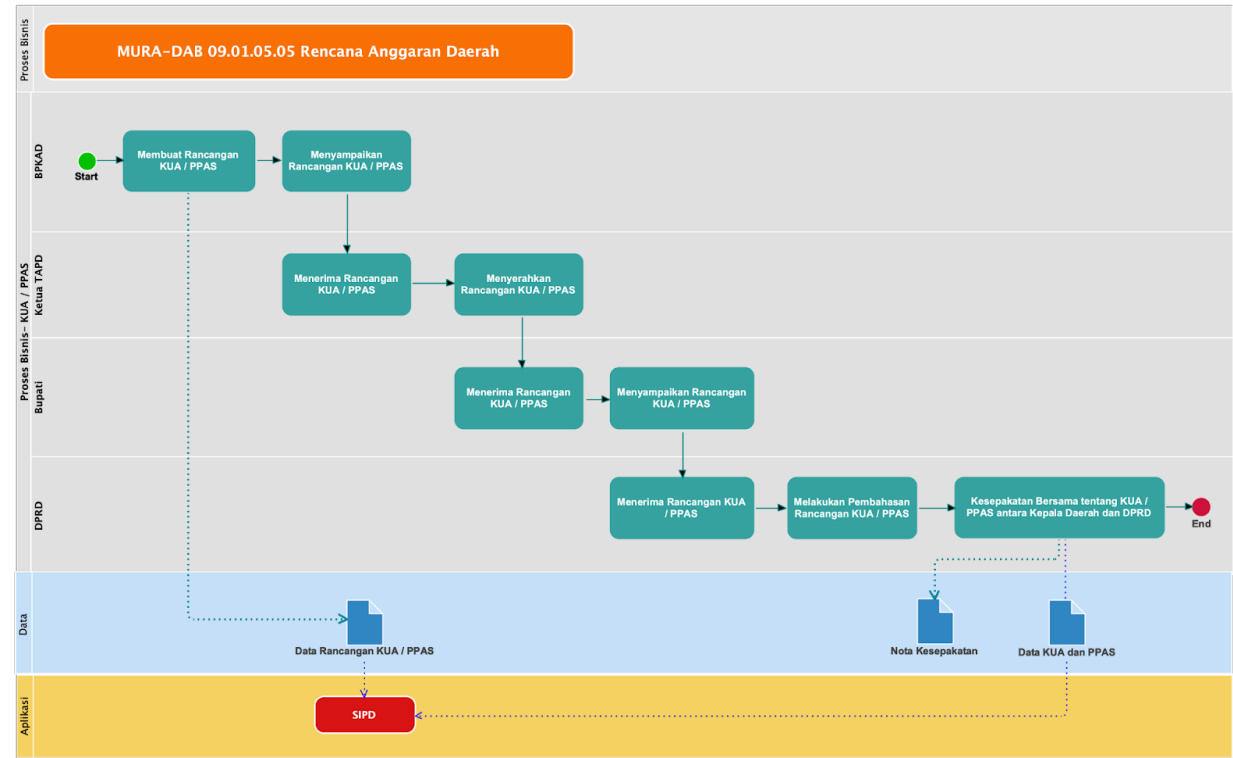
- a. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset; dan
- c. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan penganggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya adalah:

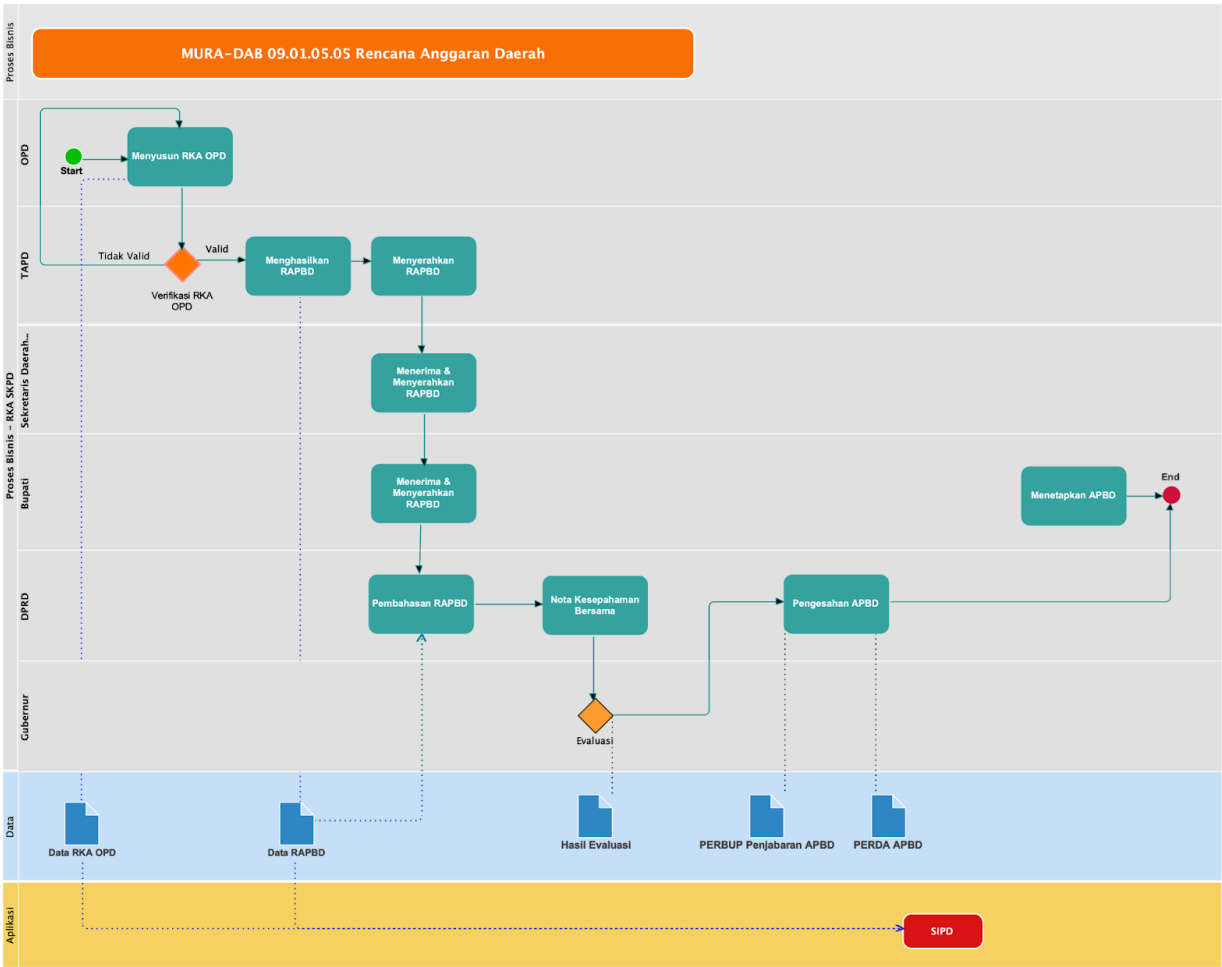
Tabel 3.2.3.1.2.1 Layanan Penganggaran

No.	Deskripsi	Uraian
1	Perencanaan APBD	Rencana keuangan pemerintah daerah yang memuat rincian sumber pendapatan dan alokasi belanja untuk tahun anggaran yang akan datang
2	Penganggaran APBD	Penyusunan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran, yang mencakup sumber pendapatan dan alokasi belanja yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Perencanaan APBD dan Penganggaran APBD. Pada layanan penganggaran ini aplikasi yang digunakan adalah SIPD.



Gambar 3.2.3.1.2.1 Perencanaan APBD



Gambar 3.2.3.1.2.2 Penganggaran APBD

3.2.3.1.3. Layanan Keuangan SPBE

Sebagai penunjang layanan keuangan SPBE yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Mengenai Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi:

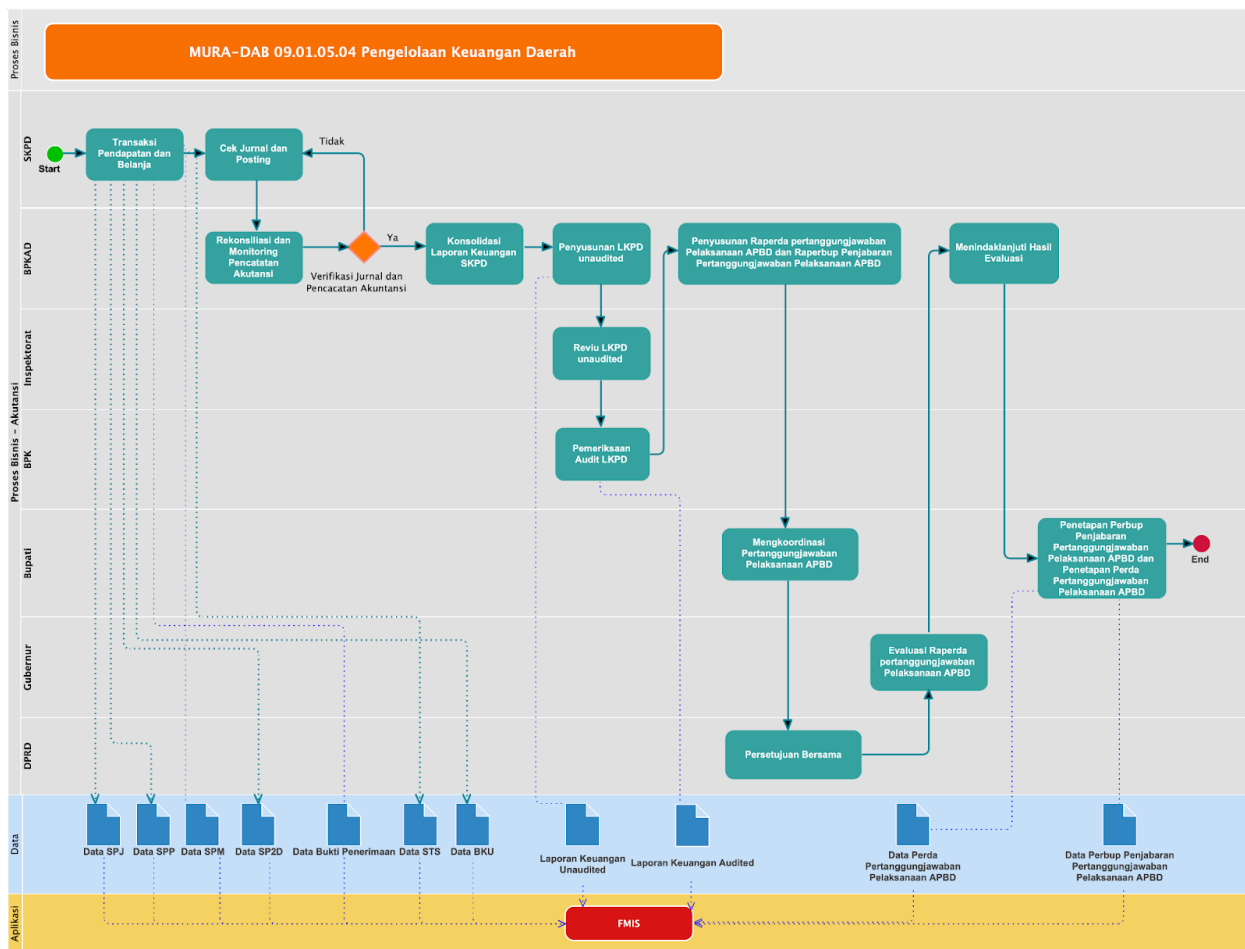
- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan keuangan yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut :

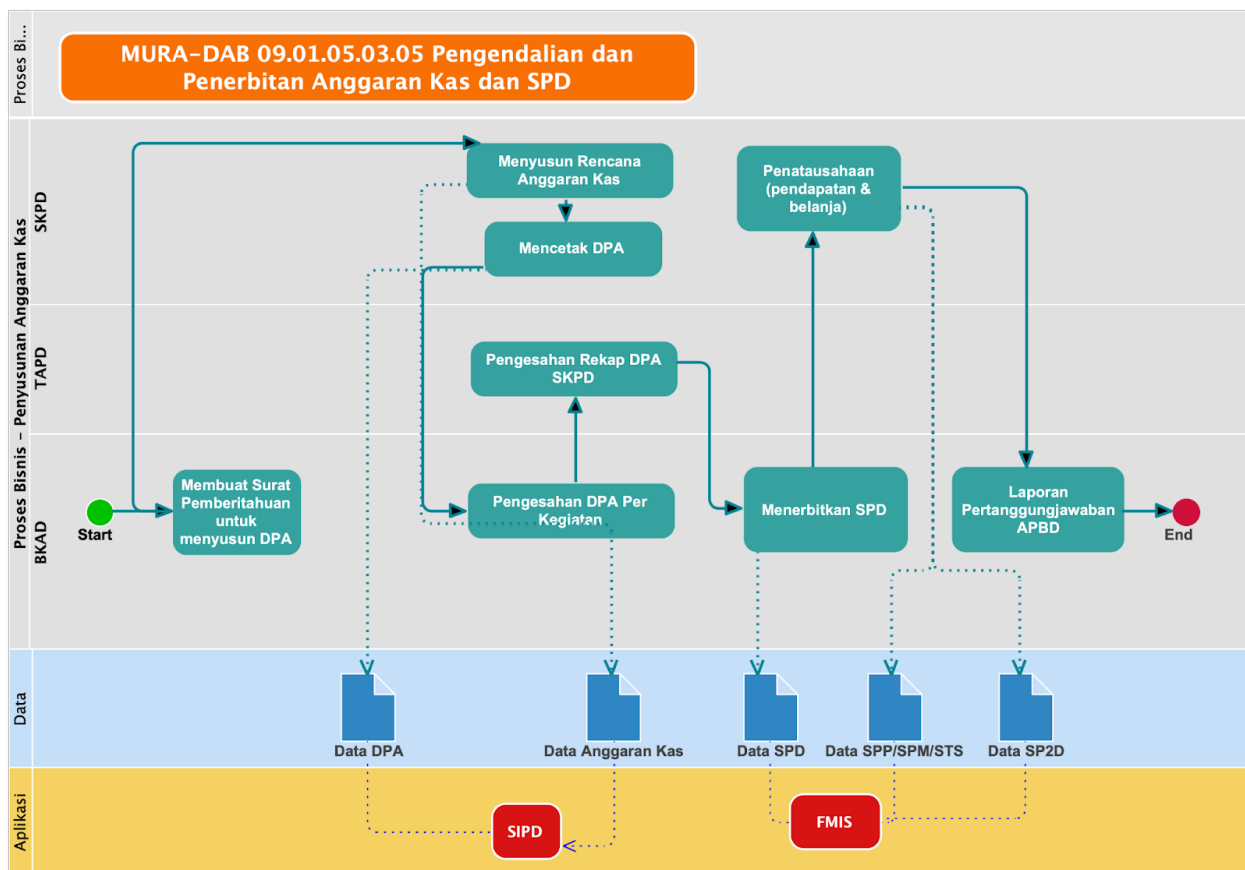
Tabel 3.2.3.1.3.1 Layanan Keuangan SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Akuntansi	Proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian keuangan yang terkait dengan aktivitas pemerintah.
2	Anggaran Kas	Proses anggaran kas adalah langkah-langkah merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengeluaran serta penerimaan uang tunai dalam suatu periode
3	Perbendaharaan	Proses pengelolaan keuangan sebuah entitas, seperti pemerintah atau perusahaan
4	Manajemen Keuangan SKPD	Proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien

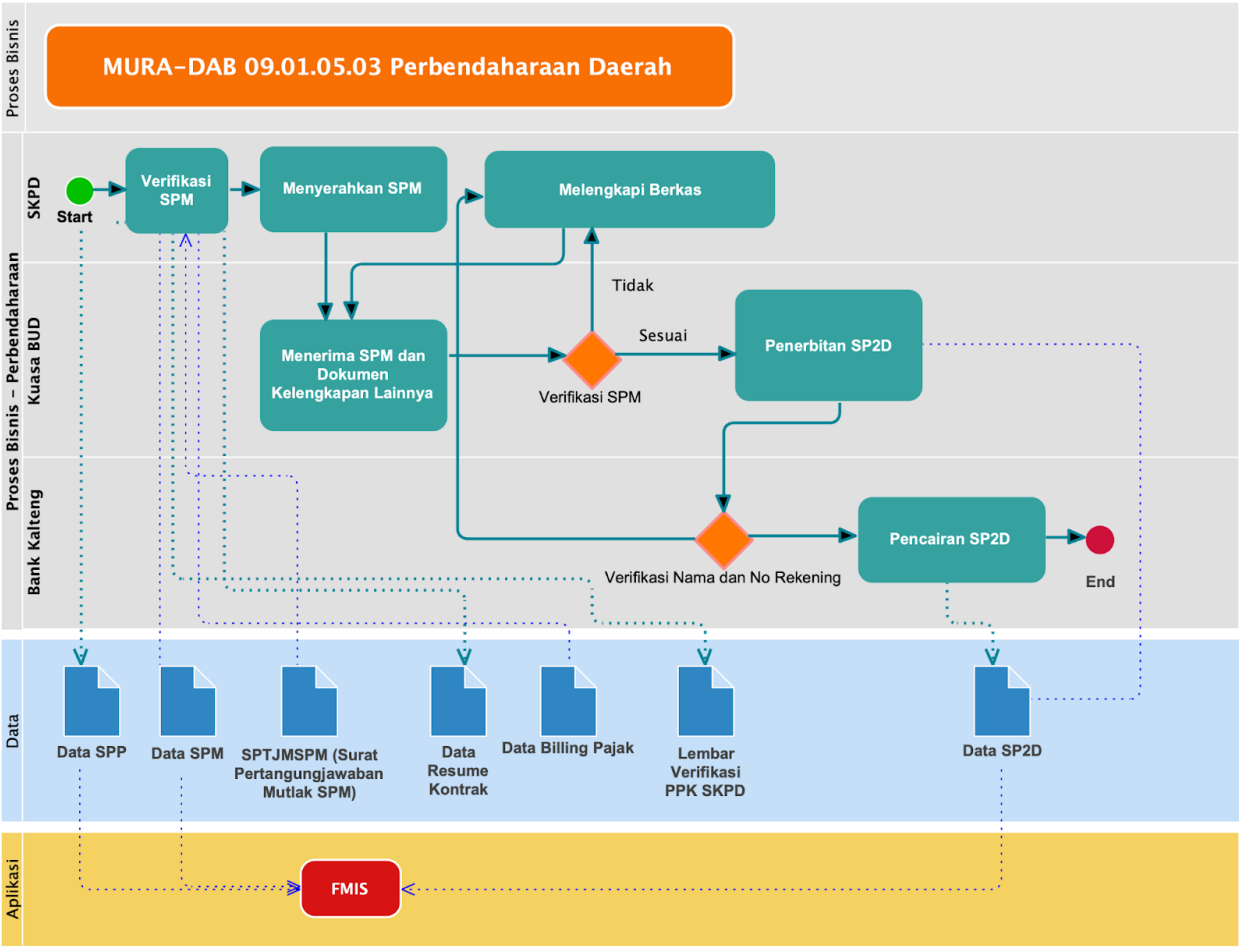
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki 4 sub layanan yaitu Penyusunan Anggaran Akuntansi, Anggaran Kas, Perbendaharaan dan Manajemen Keuangan SKPD. Pada layanan Keuangan ini Aplikasi yang digunakan adalah FMIS dan SIPD.



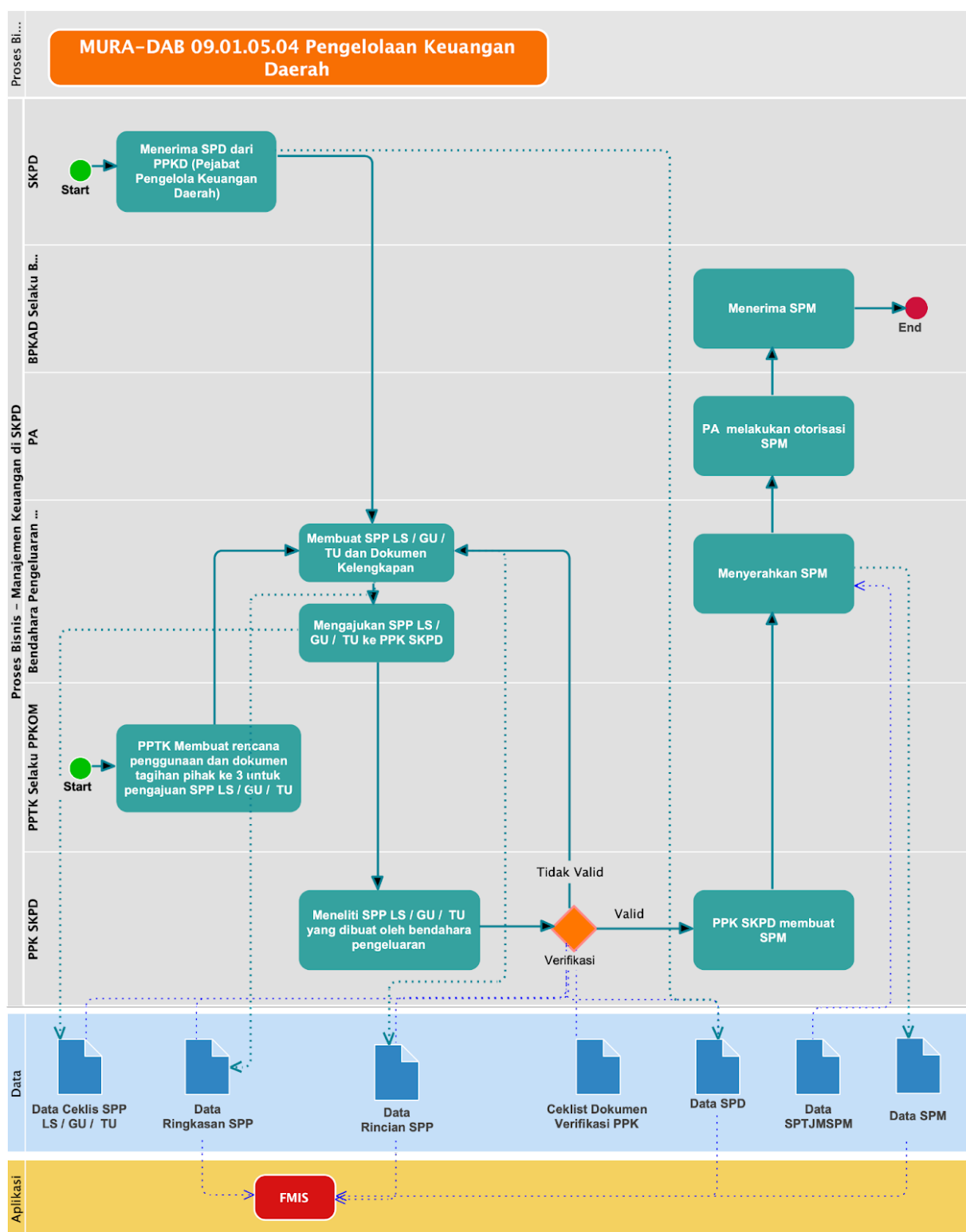
**Gambar 3.2.3.1.3.1 Akuntansi**



**Gambar 3.2.3.1.3.2 Anggaran Kas**



**Gambar 3.2.3.1.3.3 Perbendaharaan**



**Gambar 3.2.3.1.3.3** Manajemen Keuangan SKPD

**3.2.3.1.4. Layanan Pengelolaan Aset SPBE**

Layanan pengelolaan aset SPBE yang diampu oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi antara lain:

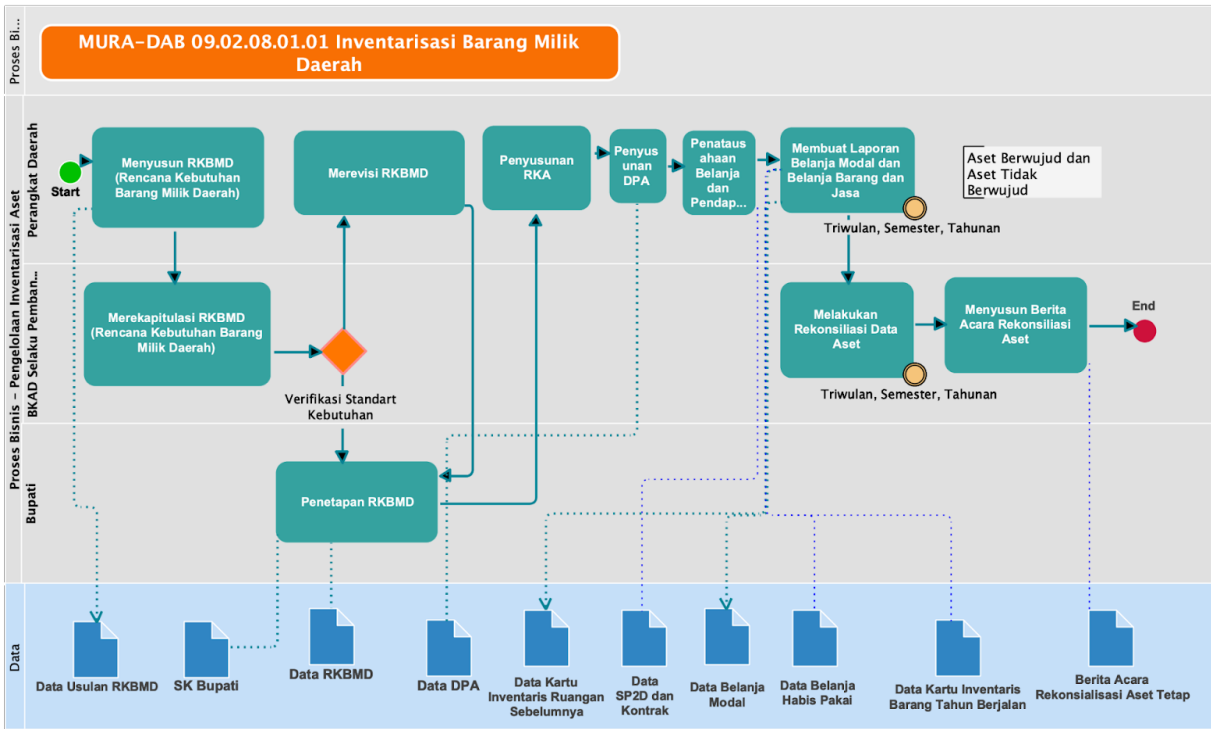
- a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Aset Daerah; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Aset Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengelolaan aset yang terdapat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut:

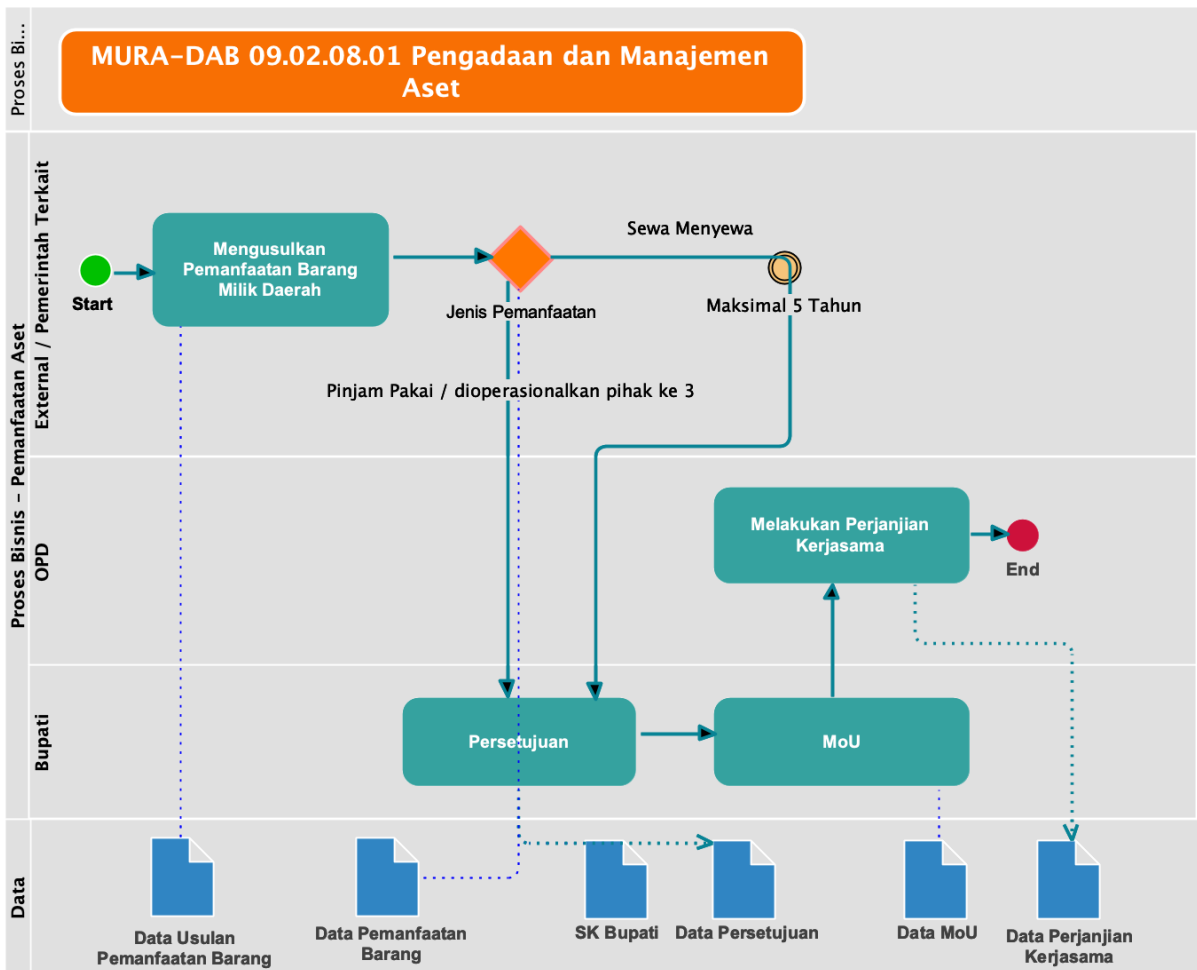
**Tabel 3.2.3.1.4.1** Layanan Pengelolaan Aset SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Inventarisasi Aset	Proses pencatatan dan dokumentasi semua aset tetap yang dimiliki oleh suatu entitas atau organisasi.
2	Pemanfaatan Aset	Pengelolaan dan optimalisasi penggunaan aset tetap agar memberikan nilai tambah dan efisiensi dalam operasional.
3	Penghapusan Aset	Prosedur untuk menghilangkan aset tetap dari catatan akuntansi ketika sudah tidak berfungsi atau tidak berdaya guna lagi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki 3 sub layanan yaitu Inventarisasi Aset Tetap, Pemanfaatan Aset, dan Penghapusan Aset. Layanan Pengelolaan aset ini Aplikasi yang digunakan adalah SIMDA BMD.

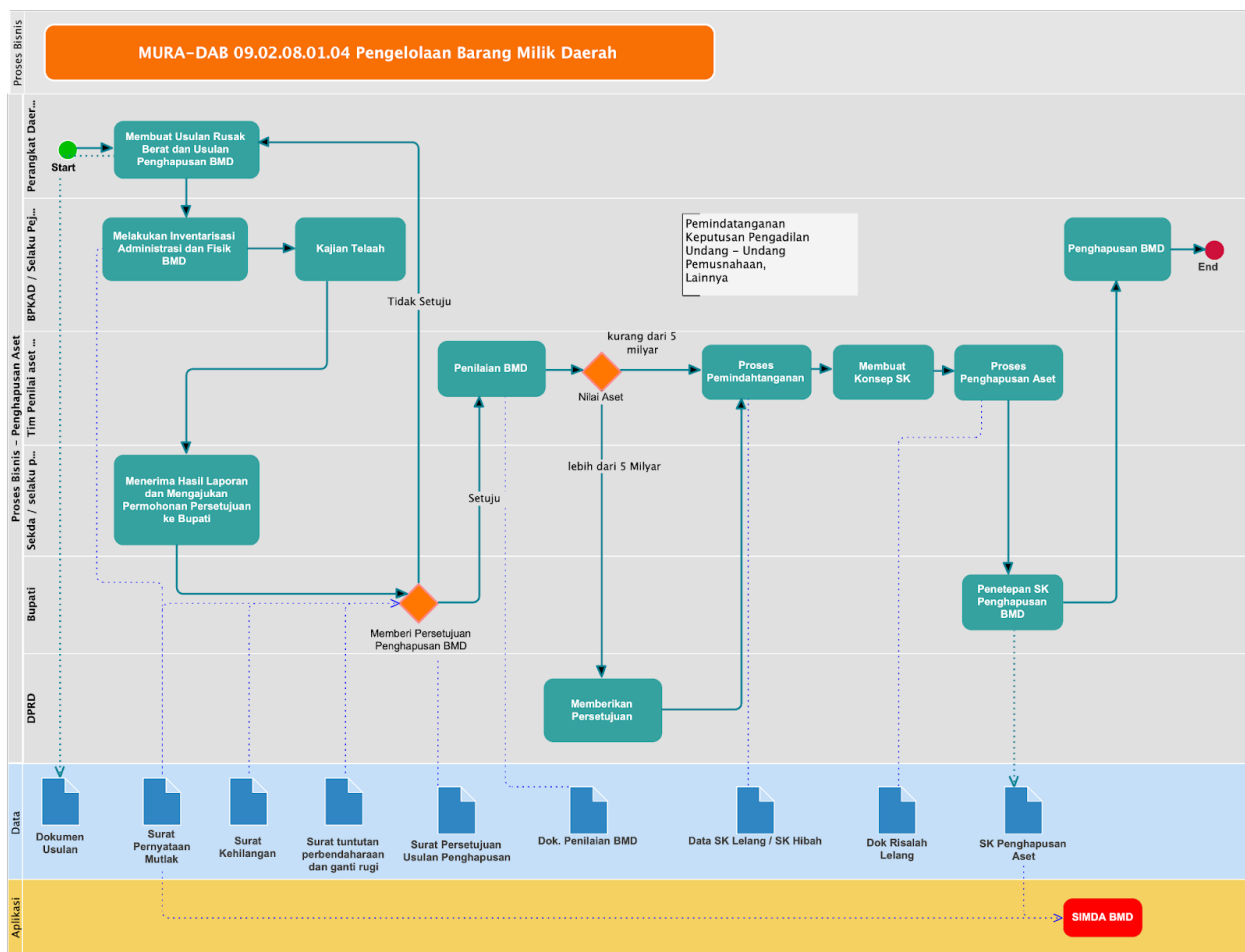


Gambar 3.2.3.1.4.1 Inventarisasi Aset



Gambar 3.2.3.1.4.2 Pemanfaatan Aset





**Gambar 3.2.3.1.4.3 Penghapusan Aset**

3.2.3.1.5. Layanan Kepegawaian SPBE

Layanan Kepegawaian SPBE yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam perencanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelayanan kesekretariatan bagi Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- f. Pelaksanaan pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

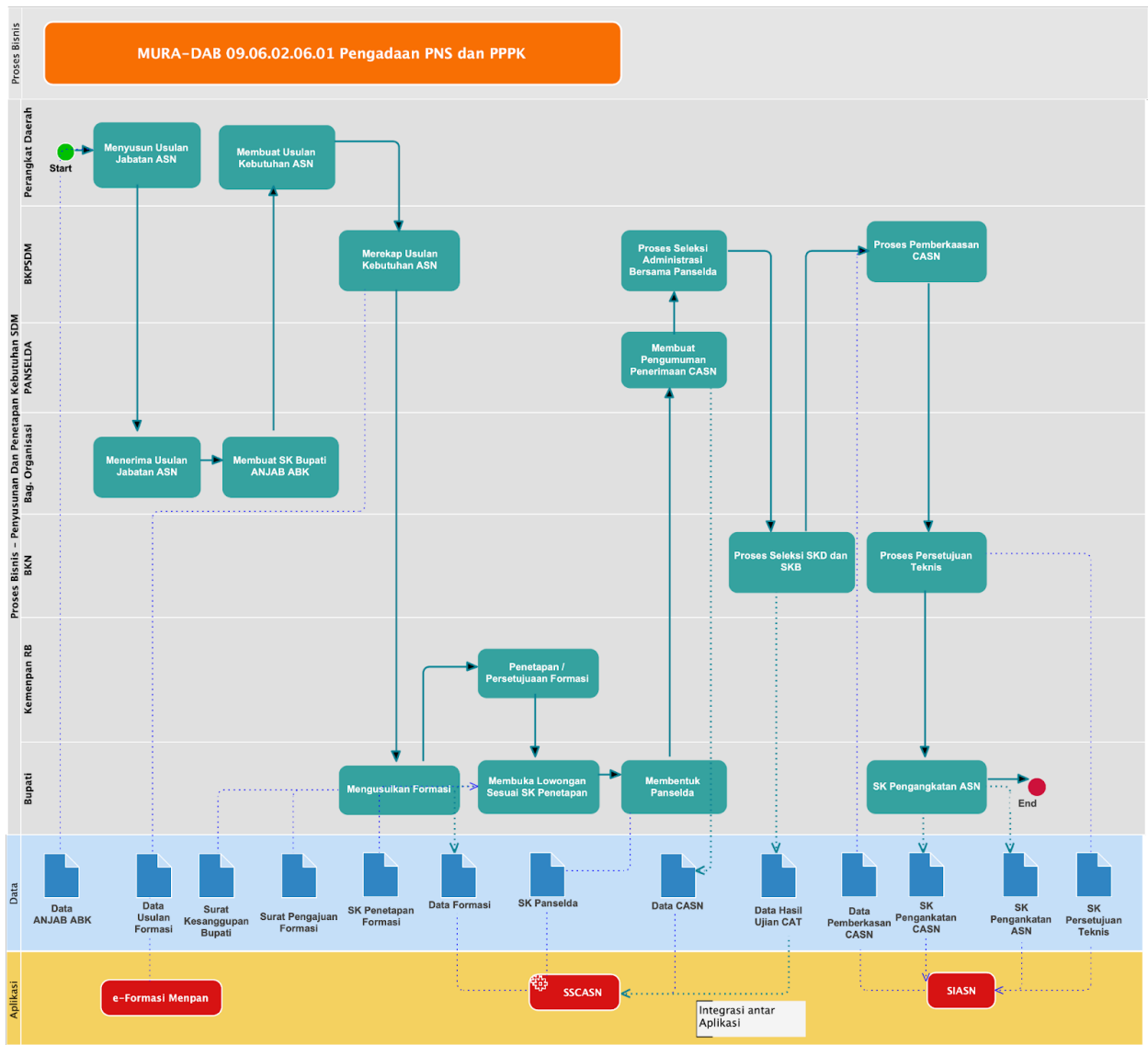
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia adalah:

Tabel 3.2.3.1.5.1 Layanan Kepegawaian SPBE

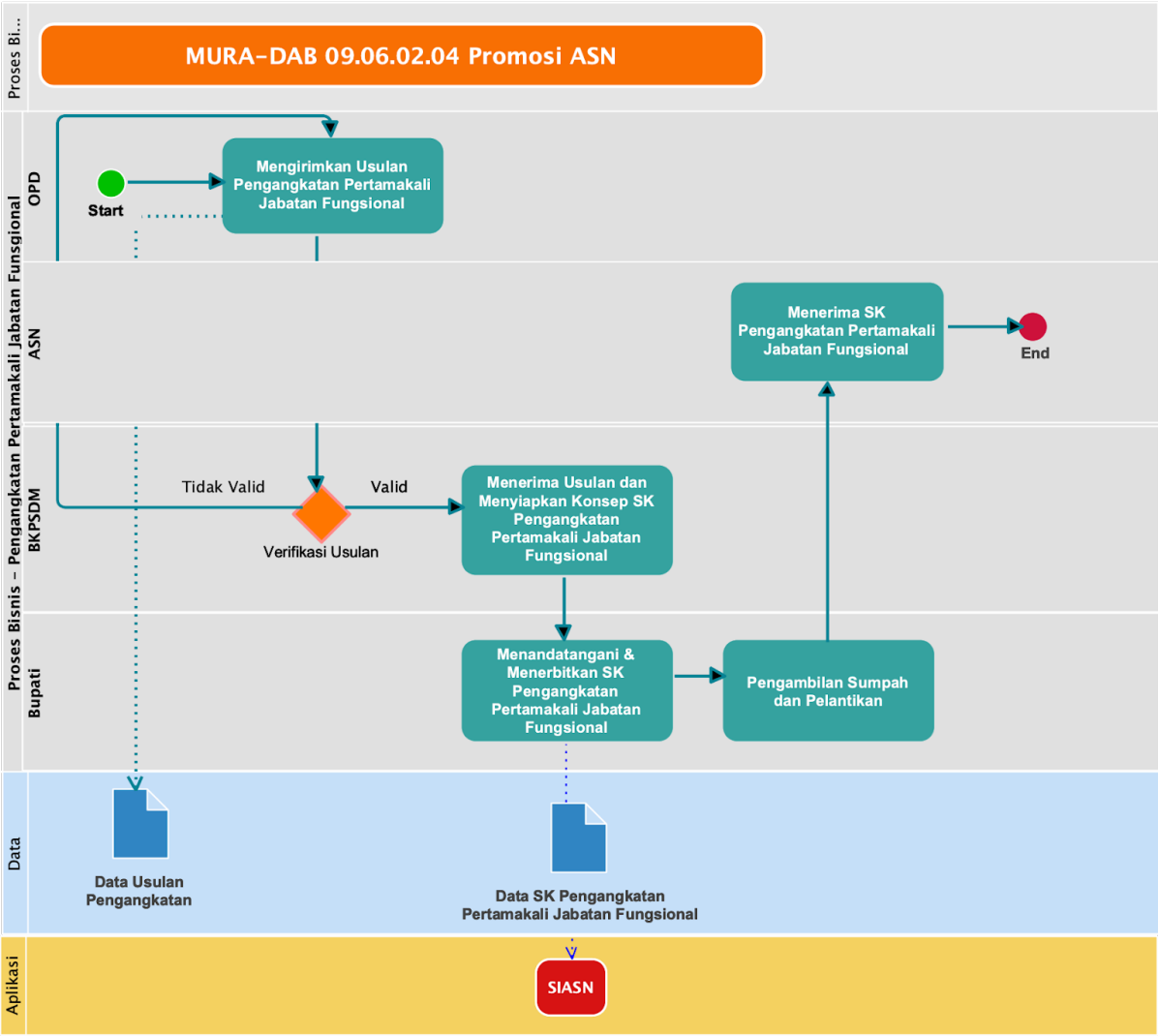
No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM	Proses perencanaan dan penetapan kebutuhan tenaga kerja atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan oleh suatu instansi pemerintahan.
2	Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional	Proses penerimaan ASN (Aparatur Sipil Negara) ke dalam jabatan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan.
3	Pemberhentian ASN	Pengakhiran hubungan kerja seseorang dari suatu organisasi atau instansi, biasanya karena berakhirnya masa kontrak, pensiun, atau alasan lainnya, dengan singkat, jelas, dan padat.
4	Pemberhentian Jabatan Fungsional	Proses pengakhiran jabatan fungsional dalam struktur organisasi pemerintah karena berbagai alasan, termasuk restrukturisasi organisasi atau perubahan kebijakan yang mempengaruhi keberlanjutan jabatan tersebut.
5	Kenaikan Pangkat	Proses yang memungkinkan seseorang naik ke tingkat jabatan yang lebih tinggi berdasarkan pencapaian, pengalaman, dan kriteria yang ditentukan dalam jabatan fungsional tertentu.
6	Kenaikan Jabatan Fungsional	Proses ASN dipromosikan atau naik jabatan dalam konteks fungsi atau tugas khususnya.
7	Alih Jenjang Jabatan Fungsional	Proses perpindahan atau peralihan seseorang dari satu Jabatan atau tingkatan pendidikan ke Jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia memiliki 7 sub layanan yaitu Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM, Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional,

Pemberhentian ASN, Pemberhentian Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan Fungsional dan Alih Jenjang Jabatan Fungsional. Pada layanan Kepegawaian ini Aplikasi yang digunakan adalah e-Formasi Menpan, SSCASN, dan SIASN.

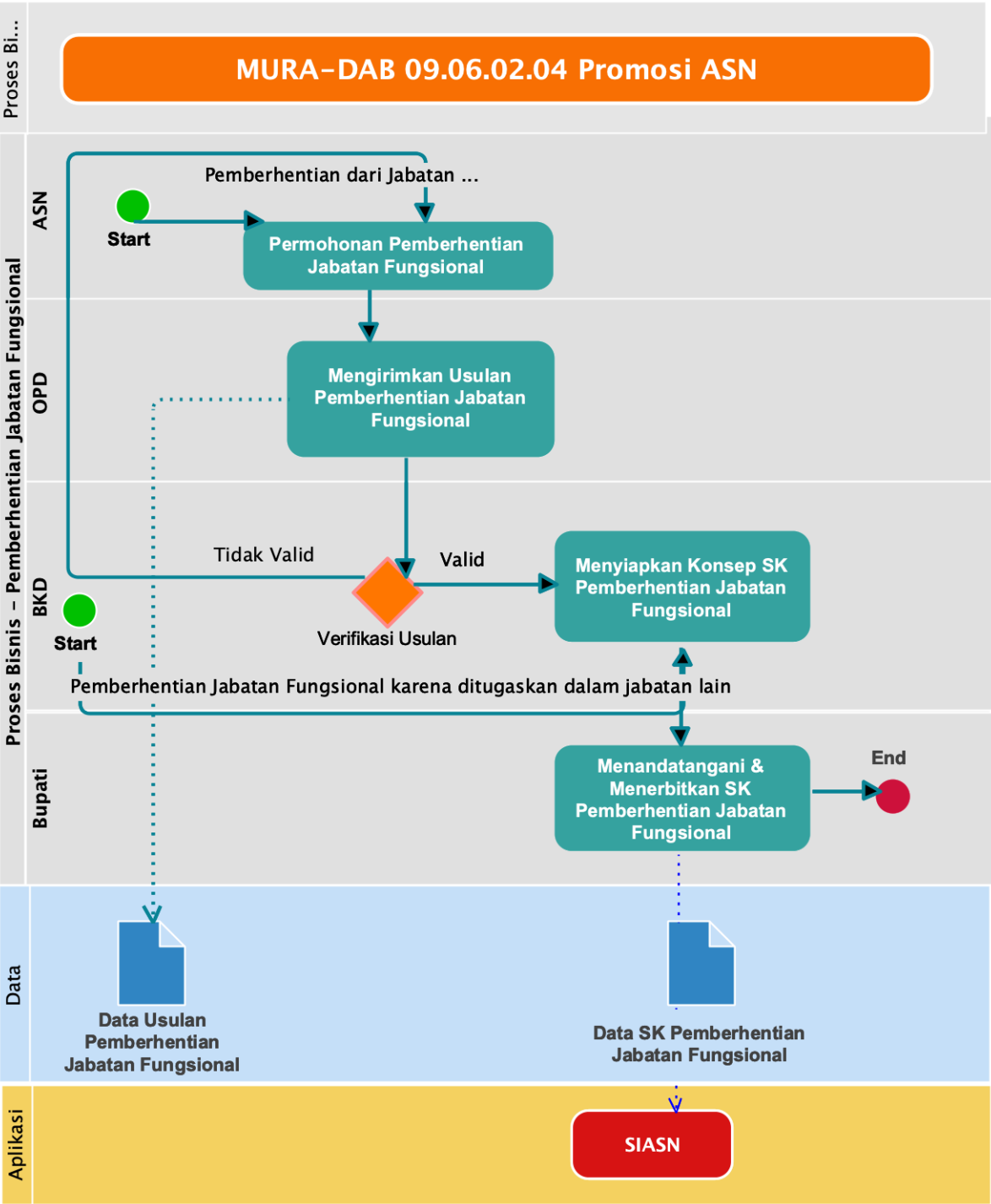


Gambar 3.2.3.1.5.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan SDM



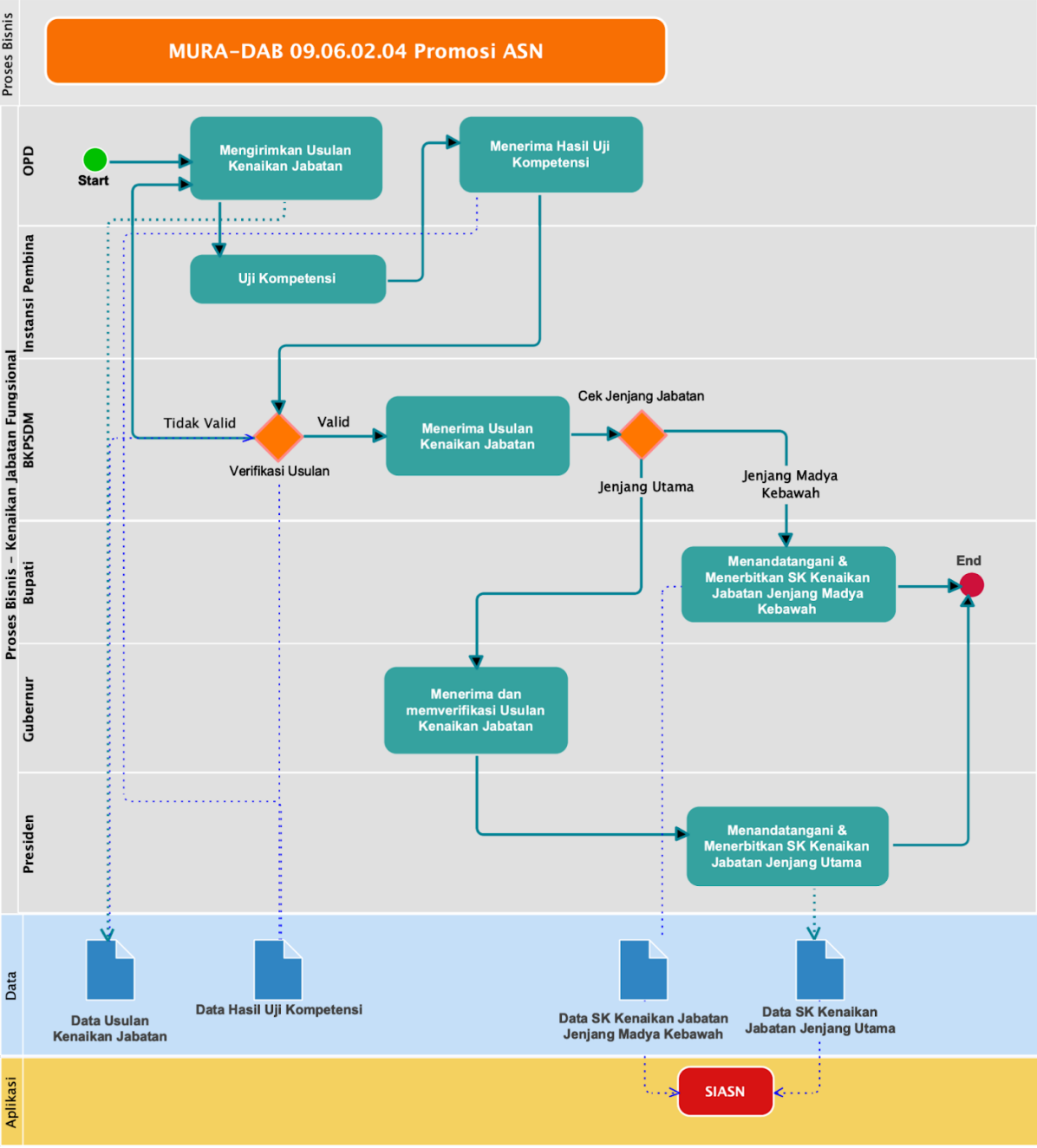
Gambar 3.2.3.1.5.2 Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional





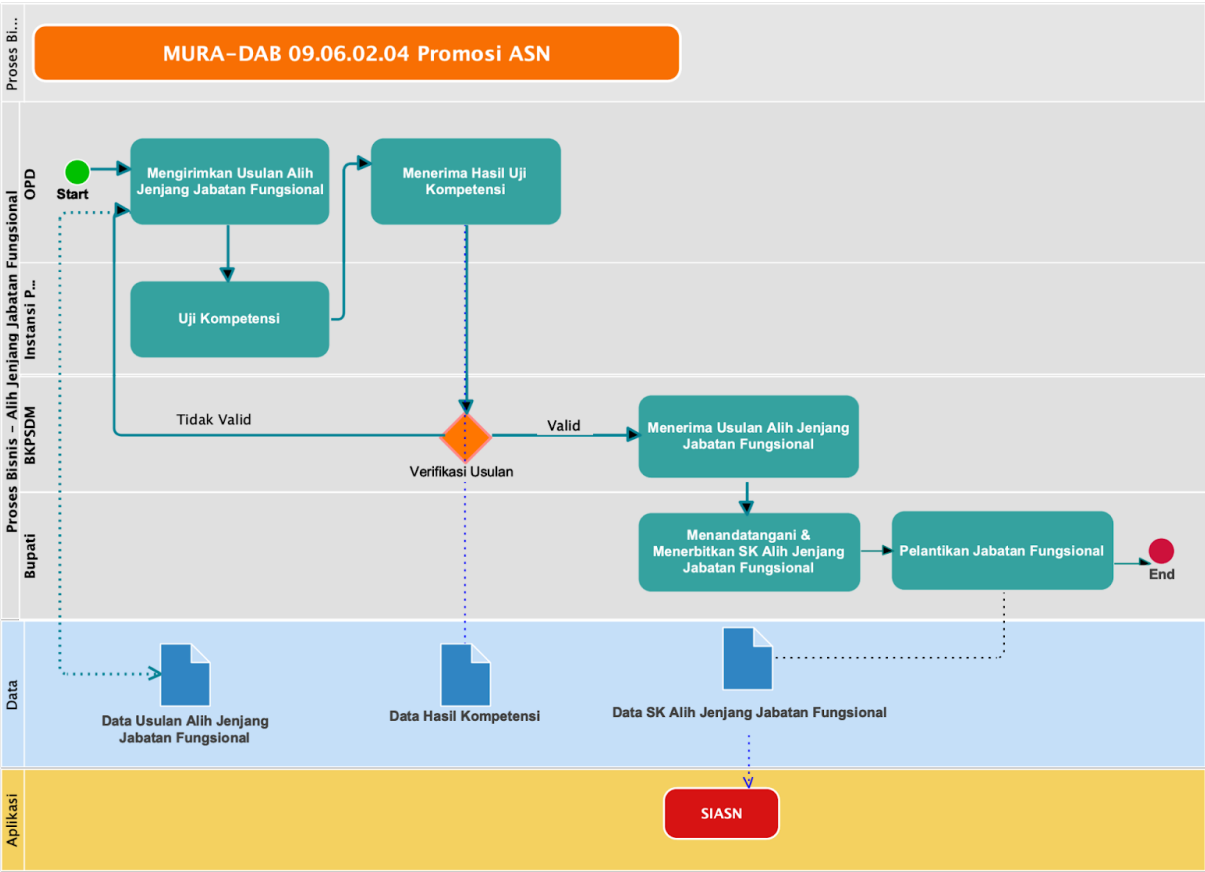
Gambar 3.2.3.1.5.5 Pemberhentian Jabatan Fungsional





Gambar 3.2.3.15.6 Kenaikan Jabatan Fungsional





Gambar 3.2.3.1.5.6 Alih Jenjang Jabatan Fungsional

3.2.3.1.6. Layanan Kinerja Pegawai SPBE

Layanan Kinerja Pegawai SPBE yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai fungsi sebagai berikut:

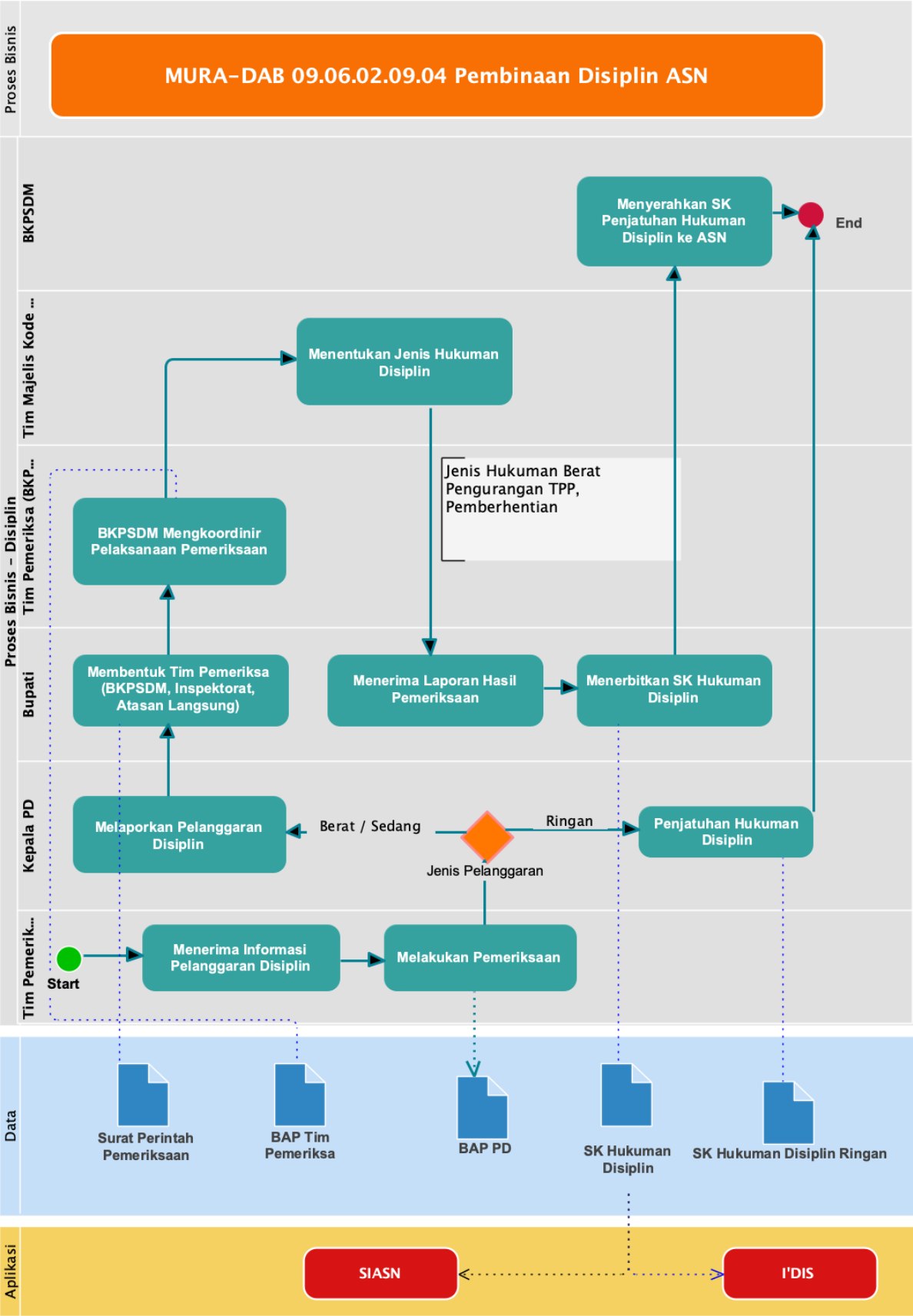
- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian; dan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai dan informasi kepegawaian.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan kepegawaian yang terdapat di Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia adalah:

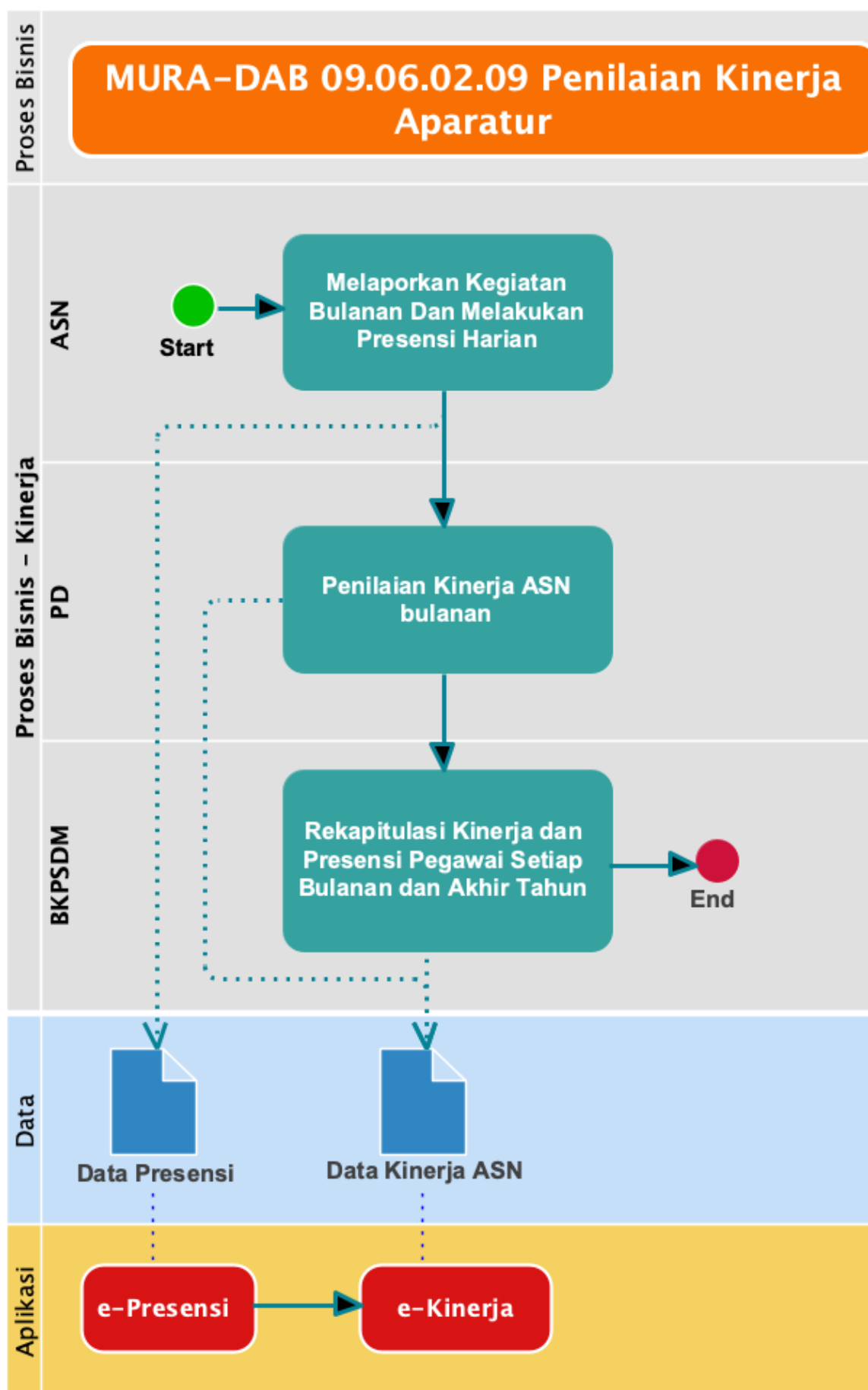
Tabel 3.2.3.1.6.1 Layanan Kinerja Pegawai SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Disiplin	Kinerja disiplin ASN (Aparatur Sipil Negara) mengacu pada perilaku dan tindakan ASN dalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
2	Kinerja	Kinerja merujuk pada kemampuan atau hasil yang dicapai seseorang, tim, organisasi, atau sistem dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia memiliki 2 sub layanan yaitu Layanan Disiplin dan Kinerja. Adapun layanan Kinerja Pegawai ini Aplikasi yang digunakan adalah SIASN, l'DIS, e-Presensi, dan e-Kinerja.



Gambar 3.2.3.1.6.1 Disiplin



Gambar 3.2.3.1.6.1 Kinerja

3.2.3.1.7. Layanan Kearsipan Dinamis SPBE

Sebagai upaya untuk menunjang layanan kearsipan dinamis SPBE, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kearsipan dan perpustakaan dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan kearsipan;
- d. Pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

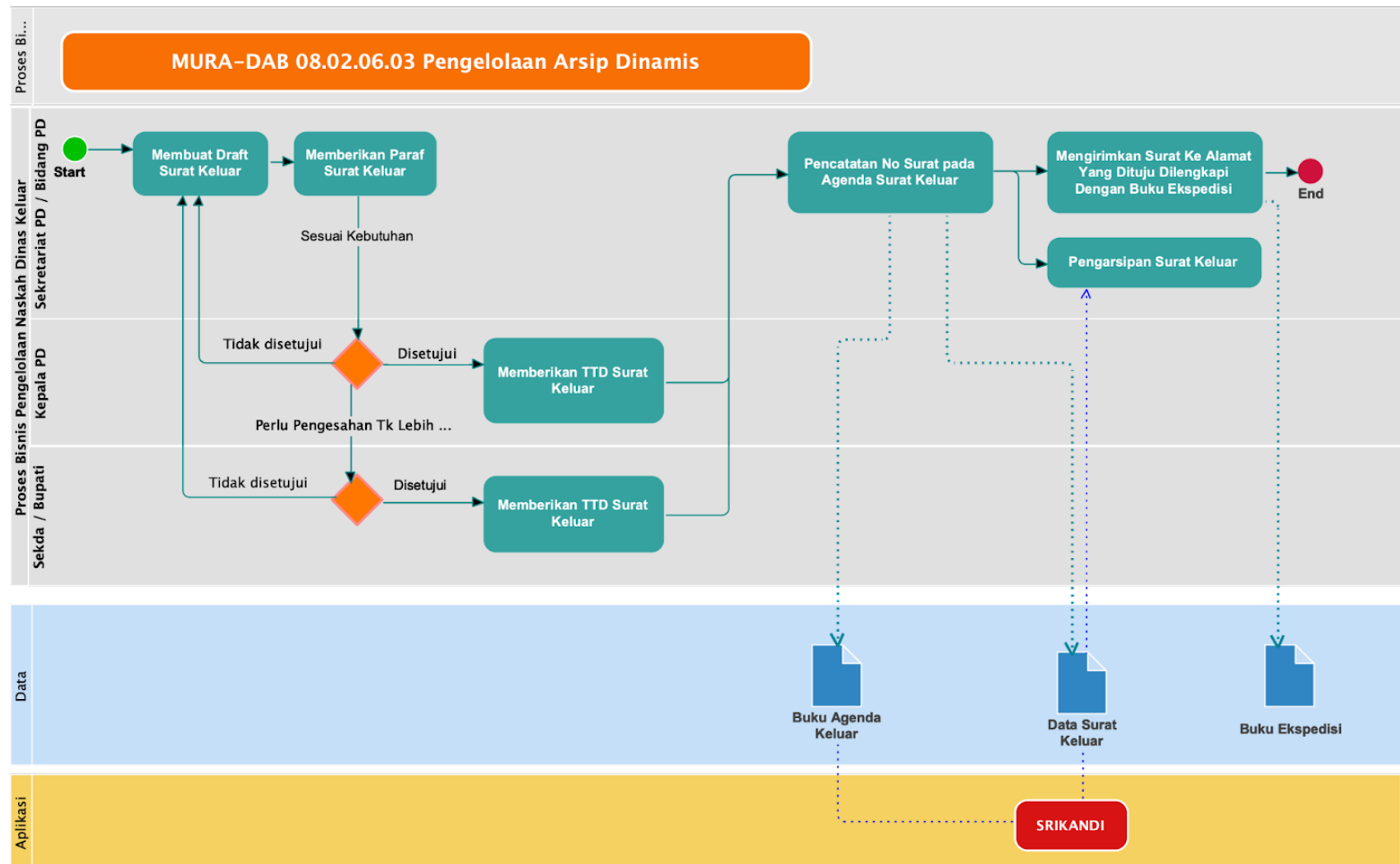
Berdasarkan fungsi tersebut, layanan kearsipan dinamis yang terdapat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

Tabel 3.2.3.1.7.1 Layanan Kearsipan Dinamis

No.	Deskripsi	Uraian
1	Tata Naskah Dinas Masuk	Prosedur pengelolaan surat dinas yang masuk ke suatu organisasi.
2	Tata Naskah Dinas Keluar	Prosedur penyusunan, penulisan, dan pengiriman surat dinas dari suatu organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memiliki 2 sub layanan yaitu Tata Naskah Dinas Masuk dan Tata Naskah Dinas Keluar. Adapun aplikasi yang digunakan adalah SRIKANDI.





Gambar 3.2.3.1.7.2 Tata Naskah Dinas Keluar

3.2.3.1.8. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPBE

Layanan pengawasan internal pemerintah (SPIP) SPBE yang diampu oleh Inspektorat dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pokok, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang Pembangunan, Pemerintahan, dan Kemasyarakatan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan.

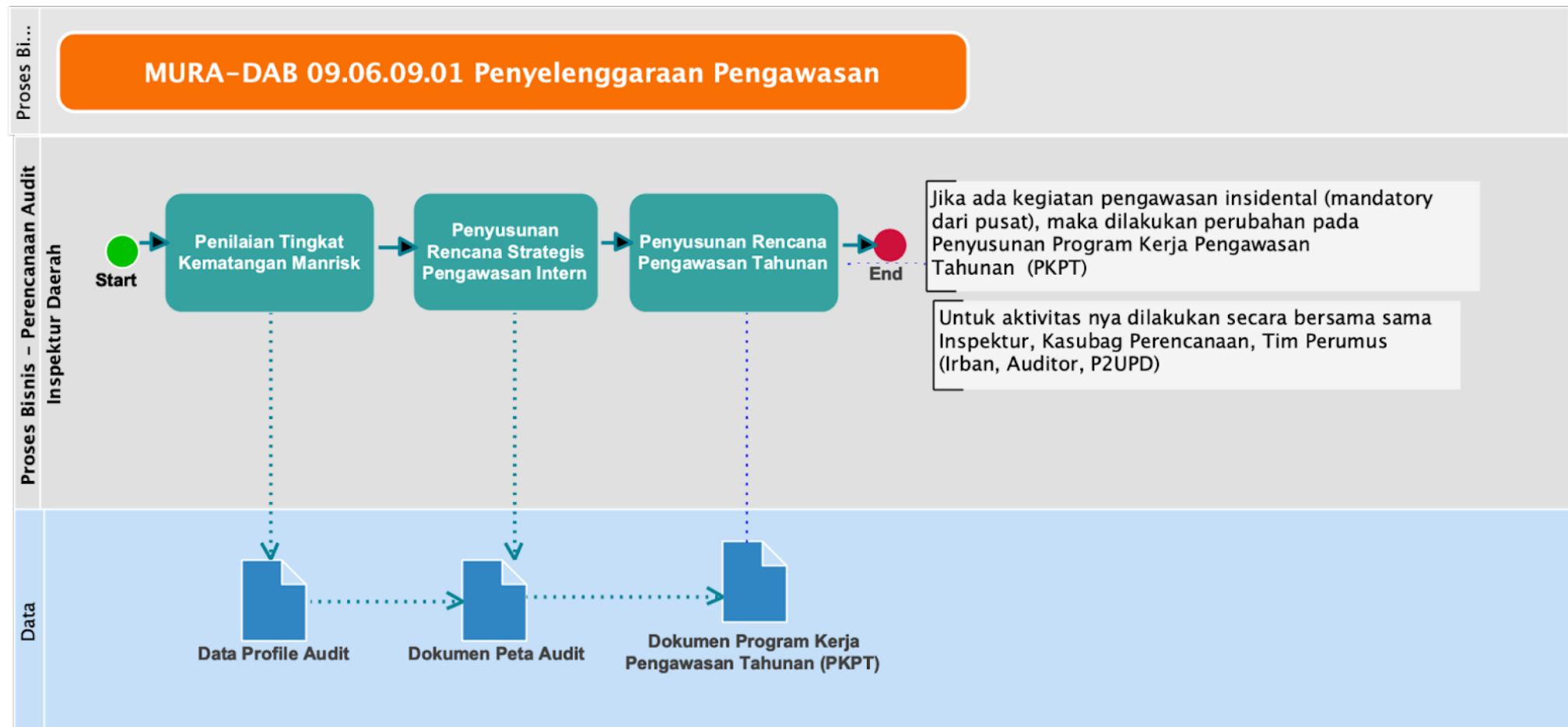
Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) yang terdapat di Inspektorat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.1.8.1 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah SPBE

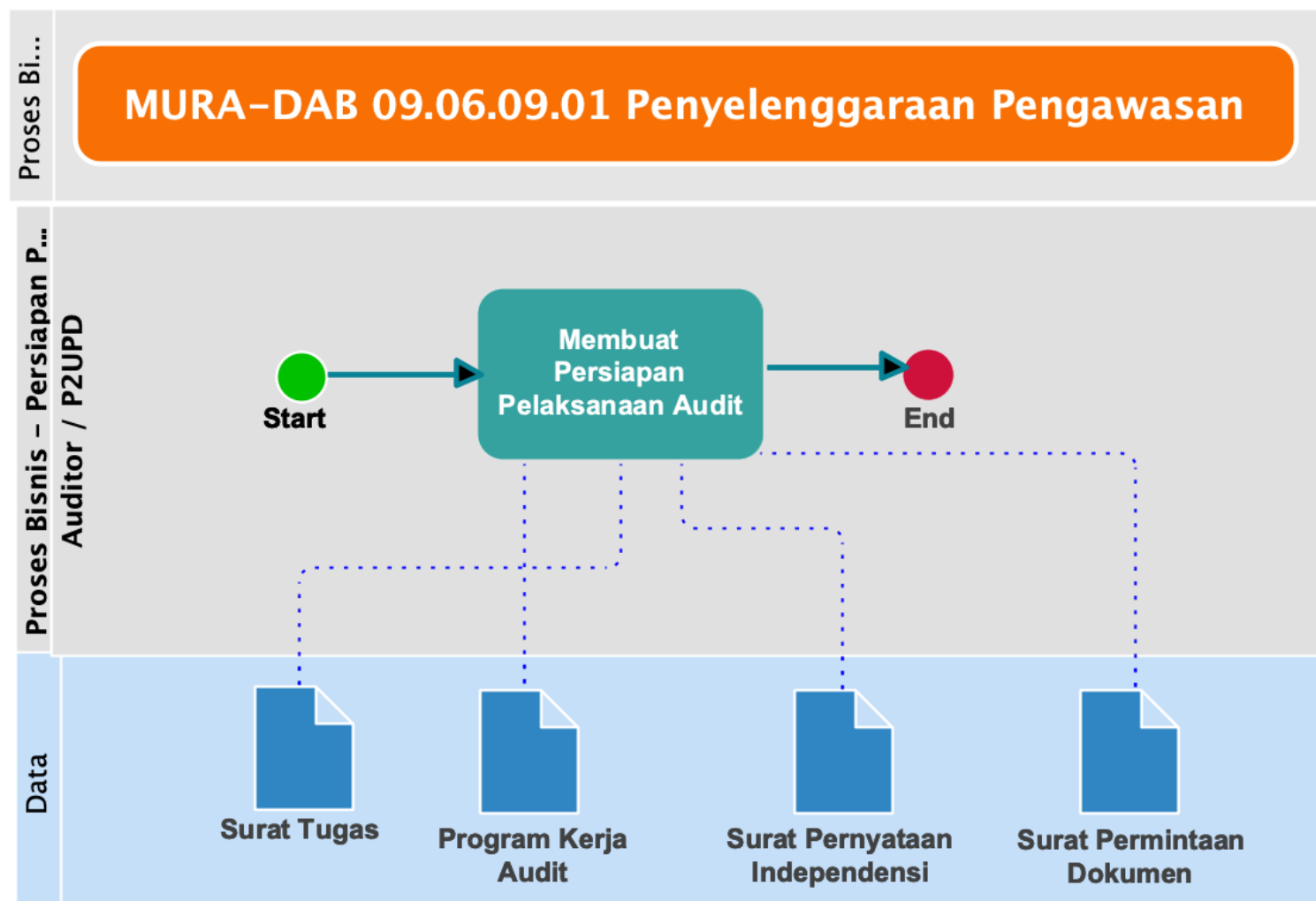
No.	Nama Layanan	Deskripsi
1	Perencanaan Audit	Perencanaan Audit adalah proses menentukan tujuan audit, mengidentifikasi risiko, membangun rencana audit, dan menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan audit.
2	Persiapan Pelaksanaan Audit	Persiapan Pelaksanaan Audit adalah tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan audit, seperti: identifikasi tujuan dan ruang lingkup audit, pemilihan auditor, pembuatan rencana audit, persiapan audit, pelaksanaan audit, dan penyusunan hasil audit.
3	Pelaksanaan Audit	Pelaksanaan Audit adalah proses yang menggunakan metodologi yang terencana untuk menilai pelaksanaan pemerintah dalam hal keuangan, operasional, manajemen dan lain-lain.
4	Tindak Lanjut Audit	Tindak Lanjut Audit adalah tindakan yang diambil berdasarkan hasil audit. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa temuan audit diatasi dan diselesaikan dengan benar.

Inspektorat memiliki 4 sub layanan pengawasan internal pemerintah yang meliputi: Perencanaan Audit, Persiapan Pelaksanaan Audit, Pelaksanaan Audit, dan Tindak lanjut Audit.

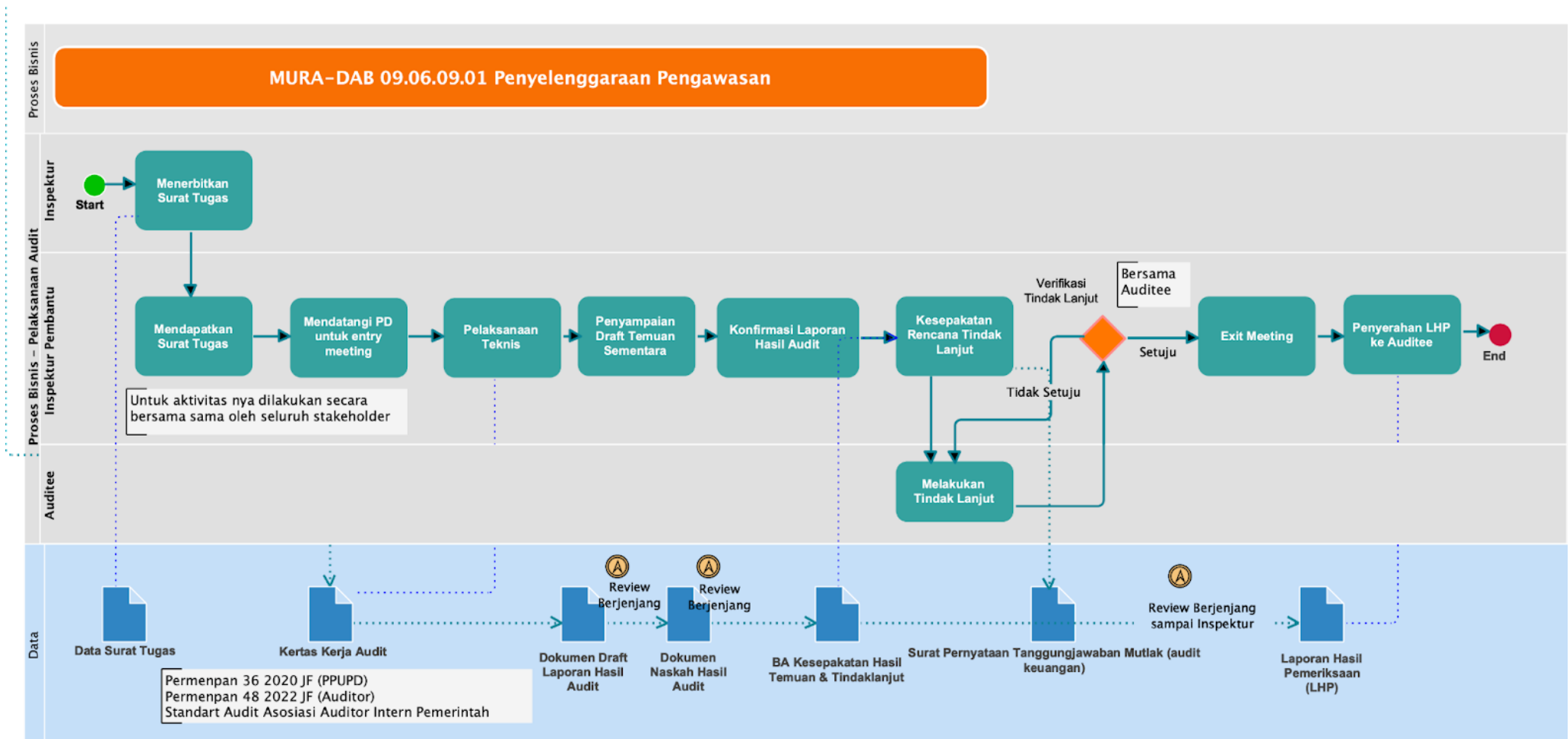




**Gambar 3.2.3.1.8.1.** Perencanaan Audit



**Gambar 3.2.3.1.8.2.** Persiapan Pelaksanaan Audit



**Gambar 3.2.3.1.8.3. Pelaksanaan Audit**



**3.2.3.1.9. Layanan Pengaduan Publik SPBE**

Upaya untuk menunjang layanan pengaduan publik SPBE, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

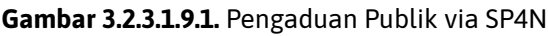
- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan pengaduan publik SPBE yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian sebagai berikut:

**Tabel 3.2.3.1.9.1** Layanan Pengaduan Publik SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Pengaduan Publik via SP4N	Pengaduan Publik via SP4N adalah sistem penerimaan, penanganan, pengawasan, dan pemberian tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik secara online, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam menyampaikan masalah atau keluhan kepada pemerintah, dengan singkat, jelas, dan padat.

Diskominfo memiliki 1 sub layanan yaitu Pengaduan Publik via SP4N. Adapun aplikasi yang digunakan dalam layanan pengaduan publik adalah SP4N Lapor.



3.2.3.1.10. Layanan Data Terbuka SPBE

Sebagai upaya untuk menunjang layanan data terbuka SPBE, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang statistik yang merupakan kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut:

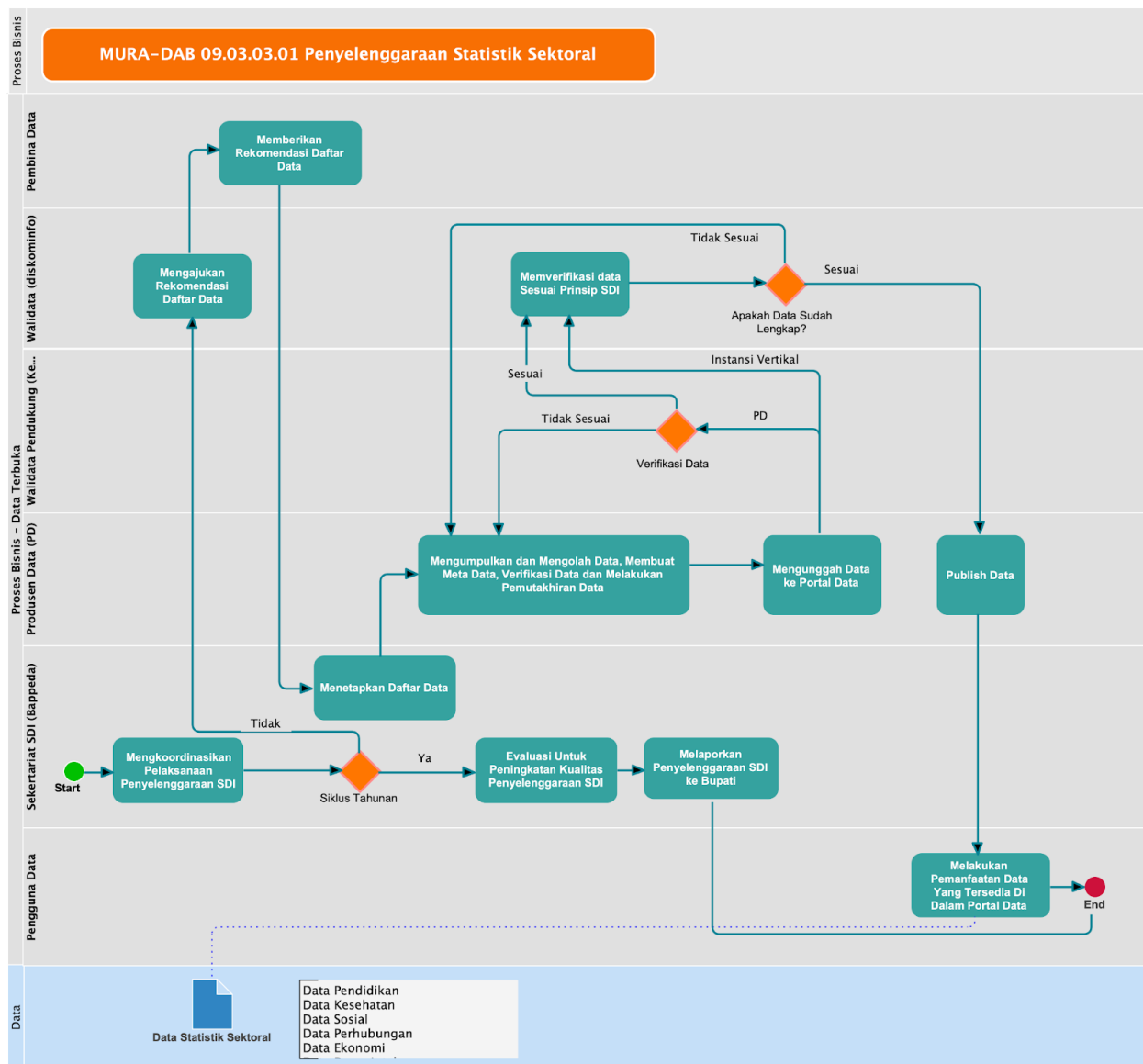
- a. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
- f. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan data terbuka yang terdapat di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian adalah:

Tabel 3.2.3.1.10.1 Layanan Data Terbuka SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Layanan Data Terbuka	Layanan Data Terbuka adalah inisiatif yang menyediakan akses bebas dan tak terbatas ke sumber data yang dapat digunakan oleh publik. Tujuan utama yang diusung oleh layanan data terbuka adalah untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh pemerintah dan badan publik lainnya tersedia untuk publik secara bebas dan tak terbatas.

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 1 sub layanan yaitu layanan Data Terbuka





3.2.3.1.11. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE

Layanan akuntabilitas kinerja organisasi SPBE yang diampu oleh Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang organisasi. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

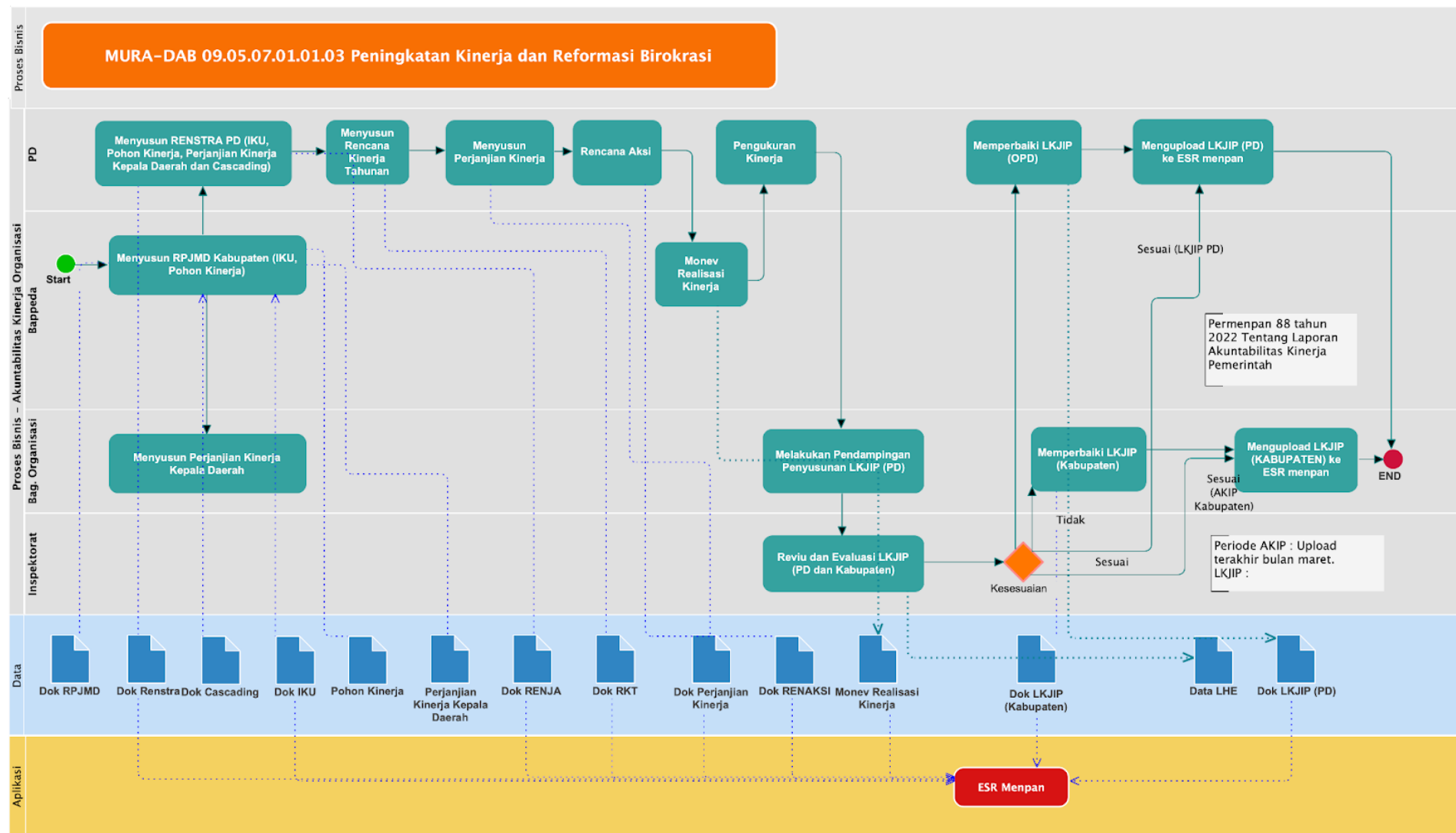
- a. Penyusunan program kerja Bagian Organisasi;
- b. Penyiapan bahan kebijakan bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi bidang kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- d. Perumusan kebijakan strategis, perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan bidang kelembagaan Pemerintah Daerah;
- e. Penataan kelembagaan dan tatalaksana, standardisasi dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- f. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, tatalaksana dan pelayanan publik, serta reformasi birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- h. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan akuntabilitas kinerja organisasi yang terdapat di Bagian Organisasi adalah:

Tabel 3.2.3.1.11.1 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Layanan yang menyediakan informasi mengenai kinerja suatu lembaga atau instansi pemerintahan dengan tujuan untuk memastikan bahwa lembaga atau instansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan sumber daya publik yang dimilikinya

Bagian Organisasi memiliki 1 sub layanan yaitu Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Aplikasi yang digunakan adalah ESR-Menpan.



**Gambar 3.2.3.1.11.1 Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

3.2.3.1.12. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE

Layanan pengadaan barang dan jasa SPBE yang diampu oleh Bagian Pengadaan Barang atau Jasa yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengkajian dan standarisasi, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

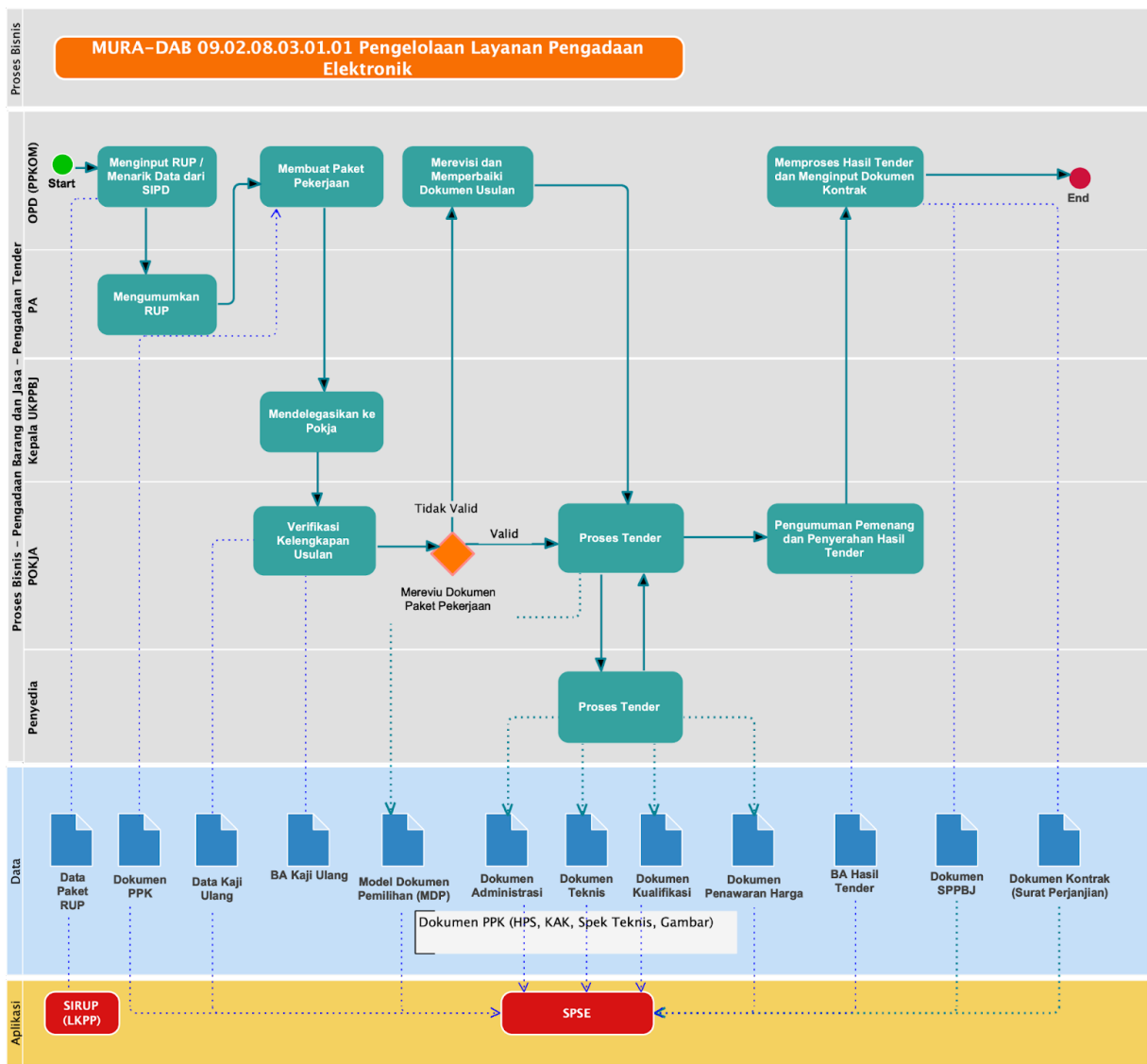
- a. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang pengkajian dan standarisasi pengadaan barang/jasa;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan di bidang perencanaan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah dan pelayanan dibidang pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan pengadaan barang dan jasa yang terdapat di Bagian Pengadaan Barang atau Jasa adalah:

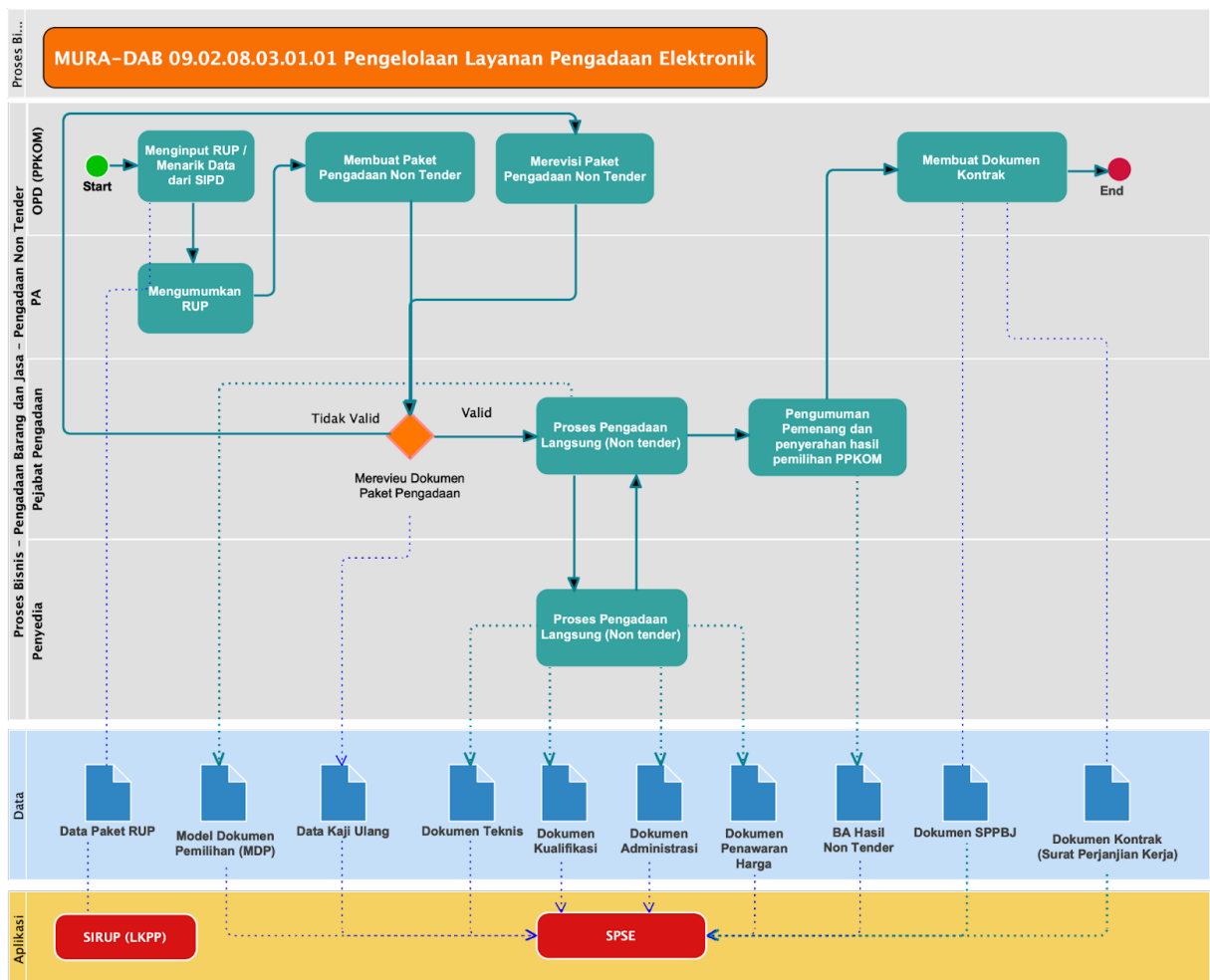
Tabel 3.4.1.12.1 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Pengadaan Barang dan Jasa (Tender)	Proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan cara pembukaan lelang atau tender terbuka
2.	Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender)	Proses pengadaan barang atau jasa yang tidak melalui proses lelang atau tender

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 2 sub layanan yaitu Pengadaan Barang dan Jasa (Tender) dan Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender). Pada layanan pengadaan ini Aplikasi yang digunakan adalah SPSE dan SIRUP (LKPP).



**Gambar 3.4.1.12.1.** Pengadaan Barang dan Jasa (Tender)



**Gambar 3.4.1.12.2.** Pengadaan Barang dan Jasa (Non Tender)

### 3.2.3.1.13. Layanan JDIH SPBE

Layanan JDIH SPBE yang diampu oleh Bagian Hukum melaksanakan pengkoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, sebagai wakil pemerintah pusat bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan Jaringan Dokumentasi serta Informasi Hukum. Adapun untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Hukum melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

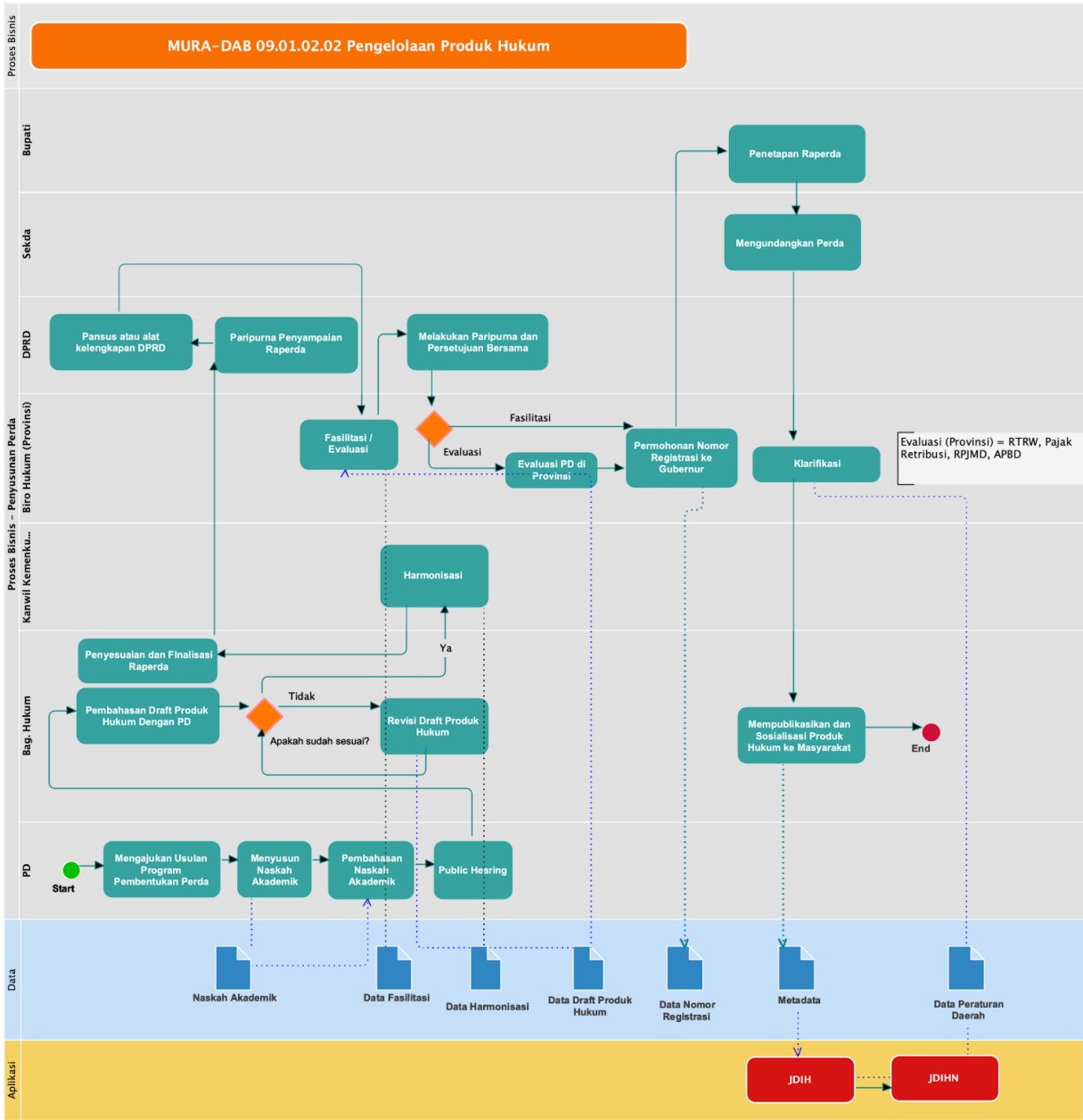
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum; dan
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan JDIH SPBE yang terdapat di Bagian Hukum adalah sebagai berikut:

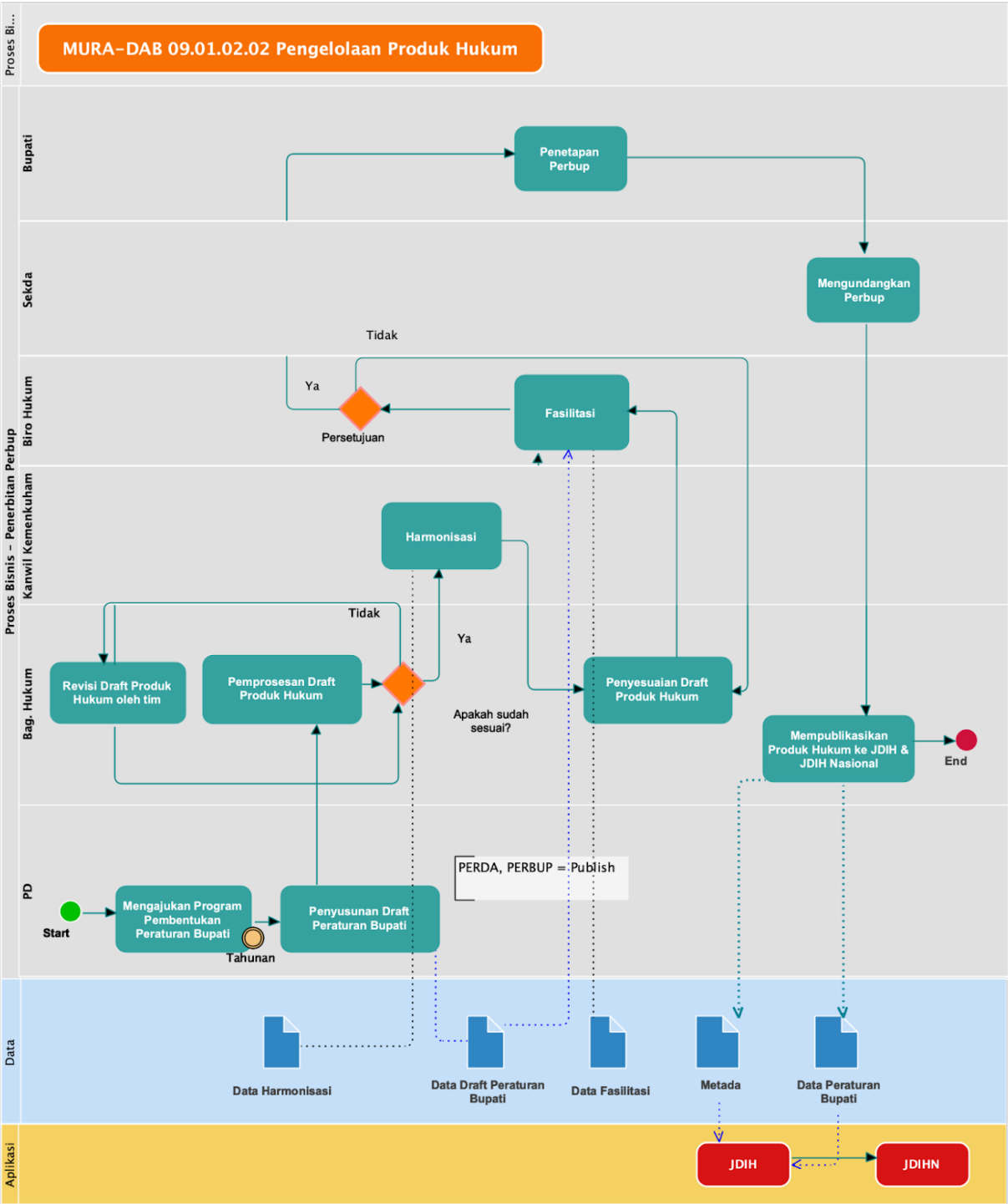
**Tabel 3.2.3.1.13.1** Layanan JDIH SPBE

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Penyusunan Perda	Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) adalah proses pembuatan aturan hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang berlaku di wilayah daerah.
2.	Penyusunan Perbup	Proses penyusunan peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah (Bupati atau Walikota) untuk mengatur urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

Bagian Hukum memiliki 2 sub layanan publik yaitu Penyusunan Perda dan Penyusunan Perbup. Pada layanan JDIH SPBE Aplikasi yang digunakan adalah JDIHN dan JDIH.



Gambar 3.4.1.13.1. Penyusunan Perda



Gambar 3.4.1.13.2. Penerbitan Perbup



3.2.3.1.14. Layanan Publik SPBE (Bidang Perizinan)

Sebagai upaya untuk menunjang layanan publik SPBE bidang perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah dengan fungsi sebagai berikut:

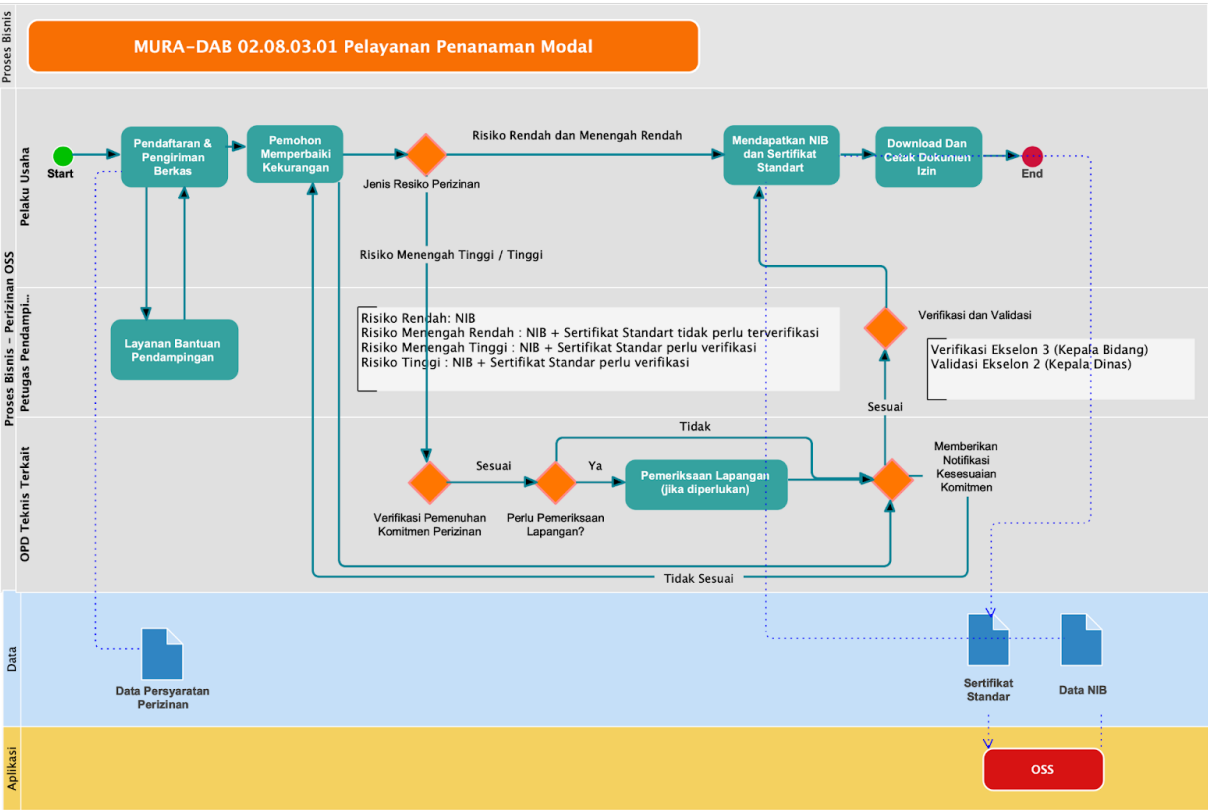
- a. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal;
- b. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas.

Berdasarkan fungsi tersebut, layanan publik perizinan yang terdapat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah:

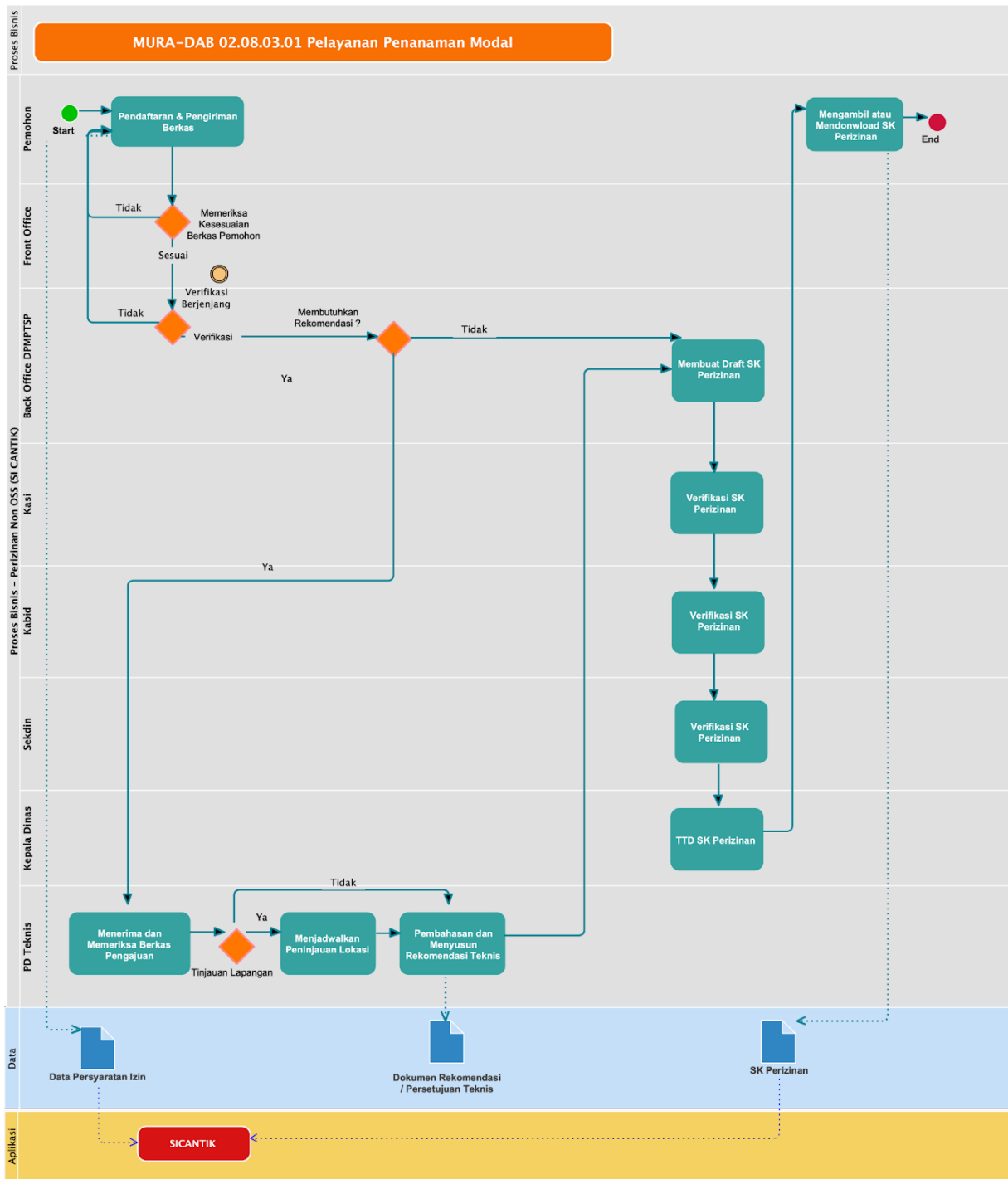
Tabel 3.2.3.1.14.1 Layanan Publik SPBE (Perizinan)

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Perizinan Berusaha (OSS)	Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan izin kepada individu atau entitas yang ingin memulai atau mengelola usaha bisnis. Tujuan layanan ini adalah memfasilitasi dan menyederhanakan proses perizinan sehingga memudahkan pelaku usaha dalam memulai atau mengembangkan bisnisnya.
2.	Perizinan Non Berusaha (SICANTIK)	Layanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan atau proyek tertentu yang tidak bersifat bisnis. Layanan ini mencakup pemberian izin untuk kegiatan non-bisnis seperti acara khusus, penggunaan lahan, atau proyek pembangunan yang bukan berorientasi pada kegiatan usaha komersial. Tujuannya adalah untuk mengatur dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki 2 sub layanan perizinan yaitu Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha. Adapun aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan berusaha adalah OSS dan pelayanan non berusaha adalah SICANTIK.



Gambar 3.2.3.1.14.1 Perizinan OSS



**Gambar 3.2.3.1.14.2 Perizinan SICANTIK**

3.2.3.1.15. Layanan Publik SPBE (Kemiskinan)

Layanan Publik SPBE Bidang Kemiskinan yang diampu oleh Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Adapun dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial melaksanakan fungsi:

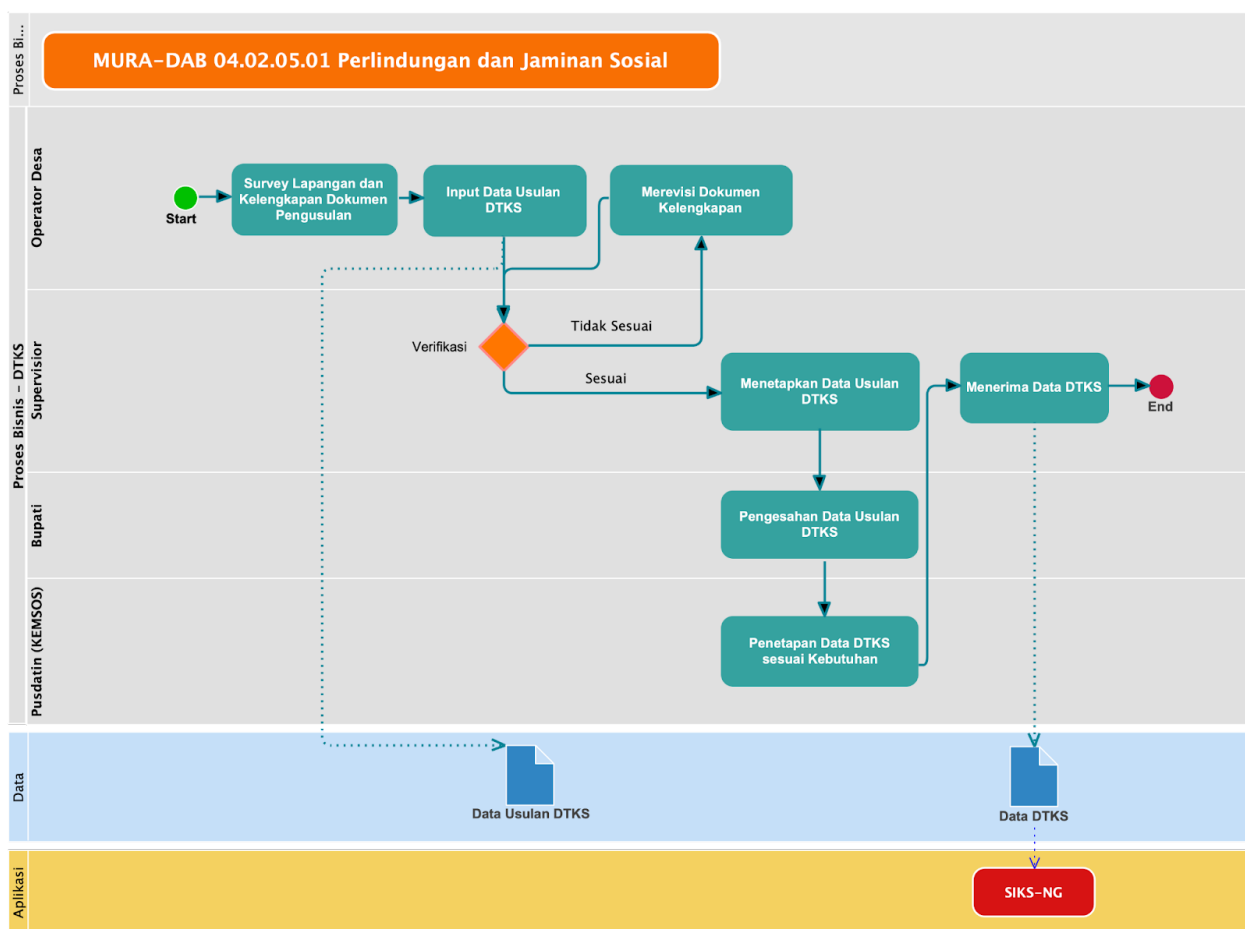
- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan publik yang terdapat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah

Tabel 3.2.3.1.15.1 Layanan Publik SPBE (Kemiskinan)

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Sistem pemerintah yang mengintegrasikan data dari berbagai program kesejahteraan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. DTKS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan mengidentifikasi penerima manfaat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Dinas Sosial memiliki 1 sub layanan yaitu DTKS. Adapun layanan publik terkait kemiskinan Aplikasi yang digunakan adalah SIKS-NG.



**Gambar 3.2.3.1.16.1** Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

3.2.3.1.16. Layanan Publik SPBE (Stunting)

Pelaksanaan Layanan publik SPBE bidang pendidikan pada Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan. Adapun tugas Dinas Kesehatan dalam melaksanakan fungsi antara lain:

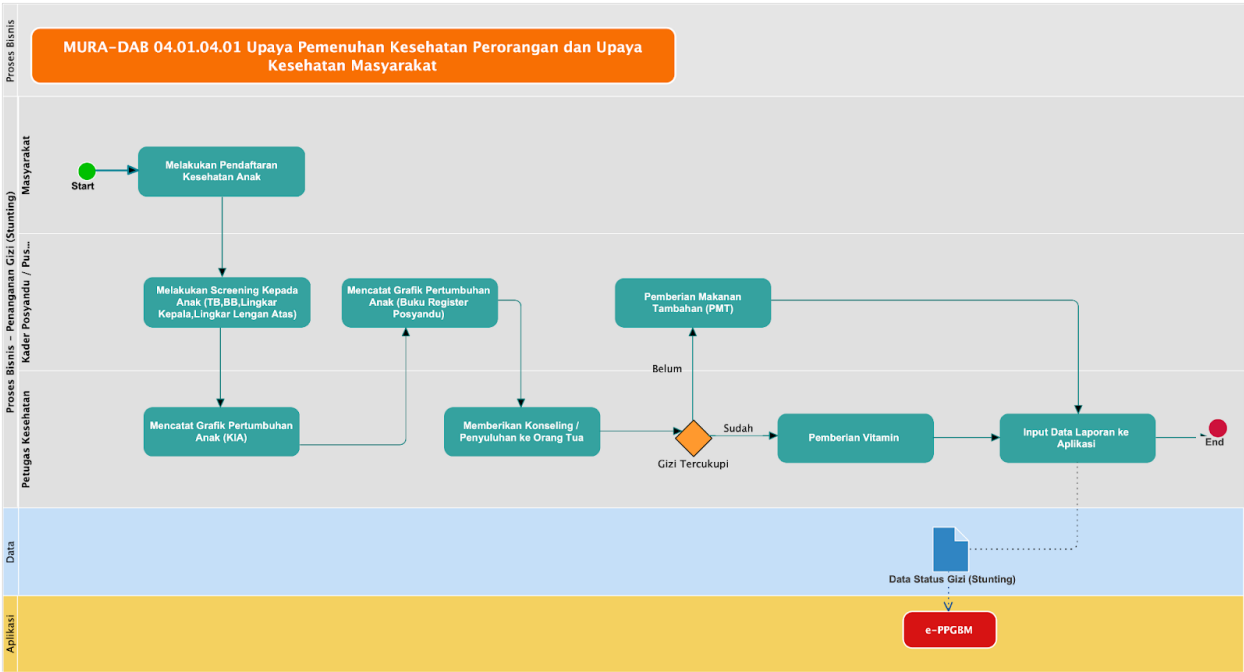
- a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis Rumah Sakit Daerah.

Adapun berdasarkan fungsinya maka layanan publik Penanganan Gizi (Stunting) yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah:

Tabel 3.2.3.1.16.1 Layanan Publik SPBE (Stunting)

No.	Nama Layanan	Deskripsi
1.	Penanganan Gizi (Stunting)	Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah stunting, yaitu kondisi pertumbuhan anak yang tidak sesuai dengan potensi genetiknya akibat kekurangan gizi kronis, dengan memberikan program dan layanan kesehatan serta nutrisi yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi stunting pada anak-anak.

Dinas Kesehatan memiliki 1 Sub layanan yaitu Penanganan Gizi (Stunting). Layanan publik bidang kesehatan urusan stunting sudah menggunakan aplikasi e-PPGBM.



Gambar 3.2.3.1.16.1 Penanganan Gizi (Stunting)

3.2.4.     **Arsitektur Aplikasi Eksisting**

Arsitektur aplikasi eksisting berisi gambaran mengenai berbagai komponen seperti nama aplikasi, basis aplikasi, basis data. Arsitektur layanan juga menggambarkan keterkaitan antara aplikasi dengan layanan dan output datanya. Arsitektur ini disusun bertujuan untuk menyediakan panduan dan struktur untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal, memiliki keamanan yang memadai, dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya.

3.2.4.1.   **Katalog Aplikasi Eksisting**

Aplikasi dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah aplikasi internal daerah maupun instansi pusat yang digunakan dalam menunjang layanan seluruh perangkat daerah. Berikut ini disajikan daftar aplikasi eksisting yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya baik aplikasi dari instansi pusat maupun aplikasi internal daerah. Tabel 3.2.4.1.1. merupakan ringkasan dari katalog aplikasi eksisting Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Adapun katalog aplikasi eksisting selengkapnya ditunjukkan pada link: <https://bit.ly/metadataspbemurungraya>.

**Tabel 3.2.4.1.1.** Daftar Aplikasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.02.01	e-Presensi	Sistem Informasi Presensi ASN	<a href="http://e-kinerja.murungrayakab.go.id">e-kinerja.murungrayakab.go.id</a>	Layanan Presensi ASN	Data Presensi ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.02	SIASN	Aplikasi Sistem Informasi ASN	<a href="https://siasn-instansi.bkn.go.id/">https://siasn-instansi.bkn.go.id/</a>	Layanan Cuti ASN Layanan Kenaikan Pangkat/Golongan Layanan Pemutakhiran Data Kepegawaian Layanan Pensiun ASN Layanan Pencantuman Gelar Layanan Penilaian	Data Cuti PNS Data Jenjang Pangkat/Golongan ASN Data Kepegawaian ASN Data Pensiun ASN Data Gelar Pendidikan ASN Data Nominasi ASN Data	Web Based	SQL Server	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia



ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
				Kinerja ASN/BAPERJAKAT Layanan Pemberhentian Pegawai Layanan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Layanan Disiplin Pegawai Layanan Kebutuhan ASN	Pemberhentian Pegawai Data SK Alih Jenjang Jabatan Data SK Hukuman Disiplin Data SK Pengangkatan Pertama Kali Jabatan Fungsional Data SK Kenaikan Jabatan Data SK Kenaikan Pangkat Data SK Pemberhentian Jabatan Data Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Data Persetujuan Teknis Pemberhentian Data SK Penetapan Formasi Data SK Pengangkatan CASN					
MURA-DAA 01.02.03	e-Kinerja BKN	Elektronik Kinerja	<a href="https://kinerja.bkn.go.id/login">https://kinerja.bkn.go.id/login</a>	Layanan Kinerja ASN	Data Kinerja ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.02.04	i'DIS BKN	Integrated Discipline	<a href="https://idis.bkn.go.id/login">https://idis.bkn.go.id/login</a>	Layanan Disiplin Pegawai	Data Disiplin ASN Data SK Hukuman Disiplin	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.05	e-Formasi Menpan	Sistem Informasi Formasi ASN	<a href="https://formasi.menpan.go.id/live/">https://formasi.menpan.go.id/live/</a>	Layanan Kebutuhan ASN	Data Usulan Formasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.06	SSCASN	Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara	<a href="https://sscASN.bkn.go.id/">https://sscASN.bkn.go.id/</a>	Layanan Kebutuhan ASN	Data Formasi ASN Data CASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.07	ULA Kemendagri	Unit Layanan Administrasi Kementerian Dalam Negeri	<a href="https://ula.kemendagri.go.id/">https://ula.kemendagri.go.id/</a>	Layanan Penghargaan Satyalancana Karya Satya	Data Penerima Satyalancana Karya Satya	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.08	SIAPEK BKN	Sistem Aplikasi Pengusulan Karpeg, Karis, Karsu	<a href="https://siapek2.com/">https://siapek2.com/</a>	Layanan Karis/Karsu	Data Karis/Karsu PNS	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.09	SIMPEG	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian		Layanan Profil Pegawai	Data Profil Pegawai	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.10	SIMPEGNAS	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional	<a href="https://simpegnas.go.id">https://simpegnas.go.id</a>	Layanan Profil Pegawai	Data Profil Pegawai	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia
MURA-DAA 01.02.11	e-Office	Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar		Layanan Kearsipan Dinamis	Data Jabatan Fungsional ASN	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.01.01	e-BPHTB	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Elektronik		Layanan BPHTB	Data BPHTB Data SSPD Data Laporan Pembayaran BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAA 02.02.01	e-CIS	Sistem Informasi Penyimpanan Surat Resmi Daerah		Layanan BPHTB	Data BPHTB Data SSPD Data Laporan Pembayaran BPHTB	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAA 02.02.02	SIMDA Pendapatan	Sistem Informasi Manajemen Daerah Pendapatan		Layanan Penagihan Pajak Retribusi	Data Penagihan Pajak Retribusi	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAA 01.01.01	e-SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik	<a href="https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8045864/pemerintah-kab-badung/permohonan-surat-pemberitahuan-pajak-terhutang-sppt-pbb-p2">https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8045864/pemerintah-kab-badung/permohonan-surat-pemberitahuan-pajak-terhutang-sppt-pbb-p2</a>	Layanan Pajak PBB-P2	Data SPPT Data Objek PBB P2 Data Subjek PBB P2	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAA 01.01.02	SISMIOP	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak		Layanan Pajak PBB Layanan BPHTB	Data Pajak PBB Data BPHTB Data SSPD Data Laporan Pembayaran BPHTB	Desktop	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah
MURA-DAA 01.01.03	SIMPBB	Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan		Layanan Pajak PBB-P2	Data SPPT Data Objek PBB P2 Data Subjek PBB P2	Desktop	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Badan Pendapatan Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.02.01	FMIS	Financial Management Information System	<a href="https://fmis.bpkp.go.id/">https://fmis.bpkp.go.id/</a>	Layanan Retribusi Kebersihan/Persampahan Layanan Pengelolaan Keuangan Daerah Layanan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) Layanan Penerbitan SP2D	Data Penerimaan Retribusi Kebersihan/Persampahan Data Pengelolaan Keuangan Daerah Data SPD Data SP2D Data SPJ Data SPP Data SPM Data STS Data BKU Data Perda Pertanggungjawaban APBD Data Perbup Penjabaran APBD Data SPTJM SPM	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAA 01.02.02	SIMDA BMD	Sistem Informasi Manajemen Daerah – Barang Milik Daerah	<a href="https://simda-online.id/">https://simda-online.id/</a>	Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Data Barang Milik Daerah Data Pemanfaatan Barang Milik Daerah Data Penghapusan Barang Milik Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
MURA-DAA 01.02.03	SIMSTRADA	Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa	<a href="https://djpk.kemendagri.go.id/simstrada/">https://djpk.kemendagri.go.id/simstrada/</a>	Layanan Pencairan Dana Desa dan ADD	Data Dana Desa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.02.04	KRISNA	Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran	<a href="https://murungraya.kab.krisna.systems/gov2login.php?cmd=login">https://murungraya.kab.krisna.systems/gov2login.php?cmd=login</a>	Layanan DAK	Data DAK	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAA 01.02.05	e-Monev Bangda	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah Elektronik	<a href="https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev">https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev</a>	Layanan Monev Pembangunan Daerah	Data Pembangunan Daerah	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAA 01.02.06	SIPD-RI	Sistem Informasi Pemerintah Daerah	<a href="https://sipd-ri.kemendagri.go.id/landi-ng-page">https://sipd-ri.kemendagri.go.id/landi-ng-page</a>	Layanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Layanan Monev Dokumen Perencanaan Layanan Penyusunan Standar Satuan Harga Layanan Penyusunan Anggaran	Data Dokumen Perencanaan Data Monev Dokumen Perencanaan Data Standart Satuan Harga Data KUA Data PPAS Data Penganggaran Data DPA Data Anggaran Kas Data RKA OPD Data RAPBD Data Rancangan RPJMD	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
MURA-DAA 01.01.01	JDIH	Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	<a href="https://jdih.murungrayakab.go.id/">https://jdih.murungrayakab.go.id/</a>	Layanan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Daerah	Data Produk Hukum Daerah Data Harmonisasi Data Draft Perbup Data Fasilitasi Data Perbup Data Naskah Akademik Produk	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Bagian Hukum

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Hukum Data Nomor Registrasi Produk Hukum					
MURA-DAA 01.02.01	e-SAKIP REVIU	Sistem Aplikasi Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	<a href="http://esr.menpan.go.id">esr.menpan.go.id</a>	Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Data Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
MURA-DAA 01.02.02	e-SIMONA	Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan	<a href="http://anjababk-simona.kemendagri.go.id/">http://anjababk-simona.kemendagri.go.id/</a>	Layanan ANJAB ABK	Data ANJAB ABK	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Organisasi
MURA-DAA 02.02.01	e-SKM	Survei Kepuasan Masyarakat Forum Konsultasi Publik	<a href="http://bit.ly/pelaporanskmfkp">bit.ly/pelaporanskmfkp</a>	Layanan Survey Kepuasan Masyarakat	Data Survey Kepuasan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Bagian Organisasi
MURA-DAA 01.02.01	e-Katalog	Sistem Informasi Pengelolaan Belanja Online	<a href="https://e-katalog.lkpp.go.id/">https://e-katalog.lkpp.go.id/</a>	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAA 01.02.02	AMEL	Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal	<a href="http://lpse.murungrayakab.go.id/eproc4/amel">http://lpse.murungrayakab.go.id/eproc4/amel</a>	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAA 01.02.03	SPSE	Sistem Pengadaan Secara Elektronik	<a href="http://lpse.murungrayakab.go.id/">http://lpse.murungrayakab.go.id/</a>	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Data Pengadaan Barang dan Jasa Data Model Dokumen Pemilihan Data Kaji Ulang Data Dokumen Teknis Data Dokumen	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Kualifikasi Data Dokumen Administrasi Data Dokumen Penawaran Harga Data BA Hasil Non Tender Data Dokumen SPPBJ Data Dokumen Kontrak Data Dokumen PPK					
MURA-DAA 01.02.04	SIKAP	Sistem Informasi Kinerja Penyedia	<a href="https://sikap.lkpp.go.id/">https://sikap.lkpp.go.id/</a>	Layanan Penilaian Penyedia Barang dan Jasa Layanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Data Penilaian Penyedia Barang dan Jasa Data Penyedia Barang dan Jasa	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAA 01.02.05	SIRUP	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	<a href="https://sirup.lkpp.go.id/">https://sirup.lkpp.go.id/</a>	Layanan Rencana Umum Pengadaan	Data Rencana Umum Pengadaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Bagian Pengadaan Barang atau Jasa
MURA-DAA 01.01.01	SIKAP	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	<a href="https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/Tte_warga/index/">https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/Tte_warga/index/</a>	Layanan Administrasi Kependudukan Layanan Penyediaan Data Kependudukan	Data Kartu Keluarga Data Kartu Tanda Penduduk Data Kartu Identitas Anak Data Surat Keterangan Pindah Warga Negara Data Akta Kelahiran	Web Based	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Data Akta Kematian Data Akta Perkawinan Data Akta Perceraian Data Kependudukan					
MURA-DAA 01.01.02	IKD	Sistem Informasi Identitas Kependudukan Digital	<a href="https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web/">https://web.dukcapil.kemendagri.go.id/web/</a>	Layanan Identitas Kependudukan Digital	Data Identitas Kependudukan Digital	Web Based	Oracle	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
MURA-DAA 02.02.01	SISDMK	Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	<a href="sisdmk.kemkes.go.id/sdmk">sisdmk.kemkes.go.id/sdmk</a>	Layanan SDM Kesehatan	Data Kartu Keluarga Data Kartu Tanda Penduduk Data Kartu Identitas Anak Data Surat Keterangan Pindah Warga Negara Data Akta Kelahiran Data Akta Kematian Data Akta Perkawinan Data Akta Perceraian Data Kependudukan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan



ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.01.01	ALLRECORD ANTIGEN	Sistem Informasi Pelaporan Hasil Rapid Antigen Covid-19	<a href="https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/web/site/login">https://allrecord-antigen.kemkes.go.id/web/site/login</a>	Layanan Rapid Antigen	Data Pasien Rapid Antigen	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 01.01.01	PCare	Primary Care	<a href="https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/">https://pcare.bpjs-kesehatan.go.id/</a>	Layanan BPJS Layanan Penjaminan Klaim BPJS	Data Klaim BPJS Data Kepesertaan BPJS Data Kunjungan Pasien BPJS	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.01	ASPAK	Sistem Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan	<a href="https://aspak.kemkes.go.id">https://aspak.kemkes.go.id</a>	Layanan Sarana Prasarana Kesehatan	Data Sarana Prasarana Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.01.01	SIGIZI Terpadu	Sistem Informasi Gizi Terpadu	<a href="https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/">https://sigiziterpadu.kemkes.go.id/login_sisfo/</a>	Layanan Pelaporan Gizi Layanan Penanganan Gizi	Data Status Gizi Data Pelaporan Gizi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.01	SILANTOR	Sistem Informasi Indikator Angka Bebas Jentik	<a href="https://silantor.kemkes.go.id/">https://silantor.kemkes.go.id/</a>	Layanan DBD	Data Angka Bebas Jentik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.02	SISKOHATKES	Sistem Informasi Jamaah Haji Terpadu Kesehatan	<a href="https://siskohatkes.kemkes.go.id">siskohatkes.kemkes.go.id</a>	Layanan Kesehatan Jamaah Haji	Data Kesehatan Jamaah Haji	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.03	SIMKESWA	Sistem Informasi Kesehatan Jiwa	<a href="https://simkeswa.kemkes.go.id/login?ref=data_kasus/indikator_2">https://simkeswa.kemkes.go.id/login?ref=data_kasus/indikator_2</a>	Layanan Napza	Data Pasien Penyalahguna Napza	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.04	INM	Sistem Informasi Manajemen Mutu	<a href="https://mutufasyankes.kemkes.go.id/">https://mutufasyankes.kemkes.go.id/</a>	Layanan Implementasi Indikator Nasional Mutu	Data Capaian Indikator Nasional Mutu	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.02.05	SIMONA	Sistem Informasi Monitoring dan Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	<a href="https://simona.kemkes.go.id/simona/Login/">https://simona.kemkes.go.id/simona/Login/</a>	Layanan Kefarmasian Layanan ANJAB ABK	Data Pengelolaan Farmasi Data Farmasi Klinis	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.06	SITKO	Sistem Informasi Pelaporan Kesehatan Olahraga	<a href="https://sitko.kemkes.go.id/v2/auth/login">https://sitko.kemkes.go.id/v2/auth/login</a>	Layanan Kesehatan Kerja Pos UKK Layanan Kesehatan Olahraga	Data Pembinaan Pos UKK Data Kesehatan Olahraga	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.07	e-Sismal	Sistem Informasi Pelaporan Penderita Malaria	<a href="https://sismal.kemkes.go.id">https://sismal.kemkes.go.id</a>	Layanan RDT Malaria	Data Skrining Malaria	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.08	SIHEPI	Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Diare	<a href="https://sihepi.kemkes.go.id/">https://sihepi.kemkes.go.id/</a>	Layanan Diare	Data Balita Diare	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.09	MPDN	Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Mortalitas	<a href="http://www.mpdn.kemkes.go.id">www.mpdn.kemkes.go.id</a>	Layanan Kartu Identitas Berobat Layanan Informasi Mortalitas	Data Kartu Identitas Berobat Data Kematian Ibu Data Kematian Anak	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.10	SIPTM	Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular	<a href="https://surveilans-ptm.kemkes.go.id/">https://surveilans-ptm.kemkes.go.id/</a>	Layanan Imunisasi Layanan Kesehatan Indera Layanan Penyakit Tidak Menular	Data Imunisasi Data Deteksi Dini/Skrining Indera Data Skrining Penyakit Tidak Menular	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02.11	RENBUT	Sistem Informasi Perhitungan Kebutuhan Tenaga	<a href="https://renbut.kemkes.go.id/">https://renbut.kemkes.go.id/</a>	Layanan Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Data Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.02 12	TAKELMAS	Sistem Informasi Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	<a href="https://link.kemkes.go.id/monevTake/mas">https://link.kemkes.go.id/monevTake/mas</a>	Layanan Kesehatan Masyarakat	Data Tata Kelola Kesehatan Masyarakat	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02 13	SITB	Sistem Informasi Tuberkulosis	<a href="http://www.sitb.id/sitb/">http://www.sitb.id/sitb/</a>	Layanan Tuberkulosis	Data Tuberkulosis	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Kesehatan
MURA-DAA 02.02 14	Sistem Informasi Pengumuman Kabupaten Murung raya	Sistem Informasi untuk mengelola pengumuman kegiatan yang sudah berlangsung dan akan berlangsung di pemerintah kabupaten murung raya	<a href="http://pengumuman.murungrayakab.go.id">pengumuman.murungrayakab.go.id</a>	Layanan Media Publikasi	Data Media Publikasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02 15	Sistem Informasi Berita dan Informasi Publik	Sistem Informasi untuk pengelolaan berita dan informasi terbuka untuk publik	<a href="http://berita.murungrayakab.go.id">berita.murungrayakab.go.id</a>	Layanan Berita dan Informasi Publik	Data Berita dan Informasi Publik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02 16	SP4N Lapor	Sistem Informasi untuk pelaporan Aspirasi dan Pengaduan masyarakat atas fasilitas dan pelayanan pemerintah	<a href="http://lapor.go.id">lapor.go.id</a>	Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat	Data Aduan dan Aspirasi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02 17	PROXMOX	Sistem Operasi Virtual Machine Server	<a href="http://vps.murungrayakab.go.id">vps.murungrayakab.go.id</a>	Layanan Virtual Private Server	Data Virtual Private Server	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.02 18	Tauval SPBE	Sistem Informasi Pemantauan dan Penilaian Indeks SPBE Pemerintah	<a href="http://tauval.spbe.go.id">tauval.spbe.go.id</a>	Layanan Pemantauan dan Evaluasi SPBE	Data Evaluasi SPBE	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02 19	e-Mail	Sistem Informasi Surat Elektronik	<a href="http://multidomain.mail.go.id">multidomain.mail.go.id</a>	Layanan Email Pemerintah	Data Email Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02 20	BSRE	Sistem Informasi Tanda Tangan Elektronik Pemerintah	<a href="http://portal-bsre.bssn.go.id">portal-bsre.bssn.go.id</a>	Layanan Sertifikat Elektronik	Data Tanda Tangan Elektronik	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 01.01.01	PPID	Sistem Informasi yang mengelola informasi PPID	<a href="http://ppid.murungrayakab.go.id">ppid.murungrayakab.go.id</a>	Layanan PPID	Data PPID	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02.01	Sistem Informasi Jaringan Intra Pemerintah	Sistem Informasi Jaringan Intra Pemerintah		Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Data Jaringan Intra Pemerintah	Desktop	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02.02	Sistem Informasi Hosting dan Sub-Domain	Sistem Informasi Pengelolaan Hosting dan Sub-Domain murungrayakab.go.id		Layanan Hosting dan Sub Domain	Data Website Pemerintah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
MURA-DAA 02.02.03	SIRAJA LIMBAH	Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3	<a href="https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja">https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2022/login/index/app/siraja</a>	Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Data Pengelolaan Lingkungan Hidup	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAA 02.02.04	National Water and Sanitation Information Service (NAWASIS)	Platform kolaborasi yang menyediakan tiga platform utama yang terdiri dari portal informasi, peningkatan	<a href="http://sanitasi.nawasis.info/">sanitasi.nawasis.info/</a>	Layanan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Data Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
		kapasitas, dan movev (database) untuk pembangunan dan pengembangan sektor perumahan, permukiman, sanitasi, dan air minum								
MURA-DAA 02.02.05	IKLH	Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<a href="https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login">https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login</a>	Layanan Indeks Lingkungan Hidup	Data Indeks Lingkungan Hidup	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAA 02.02.06	Sistem Informasi Persampahan Nasional	Sistem jejaring yang mengelola data yang bersumber dari beberapa data dasar yang terintegrasi menjadi sebuah kumpulan informasi Pengelolaan Sampah	<a href="https://sipsn.menlhk.go.id/">sipsn.menlhk.go.id/</a>	Layanan Pengelolaan Sampah	Data Pengelolaan Sampah	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Lingkungan Hidup
MURA-DAA 01.01.01	Rekreasi Murung Raya	Platform Pariwisata Berbasis Website	<a href="https://fliphtml5.com/hpizn/mbhi/">https://fliphtml5.com/hpizn/mbhi/</a>	Layanan Peta Potensi Investasi	Data Potensi Destinasi Wisata Data Pengunjung Wisata	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
MURA-DAA 02.02.01	SIPJAKI	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	<a href="https://sipjaki.pu.go.id/login">https://sipjaki.pu.go.id/login</a>	Layanan Pelatihan Jasa Konstruksi	Data Pelatihan Jasa Konstruksi	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
MURA-DAA 01.01.01	SIMBG	Sistem Informasi Perizinan Persetujuan Bangunan Gedung	<a href="https://simbg.pu.go.id/">https://simbg.pu.go.id/</a>	Layanan Persetujuan Bangunan Gedung	Data Persetujuan Bangunan Gedung	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.02.01	SISKEUDES	Sistem Informasi Keuangan Desa		Layanan Pengelolaan Keuangan Desa	Data Pengelolaan Keuangan Desa	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
MURA-DAA 02.02.02	NEW SIGA	Sistem Informasi New Sistem Informasi Keluarga	<a href="https://siga.bkkbn.go.id/">https://siga.bkkbn.go.id/</a>	Layanan Keluarga Berencana Layanan Informasi Data Keluarga Layanan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Data Keluarga Berencana Data Informasi Keluarga Data Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAA 02.02.03	SIMPONI PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	<a href="https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login">https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login</a>	Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga Layanan Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Keluarga Data Pengaduan dan Pendampingan Kekerasan Anak	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAA 02.02.04	SIRIKA	Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon	<a href="http://sirika.bkkbn.go.id/login">http://sirika.bkkbn.go.id/login</a>	Layanan Distribusi Alkon	Data Distribusi Alkon	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
MURA-DAA 02.02.05	RDK	Sistem Informasi Rumah Data Ku	<a href="https://rumahdataku.bkkbn.go.id/login">https://rumahdataku.bkkbn.go.id/login</a>	Layanan Rumah Data Kependudukan	Data Rumah Kependudukan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.01.01	OSS	Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha	<a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a>	Layanan Perizinan Berusaha Layanan Tanda Daftar Gudang (TDG) Layanan Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan Layanan Rekomendasi Pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Data Perizinan Berusaha Data Tanda Daftar Gudang Data Rekomendasi Pendirian Pusat Perbelanjaan Data Persyaratan Perizinan Data Nomor Induk Berusaha Data Pembuatan SPPL	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
MURA-DAA 01.01.02	SICANTIK	Sistem Informasi Perizinan Non Berusaha atau Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik	<a href="https://sicantik.go.id/">https://sicantik.go.id/</a>	Layanan Perizinan Non Berusaha Layanan Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial	Data Perizinan Non Berusaha Data Surat Rekomendasi Penerbitan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Data Surat Rekomendasi Penolakan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial Data Peta Potensi Investasi Data Persyaratan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Perizinan Non Berusaha Data Persetujuan Teknis Data Surat Keputusan Perizinan					
MURA-DAA 01.01.03	DAPODIK	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan	<a href="https://dapo.kemdikbud.go.id/">https://dapo.kemdikbud.go.id/</a>	Layanan Pendidikan Usia Dini Layanan Pendidikan Non Formal Layanan Pendidikan Dasar (SD - SMP)	Data Pendidikan Usia Dini Data Pendidikan Non Formal Data Pendidikan Dasar (SD - SMP)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAA 01.01.04	Verval SP	Sistem Informasi verifikasi validasi data satuan pendidikan	<a href="https://sso.data.kemdikbud.go.id/sys/login">https://sso.data.kemdikbud.go.id/sys/login</a>	Layanan Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Data Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
MURA-DAA 01.01.05	SIM PKB	Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor		Layanan Uji Kendaraan Bermotor	Data Uji Kendaraan Bermotor	Web Based	PostgreSQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Perhubungan
MURA-DAA 01.02.01	SRIKANDI	Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	<a href="https://srikandi.arsip.go.id/">https://srikandi.arsip.go.id/</a>	Layanan Kearsipan Dinamis	Data Arsip Dinamis	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAA 01.02.02	SIKN JIKN	Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)	<a href="http://jkn.anri.go.id">jkn.anri.go.id</a>	Layanan Informasi Arsip Statis	Data Jumlah Arsip Data Jumlah Pengunjung Data Pengguna Arsip	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 01.01.01	INLISLite	Integrated Library System Lite	<a href="https://inlislite.perpusnas.go.id/">https://inlislite.perpusnas.go.id/</a>	Layanan Pengelolaan Perpustakaan	Data Pengelolaan Perpustakaan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAA 01.01.02	iMurungraya	Sistem Informasi Manajemen Otomasi Perpustakaan	<a href="https://imurungraya.moco.co.id/">https://imurungraya.moco.co.id/</a>	Layanan Perpustakaan Digital	Data Jumlah Layanan Perpustakaan Digital	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
MURA-DAA 01.01.03	Satu Data KKP	Sistem informasi tata kelola Data di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.	<a href="http://satudata.kkp.go.id">satudata.kkp.go.id</a>	Layanan Pembuatan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)	Data Jumlah Nelayan Tradisional Data Pembudidaya Ikan Data Pengolah Hasil Perikanan	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAA 02.02.01	iSIKHNAS	Sistem informasi kesehatan hewan	<a href="https://www.isikhnas.com/">https://www.isikhnas.com/</a>	Layanan Kesehatan Hewan Ternak	Data Kesehatan Hewan Ternak	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanian dan Perikanan

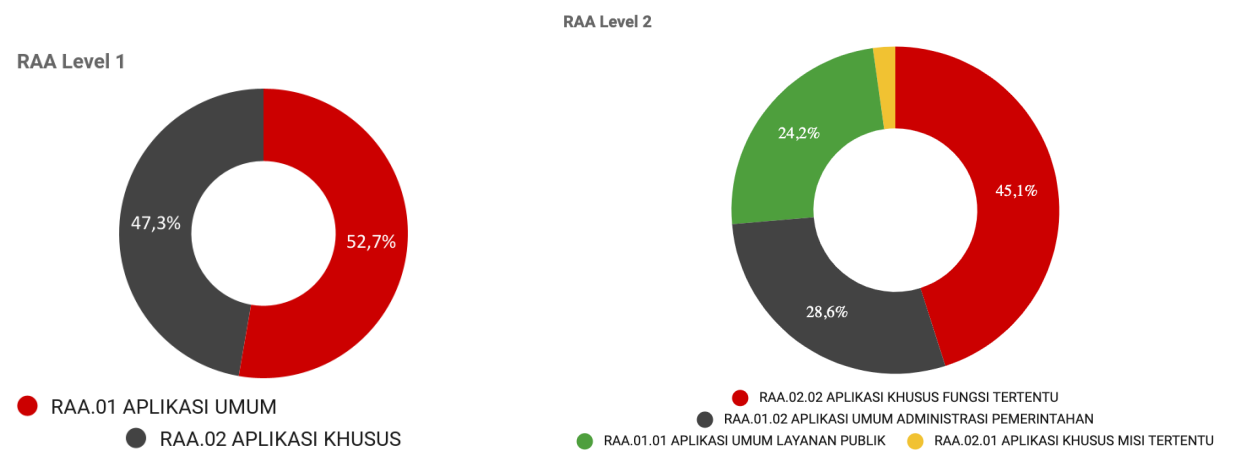
ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
MURA-DAA 02.02.02	SIMLUHTAN	Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian	<a href="http://simluh.pertanian.go.id">simluh.pertanian.go.id</a>	Layanan Pendaftaran Kelompok Tani Layanan Penyuluhan Pertanian Layanan Penyuluhan Perkebunan	Data Kelembagaan Petani Data Penyuluhan Pertanian Data Kelompok Tani Perkebunan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAA 02.02.03	IDENTIK PKH	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Ternak	<a href="https://identikpkh.com/#/login">https://identikpkh.com/#/login</a>	Layanan Pendataan Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	Data Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Hewan Ternak	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Dinas Pertanian dan Perikanan
MURA-DAA 01.01.01	SIKS-NG	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation	<a href="http://siks.kemensos.go.id">siks.kemensos.go.id</a>	Layanan Tenaga Kesejahteraan Sosial Layanan Rehabilitasi Sosial Layanan Penanganan Fakir Miskin Layanan Penerima Bantuan Sosial Layanan Perawatan Makam Pahlawan Layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Data Kesejahteraan Sosial Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Data Kartu Indonesia Sehat (KIS) Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Data Program Keluarga Harapan (PKH) Data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Data Penerima	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Sosial

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Bantuan Sosial Data Makam Pahlawan Data Usulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Data Terpadu Kesejahteraan Sosial					
MURA-DAA 01.01.02	KarirHub	Sistem informasi mengenai lowongan pekerjaan, proyek lepas dan informasi seputar karir	<a href="https://karirhub.ke&lt;br/&gt;mnaker.go.id">https://karirhub.ke mnaker.go.id</a>	Layanan Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Data Kartu Pencari Kerja	Web Based	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
MURA-DAA 01.01.03	AMANG RSUD	Sistem Informasi Pasien Mandiri, Booking dan Pendaftaran Online Pasien Rawat Jalan RSUD Curuk Cahu	<a href="https://play.google.&lt;br/&gt;com/store/apps/d&lt;br/&gt;etails?id=com.rsud&lt;br/&gt;purukcahu.amang&amp;&lt;br/&gt;hl=in&amp;gl=US&amp;pli=1">https://play.google. com/store/apps/d etails?id=com.rsud purukcahu.amang&amp; hl=in&amp;gl=US&amp;pli=1</a>	Layanan Pendaftaran Online Pasien	Data Pendaftaran Online Pasien	Mobile	MySQL	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	Rumah Sakit Umum Daerah
MURA-DAA 02.02.01	SIMRS	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit		Layanan Manajemen RSUD	Data Laporan Keuangan Data Laporan Rekam Medik Data Register Pasien Data SIRS Data Laporan Rawat Jalan Data Laporan Rawat Inap Data Laporan	Web Based	MySQL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	Rumah Sakit Umum Daerah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	URL	→ Layanan (Dependency)	→ Data yang digunakan	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	→ RAA Level 1 (Dependency)	→ RAA Level 2 (Dependency)	→ Unit Operasional Teknologi (Dependency)
					Penunjang Data Laporan Grafik Data Laporan Gudang Farmasi Data Laporan Waktu Tunggu Data Laporan Apotek Data Laporan IBS					

3.2.4.2. Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

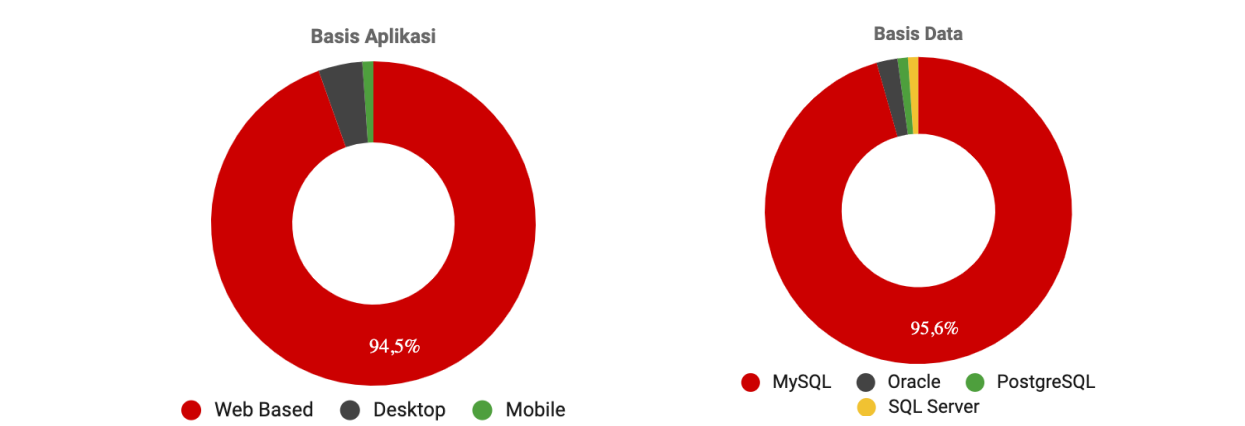
Merujuk pada hasil pemetaan aplikasi pada sub bab sebelumnya, analisis terhadap kondisi data *eksisting* dapat dijabarkan sebagai berikut:



Grafik 3.2.4.2.1. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan RAA Level 1 & 2 Nasional di Pemerintah Kabupaten Murung Raya

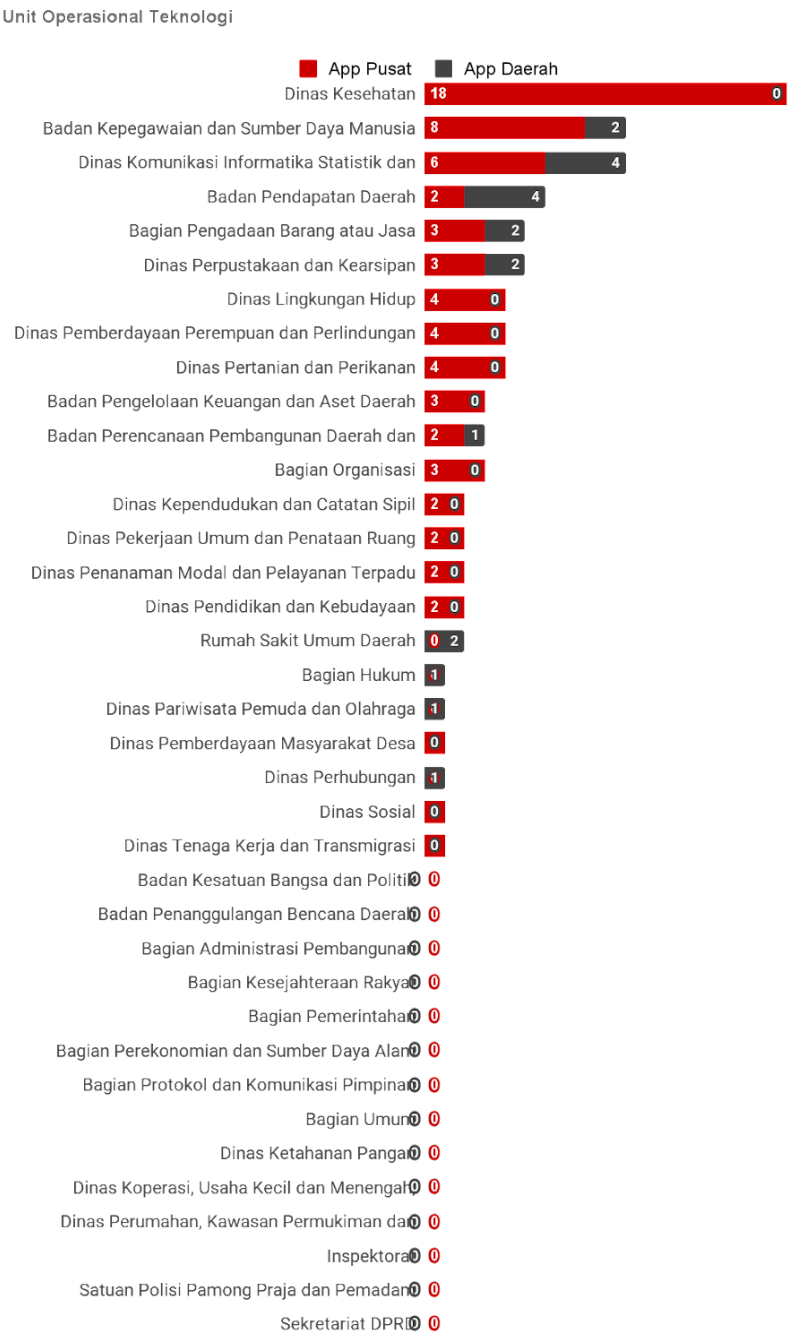
Aplikasi umum didefinisikan sebagai sebuah aplikasi bersama yang digunakan dalam proses administrasi di seluruh perangkat daerah, sedangkan aplikasi khusus merupakan aplikasi yang hanya digunakan oleh suatu perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya. Merujuk pada grafik 3.2.4.2.1. dan mengacu pada referensi Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional (RAA Level 1) dari total 91 Aplikasi, 48 Aplikasi (52,7%) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum dan 43 Aplikasi (47,3%) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus.

Sedangkan untuk RAA Level 2 terkait RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik sejumlah 22 Aplikasi (24,2%), RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan sejumlah 26 aplikasi (28,6%), RAA.02.02 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu sejumlah 41 aplikasi (45,1%) dan RAA.02.01 Aplikasi Khusus Misi Tertentu sejumlah 2 aplikasi (2,2%). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak digunakan di Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah jenis Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu sehingga diperlukan pengelolaan interoperabilitas data, baik untuk internal maupun untuk instansi pusat.



Grafik 3.2.4.2.2. Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan dari Basis Aplikasi dan Basis Datanya

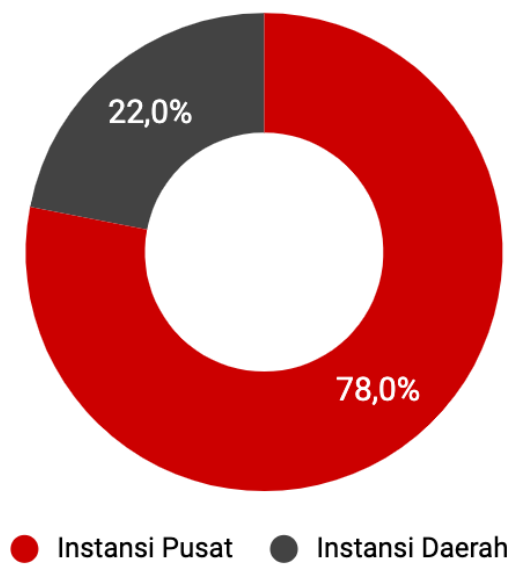
Berdasarkan grafik 3.2.4.2.2. menunjukkan bahwa terdapat 86 Aplikasi (94,5%) memiliki basis aplikasi Web Based, Desktop sejumlah 4 aplikasi (4.4%) dan Mobile 1 Aplikasi (1.1%) . Hal ini menunjukkan bahwa kedepan perlu dipastikan jumlah *web programmer* pemeliharaan aplikasi yang ada. Sedangkan, kepemilikan untuk basis data MySQL 95,6% (87 aplikasi), basis data PostgreSQL 1.1% (1 Aplikasi), basis data Oracle 2.2% (2 Aplikasi), basis data SQL Server 1.1% (1 Aplikasi). Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk menjadikan MySQL sebagai dasar dalam standar pengembangan aplikasi selanjutnya.



**Grafik 3.2.4.2.3.** Grafik Jumlah Aplikasi yang digunakan di Perangkat Daerah

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.3. menunjukkan bahwa perangkat daerah yang paling banyak dalam melakukan digitalisasi yaitu Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan karena Dinas tersebut diberikan mandatori untuk menggunakan aplikasi dari Kementerian.

#### Kepemilikan Aplikasi



**Grafik 3.2.4.2.4.** Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Eksisting

Berdasarkan grafik 3.2.4.2.4. menjelaskan bahwa dari total 91 aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya sejumlah 78,0% (71 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Pusat dan 22,0% (20 Aplikasi) aplikasi milik Instansi Daerah. Berdasarkan grafik diatas perlu dievaluasi terkait aplikasi milik daerah apakah sudah sesuai dengan kebutuhan digitalisasi Layanan di Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

### 3.2.5. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE merupakan kerangka kerja yang menggambarkan komponen-komponen teknologi informasi dan interkoneksi jaringan yang dibutuhkan untuk mendukung operasional aplikasi SPBE. Infrastruktur SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi: ruang pusat data, jaringan intra pemerintah yang didalamnya terdapat jaringan data lokal (Local Area Network - LAN) kantor OPD/UPT, dan sistem penghubung layanan untuk berbagi pakai data antar aplikasi. Berikut ini adalah uraian dari arsitektur infrastruktur SPBE.

#### 3.2.5.1. Pusat Komputasi (Pusat Data)

##### A. Lokasi Pusat Data

Sebagian besar server yang digunakan di Kabupaten Murung Raya berlokasi di pusat data provinsi, dimana terdapat pusat data colocation yang menjadi tempat bagi sejumlah besar server. Saat akan menempatkan server baru di pusat data provinsi, prosedurnya melibatkan koordinasi antara Kominfo Murung Raya dan Kominfo Provinsi. Koordinasi ini mencakup pengisian formulir yang diperlukan, dimana Kominfo Provinsi kemudian akan mengalokasikan rak server dan melakukan routing yang diperlukan.

Setiap langkah pengelolaan server di Kabupaten Murung Raya yang berada di pusat data provinsi diarahkan melalui router yang dikelola oleh Kominfo Provinsi. Kabupaten Murung Raya diberikan alamat IP publik yang diperlukan untuk pengelolaan server, yang dilakukan di bawah pengawasan dan pengelolaan jaringan oleh Kominfo Provinsi. Ketika ada kebutuhan inisiasi aplikasi dari perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya, koordinasi dilakukan antara Kominfo Murung Raya dengan Kominfo Provinsi untuk menentukan penempatan server yang diperlukan.

Dalam infrastruktur pusat data provinsi, terdapat sejumlah server yang disediakan, termasuk server yang ditujukan secara khusus (*dedicated*) untuk tugas tertentu serta server yang menggunakan teknologi virtualisasi. Perangkat ini menjadi fondasi bagi layanan dan aplikasi yang digunakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Murung Raya.

Koordinasi antara Kominfo Murung Raya dan Kominfo Provinsi menjadi penting dalam setiap tahapan penempatan server baru atau inisiasi aplikasi. Setiap langkahnya terencana dengan teliti untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya, keamanan, dan manajemen server berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

##### B. Persebaran Server Aplikasi

Server aplikasi yang dikelola oleh Diskominfo tersebar di beberapa lokasi sebagai berikut:

##### 1. Domain Murung Raya

Kabupaten Murung Raya menggunakan domain resmi dengan nama [murungrayakab.go.id](http://murungrayakab.go.id), yang memiliki IP address utama 103.123.24.237. Ini adalah alamat yang digunakan untuk mengakses berbagai layanan online yang disediakan oleh pemerintah daerah.



**Tabel 3.2.5.1.1** Domain dan IP Address Kabupaten Murung Raya

Domain	IP Address	Provider
murungrayakab.go.id	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Indonesia

Melalui analisis menggunakan tools OSINT, khususnya osint.sh/subdomain, terungkap bahwa domain murungrayakab.go.id memiliki 48 sub domain. Sub domain ini mencakup berbagai layanan dan aplikasi yang dihosting di pusat data provinsi yang dikelola Kominfo Murung Raya dan di provider lain. Sub domain menjadi cara yang efektif untuk memisahkan dan mengelompokkan layanan yang disediakan. Dari 48 sub domain tersebut, terdapat 9 IP address publik yang terkait dengan domain murungrayakab.go.id. IP address ini digunakan dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan instansi pemerintah. Penyediaan sejumlah IP address publik menunjukkan kompleksitas dan keberagaman layanan yang diberikan oleh infrastruktur IT Kabupaten Murung Raya.

Nama domain murungrayakab.go.id menjadi identitas resmi untuk entitas pemerintahan Kabupaten Murung Raya di ranah digital. Sebagai alamat utama, domain ini menjadi pintu gerbang untuk akses ke berbagai informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Penggunaan domain yang terkelola dengan baik adalah langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keterhubungan antara layanan online. Ketika melihat ke dalam IP address yang terkait, terlihat bahwa sebagian besar dari 9 IP address tersebut digunakan secara langsung oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk menyediakan layanan-layanan inti. Namun, ada juga keterlibatan pihak ketiga yang mengelola beberapa IP address tersebut, menunjukkan kerjasama dengan entitas di luar pemerintah daerah.

Selain menjadi alamat digital, domain murungrayakab.go.id dan IP address yang terkait menjadi aset kritis yang harus dijaga keamanannya. Perlindungan terhadap domain dan IP address sangat penting untuk mencegah serangan siber dan menjaga kelangsungan operasional layanan online yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya. Dengan memiliki wawasan mendalam mengenai domain, subdomain, dan IP address yang digunakan, Kabupaten Murung Raya dapat mengelola infrastruktur IT secara lebih efektif. Ini mencakup pemantauan keamanan, pembaruan sistem, serta peningkatan kapasitas infrastruktur guna menjawab tuntutan layanan yang semakin berkembang dan kompleks. Berikut daftar IP address yang berada pada domain murungrayakab.go.id:

**Tabel 3.2.5.1.2** Tabel IP Address yang digunakan Kabupaten Murung Raya

No.	IP Address	Provider
1	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No.	IP Address	Provider
		Palangka Raya, Indonesia
2	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
3	46.17.173.243	Hostinger International Limited Singapore, Singapore
4	36.92.189.67	PT Telekomunikasi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
5	103.245.225.85	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta Pusat, Indonesia
6	156.67.213.153	Hostinger International Limited Singapore, Singapore
7	180.235.149.74	ARDH GLOBAL INDONESIA, PT Tangerang, Indonesia
8	35.247.132.174	Google LLC Mountain View, United States
9	27.111.41.244	PT. Inet Global Indo Jakarta Barat, Indonesia

2. Daftar sub domain murungrayakab.go.id

Berdasarkan analisis menggunakan tools OSINT, khususnya osint.sh/subdomain, terungkap bahwa domain murungrayakab.go.id memiliki 48 sub domain. Sub domain ini mencakup berbagai layanan dan aplikasi yang dihosting di pusat data provinsi yang dikelola Kominfo Murung Raya dan di provider lain. Sub domain menjadi cara yang efektif untuk memisahkan dan mengelompokkan layanan yang disediakan.

Tabel 3.2.5.1.3 Tabel Pusat Data Nasional Kemkominfo

No.	Sub Domain	IP	Provider
1	<a href="http://www.pengumuman.murungrayakab.go.id">www.pengumuman.murungrayakab.go.id</a>	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Indonesia
2	<a href="http://murungrayakab.go.id">murungrayakab.go.id</a>	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Indonesia
3	<a href="http://polres.murungrayakab.go.id">polres.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Goverment Kementerian

No.	Sub Domain	IP	Provider
			KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
4	<a href="http://dpmd.murungrayakab.go.id">dpmd.murungrayakab.go.id</a>	46.17.173.243	Hostinger International Limited Singapore, Singapore
5	<a href="http://www.sikendal.rsud.murungrayakab.go.id">www.sikendal.rsud.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
6	<a href="http://berita.murungrayakab.go.id">berita.murungrayakab.go.id</a>	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Indonesia
7	<a href="http://www.covid19.murungrayakab.go.id">www.covid19.murungrayakab.go.id</a>	36.92.189.67	PT Telekomunikasi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
8	<a href="http://www.siappilhdlh.murungrayakab.go.id">www.siappilhdlh.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
9	<a href="http://sikendal.rsud.murungrayakab.go.id">sikendal.rsud.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
10	<a href="http://diskominfo.murungrayakab.go.id">diskominfo.murungrayakab.go.id</a>	103.123.24.237	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Palangka Raya, Indonesia
11	<a href="http://webdisk.murungrayakab.go.id">webdisk.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
12	<a href="http://disparpora.murungrayakab.go.id">disparpora.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
13	<a href="http://www.simaya.murungrayakab.go.id">www.simaya.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
14	<a href="http://simaya.murungrayakab.go.id">simaya.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
15	<a href="http://www.smurafm.murungrayakab.go.id">www.smurafm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia

No.	Sub Domain	IP	Provider
16	<a href="http://www.sibangdes.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id">www.sibangdes.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
17	<a href="http://www.sapa.murungrayakab.go.id">www.sapa.murungrayakab.go.id</a>	103.245.225.85	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta Pusat, Indonesia
18	<a href="http://www.ppid.murungrayakab.go.id">www.ppid.murungrayakab.go.id</a>	103.245.225.85	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta Pusat, Indonesia
19	<a href="http://www.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id">www.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
20	<a href="http://www.dpmpst.murungrayakab.go.id">www.dpmpst.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
21	<a href="http://www.dpmd.murungrayakab.go.id">www.dpmd.murungrayakab.go.id</a>	156.67.213.153	Hostinger International Limited Singapore, Singapore
22	<a href="http://www.diskominfo.murungrayakab.go.id">www.diskominfo.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
23	<a href="http://www.data.murungrayakab.go.id">www.data.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
24	<a href="http://www.bkpsdm.murungrayakab.go.id">www.bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	180.235.149.74	ARDH GLOBAL INDONESIA, PT Tangerang, Indonesia
25	<a href="http://webmail.bkpsdm.murungrayakab.go.id">webmail.bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
26	<a href="http://webgis.bpbdd.murungrayakab.go.id">webgis.bpbdd.murungrayakab.go.id</a>	35.247.132.174	Google LLC Mountain View, United States
27	<a href="http://smurafm.murungrayakab.go.id">smurafm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
28	<a href="http://sibangdes.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id">sibangdes.kecamatanmurung.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia

No.	Sub Domain	IP	Provider
29	<a href="http://ppid.murungrayakab.go.id">ppid.murungrayakab.go.id</a>	103.245.225.85	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Jakarta Pusat, Indonesia
30	<a href="http://pengumuman.murungrayakab.go.id">pengumuman.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
31	<a href="http://lpse.murungrayakab.go.id">lpse.murungrayakab.go.id</a>	27.111.41.244	PT. Inet Global Indo Jakarta Barat, Indonesia
32	<a href="http://kecamatanmurung.murungrayakab.go.id">kecamatanmurung.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
33	<a href="http://jdih.murungrayakab.go.id">jdih.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
34	<a href="http://jdih-dprd.murungrayakab.go.id">jdih-dprd.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
35	<a href="http://e-form.murungrayakab.go.id">e-form.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
36	<a href="http://dpmpstsp.murungrayakab.go.id">dpmpstsp.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
37	<a href="http://disperindagkopukm.murungrayakab.go.id">disperindagkopukm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
38	<a href="http://data.murungrayakab.go.id">data.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
39	<a href="http://cpcontacts.bkpsdm.murungrayakab.go.id">cpcontacts.bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
40	<a href="http://cpcalendars.bkpsdm.murungrayakab.go.id">cpcalendars.bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
41	<a href="http://cpanel.murungrayakab.go.id">cpanel.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia

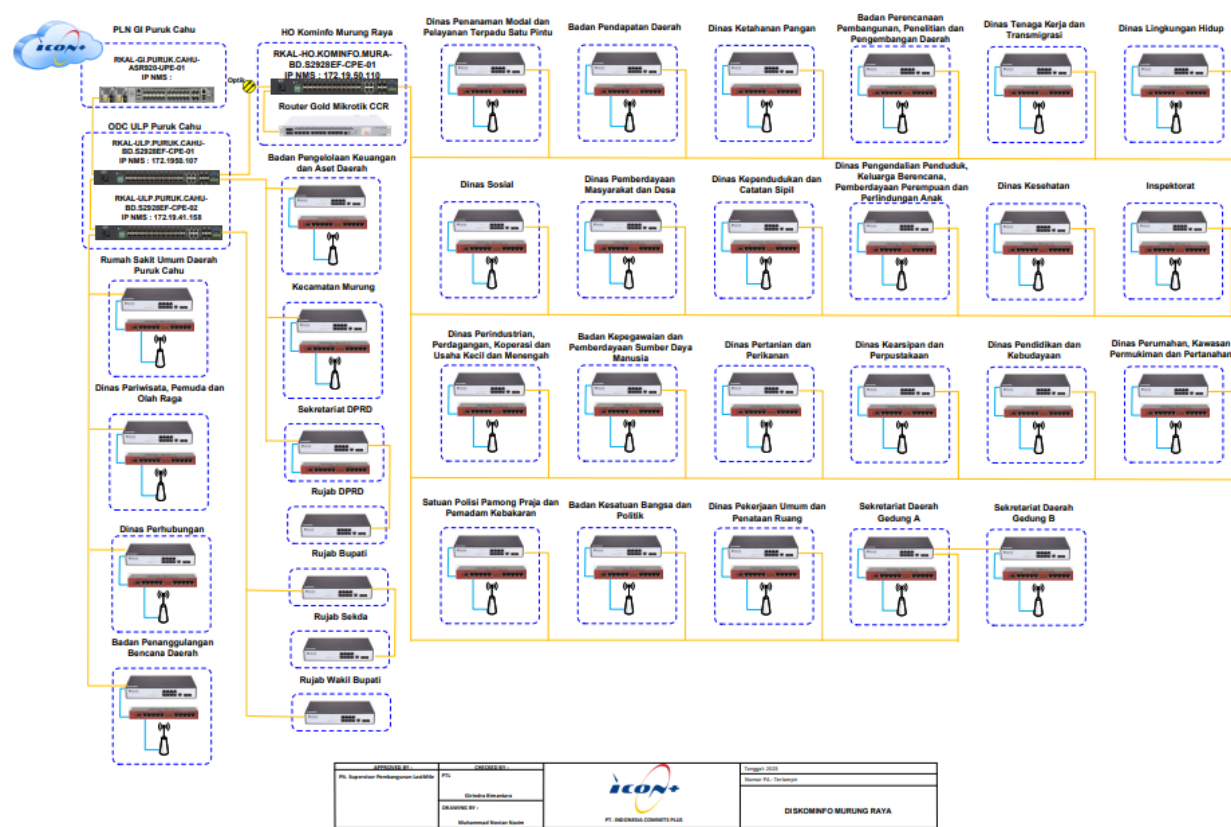
No.	Sub Domain	IP	Provider
42	<a href="#">cpanel.bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
43	<a href="#">covid19.murungrayakab.go.id</a>	36.92.189.67	PT Telekomunikasi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
44	<a href="#">bkpsdm.murungrayakab.go.id</a>	180.235.149.74	ARDH GLOBAL INDONESIA, PT Tangerang, Indonesia
45	<a href="#">files.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia
46	<a href="#">demo1.murungrayakab.go.id</a>	36.92.189.67	PT Telekomunikasi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
47	<a href="#">cloud.murungrayakab.go.id</a>	36.92.189.67	PT Telekomunikasi Indonesia Tanjungpinang, Indonesia
48	<a href="#">aplikasi.murungrayakab.go.id</a>	103.18.117.8	Direktorat E-Government Kementerian KOMINFO Jakarta Pusat, Indonesia

3.2.5.2. Sistem Integrasi

3.2.5.2.1. Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Kabupaten Murung Raya dikelola oleh Diskominfo untuk melayani jaringan antar komputer di lingkungan perangkat daerah, akses ke server, dan akses internet.

A. Topologi Jaringan



Gambar 3.2.5.3.1 Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa JIP Kabupaten Nusantara bisa dibagi menjadi beberapa zona yakni:

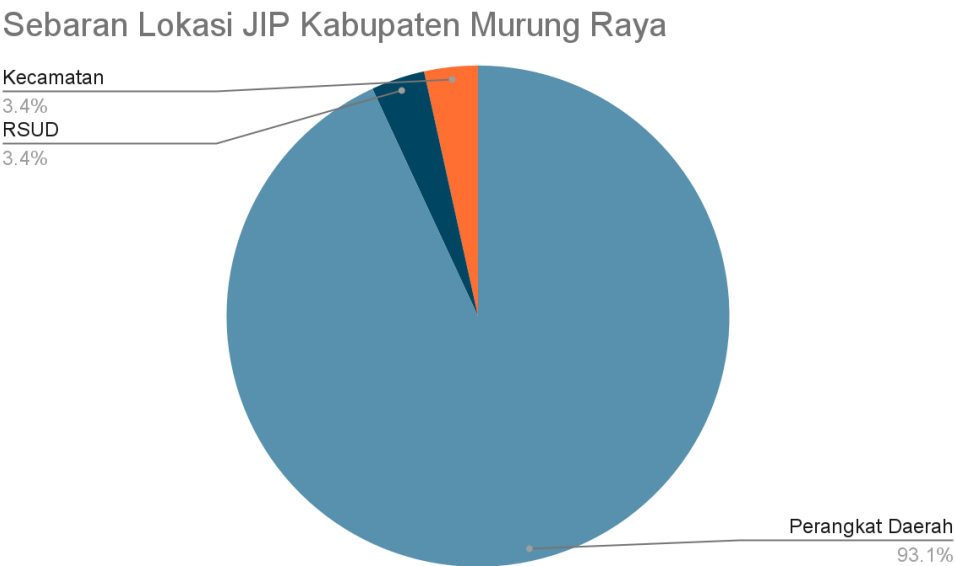
- 1. Zona Internet
- Zona internet terdiri dari 2 (dua) koneksi ke penyedia jasa layanan internet (Internet Service Provider - ISP) yakni ICON+, dan Telkom Astinet dengan kapasitas pada ISP ICON+ sebesar 100 Mbps Dedicated, 1 Gbps Broadband dan ISP Telkom Astinet 13 Mbps. Koneksi dari 2 ISP tersebut semuanya aktif dengan ISP ICON+ sebagai koneksi utama dan ISP Telkom Astinet sebagai koneksi backup. Layanan internet yang digunakan yakni dedicated karena Diskominfo Kabupaten Murung Raya belum memiliki Autonomous System (AS) Number.
- 2. Zona Jaringan Area Kabupaten (MAN)
- Jaringan area kabupaten atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan untuk koneksi - koneksi ke perangkat daerah, dan UPT ke Pusat Data. Koneksi jaringan menggunakan media fiber optic. Kondisi saat ini semua perangkat daerah, dan UPT sudah terhubung ke Jaringan

Intra Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Diskominfo Murung Raya dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yakni ICON+.

Kondisi saat ini terdapat 29 lokasi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan menggunakan media fiber optic dengan rincian seperti tabel dibawah ini.

Lokasi	Jumlah
Perangkat Daerah	27
RSUD	1
Kecamatan	1

Gambar 3.2.5.2.1.2 Jumlah Lokasi Yang Terhubung ke JIP Kab. Murung Raya



Gambar 3.2.5.2.1.3 Sebaran Lokasi Yang Terhubung ke JIP Kab. Nusantara

3. Zona Inti

Zona Inti untuk interkoneksi jaringan lokal (LAN) komputer, jaringan server farm, dan cloud server. Perangkat pada zona Inti yakni Router Core.

4. Zona LAN

Zona LAN untuk interkoneksi komputer-komputer pengguna di beberapa kantor perangkat daerah. Perangkat pendukung pada jaringan LAN yakni Router Distribusi.

5. Zona Server

Zona Server adalah zona interkoneksi antar server di Server Farm. Perangkat pendukung yakni switch access server. Server Farm terdiri dari server yang diakses umum melalui internet, dan server internal seperti database, file server, dan lain - lain.

Permasalahan yang saat ini sering terjadi dalam layanan Jaringan Intra Pemerintah antara lain:

- akses internet lambat;
- kadang mengalami downtime internet;
- backup koneksi internet masih kecil kecepatannya untuk menggantikan koneksi utama



**B. Domain Jaringan Intra Pemerintah**

Berikut ini adalah tabel JIP Kabupaten Nusantara yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Murung Raya.

**Tabel 3.2.5.2.1.1** Domain Jaringan Intra Pemerintah

ID	Nama Jaringan Intra Pemerintah	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR.JIP.01	Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jaringan intra pemerintah yang digunakan untuk menghubungkan perangkat daerah, UPT, KIM, yang ada di Pemerintah Daerah	Area Kota (MAN)	Sendiri, Swasta Dalam Negeri	Diskominfo Murung Raya, ICON+	Dinas Komunikasi dan Informatika	1 Gbps	Fiber Optic	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah
IDR.JIP.02	Jaringan Internet	Jaringan untuk Koneksi Internet	Internet	Swasta Dalam Negeri	Icon+, Telkom Astinet	Dinas Komunikasi dan Informatika	100 Mbps, 13 Mbps	Fiber Optic	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.01 Jaringan Intra	RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah

3.2.5.3. Referensi Fasilitas Komputasi

3.2.5.3.1. Pusat Data

Tabel 3.2.5.3.1.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Fasilitas Komputasi - Pusat Data

ID	Nama Pusat Data	Deskripsi Pusat Data	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola	Tipe Pusat Data	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR-DC-01	Server LPSE	Server berlokasi di Kantor Sekretariat Daerah. Bagian Barang Dan Jasa - SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Sendiri	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Pusat Data Instansi Daerah	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daera
IDR-DC-02	Ruang Server BKPSDM	Server berlokasi di Kantor BKPSDM. Bidang Pengembangan Karir, Aparatur, Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Sendiri	BKPSDM	BKPSDM	Pusat Data Instansi Daerah	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
IDR-DC-03	Ruang Server Bapenda	Server berlokasi di Kantor Bapenda. BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB	Sendiri	Bapenda	Bapenda	Pusat Data Instansi Daerah	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.01 Pusat Data	RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah

3.2.5.4. Platform

3.2.5.4.1. Perangkat Keras Server

Tabel 3.2.5.4.1.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
IDR-SVR-01	Server Bagian Pengadaan Barang Jasa	Server Penyimpanan Data Pengadaan Barang Jasa LPSE	Web Server	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bidang Pengadaan Barang Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Ruang Server LPSE	Linux	128GB	High End	9830GB	RAID	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Dinas Komunikasi dan Informatika
IDR-SVR-02	Server BKPSDM	Server Penyimpanan Data SIM ASN Kepegawaian	Web Server	Sendiri	BKPSDM	BIDANG PENGEMBA NGAN KARIER APARATUR, PENGADAAN, PEMBERHE NTIAN DAN INFORMASI	Ruang Server BKPSDM	Linux	32 GB	High End	4096 GB	RAID	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Dinas Komunikasi dan Informatika
IDR-SVR-03	Server BAPENDA	Server Penyimpanan Data e-BPHTB	Web Server	Sendiri	BAPENDA	BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB	Ruang Server Bapenda	Windows	40 GB	High End	512 GB	Non Raid	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2.5.4.2. Perangkat Keras Storage

Tabel 3.2.5.4.2.1 Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Storage

ID	Nama Storage	Deskripsi Storage	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR-STR-01	HARDDISK Server Diskominfo 2	Merupakan tempat penyimpanan pada server diskominfo yang tergabung dalam teknik penyimpanan RAID 11	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-02	HARDDISK Server Diskominfo 3	Merupakan tempat penyimpanan pada server diskominfo yang tergabung dalam teknik penyimpanan RAID 12	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-03	HARDDISK Server Diskominfo 4	Merupakan tempat penyimpanan pada server diskominfo yang tergabung dalam teknik penyimpanan RAID 13	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan e-Government	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-04	HARDISK Server BPKAD	Merupakan tempat penyimpanan pada server BPKAD	Sendiri	BPKAD	Sub-Bidang Penyimpanan Dan Inventarisasi Aset	Windows	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-05	HARDISK Server Disdukcapil	Merupakan tempat penyimpanan pada server Disdukcapil	Sendiri	Disdukcapil	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Windows	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)

ID	Nama Storage	Deskripsi Storage	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR-STR-06	HARDISK Server Pengadaan Barang JASA 1	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Pengadaan Barang Jasa LPSE dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bidang Pengadaan Barang Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-07	HARDISK Server Pengadaan Barang JASA 2	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Pengadaan Barang Jasa LPSE dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bidang Pengadaan Barang Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-08	HARDISK Server Pengadaan Barang JASA 3	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Pengadaan Barang Jasa LPSE dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bidang Pengadaan Barang Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-09	HARDISK Server Pengadaan Barang JASA 4	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Pengadaan Barang Jasa LPSE dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	Sekretariat Daerah - Bidang Pengadaan Barang Jasa	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-10	HARDISK Server BKPSDM 1	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Kepegawaian dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	BKPSDM	BIDANG PENGEMBANGAN KARIER APARATUR, PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-11	HARDISK Server BKPSDM 2	Merupakan Tempat Penyimpanan Data	Sendiri	BKPSDM	BIDANG PENGEMBANGAN KARIER APARATUR,	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data

ID	Nama Storage	Deskripsi Storage	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	Perangkat Lunak Digunakan	Metode Akses Data Sharing	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR-STR-12	HARDISK Server BKPSDM 3	Kepegawaian dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	BKPSDM	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Storage)
		Merupakan Tempat Penyimpanan Data Kepegawaian dengan teknik penyimpanan RAID			BIDANG PENGEMBANGAN KARIER APARATUR, PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI					RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)
IDR-STR-13	HARDISK Server BKPSDM 4	Merupakan Tempat Penyimpanan Data Kepegawaian dengan teknik penyimpanan RAID	Sendiri	BKPSDM	BIDANG PENGEMBANGAN KARIER APARATUR, PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI	Linux	Direct Attached Storage (DAS)	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.02 Media Penyimpan (Data Storage)

### 3.2.5.4.3. Perangkat Keras Jaringan

Katalog perangkat keras jaringan Kabupaten Murung Raya sebagaimana dalam Surat edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sebagai berikut:

**Tabel 3.2.5.4.3.1** Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
IDR-PKJ-01	Wireless Router	Outdoor Point To Point CPE	Wireless Equipment	Sendiri	Diskominfo	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika

### 3.2.5.4.4. Perangkat Lunak

Katalog perangkat lunak Kabupaten Murung Raya sebagaimana dalam Surat edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sebagai berikut:

**Tabel 3.2.5.4.4.1** Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform Perangkat Lunak

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Nama Perangkat Sistem Operasi	Nama Perangkat Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)
IDR-LNK-01	Uptime Kuma	Monitoring Tools	Sistem Utilitas			Kode Sumber Terbuka	General Public Licence	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
IDR-LNK-02	The Dude	Monitoring Tools	Sistem Utilitas					RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
IDR-LNK-03	Proxmox VE	Platform Virtualisasi Hypervisor	Sistem Operasi			Kode Sumber Terbuka	General Public Licence	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
IDR-LNK-04	AApanel	Control Panel Web Hosting	Sistem Utilitas			Kode Sumber Terbuka	General Public Licence	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
IDR-LNK-05	CentOS	Operating System	Sistem Utilitas			Kode Sumber Terbuka	General Public Licence	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
IDR-LNK-06	Workbench	Database Editor untuk pengelolaan database untuk MySQL	Sistem Utilitas				General Public Licence	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform

3.2.5.4.5. Perangkat Keras Keamanan

Katalog perangkat keamanan Kabupaten Murung Raya sebagaimana dalam Surat edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, sebagai berikut:

Tabel 3.2.5.4.5.1. Referensi Arsitektur Infrastruktur - Platform - Perangkat keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi <i>Security Device</i>	Tipe Keamanan <i>Device</i>	Nama Pemilik	Unit Pengelola	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	→ RAI Level 3 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
IDR-PKK-01	Firewall	perangkat keras yang dirancang khusus untuk keperluan keamanan jaringan - JUNIPER	Firewall	Diskominfo Provinsi Kalteng	Diskominfo Provinsi Kalteng	RAI 03. <i>Platform</i>	RAI 03.01. Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan	Dinas Komunikasi dan Informatika

3.2.5.5. Arsitektur Keamanan SPBE

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan.



Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan.



**Tabel 3.2.5.5.1** Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Daerah

**3.2.5.6. Standar Keamanan**

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun standar teknis dan prosedur dalam bentuk SOP yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 3.2.6.1.** Standar Keamanan

No	Nama Regulasi	Tanggal Mulai Penerapan
1	Peraturan Bupati Murung Raya No 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya	3 April 2023
2	Rencana Peraturan Daerah terkait SPBE dan Keamanan Informasi	2024

**3.2.5.7. Penerapan Keamanan**

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

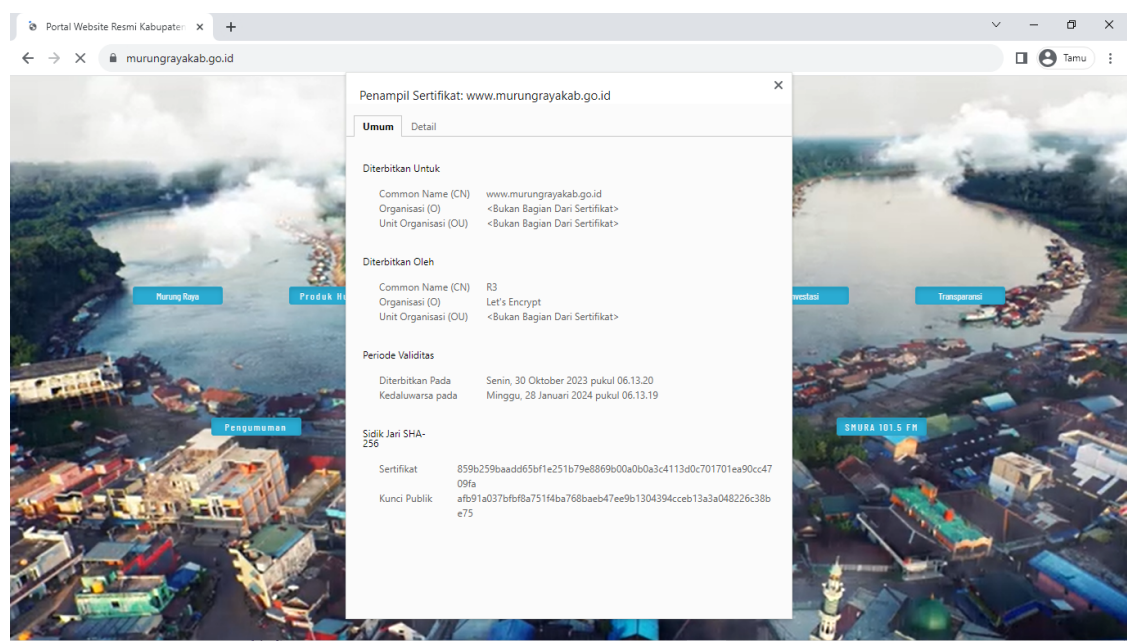
**3.2.5.7.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE**

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan

keamanan infrastruktur TIK. Kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan adalah Rencana untuk Literasi melalui brosur, pamflet, x banner, medsos, sosialisasi, dll terkait materi keamanan informasi di Kabupaten Murung Raya.

**3.2.5.7.2. Peningkatan Keamanan SPBE**

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain penggunaan Aplikasi Monitoring Jaringan dengan MRTG.



**Gambar 3.2.5.7.2.1** Sertifikat SSL Aplikasi Web

**3.2.5.7.3. Penanganan insiden Keamanan SPBE**

Penanganan insiden keamanan yang telah dilaksanakan melalui kegiatan mengidentifikasi sumber serangan, dan analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya. Kegiatan penanganan insiden sudah dilaksanakan yakni terhadap serangan code injection berupa perubahan tampilan halaman depan web menjadi judi slot. Brute Force yakni upaya login berkali kali dengan melakukan request tinggi ke server untuk akses tidak sah.

**3.2.5.8. Audit Keamanan**

Kegiatan audit keamanan yang sudah pernah dilakukan yakni audit terhadap aplikasi web, dan mobile seperti Kerjaku, AKKU mobile, BANGKOM AYU, dan TTE Nusantara Kab.

**3.2.5.9. Kelaikan Keamanan**

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur jaringan, pusat data, dan lainnya. Proses yang telah dilaksanakan yakni penilaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) oleh BSSN pada tanggal 31 Desember 2022.

3.2.5.10. Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Berikut ini ditampilkan tabel-tabel Referensi Arsitektur Keamanan dalam kerangka arsitektur SPBE meliputi standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan :

Tabel 3.2.5.10.1 Referensi Arsitektur Keamanan - Standar Keamanan

Nama	Tanggal Penerapan	→ Data dan Informasi (Dependency)	← Aplikasi (Dependency)
Peraturan Bupati Murung Raya No 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya	3 April 2023		
Rencana Peraturan Daerah terkait SPBE dan Keamanan Informasi	2024		

Tabel 3.2.5.10.1 Referensi Arsitektur Keamanan - Edukasi Keamanan

Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi	Tanggal Kegiatan Edukasi	← Aplikasi (Dependency)
Rencana untuk Literasi melalui brosur, pamflet, x banner, medsos, sosialisasi, dll terkait materi keamanan informasi	Memberikan pengetahuan kepada OPD maupun masyarakat Kab. Murung Raya tentang Keamanan Informasi	2024	

Tabel 3.2.5.10.1 Referensi Arsitektur Keamanan - Peningkatan Keamanan

Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi	Tanggal Kegiatan	← Aplikasi (Dependency)
Penggunaan Aplikasi Monitoring Jaringan	Penggunaan Aplikasi Monitoring Jaringan MRTG	Maret 2023	

Tabel 3.2.5.10.1 Referensi Arsitektur Keamanan - Insiden Keamanan

Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan	Nilai Kematangan	Tanggal Kegiatan	← Aplikasi (Dependency)
Web Defacement	Penanganan Insiden Deface Website JDIH Murung Raya	Fase Respon	2020	

3.2.5.11. Pemenuhan Standar Teknis

3.2.5.11.1. Standar Teknis Jaringan Intra Pemerintah

Tabel 3.2.5.11.1 Standar Teknis Jaringan Intra Pemerintah

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.1.	Menyusun dan mengevaluasi dokumen arsitektur Jaringan Intra	Ya	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.2	Mengidentifikasi seluruh aset infrastruktur jaringan	Ya	
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.3	Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur terkait	Ya	

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Aspek administrasi keamanan jaringan intra	1.4	Membuat laporan pengawasan keamanan jaringan secara periodik		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.1	Menempatkan perangkat infrastruktur jaringan yang menyediakan layanan Jaringan Intra pada zona terpisah	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.2	Menggunakan autentikasi untuk mengakses Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.3	Menerapkan pembatasan akses dalam Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.4	Mematikan atau membatasi protocol, port, dan layanan yang tidak digunakan		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.5	Menerapkan penyaringan tautan dan memblokir akses ke situs berbahaya		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.6	Menerapkan fungsi honeypot untuk menganalisis celah keamanan berdasarkan jenis serangan		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.7	Menerapkan virtual private network dan mengaktifkan fungsi enkripsi pada jalur komunikasi yang digunakan		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.8	Memberikan kewenangan hanya kepada administrator untuk menginstal perangkat lunak dan/atau mengubah konfigurasi sistem dalam Jaringan Intra	Ya	
Kontrol akses dan autentikasi	2.9	Menerapkan secure endpoints		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.10	Memblokir layanan yang tidak dikenal		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.11	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security versi terkini pada jalur akses Jaringan Intra		Tidak
Kontrol akses dan autentikasi	2.12	Menerapkan server perantara saat client mengakses server database dalam rangka pemeliharaan		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.1	Menggunakan perangkat security information and event management untuk network logging dan monitoring		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.2	Menerapkan sistem deteksi dini kerentanan keamanan perangkat jaringan		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.3	Menggunakan perangkat firewall	Ya	
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.4	Menggunakan perangkat intrusion detection systems dan intrusion prevention systems		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.5	Menerapkan virtual private network terenkripsi untuk penggunaan akses jarak jauh secara terbatas		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.6	Menerapkan kontrol update patching pada infrastruktur Jaringan Intra dan sistem komputer		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.7	Menggunakan perangkat web application firewall		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.8	menggunakan perangkat load balancer untuk menjaga ketersediaan akses terhadap jaringan dan aplikasi		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.9	Perbarui teknologi keamanan perangkat keras dan perangkat lunak untuk meminimalisasi celah peretas		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.10	Mengunduh perangkat lunak melalui enterprise software distribution		Tidak
Persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan jaringan intra	3.11	Menerapkan sertifikat elektronik		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.1	Menerapkan content filtering		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.2	Menerapkan inspection packet filtering untuk memeriksa packet yang masuk pada Jaringan Intra		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.3	Menerapkan kontrol keamanan pada fitur akses jarak jauh perangkat gateway		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.4	Memastikan perangkat gateway yang menghubungkan antar Jaringan Intra tidak terkoneksi langsung dengan jaringan publik		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.5	Melaksanakan manajemen traffic gateway		Tidak
Kontrol keamanan gateway	4.6	Memastikan port tidak dibuka secara default		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.1	Menerapkan protokol keamanan access point nirkabel dan teknologi enkripsi terkini		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.2	Menerapkan media access control pada address filtering		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.3	Menerapkan dedicated service set identifier		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.4	Menerapkan pembatasan jangkauan radio transmisi dan pengguna jaringan		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.5	Menerapkan pembatasan terkait penambahan perangkat nirkabel yang dipasang secara tidak sah		Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.6	Menerapkan manajemen vulnerability secara berkala dan berkelanjutan		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel	5.7	Melakukan patching firmware secara rutin		Tidak

3.2.5.11.2.     **Standar Teknis Aplikasi Web**

**Tabel 3.2.6.11.2** Standar Teknis Aplikasi Web

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Autentikasi	1.1	Menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi	Ya	
Autentikasi	1.2	Menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server	Ya	
Autentikasi	1.3	Mengatur jumlah karakter, kombinasi jenis karakter, dan masa berlaku dari kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.4	Mengatur jumlah maksimum kesalahan dalam pemasukan kata sandi		Tidak
Autentikasi	1.5	Mengatur mekanisme pemulihan kata sandi	Ya	
Autentikasi	1.6	Menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi		Tidak
Autentikasi	1.7	Menggunakan jalur komunikasi yang diamankan untuk proses autentikasi		Tidak
Manajemen sesi	2.1	Menggunakan pengendali sesi untuk proses manajemen sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.2	Menggunakan pengendali sesi yang disediakan oleh kerangka kerja aplikasi	Ya	
Manajemen sesi	2.3	Mengatur pembuatan dan keacakan token sesi yang dihasilkan oleh pengendali sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.4	Mengatur kondisi dan jangka waktu habis sesi	Ya	
Manajemen sesi	2.5	Validasi dan pencantuman session id	Ya	
Manajemen sesi	2.6	Perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi		Tidak
Manajemen sesi	2.7	Perlindungan terhadap duplikasi dan mekanisme persetujuan pengguna		Tidak
Persyaratan kontrol akses	3.1	Menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses		Tidak
Persyaratan kontrol akses	3.2	Mengatur peringatan terhadap bahaya serangan otomatis apabila terjadi akses yang bersamaan atau akses yang terus menerus pada fungsi		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Persyaratan kontrol akses	3.3	Mengatur antarmuka pada sisi administrator	Ya	
Persyaratan kontrol akses	3.4	Mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan	Ya	
Validasi Input	4.1	Menerapkan fungsi validasi input pada sisi server		Tidak
Validasi Input	4.2	Menerapkan mekanisme penolakan input jika terjadi kesalahan validasi		Tidak
Validasi Input	4.3	Memastikan runtime environment aplikasi tidak rentan terhadap serangan validasi input		Tidak
Validasi Input	4.4	Melakukan validasi positif pada seluruh input		Tidak
Validasi Input	4.5	Melakukan filter terhadap data yang tidak dipercaya		Tidak
Validasi Input	4.6	Menggunakan fitur kode dinamis		Tidak
Validasi Input	4.7	Melakukan perlindungan terhadap akses yang mengandung konten skrip		Tidak
Validasi Input	4.8	Melakukan perlindungan dari serangan injeksi basis data		Tidak
Kriptografi pada verifikasi statis	5.1	Menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		Tidak
Kriptografi pada verifikasi statis	5.2	Melakukan autentikasi data yang dienkripsi		Tidak
Kriptografi pada verifikasi statis	5.3	Menerapkan manajemen kunci kriptografi		Tidak
Kriptografi pada verifikasi statis	5.4	Membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.1	Mengatur konten pesan yang ditampilkan ketika terjadi kesalahan		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.2	Menggunakan metode penanganan error untuk mencegah kesalahan terprediksi dan tidak terduga serta menangani seluruh pengecualian yang tidak ditangani		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.3	Tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.4	Mengatur cakupan log yang dicatat untuk mendukung upaya penyelidikan ketika terjadi insiden		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.5	Mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.6	Melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log		Tidak
Penanganan error dan pencatatan log	6.7	Melakukan sinkronisasi sumber waktu sesuai dengan zona waktu dan waktu yang benar		Tidak
Proteksi data	7.1	Melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan		Tidak
Proteksi data	7.2	Melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi		Tidak
Proteksi data	7.3	Melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan		Tidak
Proteksi data	7.4	Melakukan penentuan jumlah parameter		Tidak
Proteksi data	7.5	Memastikan data disimpan dengan aman		Tidak
Proteksi data	7.6	Menentukan metode untuk menghapus dan mengekspor data sesuai permintaan pengguna		Tidak
Proteksi data	7.7	Membersihkan memori setelah tidak diperlukan		Tidak
Keamanan komunikasi	8.1	Menggunakan komunikasi terenkripsi		Tidak
Keamanan komunikasi	8.2	Mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna		Tidak
Keamanan komunikasi	8.3	Mengatur jenis algoritma yang digunakan dan alat pengujiannya		Tidak
Keamanan komunikasi	8.4	Mengatur aktivasi dan konfigurasi sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik		Tidak
Pengendalian Kode Berbahaya	9.1	Menggunakan analisis kode dalam kontrol kode berbahaya		Tidak
Pengendalian Kode Berbahaya	9.2	Memastikan kode sumber aplikasi dan pustaka tidak mengandung kode berbahaya dan fungsionalitas lain yang tidak diinginkan		Tidak
Pengendalian Kode Berbahaya	9.3	Mengatur izin terkait fitur atau sensor terkait privasi		Tidak
Pengendalian Kode Berbahaya	9.4	Mengatur perlindungan integritas		Tidak
Pengendalian Kode Berbahaya	9.5	Mengatur mekanisme fitur pembaruan		Tidak



Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Logika bisnis	10.1	Memproses alur logika bisnis dalam urutan langkah dan waktu yang realistis;		Tidak
Logika bisnis	10.2	Memastikan logika bisnis memiliki batasan dan validitas		Tidak
Logika bisnis	10.3	Memonitor aktivitas yang tidak biasa		Tidak
Logika bisnis	10.4	Membantu dalam kontrol antiotomatisasi		Tidak
Logika bisnis	10.5	Memberikan peringatan ketika terjadi serangan otomatis atau aktivitas yang tidak biasa		Tidak
File	11.1	mengatur jumlah file untuk setiap pengguna dan kuota ukuran file yang diunggah		Tidak
File	11.2	Melakukan validasi file sesuai dengan tipe konten yang diharapkan		Tidak
File	11.3	Melakukan perlindungan terhadap metadata input dan metadata file		Tidak
File	11.4	Melakukan pemindaian file yang diperoleh dari sumber yang tidak dipercaya		Tidak
File	11.5	Melakukan konfigurasi server untuk mengunduh file sesuai ekstensi yang ditentukan		Tidak
Keamanan API dan web service	12.1	melakukan konfigurasi layanan web		Tidak
Keamanan API dan web service	12.2	Verifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan		Tidak
Keamanan API dan web service	12.3	Membuat keputusan otorisasi		Tidak
Keamanan API dan web service	12.4	Menampilkan metode RESTful hypertext transfer protocol apabila input pengguna dinyatakan valid		Tidak
Keamanan API dan web service	12.5	Menggunakan validasi skema dan verifikasi sebelum menerima input		Tidak
Keamanan API dan web service	12.6	Menggunakan metode perlindungan layanan berbasis web		Tidak
Keamanan API dan web service	12.7	Menerapkan kontrol antiotomatisasi		Tidak
Keamanan konfigurasi	13.1	Mengkonfigurasi server sesuai rekomendasi server aplikasi dan kerangka kerja aplikasi yang digunakan		Tidak
Keamanan konfigurasi	13.2	Mendokumentasi, menyalin konfigurasi, dan semua dependensi		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Keamanan konfigurasi	13.3	Menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan	Ya	Tidak
Keamanan konfigurasi	13.4	Memvalidasi integritas aset jika aset aplikasi diakses secara eksternal	Ya	
Keamanan konfigurasi	13.5	Menggunakan respons aplikasi dan konten yang aman	Ya	

### 3.2.5.11.3. Standar Teknik Aplikasi Mobile

Tabel 3.2.5.11.3.1 Standar Teknis Aplikasi Mobile

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.1	Menyimpan seluruh data dan informasi yang dikecualikan hanya dalam fasilitas penyimpanan kredensial sistem	Ya	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.2	Membatasi pertukaran data dan informasi yang dikecualikan dengan third party	Ya	
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.3	Menonaktifkan cache keyboard pada saat memasukkan data dan informasi yang dikecualikan		Tidak
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.4	Melindungi informasi yang dikecualikan saat terjadi inter process communication		Tidak
Penyimpanan data dan persyaratan privasi	1.5	Melindungi data dan informasi yang dikecualikan yang dimasukkan melalui antarmuka pengguna	Ya	
Kriptografi	2.1	Menghindari penggunaan kriptografi simetrik dengan		Tidak
Kriptografi	2.2	Mengimplementasikan metode kriptografi yang sudah teruji sesuai kebutuhan		Tidak
Kriptografi	2.3	Menghindari penggunaan protokol kriptografi atau algoritma kriptografi yang obsolet		Tidak
Kriptografi	2.4	Menghindari penggunaan kunci kriptografi yang sama		Tidak
Kriptografi	2.5	Menggunakan pembangkit kunci acak yang memenuhi kriteria keacakan kunci		Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.1	Menerapkan autentikasi pada remote endpoint terhadap aplikasi yang menyediakan akses pengguna untuk layanan jarak jauh		Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.2	Menggunakan session identifier yang acak tanpa perlu mengirimkan kredensial pengguna apabila menggunakan stateful manajemen sesi		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.3	Memastikan server menyediakan token yang telah ditandatangani menggunakan algoritma yang aman apabila menggunakan autentikasi stateless berbasis toke		Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.4	Memastikan remote endpoint memutus sesi yang ada saat pengguna log out		Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.5	Menerapkan pengaturan sandi pada remote endpoint		Tidak
Autentikasi dan manajemen sesi	3.6	Membatasi jumlah percobaan log in pada remote endpoint	Ya	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.7	Menentukan masa berlaku sesi dan masa kadaluarsa token pada remote endpoint	Ya	
Autentikasi dan manajemen sesi	3.8	Melakukan otorisasi pada remote endpoint		Tidak
Komunikasi Jaringan	4.1	Menerapkan secure socket layer atau transport layer security yang tidak obsolet secara konsisten		Tidak
Komunikasi Jaringan	4.2	Memverifikasi sertifikat remote endpoint		Tidak
Interaksi Platform	5.1	Memastikan aplikasi hanya meminta akses terhadap sumber daya yang diperlukan	Ya	
Interaksi Platform	5.2	Melakukan validasi terhadap seluruh input dari sumber eksternal dan pengguna		Tidak
Interaksi Platform	5.3	Menghindari pengiriman fungsionalitas sensitif melalui skema custom uniform resource locator dan fasilitas inter process communication;		Tidak
Interaksi Platform	5.4	Menggunakan protokol hypertext transfer protocol secure pada WebView		Tidak
Interaksi Platform	5.5	Menghindari penggunaan JavaScript dalam WebView		Tidak
Interaksi Platform	5.6	Mengimplementasikan penggunaan serialisasi API yang aman	Ya	
Kualitas kode dan	6.1	Menandatangani aplikasi dengan sertifikat yang valid	Ya	
Kualitas kode dan	6.2	Memastikan aplikasi dalam mode rilis	Ya	
Kualitas kode dan	6.3	Menghapus simbol debugging dari native binary		Tidak
Kualitas kode dan	6.4	Menghapus kode debugging dan kode bantuan pengembang		Tidak
Kualitas kode dan	6.5	Mengidentifikasi kelemahan seluruh komponen third party		Tidak
Kualitas kode dan	6.6	Menentukan mekanisme penanganan error		Tidak
Kualitas kode dan	6.7	Mengelola memori secara aman		Tidak

Fungsi		Prosedur	Ya	Tidak
Kualitas kode dan	6.8	Mengaktifkan fitur keamanan yang tersedia		Tidak
Ketahanan	7.1	Mencegah aplikasi berjalan pada perangkat yang telah dilakukan modifikasi yang tidak sah		Tidak
Ketahanan	7.2	Mendeteksi dan merespons debugger		Tidak
Ketahanan	7.3	Mencegah executable file melakukan perubahan pada sumber daya perangkat		Tidak
Ketahanan	7.4	Mendeteksi dan merespons keberadaan perangkat reverse engineering		Tidak
Ketahanan	7.5	Mencegah aplikasi berjalan dalam emulator	Ya	
Ketahanan	7.6	Mendeteksi perubahan kode dan data di ruang memo		Tidak
Ketahanan	7.7	Menerapkan fungsi device binding dengan menggunakan properti unik pada perangkat		Tidak
Ketahanan	7.8	Melindungi seluruh file dan library pada aplikasi		Tidak
Ketahanan	7.9	Menerapkan metode obfuscation		Tidak

3.2.5.12. Level Maturitas Infrastruktur IT

Tahapan maturitas dalam infrastruktur dan keamanan mencerminkan tingkat kesiapan dan pengelolaan dari teknologi informasi dan keamanan yang diterapkan di dalam sebuah pemerintah daerah. Tahapan ini dapat dijelaskan melalui kerangka kerja seperti Capability Maturity Model Integration (CMMI) atau dikenal juga dengan tingkatan tingkat kematangan (maturity levels): Initial, Managed, Defined, Efficient, dan Optimized.

Level 1: Ad Hoc / Awal (Initial)

Pada tahap ini, infrastruktur IT seringkali terdesentralisasi, kurang terkoordinasi, dan tidak memiliki proses atau standar yang jelas. Biasanya, ada reaksi terhadap kebutuhan mendesak tanpa perencanaan jangka panjang. Pemeliharaan dan manajemen risiko belum terstruktur dengan baik.

Level 2: Terkelola (Managed)

Pemerintah daerah mulai menerapkan proses manajemen yang lebih terstruktur. Ada standar yang dibuat untuk pengelolaan sistem, pemantauan kinerja, pemeliharaan rutin, dan tindakan keamanan dasar. Kebijakan dan prosedur mulai diterapkan untuk menjaga infrastruktur agar berfungsi dengan lebih baik.

Level 3: Dikendalikan (Defined)

Tahap ini melibatkan pengembangan lebih lanjut dari proses dan standar. Semua kegiatan terstruktur secara formal, termasuk manajemen risiko yang lebih cermat, kepatuhan kebijakan, dan pemantauan yang lebih terperinci. Proses dokumentasi menjadi lebih penting.

#### **Level 4: Efisien (Efficient)**

Infrastruktur IT menjadi lebih efisien dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Otomatisasi dan otomatisasi proses menjadi umum, meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Inovasi teknologi dan pemantauan yang cermat membantu dalam meningkatkan kinerja.

#### **Level 5: Optimal / Optimalisasi (Optimized)**

Pada tahap ini, infrastruktur IT dianggap sebagai aset strategis. Pemerintah daerah mencapai efektivitas penuh dalam manajemen risiko, keamanan, penggunaan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi. Inovasi menjadi fokus utama, dan perbaikan terus-menerus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Tahapan maturitas dalam infrastruktur IT dan keamanan IT dapat dievaluasi menggunakan sejumlah indikator atau kriteria yang membantu menilai sejauh mana suatu Pemerintah daerah telah mencapai setiap tahap tersebut. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi setiap tahap maturitas:

1. **Arsitektur dan Desain Infrastruktur:** Evaluasi sejauh mana infrastruktur IT didesain untuk mendukung kebutuhan bisnis, fleksibilitas, serta skalabilitas. Pemahaman mengenai arsitektur yang ada, integrasi sistem, dan kecocokannya dengan tujuan bisnis.
2. **Penggunaan Teknologi:** Mengevaluasi sejauh mana teknologi digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis, proses integrasi, efisiensi operasional, serta inovasi dalam penerapan teknologi.
3. **Manajemen Aset:** Melibatkan pengelolaan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya IT lainnya secara efisien, termasuk pemantauan, pembaruan, dan perencanaan siklus hidup aset.
4. **Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal:** Evaluasi terhadap pemeliharaan dan pemantauan rutin sistem, termasuk rencana terjadwal, pemantauan kinerja sistem, backup data, dan perencanaan kapasitas.
5. **Pemantauan Kinerja dan Analisis Data:** Evaluasi kemampuan untuk memantau kinerja infrastruktur secara menyeluruh, menganalisis data operasional, dan menggunakan hasil analisis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
6. **Keamanan Informasi:** Mengukur tingkat keamanan infrastruktur IT, termasuk kebijakan keamanan, manajemen akses, enkripsi data, pemantauan keamanan, dan respons terhadap kejadian keamanan.
7. **Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana:** Menilai rencana tanggap darurat, pemulihan data, uji coba bencana, pelatihan personil tanggap darurat, dan strategi pemulihan sistem dalam situasi darurat.

#### **3.2.5.13. Arsitektur dan Desain Infrastruktur**

Mencakup beberapa aspek penting dalam pemahaman tentang bagaimana infrastruktur IT didesain dan diimplementasikan untuk mendukung kebutuhan Pemerintah daerah.

1. **Kesesuaian dengan Kebutuhan Bisnis:** Pemerintah daerah yang matang dalam arsitektur dan desain infrastruktur memiliki infrastruktur yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis yang spesifik. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan aplikasi, pemrosesan data, dan interaksi pengguna.
2. **Skalabilitas dan Fleksibilitas:** Infrastruktur yang baik tidak hanya mengatasi kebutuhan saat ini tetapi juga dapat berkembang sesuai dengan pertumbuhan bisnis dan perubahan kebutuhan teknologi di masa depan. Kemampuan untuk berkembang secara horizontal atau vertikal dan penyesuaian dengan perubahan adalah penting.
3. **Integrasi dan Kompatibilitas:** Evaluasi sejauh mana infrastruktur dapat berintegrasi dengan berbagai sistem dan aplikasi lain yang ada di Pemerintah daerah. Kompatibilitas dengan teknologi terkini dan masa depan juga penting agar infrastruktur bisa tetap relevan seiring waktu.
4. **Keamanan dalam Desain:** Keamanan harus menjadi pertimbangan utama dalam desain infrastruktur. Perlindungan data, firewall, enkripsi, aplikasi yang mengikuti standar keamanan dan perlindungan terhadap serangan serta ancaman keamanan harus menjadi bagian integral dari desain tersebut.
5. **Efisiensi Operasional:** Infrastruktur yang matang memberikan fokus pada efisiensi operasional. Ini bisa mencakup penggunaan sumber daya yang optimal, peningkatan proses kerja, dan otomatisasi untuk mengurangi beban kerja manual.
6. **Pemeliharaan dan Perawatan:** Evaluasi sejauh mana infrastruktur mempertimbangkan kemudahan pemeliharaan dan perawatan jangka panjang. Ini termasuk pembaruan sistem, perangkat lunak, serta perawatan rutin lainnya untuk memastikan keandalan dan ketersediaan.
7. **Ketersediaan dan Redundansi:** Pemerintah daerah yang matang dalam infrastruktur IT memperhitungkan ketersediaan sistem dan redundansi untuk mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. Redundansi server, backup data, dan rencana pemulihan bencana biasanya menjadi bagian dari desain infrastruktur yang baik.

### 3.2.5.13.1. Kondisi Eksisting Arsitektur dan Desain Infrastruktur

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada arsitektur dan desain infrastruktur yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

**Tabel 3.2.5.13.1.1** Kondisi Eksisting Arsitektur dan Desain Infrastruktur

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Arsitektur dan Desain Infrastruktur	Kesesuaian dengan Kebutuhan Bisnis	Ya	
	Skalabilitas dan Fleksibilitas		Tidak
	Integrasi dan Kompatibilitas		Tidak

	Keamanan dalam Desain		Tidak
	Efisiensi Operasional		Tidak
	Pemeliharaan dan Perawatan		Tidak
	Ketersediaan dan Redundansi		Tidak

3.2.5.14. Penggunaan Teknologi

Tahap maturitas infrastruktur IT dapat diukur dengan mempertimbangkan indikator penggunaan teknologi yang menunjukkan sejauh mana suatu Pemerintah daerah telah mengadopsi dan memanfaatkan teknologi dalam operasinya. Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tahapan maturitas infrastruktur berdasarkan penggunaan teknologi:

1. Adopsi Teknologi Baru: Seberapa cepat Pemerintah daerah mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi terkini dalam infrastrukturnya. Sejauh mana Pemerintah daerah terbuka terhadap inovasi dan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan operasi mereka.
2. Otomatisasi Proses: Tingkat sejauh mana Pemerintah daerah menggunakan teknologi untuk otomatisasi proses bisnis dan operasional. Penggunaan devops dan tool automation untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Sejauh mana teknologi membantu dalam pengelolaan sumber daya (CPU, memori, penyimpanan) dengan efisien. Melakukan identifikasi aplikasi untuk menentukan resource hardware yang efisien.
4. Pengelolaan Data: Sejauh mana data terkelola dengan baik dan dipertahankan dalam keadaan yang akurat, lengkap, dan terlindungi. Pemanfaatan teknologi untuk melakukan analisis data yang lebih canggih dan mendapatkan wawasan yang berharga dari data.
5. Ketersediaan dan Kinerja Jaringan: Seberapa cepat dan handal jaringan yang mendukung infrastruktur IT dalam mengirim data. Tingkat ketersediaan jaringan yang memadai untuk mendukung operasi Pemerintah daerah secara keseluruhan.
6. Penggunaan Cloud dan Virtualisasi: Tingkat adopsi teknologi cloud untuk penyimpanan data dan penggunaan layanan cloud dalam operasi sehari-hari. Sejauh mana Pemerintah daerah menggunakan teknologi virtualisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
7. Penggunaan Perangkat Lunak dan Aplikasi: Adopsi perangkat lunak terbaru yang memungkinkan fungsionalitas tambahan dan efisiensi. Penggunaan aplikasi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan memenuhi kebutuhan spesifik.

3.2.5.14.1.      **Kondisi Eksisting Penggunaan Teknologi**

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada Penggunaan Teknologi yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

**Tabel 3.2.5.14.1.1** Kondisi Eksisting Penggunaan Teknologi

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Penggunaan Teknologi	Adopsi Teknologi Baru	Ya	
	Otomatisasi Proses		Tidak
	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya		Tidak
	Pengelolaan Data		Tidak
	Ketersediaan dan Kinerja Jaringan		Tidak
	Penggunaan Cloud dan Virtualisasi	Ya	
	Penggunaan Perangkat Lunak dan Aplikasi		Tidak

**3.2.5.15. Manajemen aset**

Manajemen aset yang efektif adalah elemen kunci dalam menilai level maturitas infrastruktur IT. Indikator terkait manajemen aset yang baik meliputi:

1. Inventarisasi yang Lengkap: Pemerintah daerah yang memiliki tingkat maturitas yang tinggi dalam manajemen aset akan memiliki inventaris yang terperinci tentang semua perangkat keras dan perangkat lunak yang dimiliki. Ini termasuk informasi seperti nomor seri, spesifikasi, lokasi, dan status pemakaian.
2. Pemantauan Siklus Hidup Aset: Pemerintah daerah akan memantau siklus hidup aset mereka dari pembelian hingga penghapusan. Hal ini membantu dalam perencanaan pembaruan, penggantian, atau peningkatan sistem secara tepat waktu.
3. Pemeliharaan dan Pemantauan Keberadaan Aset: Aset-aset IT harus terawat dengan baik dan dipantau secara teratur untuk memastikan keandalan dan ketersediaannya. Ini termasuk pemeliharaan rutin, pemantauan kesehatan perangkat keras, dan pembaruan perangkat lunak yang diperlukan.
4. Optimasi Penggunaan Aset: Pemerintah daerah yang matang secara infrastruktur akan dapat mengoptimalkan penggunaan aset mereka. Mereka akan memastikan bahwa sumber daya terpakai secara efisien, menghindari pemborosan, dan memaksimalkan nilai dari setiap aset IT.
5. Kepatuhan Terhadap Lisensi: Manajemen aset yang baik juga melibatkan kepatuhan terhadap lisensi perangkat lunak. Pemerintah daerah akan memantau dan memastikan bahwa mereka menggunakan perangkat lunak sesuai dengan persyaratan lisensi yang berlaku.



6. Penghapusan Aset yang Tidak Digunakan: Aset-aset yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah usang harus dihapus dari inventaris secara tepat waktu. Ini membantu dalam menjaga inventaris yang akurat dan mencegah resiko keamanan atau biaya yang tidak perlu.

**3.2.5.15.1. Kondisi Eksisting Manajemen Aset**

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada manajemen aset yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

**Tabel 3.2.5.15.1.1. Kondisi Eksisting Manajemen Aset**

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Manajemen Aset	Inventarisasi yang Lengkap		Tidak
	Pemantauan Siklus Hidup Aset		Tidak
	Pemeliharaan dan Pemantauan Keberadaan Aset		Tidak
	Optimasi Penggunaan Aset		Tidak
	Kepatuhan Terhadap Lisensi	Ya	
	Penghapusan Aset yang Tidak Digunakan		Tidak

**3.2.5.16. Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal**

Mencakup sejumlah elemen penting dalam menilai sejauh mana suatu Pemerintah daerah telah mencapai tingkat kematangan dalam merawat dan memonitor infrastruktur mereka secara teratur.

1. Perawatan Rutin dan Terjadwal: Pemerintah daerah pada tingkat maturitas yang lebih tinggi memiliki jadwal pemeliharaan yang terstruktur untuk infrastruktur mereka. Ini termasuk pemeliharaan rutin untuk perangkat keras dan perangkat lunak guna memastikan kinerja yang optimal.
2. Pemantauan Kinerja yang Berkelanjutan: Mereka memiliki sistem pemantauan yang terjadwal untuk memantau kinerja sistem secara terus-menerus. Ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah masalah sebelum mereka menyebabkan gangguan yang serius.
3. Backup dan Penyimpanan Data yang Teratur: Pemerintah daerah yang matang dalam hal ini akan memiliki proses backup data yang terjadwal secara rutin. Mereka juga memiliki kebijakan penyimpanan data yang jelas, termasuk retensi data yang tepat.
4. Perencanaan Kapasitas yang Terencana: Pada level yang lebih tinggi, Pemerintah daerah memiliki perencanaan kapasitas yang terstruktur. Mereka memantau penggunaan kapasitas saat ini dan memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas jika diperlukan.

5. Pengujian dan Pembaruan yang Terjadwal: Pembaruan sistem dan perangkat lunak direncanakan dan dilakukan secara teratur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pengujian sebelum pembaruan juga dilakukan untuk meminimalkan risiko ketidaksempurnaan sistem setelah pembaruan.
6. Pengelolaan Insiden yang Terjadwal: Pemerintah daerah memiliki prosedur yang terjadwal untuk menangani insiden atau masalah yang muncul. Mereka juga melakukan evaluasi insiden untuk memperbaiki proses dan mencegahnya terulang di masa mendatang.

**3.2.5.16.1. Kondisi Eksisting Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal**

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal	Perawatan Rutin dan Terjadwal	Ya	
	Pemantauan Kinerja yang Berkelanjutan		Tidak
	Backup dan Penyimpanan Data yang Teratur	Ya	
	Perencanaan Kapasitas yang Terencana		Tidak
	Pengujian dan Pembaruan yang Terjadwal		Tidak
	Pengelolaan Insiden yang Terjadwal		Tidak

**Tabel 3.2.5.16.1.1** Kondisi Eksisting Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal

**3.2.5.17. Pemantauan Kinerja dan Analisis Data**

Mencakup sejumlah praktik dan proses yang digunakan untuk memantau kinerja infrastruktur serta menganalisis data operasional guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

1. Pemantauan Kinerja Infrastruktur: Pemerintah daerah yang matang dalam hal ini memiliki sistem pemantauan yang terintegrasi. Mereka bisa secara aktif memantau kinerja berbagai komponen infrastruktur seperti server, jaringan, basis data, dan aplikasi. Ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi masalah atau potensi masalah sebelum menjadi signifikan.
2. Analisis Data Operasional: Mengumpulkan data operasional adalah hal yang biasa. Namun, pada tingkat maturitas yang lebih tinggi, Pemerintah daerah menggunakan data ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Analisis data digunakan untuk mengidentifikasi tren, pola, atau masalah yang mungkin terjadi dalam infrastruktur IT.

- Optimasi Berdasarkan Analisis: Informasi yang diperoleh dari analisis data digunakan untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi. Ini bisa berupa perubahan dalam konfigurasi infrastruktur, peningkatan kapasitas di area yang diperlukan, atau identifikasi area yang memerlukan pembaruan atau peningkatan.
- Pemantauan Proaktif dan Prediktif: Pemerintah daerah pada tingkat maturitas yang tinggi menggunakan analisis data untuk pemantauan proaktif dan prediktif. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap masalah yang muncul, tetapi juga bisa meramalkan atau mencegah potensi masalah dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan.
- Peningkatan Efisiensi Operasional: Analisis data membantu meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, melalui identifikasi proses yang lambat atau tidak efisien, dan mengambil langkah untuk memperbaikinya dengan data yang diperoleh.
- Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Keputusan terkait infrastruktur IT dibuat berdasarkan analisis data yang terkumpul. Hal ini mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan terukur.

**3.2.5.17.1.      Kondisi Eksisting Pemantauan Kinerja dan Analisis Data**

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada Pemantauan Kinerja dan Analisis Data yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

**Tabel 3.2.5.17.1.1** Kondisi Eksisting Pemantauan Kinerja dan Analisis Data

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Pemantauan Kinerja dan Analisis Data	Pemantauan Kinerja Infrastruktur	Ya	
	Analisis Data Operasional		Tidak
	Optimasi Berdasarkan Analisis		Tidak
	Pemantauan Proaktif dan Prediktif		Tidak
	Peningkatan Efisiensi Operasional		Tidak
	Pengambilan Keputusan Berbasis Data		Tidak

**3.2.5.18. Keamanan Informasi**

Mencakup sejumlah hal yang menjadi penanda penting dalam menilai sejauh mana suatu Pemerintah daerah telah mencapai maturitas dalam memastikan keamanan informasi mereka.

- Kebijakan Keamanan yang Terdefinisi: Pemerintah daerah pada tingkat maturitas yang lebih tinggi telah memiliki kebijakan keamanan yang terdefinisi dengan baik. Kebijakan ini mencakup hal-hal seperti penggunaan sandi yang kuat, akses terkendali terhadap sistem, dan kebijakan tentang penggunaan perangkat BYOD (Bring Your Own Device).

2. Prosedur Keamanan dan Praktik Enkripsi: Mereka memiliki prosedur dan praktik enkripsi data yang kuat, terutama untuk data sensitif atau penting. Ini meliputi penyandian data saat berpindah di jaringan dan saat disimpan pada perangkat.
3. Pelatihan dan Kesadaran Keamanan: Pemerintah daerah yang matang dalam hal keamanan informasi telah berinvestasi dalam pelatihan keamanan untuk karyawan mereka. Mereka memperhatikan tingkat kesadaran keamanan karyawan untuk mencegah insiden keamanan yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan.
4. Sistem Deteksi Intrusi dan Manajemen Kejadian Keamanan: Mereka memiliki sistem deteksi intrusi yang efektif untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. Selain itu, mereka memiliki proses yang terstruktur untuk menangani kejadian keamanan jika terjadi.
5. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keamanan: Pemerintah daerah pada tingkat maturitas yang tinggi mematuhi regulasi industri dan standar keamanan yang berlaku. Mereka memiliki proses yang didefinisikan dengan baik untuk memastikan kepatuhan ini.
6. Pembaruan Keamanan Teratur: Mereka secara teratur melakukan pembaruan perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengatasi kerentanan keamanan yang baru teridentifikasi.
7. Evaluasi Risiko Keamanan: Pemerintah daerah memiliki proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan secara terus-menerus. Hal ini memungkinkan mereka untuk merencanakan tindakan pencegahan yang sesuai.

**3.2.5.18.1.      Kondisi Eksisting Keamanan Informasi**

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada Keamanan Informasi yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

**Tabel 3.2.5.18.1.1** Kondisi Eksisting Keamanan Informasi

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Keamanan Informasi	Kebijakan Keamanan yang Terdefinisi		Tidak
	Prosedur Keamanan dan Praktik Enkripsi		Tidak
	Pelatihan dan Kesadaran Keamanan	Ya	
	Sistem Deteksi Intrusi dan Manajemen Kejadian Keamanan		Tidak
	Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keamanan		Tidak
	Pembaruan Keamanan Teratur		Tidak
	Evaluasi Risiko Keamanan		Tidak

3.2.5.19. Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Menyoroti sejauh mana suatu Pemerintah daerah telah mempersiapkan diri dalam menghadapi keadaan darurat atau bencana, serta seberapa baik mereka dapat pulih dari gangguan yang tidak terduga.

- 1. Rencana Tanggap Darurat yang Terdefinisi: Pemerintah daerah yang matang secara infrastruktur memiliki rencana tanggap darurat yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Rencana ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi gangguan besar pada sistem atau keadaan darurat.
- 2. Pemulihan Data yang Terencana: Mereka memiliki strategi pemulihan data yang jelas, termasuk cadangan data secara teratur dan rencana pemulihan data yang teruji. Ini meliputi pemulihan data dalam situasi bencana untuk memastikan kelangsungan bisnis.
- 3. Uji Coba dan Simulasi Bencana: Pemerintah daerah pada tingkat maturitas yang lebih tinggi sering melakukan uji coba atau simulasi bencana untuk menguji efektivitas rencana darurat mereka. Hal ini membantu dalam mengevaluasi kelemahan dan memperbaiki rencana tanggap darurat.
- 4. Pelatihan Personil Tanggap Darurat: Mereka melatih personel untuk menangani situasi darurat atau bencana. Ini mencakup pelatihan untuk respons cepat, pemulihan sistem, dan tindakan yang diperlukan untuk memastikan kelancaran operasi.
- 5. Pemantauan Terus-Menerus dan Perbaikan Rencana: Pemerintah daerah terus memantau dan memperbarui rencana tanggap darurat mereka sesuai dengan perubahan teknologi atau kebutuhan bisnis. Mereka melakukan evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas rencana tanggap darurat mereka.
- 6. Komitmen pada Ketersediaan dan Ketahanan Sistem: Pemerintah daerah pada tingkat ini memiliki komitmen yang kuat pada ketersediaan sistem, keamanan data, dan ketahanan terhadap gangguan. Ini tercermin dalam investasi dalam solusi teknologi yang mendukung pemulihan cepat dan keberlanjutan operasional.

3.2.5.19.1. Kondisi Eksisting Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Dengan mengacu pada indikator maturitas infrastruktur pada Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana yang telah disebutkan, evaluasi infrastruktur teknologi di Kabupaten Murung Raya menunjukkan sejumlah area yang belum sepenuhnya terpenuhi, yang bisa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan kedepannya.

Tabel 3.2.5.19.1 Kondisi Eksisting Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana

Indikator	Sub Indikator	Ya	Tidak
Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana	Rencana Tanggap Darurat yang Terdefinisi		Tidak
	Pemulihan Data yang Terencana		Tidak
	Uji Coba dan Simulasi Bencana		Tidak

	Pelatihan Personil Tanggap Darurat		Tidak
	Pemantauan Terus-Menerus dan Perbaikan Rencana		Tidak
	Komitmen pada Ketersediaan dan Ketahanan Sistem		Tidak

**3.2.5.19.2. Nilai Level Maturitas Infrastruktur IT**

Dalam evaluasi maturitas infrastruktur IT Kabupaten Murung Raya, dari total 45 indikator yang dievaluasi, hanya 8 indikator atau sekitar 18% yang terpenuhi. Sementara itu, sebanyak 37 indikator atau sekitar 82% masih belum terpenuhi. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat maturitas infrastruktur IT saat ini berada pada level adhoc/initial.

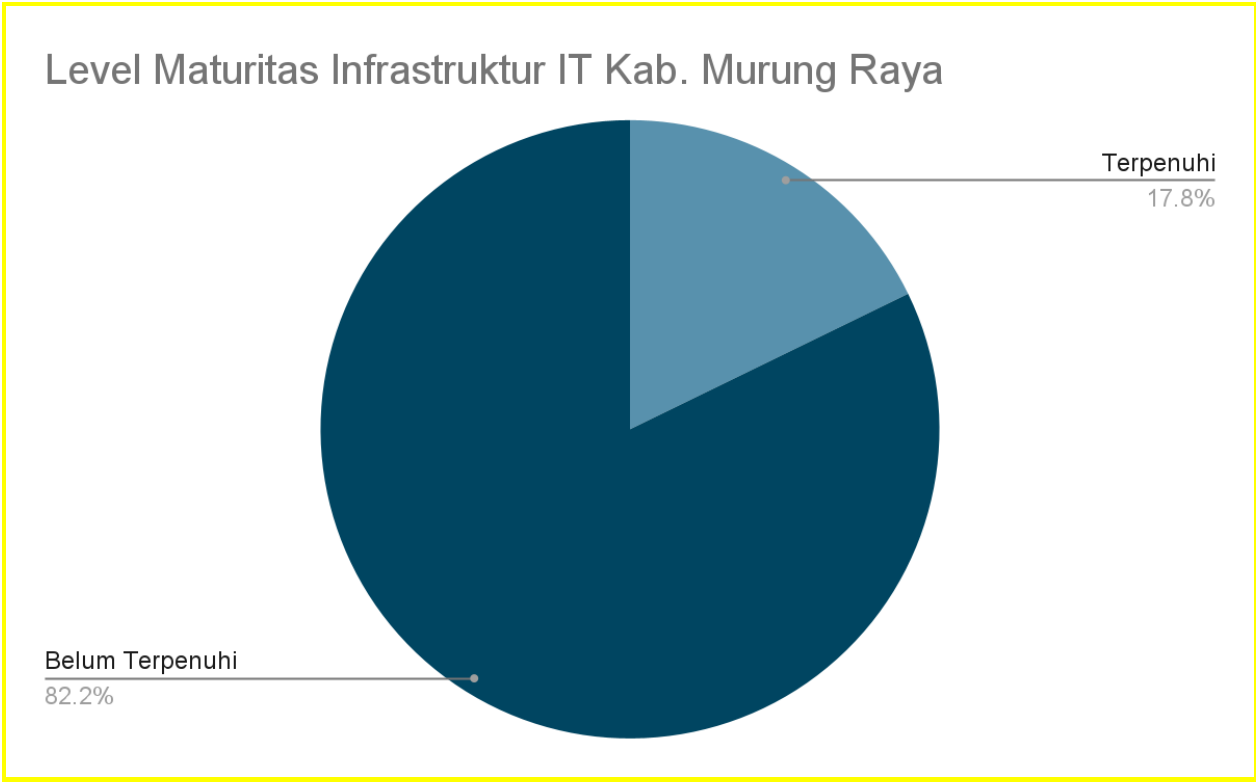
Level adhoc/initial menandakan bahwa infrastruktur IT masih dalam tahap awal dan belum terorganisir dengan baik. Meskipun beberapa aspek telah terpenuhi, mayoritas indikator menunjukkan bahwa infrastruktur memerlukan perbaikan yang signifikan untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi, seperti level managed. Untuk naik ke level managed, Kabupaten Murung Raya perlu melakukan perbaikan yang menyeluruh dalam beberapa area kunci. Pertama, perbaikan arsitektur dan desain infrastruktur diperlukan untuk memastikan kehandalan, skalabilitas, dan fleksibilitas sistem. Ini mencakup pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih modern serta meningkatkan integrasi antar sistem.

Manajemen aset juga menjadi fokus penting untuk meningkatkan level maturitas. Hal ini termasuk dalam manajemen inventarisasi, pemantauan, dan pengelolaan sumber daya IT secara lebih terstruktur dan terencana. Pemeliharaan dan pemantauan terjadwal menjadi hal penting untuk memastikan infrastruktur IT tetap berjalan optimal. Perawatan rutin, pembaruan sistem secara berkala, serta penjadwalan pemantauan kinerja sistem akan membantu mencegah masalah yang mungkin terjadi. Peningkatan penggunaan teknologi yang lebih efektif dan efisien akan mendukung evolusi infrastruktur. Implementasi teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti cloud computing atau IoT (Internet of Things), bisa menjadi langkah penting.

Pemantauan kinerja dan analisis data merupakan aspek penting dalam meningkatkan level maturitas. Penggunaan alat pemantauan yang canggih dan analisis data yang mendalam akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Keselamatan informasi dan kesiapan tanggap darurat serta pemulihan bencana menjadi aspek krusial. Peningkatan keamanan data, perencanaan darurat yang matang, serta pelaksanaan uji coba keadaan darurat akan meningkatkan ketahanan sistem. Dengan fokus pada perbaikan yang disebutkan di atas, Kabupaten Murung Raya dapat memperbaiki tingkat maturitas infrastruktur IT-nya. Komitmen pada perbaikan terus-menerus, investasi yang tepat, dan kolaborasi antara instansi terkait akan menjadi faktor penting dalam mencapai level maturitas yang lebih tinggi. Evaluasi secara berkala akan membantu dalam melacak kemajuan dan membuat perbaikan yang diperlukan menuju level managed yang lebih matang dan responsif.

Tabel 3.2.5.19.2.1 Nilai Level Maturitas Infrastruktur IT

No	Indikator	Ya	Tidak
1	Arsitektur dan Desain Infrastruktur	1	6
2	Manajemen Aset	1	5
3	Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal	2	4
4	Penggunaan Teknologi	2	5
5	Pemantauan Kinerja dan Analisis Data	1	5
6	Keamanan Informasi	1	6
7	Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana	0	6
Total		8	37



Gambar 3.2.5.19.2.1 Level maturitas IT Kab. Murung Raya



# **Bab IV**

## **Analisa**

### **Kesenjangan SPBE**



### 4.1. Analisa Kesenjangan SPBE

Analisa kesenjangan SPBE dilakukan dengan membandingkan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal implementasi SPBE. Hal ini bertujuan untuk memetakan kebutuhan dasar guna perbaikan implementasi SPBE di Pemerintah Daerah. Adapun hasil analisa kesenjangan SPBE sebagai berikut.

**Tabel 4.1.1.** Hasil Analisa Kesenjangan SPBE

No	Domain	Kondisi Eksisting/Level 1: Initial	Kondisi Level 2: Managed
1	Arsitektur dan Desain Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arsitektur dan desain infrastruktur cenderung tidak terstruktur.</li><li>• Masih mengadopsi teknologi berdasarkan kebutuhan mendesak tanpa rencana yang jelas.</li><li>• Tidak ada standar atau panduan yang terdefinisi dalam perencanaan dan desain infrastruktur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai memiliki panduan dasar atau prinsip dalam perencanaan dan desain infrastruktur.</li><li>• Menetapkan beberapa standar dan prosedur, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam integrasi sistem serta perencanaan kapasitas yang lebih baik.</li></ul>
2	Manajemen Aset	<ul style="list-style-type: none"><li>• Manajemen aset seringkali minim atau tidak terorganisir.</li><li>• Inventarisasi mungkin tidak lengkap atau bahkan tidak ada.</li><li>• Cenderung tidak memiliki proses terstruktur untuk manajemen aset dan sering kali reaktif terhadap perawatan atau pemantauan aset.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai memiliki proses terstruktur untuk manajemen aset.</li><li>• Memiliki inventaris yang lebih lengkap, mulai memantau siklus hidup aset, dan melakukan pemeliharaan secara rutin.</li><li>• Meskipun belum sepenuhnya terdefinisi, tapi sudah mulai memahami pentingnya manajemen aset.</li></ul>
3	Pemeliharaan dan Pemantauan Terjadwal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeliharaan dan pemantauan seringkali tidak terjadwal atau terstruktur dengan baik.</li><li>• Melakukan pemeliharaan jika ada kegagalan atau masalah, tetapi tidak ada jadwal rutin yang ditetapkan.</li><li>• Pemantauan juga mungkin dilakukan secara sporadis atau tidak dilakukan sama sekali.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mulai memahami pentingnya pemeliharaan dan pemantauan terjadwal.</li><li>• Memiliki jadwal rutin untuk beberapa aspek infrastruktur, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi atau terstruktur dengan baik.</li><li>• Pemeliharaan mungkin terjadi, tetapi belum ada perencanaan yang jelas</li></ul>
4	Penggunaan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penggunaan teknologi cenderung tidak terkoordinasi dan tanpa rencana yang jelas.</li><li>• Menggunakan teknologi berdasarkan kebutuhan mendesak atau tanpa evaluasi menyeluruh.</li><li>• Tidak ada standar yang jelas dalam penggunaan teknologi, dan keputusan pembelian teknologi dilakukan secara acak tanpa pertimbangan jangka panjang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai memiliki proses yang lebih terstruktur dalam penggunaan teknologi.</li><li>• Mengadopsi teknologi yang relevan dengan kebutuhan, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan koordinasi dan standarisasi.</li><li>• Penggunaan teknologi sudah lebih terencana dan ada upaya untuk mengelola berbagai platform teknologi yang digunakan.</li></ul>

No	Domain	Kondisi Eksisting/Level 1: Initial	Kondisi Level 2: Managed
5	Pemantauan Kinerja dan Analisis Data	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemantauan kinerja mungkin dilakukan secara terpisah untuk setiap komponen infrastruktur tanpa integrasi yang memadai.</li><li>• Kemungkinan mengumpulkan data tetapi tidak memiliki proses untuk menganalisisnya secara menyeluruh.</li><li>• Analisis data tidak digunakan secara proaktif untuk membuat keputusan.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai mengumpulkan data operasional dan menggunakan alat pemantauan dasar untuk melacak kinerja.</li><li>• Ada upaya untuk mengintegrasikan data dari beberapa sumber, tetapi analisisnya masih terbatas.</li><li>• Reaksi terhadap masalah hanya bersifat reaktif.</li></ul>
6	Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keamanan informasi seringkali diabaikan atau kurang mendapatkan perhatian yang cukup.</li><li>• Kemungkinan tidak memiliki kebijakan keamanan yang jelas, pelatihan tentang kesadaran keamanan, atau praktik enkripsi yang terdefinisi dengan baik.</li><li>• Pembaruan perangkat lunak mungkin jarang dilakukan, dan deteksi serangan serta manajemen kejadian keamanan mungkin tidak terorganisir.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai mengelola keamanan informasi dengan lebih terstruktur.</li><li>• Memiliki kebijakan keamanan dasar, seperti penggunaan sandi yang kuat atau aturan akses terkendali.</li><li>• Sudah ada upaya untuk melakukan pelatihan kesadaran keamanan, meskipun masih terbatas.</li><li>• Deteksi intrusi dan manajemen kejadian keamanan sudah ada, meskipun belum terintegrasi sepenuhnya.</li></ul>
7	Kesiapan Tanggap Darurat dan Pemulihan Bencana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum memiliki rencana tanggap darurat yang jelas atau terdokumentasi dengan baik.</li><li>• Pelatihan untuk respons darurat mungkin tidak dilakukan, dan pemulihan bencana tidak menjadi fokus.</li><li>• Baru merespons keadaan darurat jika terjadi tanpa persiapan yang matang.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemerintah daerah mulai menyadari pentingnya rencana tanggap darurat.</li><li>• Ada rencana darurat yang dibuat secara sederhana, serta upaya untuk melatih beberapa anggota tim dalam respons darurat. Meskipun, masih ada kekurangan dalam pengujian dan peningkatan rencana</li></ul>

Laporan Arsitektur Kondisi Eksisting SPBE ini disusun guna memberikan gambaran sementara kondisi saat ini di Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang kemudian dibandingkan antara dengan kondisi ideal yang perlu dilakukan dalam penerapan SPBE. Secara umum, kondisi eksisting SPBE di Pemerintah Kabupaten Murung Raya bisa disimpulkan telah terstandar dan mayoritas aplikasi internal yang ada sudah terintegrasi dengan aplikasi internal lainnya maupun dengan aplikasi instansi pusat. Sehingga Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat memberikan layanan internal dan layanan publik yang lebih efisien, efektif, dan transparan kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif seluruh perangkat daerah dalam proses pemerintahan secara elektronik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kemajuan daerah dan kemudahan akses informasi serta layanan publik di era digital saat ini.

Kedepannya, dalam SPBE Pemerintah Kabupaten Murung Raya perlu adanya peningkatan pada domain tata kelola dan manajemen serta integrasi beberapa sarana infrastruktur internal daerah dengan infrastruktur nasional dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Kondisi yang disampaikan dalam laporan ini diperoleh dari analisa formulir kuesioner yang disebar ke perangkat daerah, hasil *interview* terhadap seluruh perangkat daerah yang berperan sebagai koordinator dalam tim koordinasi SPBE, maupun data sekunder (referensi dan pengalaman konsultan di institusi sejenis). Substansi dalam laporan Kondisi *Eksisting* ini selanjutnya dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan kondisi ideal/target layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sesuai bagi Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama 5 (lima) tahun mendatang.

## **Pemerintah Kabupaten Murung Raya**

DOKUMEN INI MERUPAKAN DOKUMEN YANG SENANTIASA DAPAT BERUBAH (*LIVING DOCUMENT*) SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI SEHINGGA PERLU DILAKUKAN REVIEW SEKURANG-KURANGNYA SETAHUN SEKALI (*ANNUAL REVIEW*).



**Pemerintah Kabupaten Murung Raya**